



Modul Bahan Ajar UBDistanceLearning

SOSIOLOGI PERIKANAN

Dr. Ir. Edi Susilo, MS., Wahyu Handayani, S.Pi., Riski
Agung Lestariyadi, S.Pi., Wildan Alfarizi, SE.



PROGRAM STUDI AGRIBISNIS PERIKANAN
FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN
UNIVERSITAS BRAWIJAYA



UB*DistanceLearning*



Pertemuan	Topik Bahasan	Bacaan/Bab
1	<ul style="list-style-type: none"> • Penjelasan TIU dan TIK • Penjelasan umum kontrak perkuliahan dan materi secara keseluruhan • Perkenalan setiap mahasiswa • Menjelaskan tentang: Pengertian Sosiologi, Perikanan dan Sosiologi Perikanan • Menjelaskan Praktikum • Pembentukan Kelompok Praktikum dan Job Deskripsi 	<ul style="list-style-type: none"> • Tim Teaching Sosper, 2007. Pedoman Praktikum Sosiologi Perikanan Fakultas Perikanan, Universitas Brawijaya, Tdk diterbitkan. • Susilo, Edi dan Harsuko Riniwati, 2002. Modul 1 Pokok Bahasan Sosiologi Perikanan, Fakultas Perikanan, Universitas Brawijaya, Tdk diterbitkan. • Rahardjo, 1999. Pengantar Sosiologi Pedesaan dan Pertanian. Gadjah Mada University Press. Yogyakarta. Bab I • Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, pasal 1
2-4	<p>EVOLUSI BUDAYA</p> <ul style="list-style-type: none"> • Evolusi budaya ditinjau dari: <ul style="list-style-type: none"> - Perubahan evolusioner - Ekologis humanistik dan adaptasi manusia - Tahapan evolusi masyarakat nelayan di Indonesia • Evolusi Budaya yang berkait dalam perubahan mata pencaharian (manusia dan alam) • Proses adaptasi manusia pada lingkungan dan teori ekologi manusia • Daya dukung lingkungan terhadap kehidupan manusia • Upaya manusia melestarikan sumberdaya alam dan habitatnya 	<ul style="list-style-type: none"> • Sukadana, A. Adi, 1983. Antropo-ekologi, Airlangga University Press, Surabaya. Bab I,II,III,IV,IX,X,XI,XII dan XIII • Koentjaraningrat, 1985. Beberapa Pokok Antropologi Sosial. Dian Rakyat. Jakarta. Bab I dan II • Moran, Emilio F. 1983. An Introduction to Ecological • Sukadana, A. Adi, 1983. Antropo-ekologi, Airlangga University Press, Surabaya. Bab I,II,III,IV,IX,X,XI,XII dan XIII • Koentjaraningrat, 1985. Beberapa Pokok Antropologi Sosial. Dian Rakyat. Jakarta. Bab I dan II • Moran, Emilio F. 1983. An Introduction to Ecological Anthropology, Westview Press. Bab 1 1. Brown, Lester R, 1992, Hari Keduapuluh Sembilan. Erlangga. Jakarta. Prakata, Bab I, II dan III 2. Salim, Emil, 1992, "Kesesinambungan dengan Pembaharuan " dalam ANALISIS CSIS, Tahun XXI. No. 6. Nov-Des. Halaman:489-497 3. Naitja, I Nyoman S., 1992. "Ekologi Kelautan: Suatu Tantangan Besar negara Bahari" dalam ANALISIS CSIS, Tahun XXI. No. 6. Nov-Des. Halaman: 514-523 4. Simarmata Dj., A., 1992, "instrumen Ekonomi dalam Penegelolaan Pencemaran Lingkungan" dalam ANALISIS CSIS, Tahun XXI. No. 6. Nov-Des. Halaman:535-547

<p>5-7</p>	<p>TEORI PERTUKARAN</p> <ul style="list-style-type: none"> • Etika Subsistensi • Resiprositas, Redistribusi, dan Exchange • Ekonomi Dasar dan Psikologi sebagai dasar pertukaran • Proposisi Homans (sukses, stimulus, nilai deprivasi-satiasi, restu-agresi) • Pertukaran tak seimbang dan munculnya struktur makro (Blau) • Strategi memperoleh kekuasaan dan menghindar dari subordinasi • Kedudukan Teori-teori tersebut dalam Ilmu 	<ul style="list-style-type: none"> • Scott, James C., 1983. Moral Ekonomi Petani: Subsistensi dan Pergolakan Petani di Asia Tenggara. LP3ES. Jakarta. Bab I • Susilo, Edi, 1986, 'Nelayan di antara Tengkulak dan Tempat Pelelangan Ikan: Suatu tinjauan Teoretik", makalah disampaikan dalam Seminar Nasional di Ujung Pandang. • Johnson, Doyle Paul, 1986, Teori Sosiologi Klasik dan Modern. Jilid II. LP3ES. Jakarta. Bab IX • Susilo, Edi, <i>et al</i>, 1996, 1997, 1999. Model Kelembagaan Akomodatif Sebagai Upaya Untuk Membentuk Struktur Masyarakat agribisnis perikanan "Progresif-Interaktif" guna Menunjang Pembangunan Perikanan di Jawa Timur. Laporan Penelitian PHB. Pusat Penelitian Ilmu Sosial. Unibraw. Tidak Diterbitkan.
<p>8-10</p>	<p>TEORI DEPENDENSIA</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sejarah Teori Dependensia • Hegemoni dalam Kaitan dengan Keadaan Dependensia • Modal asing, teknologi dan politik Imperialisme • Faktor-faktor yang mempengaruhi dependensia di Indonesia dan yang berkaitan dengan perikanan 	<ul style="list-style-type: none"> • Djojohadikusumo, Sumitro, 1986. <i>Indonesia dalam Perkembangan Dunia, Kini dan Masa Datang</i>, LP3ES, Jakarta • Forbes, Dean K., 1986. <i>Geografi Keterbelakangan, Sebuah Survei Kritis</i>, LP3ES, Jakarta • Frank, Andre Gunder, 1984. <i>Sosiologi Pembangunan dan Keterbelakangan Sosiologi</i>, P.T. Sangkala Pulsar, Indonesia • Meier, Gerald M., 1985. <i>Ekonomi Pembangunan Negara Berkembang</i>, Bina Aksara, Indonesia • Morgenthau, Hans J. 1990, direvisi oleh Kenneth W. Thompson, penerjemah oleh S. Maimoen, <i>Politik Antar Bangsa</i>, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta • Nirwono, Ahmad Rofi'ie, Soetjipto Wirosardjono, dan Atmakusumah, <i>Gurita Kolonialisme</i>, Lembaga Studi Pembangunan, Jakarta • Sritua Arief, 1984, <i>Strategi Industrialisasi Negara Sedang Berkembang dari Ketergantungan Impor sampai Ketergantungan Ekspor</i> dalam Adi Sasono, Lembaga Studi Pembangunan, Jakarta

		<ul style="list-style-type: none"> • Wiranto, H. Jenderal TNI (Purn), 2006. <i>Hegemoni Intervensi Adidaya dan Fenomena Clash of Civilization</i>, Makalah disampaikan dalam acara Dialog Publik yang diselenggarakan oleh Forum Umat Islam dengan tema “<i>Hegemoni Intervensi Adidaya dan Prospek Perdamaian Dunia</i>” pada tanggal 14 Maret 2006 di Pesantren Al Hikam Malang Jawa Timur. • Wisadirana, Darsono, Dr, Ir, MS, 2004, <i>Sosiologi Pedesaan (Kajian Kultural dan Struktural Masyarakat Pedesaan)</i>, UMM (Universitas Muhammadiyah Malang) Pers, Malang
11-12	<p>KONFLIK DAN POTENSI KONFLIK</p> <ul style="list-style-type: none"> • Teori Konflik • Variasi Teori Konflik • Evaluasi Kritis pada Teori Konflik • Catatan Akhir Teori Konflik • Potensi Konflik dan Konflik dalam Masyarakat Pesisir 	<ul style="list-style-type: none"> • Zeitlin, M. Irving, 1995, <i>Memahami Kembali Sosiologi, Kritik Terhadap Teori Sosiologi Kontemporer</i>, Gadjah Mada University Pers, Yogyakarta • Soemardjan, Selo, Soelaeman Soemardi, 1964. <i>Setangkai Bunga Sosiologi</i>, Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi-Universitas Indonesia, Jakarta • Satria, Arief, 2002. <i>Sosiologi Masyarakat Pesisir</i>, P.T. Pustaka Cidesindo, Jakarta • Fadiel, M. Abdiel, Francis Cripps, John Wells, 1983. <i>Tata Ekonomi Internasional Baru?</i>, dalam Thee Kian Wie, 1983. <i>Pembangunan Ekonomi dan Pemerataan</i>, LP3ES, Jakarta • Roskin, Michael, Nicholas Berry, 1990. <i>I R, an Introduction to International Relation</i>, Prentice Hall-Englewood Cliffs, New Jersey
13-14	<p>PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMBANGUNAN MASYARAKAT</p> <ul style="list-style-type: none"> • Beberapa Pemberdayaan yang Sudah Dilakukan • Cofish Project Banyuwangi • Peningkatan Daya Adaptasi Melalui Proses Advokasi 	<ul style="list-style-type: none"> • Alimuddin, Muhammad Ridwan. Orang Mandar Orang Laut (Kebudayaan Bahari Mandar Mengarungi Gelombang Perubahan Zaman., 2002. KPG (Kepustakaan Populer Gramedia) bekerja sama dengan Yayasan Adikarya IKAPI, 2005. • Satria Arief, 2001. <i>Dinamika Modernisasi; Perikanan Formasi Sosial dan Mobilitas Nelayan</i>. Humaniora Utama Press, Bandung. • Kusnadi, 2001. <i>Pangamba' Kaum Perempuan Fenomenal</i>. Humaniora Utama Press, Bandung. • Kusnadi, 2006. <i>Filosofi Pemberdayaan Masyarakat Pesisir</i>, Humaniora Utama Press, Bandung

Title

Memberikan materi pembelajaran tentang: ruang lingkup dan pengertian Sosiologi Perikanan; evolusi sosio-budaya; etika subsistensi; Resiprositas, Redistribusi dan Exchange; struktur masyarakat; pertukaran sosial; konflik dan potensi konflik; teori pertukaran, konflik dan potensi konflik; serta model pemberdayaan masyarakat. Dengan harapan mahasiswa mampu menyusun solusi hipotetis pada permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat perikanan dengan menitik beratkan pada kelembagaan yang ada dalam masyarakat.

Sub Title

Studi ilmiah tentang kehidupan sosial manusia yang berkaitan dengan sumberdaya perikanan, disamping itu mahasiswa akan dapat mengetahui tentang hakekat manusia dan masyarakat ditinjau dari segi:

- naturalistik (positivisme)
- humanistik (interpretatif)
- strukturasi

Box Title

TIU : Setelah menyelesaikan kuliah Sosiologi Perikanan, mahasiswa Sosial Ekonomi Perikanan diharapkan dapat memahami keterkaitan antara: sumberdaya dan habitat, pengguna sumberdaya dan manajemen dalam sudut pandang sosiologi, antropologi dan ekologi, mengenali proses-proses sosiologis dan permasalahan nyata dalam kehidupan masyarakat perikanan dan berbagai model pemberdayaan masyarakat sehingga mampu menyusun solusi hipotetis pada permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat perikanan.



Metode perkuliahan ini lebih banyak menggunakan seminar. Dengan demikian setiap peserta diharapkan untuk menyampaikan gagasan dalam pembahasan baik berupa pendapat pribadi atau hasil observasi. Berbagai strategi intruksional akan digunakan dalam perkuliahan ini sebagai contoh, untuk beberapa pertemuan dosen pembimbing akan memberi kuliah singkat pada awal pertemuan untuk memberi latar belakang dan kerangka berpikir bagi diskusi kelas. Fokus diskusi adalah membahas berbagai masalah yang berkaitan dengan pokok yang dibahas dan mencoba mengidentifikasi alternatif pemecahannya. Untuk topik-topik tertentu mahasiswa akan diminta mempresentasikan topik-topik tersebut dan hasilnya dibahas bersama dalam kuliah.

Pelaksanaan praktikum diadakan di lapangan dengan tujuan mahasiswa akan langsung mengamati secara langsung permasalahan-permasalahan yang dihadapi masyarakat berkaitan dengan bidang telaah mata kuliah pada masing-masing kelompok sehingga mahasiswa dapat mendesain kelembagaan yang memfasilitasi kepentingan masyarakat sesuai dengan asas kebenaran dan keadilan.



SOSIOLOGI PERIKANAN:

Pendahuluan

Dr. Ir. Edi Susilo, MS.

Agribisnis Perikanan, SEPK, FPIK, Universitas Brawijaya

Email : olisuside@yahoo.com



1. PENDAHULUAN

- 1.1 Pengantar
- 1.2 Pengertian
- 1.3 Rancangan Kuliah

MODUL

1

SELF-PROPAGATING ENTREPRENEURIAL EDUCATION DEVELOPMENT

1. PENDAHULUAN

1.1 Pengantar

Silabi mata kuliah ini adalah sebagai berikut: “ruang lingkup dan pengertian sosiologi perikanan, evolusi sosiobudaya, etika subsistensi, resiprositas, redistribusi, *exchange* dan struktur masyarakat, pertukaran sosial, konflik dan potensi konflik, kapasitas ruang dan titik kritis struktur sosial, *social entrepreneurship*, dan model pemberdayaan masyarakat pesisir”. **Tujuan Instruksional Umum (TIU)** yang ingin dicapai adalah agar mahasiswa akan dapat memahami keterkaitan antara: sumberdaya & habitat, pengguna sumberdaya dan manajemen dalam sudut pandang sosiologi, antropologi dan ekologi; mengenali proses-proses sosiologis dalam kehidupan masyarakat perikanan dan berbagai model pemberdayaan masyarakat; sehingga mampu menyusun solusi hipotetis pada permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat perikanan.

1.2 Pengertian

Sosiologi perikanan dapat dianggap sebagai turunan dari sosiologi pertanian. Sebagaimana yang disampaikan oleh Planck (1993) bahwa sosiologi pertanian (*agricultural sociology*) sering disamakan dengan sosiologi pedesaan (*rural sociology*). Menyamakan keduanya bisa dibenarkan jika seluruh penduduk desa bekerja di sektor pertanian. Sosiologi pedesaan, lebih mengacu kepada kajian sosiologi pada masyarakat di pedesaan, tidak hanya terfokus kepada penduduk yang bekerja di sektor pertanian saja. Atau secara lebih tegas, sebagaimana disampaikan oleh Planck, bahwa:

Obyek “sosiologi pedesaan” adalah seluruh penduduk di pedesaan yang terus menerus atau untuk sementara tinggal di sana. Obyek “sosiologi pertanian” adalah keseluruhan penduduk yang bertani tanpa memperhatikan jenis tempat tinggalnya. Dengan kata lain, *sosiologi pedesaan* seperti juga sosiologi perkotaan, merupakan sosiologi pemukiman. Sosiologi ini membahas, dalam situasi dan keadaan lingkungan bagaimana manusia di pedesaan—tak peduli apakah ia petani atau bukan petani, pekerja atau yang sedang berlibur—hidup dan bergaul dengan sesama mereka, bagaimana hubungan antara mereka dan dengan penduduk lainnya diatur, pada nilai, norma dan otoritas apa tindakan mereka berorientasi, dalam kelompok dan organisasi mana berlangsung kehidupan mereka, masalah mana yang muncul dan dengan bantuan proses



sosial mana hal ini bisa diselesaikan.

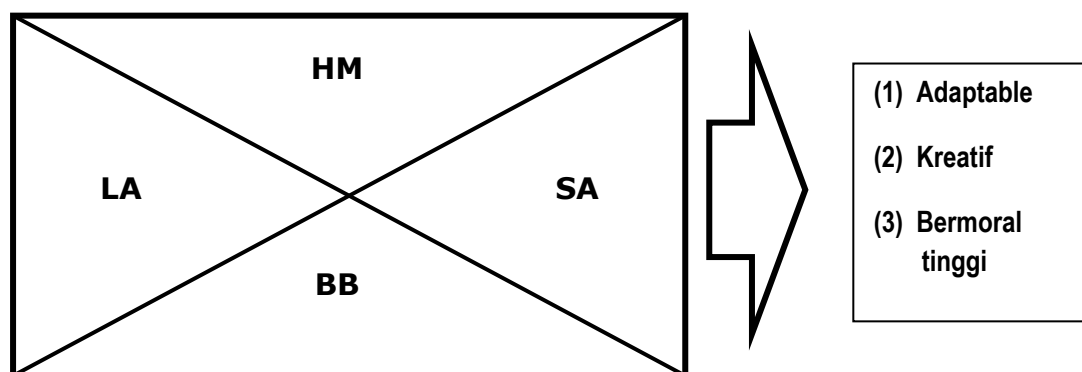
Sebaliknya, sosiologi pertanian adaah sosiologi ekonomi, seperti hanya sosiologi industri, yang membahas fenomena sosial dalam bidang ekonomi pertanian. Tema utama sosiologi pertanian adalah undang-undang pertanian , organisasi sosial pertanian, (struktur pertanian), usaha pertanian, bentuk organisasi pertanian, terutama koperasi dan masalah sosial pertanian. Sebuah aspek penting adalah posisi sosial petani dalam masyarakat.

Kemudian untuk pengertian sosiologi perikanan apakah mengacu kepada pemikiran Planck? Secara sederhana sosiologi adalah sebuah ilmu yang mempelajari hubungan sosial manusia (Horton dan Hunt, 1987). Sedangkan definsisi perikanan, mengacu kepada Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya ikan dan lingkungannya, yang dimulai dari kegiatan praproduksi, produksi (budidaya dan penangkapan), pengolahan, sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan. Dengan demikian cakupan kajian sosiologi perikanan berfokus kepada pelaku-pelaku dalam kegiatan pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya perikanan.

Oleh karena itu pihak-pihak yang menjadi obyek kajian sosiologi perikanan mencakup para pelaku yang bergerak dalam penyediaan sarana produksi perikanan, pelaku di dalam kegiatan budidaya perikanan, pelaku dalam kegiatan penangkapan ikan, pelaku dalam kegiatan pengolahan, dan pelaku dalam kegiatan pemasaran hasil perikanan. Atau dalam bingkai yang lebih sederhana, mengikuti pemikiran dari FAO dalam Faperikan (1999), maka kajian ini didasarkan pada keterkaitan erat antara tiga elemen penting, yaitu sumberdaya, pengguna sumberdaya dan manajemen. Mengingat bahwa perkembangan dunia perikanan di Indonesia mencirikan sebuah peradaban yang dapat dijelaskan dari kacamata evolusi multilinier, maka di dalam upaya membingkai mata kuliah ini digunakan tiga pendekatan keilmuan, yaitu sosiologi, antropologi dan ekologi.

1.3 Rancangan Kuliah

Kuliah ini dirancang dengan menggunakan model pembelajaran "*the envelope system*", yang dibingkai oleh empat sudut "amplop". Sudut kiri adalah LA, (*Lecture Activity* = aktivitas dosen), sudut kanan adalah SA (*Student Activity* = aktivitas mahasiswa), sudut atas adalah HG (*Highest Morality* = bermoral baik) dan sudut bawah adalah BB (*Brightest Brain* = berotak cerdas). Model pendekatan ini disajikan pada Gambar 1 berikut ini.



Gambar 1. Model pendekatan pembelajaran "sistem amplop"

Model ini dapat digunakan untuk merancang studi dalam satu semester maupun untuk studi di fakultas. Pada awal kegiatan presentase aktivitas dosen tinggi, dan kemudian menurun pada masa pertengahan dan menuju ke akhir waktu, aktivitas mahasiswa semakin meningkat. Dengan demikian sistem ini akan menjadikan lulusan menjadi manusia yang

mandiri dan mudah menyesuaikan diri (kreatif dan adaptable). Kemandirian ini harus dibarengi dengan moral yang tinggi serta tingkat kecerdasan yang memadai. Sejak awal civitas akademika dilatih untuk meninggalkan perilaku tindak kejahatan akademik (plagiasi, manipulasi, kreditur/debitur dalam proses keilmuan).

Sistem kuliah dilaksanakan dengan metode ceramah, diskusi dan analisis artikel. Proses analisis artikel dilakukan dengan proses pengumpulan artikel, melakukan kajian pada inti artikel, menyusun sebuah kerangka befikir dan dipresentasikan di kelas. Proses analisis artikel merupakan inti utama dari bentuk praktikum pada mata kuliah ini.

REFERENSI

PROPAGASI

A. Latihan dan Diskusi (Propagasi vertical dan Horizontal)

Bagi kelas menjadi beberapa kelompok untuk membahas beberapa topik

Topik Besar: Sosiologi Perikanan merupakan suatu mata kuliah yang berfokus kepada pelaku-pelaku dalam kegiatan pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya perikanan. Secara keilmuan, sosiologi perikanan memiliki peranan yang memberikan manfaat pada beberapa komponen.

Topik per kelompok:

1. Manfaat belajar sosiologi perikanan bagi mahasiswa
2. Manfaat belajar sosiologi perikanan bagi masyarakat
3. Manfaat belajar sosiologi perikanan bagi pengambil kebijakan

B. Pertanyaan (Evaluasi mandiri)

1. What is sociology of fisheries?
2. Who is the object in sociology of fisheries?
3. What kind of field studies which integrated in sociology of fisheries?

C. QUIZ -multiple choice (Evaluasi)

D. PROYEK (Eksplorasi entrepreneurship, penerapan topic bahasan pada dunia nyata)



SOSIOLOGI PERIKANAN: Evolusi Sosiobudaya

Dr. Ir. Edi Susilo, MS., Wahyu Handayani, S.Pi.
Agribisnis Perikanan, SEPK, FPIK, Universitas Brawijaya
Email : olisuside@yahoo.com



2. EVOLUSI SOSIOBUDAYA

2.1 Perubahan Evolusioner	2.1.7 Wujud Terakhir Evolusionisme
2.1.1 Evolusi Klasik	2.1.8 Kritik Harun Yahya pada Teori Evolusi
2.1.2 Kritik terhadap Evolusi Klasik	2.1.9 Refleksi Lapang Terhadap Teori Evolusioner
2.1.3 Neo-evolusionisme	2.2 Ekologi Humanistik dan Adaptasi Manusia
2.1.4 Neo-evolusionisme dalam antropologi kultural	2.2.1 Ekologi Humanistik
2.1.5 Neo-evolusionisme dalam Sosiologi	2.2.2 Proses Adaptasi Manusia
2.1.6 Kembali ke Evolusionisme Biologis	2.3 Tahapan Evolusi Masyarakat Nelayan Indonesia

MODUL

2

SELF-PROPAGATING ENTREPRENEURIAL EDUCATION DEVELOPMENT

2. EVOLUSI SOSIOBUDAYA

2.1 Perubahan Evolusioner.

Selama ini kita telah mengenal adanya tiga model dalam pengkajian ilmu, yaitu model ikonik, model matematis dan model analogi. Berangkat dari pemikiran ekologi dan pemikiran-pemikiran awal mempelajari masyarakat, saya lebih sering menggunakan pendekatan model analogi, misalnya dalam melakukan analisis antara nelayan dan tengkulak saya analogikan dengan hubungan dinamis antara zooplankton (tengkulak) dengan fitoplankton (nelayan) (Susilo, 1986). Hal ini berkaitan pula dengan adanya evolusi sosiobudaya dimana kehidupan para nelayan berada dalam tahap ke-2 (antroposere-II) yaitu *hunting and fishing*, dari enam tahapan yang ada (Sukadana, 1983).

Pengkajian tentang evolusioner dapat disimak dari beberapa buku, misalnya Laurer (1993) yang membahas tiga tokoh (Comte, Spencer dan Durkheim), LaPiere (1965) yang membahas evolusi dan neoevolusi, Appelbaum (1970) yang menyajikan teori evolusioner mulai dari yang klasik (Darwin dan teori unilinier, teori organismik) dan teori evolusi variasi modern (teori modernisasi, teori aspek fungsi dan sistem), dan Sztompka (2005) yang secara mudah dan lengkap membagi evolusi ke dalam evolusionisme klasik dan neoevolusionisme.

Sejak abad ke-19 para sosiolog telah menggunakan model analogi organisme untuk menjelaskan masyarakat (Sztompka, 2005). Analogi organik mengacu kepada anatomi keadaan internal masyarakat. Baik organisme dan masyarakat terdiri dari unsur-unsur yang dapat dilihat (sel, individu) yang tergabung dalam unit-unit yang lebih kompleks (organ, institusi) dan dipersatukan oleh jaringan hubungan tertentu (anatomi organik, ikatan sosial).



Singkatnya keduanya sama-sama memiliki struktur, meskipun diakui bahwa struktur organ sangat kuat dan ketat, sementara struktur masyarakat lebih longgar. Dalam organisme fungsi masing-masing organ sangat spesifik, sementara dalam masyarakat, masing-masing unsur dapat berfungsi ganda dan saling menggantikan.

Masyarakat yang dianalogkan dengan organisme dapat didekati dengan adanya sebuah pertumbuhan, yang memiliki makna perluasan, perkembangan, komplikasi dan diferensiasi (Sztompka, 2005). Pertumbuhan adalah proses yang: (1) terdiri dari perkembangan kemampuan (potensi) yang sudah ada sejak awal di dalam diri obyek yang dikaji (membuka dan menunjukkan apa yang telah ada di dalam bibit atau embrio), (2) bergerak maju menuju satu arah dan tidak dapat diubah (tidak ada cara untuk kembali dari kedewasaan ke kemudaan), (3) kelangsungannya tak dapat ditawar-tawar dan tidak dapat dihentikan (tak ada cara untuk tetap muda selamanya), (4) bergerak maju secara bertahap, meningkat setahap demi setahap, dan (5) tahap atau fase yang dilalui dapat dilihat (misalnya: muda, dewasa, tua). Pola ini dikenal dengan evolusionisme sosiologis.

Berbagai tokoh sosiologi yang mengembangkan teori evolusi klasik adalah sebagai berikut. Comte dengan konsep **evolusi idealis**, dimana bahwa pemikiran manusia itu berkembang dalam tiga tahapan, yaitu teologis (manusia bergantung kepada supranatural), metafisik (Tuhan ada dalam bentuk atau zat yang abstrak), dan positif (manusia menyerahkan kepada bukti empiris). Spenser dengan konsep **evolusi naturalis**, dimana evolusi menjadi prinsip umum realitas: alam dan sosial. Adanya sifat umum ini adalah karena realitas pada dasarnya adalah material, terdiri dari zat, energi, dan gerakan. Evolusi didefinisikan sebagai perubahan dari homogenitas tak beraturan ke heterogenitas yang logis, yang diikuti kehilangan gerak dan integrasi zat (Sztompka, 2005). Dalam tataran masyarakat muncul sebuah tahapan perubahan dari: masyarakat sederhana, masyarakat kompleks, masyarakat lebih kompleks dan tahap peradaban. Morgan (antropolog) dengan konsep **evolusi materialis**, yang mendasarkan diri pada gagasan perkembangan teknologi sebagai jawaban manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Sejarah manusia mengikuti tiga fase: kebuasan (rendah, menengah dan tinggi), barbarisme (menengah dan tinggi), dan fase peradaban (budaya baca tulis). Durkheim menawarkan konsep **evolusi sosiologis**, mengacu kepada perbedaan kualitas ikatan sosial, dengan menampilkan adanya perubahan dari solidaritas mekanik menuju solidaritas organik. Tonnies menyampaikan konsep **evolusi tanpa kemajuan**, dengan adanya dikotomi masyarakat *gemeinschaft* (komunitas) dan *gesellschaft* (masyarakat modern). Ward menambahkan konsep evolusi ini dengan **evolusi dari evolusi**, di mana mekanisme evolusi tidak konstan, tetapi berubah dengan sendirinya dalam perjalanan waktu. Dalam perjalanannya evolusi juga mencakup mekanisme evolusi itu sendiri. Evolusi dimulai dari kosmogogenesis (mencakup seluruh alam semesta), biogenesis (melengkapi kosmogogenesis yang berlangsung terus menerus), antropogenesis (evolusi manusia berdasar pikiran dan kesadaran) dan melengkapi kedua jenis evolusi yang terdahulu, sosiogeensis (kemudian karena manusia membentuk masyarakat dan mulai dengan evolusi baru yang berintegrasi dengan jenis evolusi sebelumnya).

2.1.1 Evolusi Klasik

Menurut Sztompka (2005) sejumlah asumsi umum yang menjadi teori evolusi adalah sebagai berikut: (diringkas dari 14 item).

- (a) Sejarah manusia mempunyai bentuk, pola, logika, atau makna unik yang melandasi banyak kejadian yang tampaknya serampangan dan tidak berkaitan. Pola tersebut dapat direkonstruksi dan dapat digunakan untuk meramal kejadian masa depan. Obyek yang mengalami perubahan adalah keseluruhan masyarakat manusia, kemanusiaan,

umat manusia. Perubahan suatu aspek kemasyarakatan hanya sebuah gejala saja dari evolusi sosial keseluruhan.

- (b) Keseluruhan dipahami secara organis, sebagai sebuah sistem yang terintegrasi, bagian dan keseluruhan menyumbang terhadap pemeliharaan dan kelangsungan hidupnya. Karena dianggap sebagai kesatuan integral, maka dapat dibayangkan dan dikaji sebagai satu totalitas dengan mengabstraksikannya pada tingkat yang tertinggi.
- (c) Perubahan sebagai gejala alamiah, suatu kejadian yang tidak terhindarkan. Masyarakat bergerak dari kondisi sederhana menjadi keadaan yang lebih kompleks dan tidak bisa kembali lagi. Berpola unilinier, atau mengikuti pola/ lintasan yang tunggal. Lintasan evolusi mengikuti suatu fase, dan antar fase tidak dapat diloncati, dengan adanya faktor penyebab tunggal, dan umumnya berasal dari dalam (potensi diri) yang sudah ada. Pada proses perubahan terjadi secara spontan dan selalu mengalami kemajuan atau perbaikan.

2.1.2 Kritik terhadap Evolusi Klasik

Pemikiran klasik tersebut dianggap memiliki berbagai kelemahan, kurang dapat dibuktikan secara empiris dan berlawanan dengan bukti historis. Kritik sempat membuat teori ini mengalami mati suri pada abad 20, dan baru bangkit sekitar tahun 1950-an. Kritik atau kelemahan evolusionisme klasik adalah sebagai berikut: (Sztompka, 2005).

- (a) Asumsi bahwa pola atau logika historis bersifat menyeluruh, universal dipertanyakan oleh kebanyakan sejarawan. Pola hanya dapat diterapkan dalam lingkup terbatas: zaman, periode, kawasan dan negara-bangsa. Keseluruhan masyarakat manusia bersifat heterogen, bukan homogen.
- (b) Citra bahwa masyarakat manusia sebagai kesatuan organik tidak sesuai dengan fakta adanya konflik, pemaksaan, ketegangan dan tidak berfungsinya institusi sosial tertentu.
- (c) Perubahan sosial internal tidak begitu berpengaruh kepada keseluruhan. Bahwa perubahan selalu terjadi dan menjadi lebih baik tidak terbukti. Stabilitas harus dianggap sama "alamiahnya" dengan perubahan. Tidak ada bukti tentang perubahan sosial tunggal. Arah perkembangan evolusi tidak selalu seragam, sehingga menjadi tidak benar kalau perubahan hanya melalui lintasan tunggal. Perubahan tidak selalu mengikuti tahapan yang runtut. Perubahan tidak terjadi secara spontan, dan penyebab lebih banyak dari faktor eksternal. Perubahan tidak selalu berarti kemajuan, sebab dalam peradaban modern juga terjadi kekecewaan dan kadang menakutkan.

2.1.3 Neo-evolusionisme

Neoevolusionisme mencoba mencari landasan baru bagi pernyataan teoretisnya. Ia mencoba memanfaatkan temuan disiplin empiris mengenai perubahan sosial, terutama temuan palaentologi, arkeologi, antropologi-kultural, etnologi dan historiografi. Sebagaimana dinyatakan oleh Lenski:

Gambaran kasar sejarah manusia dari zaman kuno hingga zaman perunggu kini sudah jelas. Itu hanya dapat dilukiskan dalam arti perkembangan: fakta kenaikan jumlah penduduk, fakta pemukiman di tempat yang makin beragam; dan fakta barang produksi tahan lama dan akumulasi kapital. Sejarawan memungut cerita yang ditinggalkan arkeolog dan temuan mereka menguatkan dan memperluas gambaran yang disajikan oleh arkeolog; berlanjutnya pertumbuhan penduduk, kemajuan teknologi, produksi dan akumulasi kapital; dan sistem sosialnya semakin kompleks, makin terdiferensiasi, makin urban dan makin kuat seiring dengan berjalannya waktu (dalam Sztompka, 2005)

Parson juga menyatakan :

Kemajuan teori biologi dan ilmu sosial menciptakan landasan kuat untuk menerima kontinuitas masyarakat dan kultur sebagai bagian teori evolusi sistem kehidupan yang lebih umum (dalam Sztompka, 2005)

2.1.4. Neo-evolusionisme dalam antropologi-kultural

Neo-evolusionisme dimulai dalam antropologi kultural. White dalam Sztompka (2005), dengan **langkah ke determinisme teknologi**, menyatakan bahwa kultur sebagai alat penyesuaian diri (adaptasi) dengan alam terutama dengan memanfaatkan energi bebas, dan digunakan dalam bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup. Semua bagian kultur saling berhubungan, namun peran utama dimainkan oleh sistem teknologi. Organisasi politik, struktur normatif, sistem pengetahuan, dan ideologi berperan sekunder. Evolusi penggunaan energi sebagai refleksi dari teknologi berkembang secara bertahap. Dimulai dari penggunaan tenaga manusia, kemudian manusia menjinakkan binatang sebagai pengganti tenaga manusia. Selanjutnya penggunaan energi berkembang dengan ditemukannya minyak bumi, dan terakhir ditemukan nuklir sampai saat ini.

Steward dalam Sztompka (2005) mengemukakan konsep **evolusi multilinier**, yang didasarkan pada riset di abad ke-20, bahwa kultur masyarakat sangat berbeda-beda dan perkembangannya tidak melalui tahapan unilinier. Kultur dilihat sebagai kesatuan yang mempunyai ciri-ciri berlainan yang ditemukan di berbagai lingkungan ekologis. Kultur mendapat bentuk yang berbeda karena beradaptasi dengan kondisi lingkungan yang berbeda. Kultur disebut multilinier mengandung dua arti, pertama dari sudut antarmasyarakat: evolusi di berbagai masyarakat mengikuti jalan yang berbeda karena menghadapi kondisi yang berbeda. Kedua, dari sudut masyarakat tertentu: evolusi berbagai bidang kehidupan sosial (kultur, ekonomi, politik, dan sebagainya) mengikuti jalan dan mekanisme yang berbeda.

Penyebab perubahan evolusioner bermacam-macam, namun ada faktor mendasar dan umum, yaitu faktor tekno-ekonomi, namun bukan determinisme teknologi. Faktor organisasi sosial dan ideologi dianggap oleh White hanya memberikan peluang perubahan yang kecil. Namun pemikiran ini memperoleh kritik, terutama dari Anthony Smith, yang menyatakan: (1) keragaman kultur masyarakat lebih besar ketimbang keragaman ekologi, (2) kekuatan yang disebabkan oleh faktor tekno-ekonomi, berkaitan erat dengan fase evolusi, dalam fase awal mungkin memiliki pengaruh yang kuat, namun pada fase selanjutnya justru faktor organisasi politik dan ideologi yang memiliki peranan menentukan.

Sahlin dan Service (dalam Sztompka, 2005) menyatakan adanya **perbedaan antara evolusi umum dan evolusi khusus**. Evolusi umum dapat dikaji dalam tingkat abstraksi yang tertinggi dengan memperhatikan arah perubahan kemanusiaan secara menyeluruh. Dengan cara demikian akan terlihat tipe kultur baru yang terus-menerus muncul. Pertumbuhan kultur baru ini seiring dengan derajat kemampuan adaptasi, kompleksitas sistem dan organisasi yang makin tinggi. Sebaliknya, evolusi khusus merupakan cara-cara kongkrit adaptasi kultur baru dengan lingkungan khusus. Dalam hal ini masyarakat menunjukkan kreativitas sangat besar hingga menghasilkan keberagaman kultur yang sangat besar pula.

Kedua evolusi ini dapat menimbulkan konflik. Evolusi khusus berarti adaptasi sempurna terhadap lingkungan kongkret, sedangkan evolusi umum berarti peningkatan otonomi dan penguasaan lingkungan sebagai prasyarat untuk adaptasi di masa mendatang. Jadi masyarakat atau kultur, dengan meningkatnya spesialisasi, mungkin tidak lagi mempunyai daya adaptasi, tidak lagi mampu mencipta untuk melompat ke tingkat teknologi dan organisasi sosial yang lebih tinggi. Akibatnya stagnasilah yang terjadi, bukan perubahan.

2.1.5. Neo-evolusionisme dalam Sosiologi

Berdasarkan pada Sztompka (2005) dinyatakan bahwa neoevolusionisme dalam sosiologi dipertahankan sebagai reaksi atas versi ortodoks pendekatan struktural fungsional yang mendominasi teori sosiologi di tahun 1950-an, tetapi kemudian diserang karena kelemahan asumsinya.

Gerhard dan Lenski mengenalkan konsep **evolusi-ekologi**. Keduanya merumuskan pemikiran utama dengan merujuk kepada ilmu biologi sebagai berikut:

Pendekatan evolusi dalam biologi besar perhatiannya dalam perubahan --- terutama perubahan mendasar, jangka panjang, perkembangan, dan penyesuaian diri --- dan yang berkaitan dengan proses kompetisi

dan konflik. Pendekatan ekologi dalam biologi pun memerhatikan hubungan saling tergantung antara manusia dan antara manusia dengan lingkungannya (dalam Sztompka, 2005).

Kecenderungan paling nyata adalah kemajuan teknologi. Meski ada kalanya ada kemunduran, umumnya teknologi mengalami kemajuan. Pembebasan manusia dari dunia binatang adalah berkat kemajuan dalam mempelajari dan menguasai informasi. Bentuk dasarnya murni bawaan (genetik); bentuk lebih tinggi adalah kemampuan belajar secara individual; kemudian muncul cara berkomunikasi dengan tanda-tanda, dan terakhir berkomunikasi dengan simbol, kode, serta memiliki bersama dengan orang lain (sosialisasi pada generasi berikut). Karena kemajuan teknologi merupakan faktor yang menentukan arah sejarah manusia, maka dapat digunakan menjadi kriteria utama penahapan evolusi masyarakat¹: (1) berburu dan meramu hingga tahun 7.000 SM; (2) berkebun, dari 7.000 SM – 3.000 SM; (3) Agraris (3.000 SM hingga tahun 1.800), dan (4) industri, mulai tahun 1.800. Tergantung pada ekologi lokal, ada peluang evolusi bercabang banyak, atau menyimpang dari jalan utamanya, sehingga berbeda dengan tipe utama.

Kemudian Parson menawarkan **pengembangan teori diferensiasi**. Parsons juga memusatkan perhatian pada masalah perubahan historis jangka panjang. Ia menggunakan kembali konsep struktural fungsional lama untuk menafsirkan transformasi evolusioner masyarakat. Parsons membedakan dua jenis proses yang terjadi dalam setiap masyarakat, yakni proses integratif dan proses kontrol. Keduanya memiliki pengaruh yang setara. Keduanya berfungsi memulihkan keseimbangan setelah terganggu dan menjaga kelangsungan hidup dan reproduksi masyarakat.

Perubahan struktural mengikuti pola evolusioner, yang multilinier. Ada empat dasar evolusi, yaitu: diferensiasi, peningkatan daya adaptasi, pemasukan dan generalisasi nilai. Mekanisme diferensiasi adalah pembentukan unit-unit khusus secara fungsional dan struktural. Mekanisme peningkatan daya adaptasi berarti peningkatan efisiensi setiap unit baru, pelaksanaan fungsinya lebih khusus dan lebih efektif ketimbang keseluruhan yang sebelumnya lebih seragam. Mekanisme pemasukan berarti integrasi unit-unit baru ke dalam masyarakat, menjaga keharmonisan pelaksanaan fungsinya dalam suasana hubungan yang baru. Mekanisme generalisasi nilai berarti merumuskan standar norma pada tingkat yang cukup umum sehingga mencakup unit baru yang beragam dan memberikan dukungan dan legitimasi terhadap unit baru itu. Keempat mekanisme di atas beroperasi bersama-sama. Keadaan masyarakat tertentu merupakan hasil proses progresif yang melibatkan keempat proses perubahan tersebut di atas.

Evolusi melalui empat tahap yang dapat dilihat, yaitu: (1) primitif (sangat seragam dan homogen, tidak terdiferensiasi dalam subsistem spesialis), (2) primitif maju (dicapai ketika muncul diferensiasi sehingga terbentuk subsistem), (3) menengah (ada pengembangan tulisan, yang memungkinkan akumulasi informasi, komunikasi jarak jauh dan penyaluran tradisi. (4) modern (diferensiasi menyeluruh dari empat subsistem sosial: daya adaptasi, pencapaian tujuan, integrasi, dan pemeliharaan pola; dominasi peran ekonomi, perkembangan sistem hukum, stratifikasi berdasarkan kriteria prestasi universal; perkembangan jaringan hubungan sosial yang bersifat impersonal, menengah dan kompleks.

2.1.6. Kembali ke Evolusionisme Biologis

Evolusionisme sosiologi Comte maupun Spencer jauh lebih tua ketimbang perumusan teori evolusi dalam biologi terutama jika dibandingkan dengan karya Darwin. Penganut evolusionisme klasik dan kebanyakan neofungsionalisme dalam sosiologi lebih mengikuti gambaran Spencerian mengenai pertumbuhan organis ketimbang gagasan Darwinian mengenai seleksi alam. Baru belakangan ini saja sosiologi kembali ke gagasan Darwinian. Sebagai pengganti teori sebelumnya (ontogenesis dan teori tahapan atau diferensiasi

organik), beberapa penganut neofungsionalisme mengajukan teori seleksi alam atau teori perbedaan sosio-kultural. Mereka sama yakin kalau teori Darwinian menunjukkan kesamaan analisis mendasar antara proses evolusi biologis dan proses sosio kultural dengan beranalogi pada teori Darwinian tentang perbedaan dan seleksi acak.

Mekanisme dasar evolusi telah dirumuskan Darwin sebagai pelestarian jenis yang menguntungkan dan penolakan jenis yang merugikan. Ada tiga prinsip logika proses ini. Pertama, prinsip variasi (mutasi acak) dalam populasi. Kedua, prinsip seleksi (perjuangan untuk hidup) diantara individu yang ditakdirkan berbeda. Ketiga, prinsip yang terkuatlah yang mampu bertahan hidup (kesuksesan reproduksi) yang menghasilkan reproduksi ciri-ciri yang dimiliki individu terpilih dalam kehidupan populasi di masa yang akan datang.

2.1.7. Wujud Terakhir Evolucionisme

Wujud terakhir evolusionisme adalah modernisasi. Modernisasi mengandung tiga makna. Makna paling umum sama dengan seluruh jenis perubahan sosial progresif apabila masyarakat bergerak maju menurut skala kemajuan yang diakui. Makna kedua adalah lebih khusus secara historis, yakni "modernitas", yang berarti transformasi sosial, politik, ekonomi, kultural, dan mental. Modernisasi meliputi: industrialisasi, urbanisasi, rasionalisasi, birokratisasi, demokratisasi, pengaruh kapitalisme, perkembangan individualisme dan motivasi untuk berprestasi, meningkatnya pengaruh akal dan sains. Makna modernisasi paling khusus hanya mengacu pada masyarakat terbelakang atau tertinggal dan melukiskan upaya mereka untuk mengejar ketertinggalan dari masyarakat paling maju yang hidup berdampingan dengan mereka pada periode historis yang sama dengan masyarakat global. Dengan kata lain modernisasi melukiskan gerakan dari pinggiran menuju inti masyarakat modern.

Teori modernisasi dan konvergensi adalah produk era pasca perang Dunia II. Teori modernisasi klasik memusatkan perhatian pada perbedaan antara Dunia Pertama dan Dunia Ketiga, sedangkan teori konvergensi memusatkan pada perbedaan antara Dunia Pertama dengan Dunia Kedua. Di awal tahun 1990-an, akibat runtuhnya komunisme, teori konvergensi pun kembali menjadi tema utama perdebatan sosiologi dan dijadikan alat untuk menganalisis transisi masyarakat post-komunis. Teori modernisasi dan konvergensi dapat dianggap sebagai wujud terakhir pemikiran evolusionisme.

2.1.8. Kritik Harun Yahya pada Teori Evolusi²

Yahya (2004) mengemukakan tentang keruntuhan teori evolusi, terutama pada evolusi biologis dalam penciptaan makhluk hidup. Dijelaskan lebih rinci oleh Yahya bahwa sebagian orang yang pernah mendengar "teori evolusi" atau "Darwinisme" mungkin beranggapan bahwa konsep-konsep tersebut hanya berkaitan dengan bidang studi biologi dan tidak berpengaruh sedikit pun terhadap kehidupan sehari-hari. Anggapan ini sangat keliru sebab teori ini ternyata lebih dari sekadar konsep biologi. Teori evolusi telah menjadi pondasi sebuah filsafat yang menyesatkan sebagian besar manusia. Filsafat tersebut adalah "materialisme", yang mengandung sejumlah pemikiran penuh kepalsuan tentang mengapa dan bagaimana manusia muncul di muka bumi.

Materialisme mengajarkan bahwa tidak ada sesuatu pun selain materi dan materi adalah esensi dari segala sesuatu, baik yang hidup maupun tak hidup. Berawal dari pemikiran ini, materialisme mengingkari keberadaan Sang Maha Pencipta, yaitu Allah. Dengan mereduksi segala sesuatu ke tingkat materi, teori ini mengubah manusia menjadi makhluk yang hanya berorientasi kepada materi dan berpaling dari nilai-nilai moral. Ini adalah awal

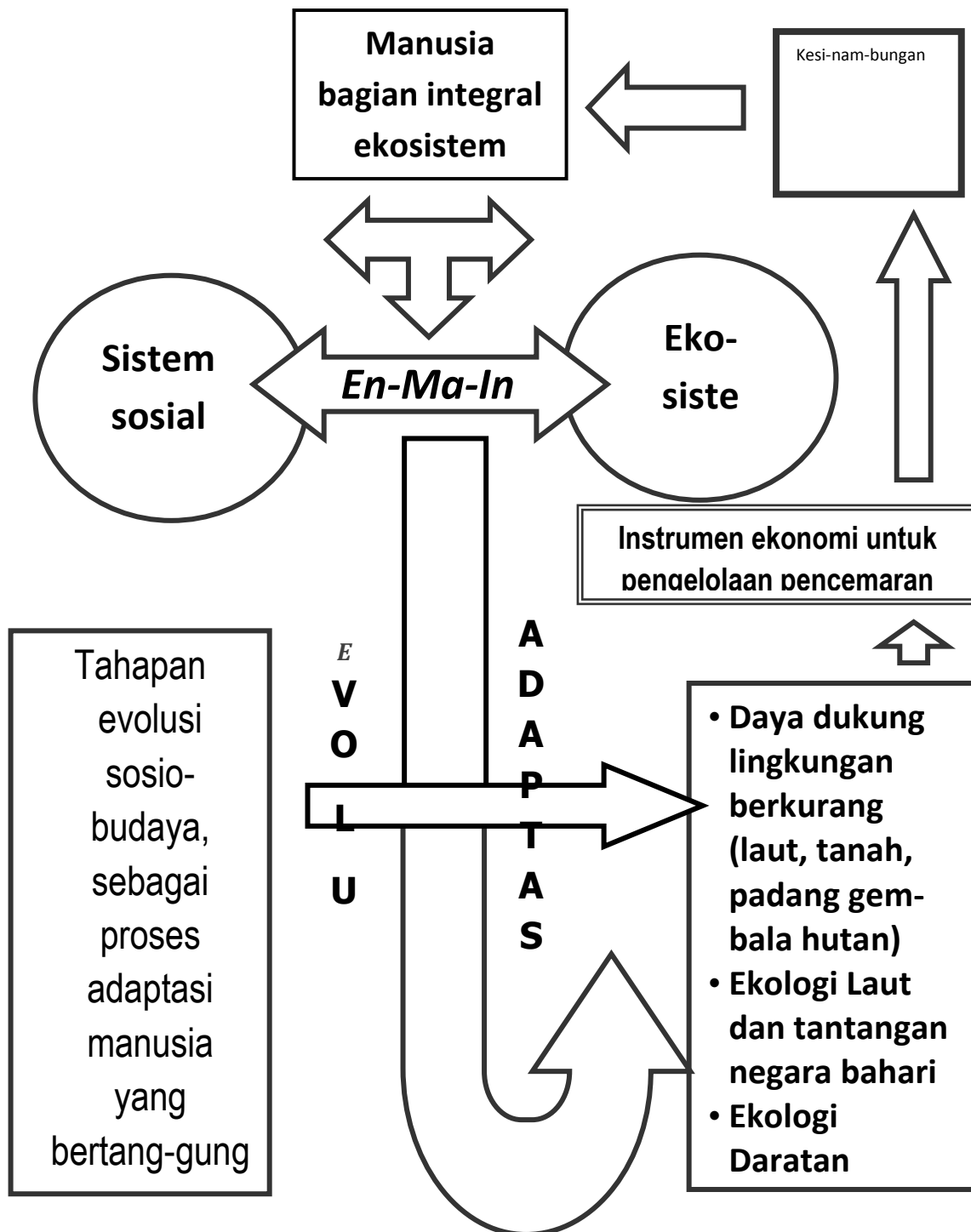
dari bencana besar yang akan menimpa hidup manusia. Kerusakan ajaran materialisme tidak hanya terbatas pada tingkat individu. Ajaran ini juga mengarah untuk meruntuhkan nilai-nilai dasar suatu negara dan masyarakat dan menciptakan sebuah masyarakat tanpa jiwa dan rasa sensitif, yang hanya memperhatikan aspek materi. Anggota masyarakat yang demikian tidak akan pernah memiliki idealisme seperti patriotisme, cinta bangsa, keadilan, loyalitas, kejujuran, pengorbanan, kehormatan atau moral yang baik, sehingga tatanan sosial yang dibangunnya pasti akan hancur dalam waktu singkat. Karena itulah, materialisme menjadi salah satu ancaman paling berat terhadap nilai-nilai yang mendasari tatanan politik dan sosial suatu bangsa.

Yahya berkesimpulan bahwa evolusi adalah sebuah kebohongan. Masih banyak bukti dan hukum-hukum ilmiah lain yang menggugurkan teori evolusi. Namun buku tersebut hanya membahas beberapa di antaranya. Itu pun seharusnya sudah cukup untuk menyingkap sebuah kebenaran. Meskipun ditutup-tutupi dengan kedok ilmu pengetahuan, teori evolusi hanyalah sebuah kebohongan; yang dipertahankan hanya untuk kepentingan filsafat materialistis. Kebohongan yang tidak berdasarkan pada ilmu pengetahuan tetapi pada pencucian otak, propaganda dan penipuan.

2.1.9. Refleksi Lapang terhadap Teori Evolusioner

Pada artikel yang ditulis Susilo (2005b) disampaikan adanya refleksi lapang terhadap teori perubahan sosial. Secara ringkas disampaikan sebagai berikut. Pertama, masyarakat nelayan selalu mengalami proses perubahan secara evolusioner, baik dalam bentuk unilinier, multilinier maupun revolusioner. Selama proses perubahan tersebut masyarakat selalu beradaptasi pada lingkungan fisik dan sosial budaya. Dalam proses itu dapat dicapai sebuah keseimbangan sementara atau mengalami fase ekuilibrium. Proses menuju keseimbangan merupakan sebuah proses yang sangat berpeluang besar terjadi sebuah konflik. Pada akhirnya kehidupan masyarakat nelayan secara keseluruhan atau dalam kelompok alat tangkap tertentu berada dalam kondisi kebangkitan maupun kehancuran dalam kurun waktu tertentu. Kondisi ini merupakan sebuah hasil dari proses evolusioner.

Meskipun teori evolusi telah memperoleh kritik dari Harun Yahya, sebagaimana disampaikan di atas, namun di dalam kajian ini teori evolusi sosial sebagai sebuah penjelas pada perubahan struktur tetap digunakan. Dengan demikian dalam pemikiran buku ini, menyetujui pemikiran Harun Yahya tentang penolakan terhadap evolusi penciptaan makhluk hidup.



Catatan: EnMaIn = Energi, Materi dan Informasi

Gambar 2. Ekologi Humanistik (dikembangkan dari Rambo, 1985)

2.2 Ekologi Sus

berkaitan dengan daya adaptasi manusia. Dua dari kerangka konseptual tersebut dapat digunakan untuk menjelaskan tentang evolusi dan adaptasi manusia pada lingkungannya. Kedua kerangka konseptual tersebut adalah: ekologi humanistik dan proses adaptasi manusia.

2.2.1. Ekologis Humanistik

Kaitan antara sistem sosial dengan ekosistem telah dianalisis oleh Rambo (1985) yang melihat adanya kesatuan integral antar keduanya. Demikian pula para ahli antropologi, seperti Moran (1982), Sukadana (1983), Koentjaraningrat (1995), secara jelas menyinggung tentang adanya adaptasi manusia dan evolusi sosiobudaya. Beberapa tahapan perkembangan yang dimulai dari meramu (*food gather*), berburu dan perikanan (*hunting and fishing*), padang gembala (*pastoral nomad*) atau *herding*, pertanian (*agriculture*), industrial sampai kepada masyarakat kota (urban), dialami manusia sebagai jawaban terhadap lingkungan yang sedang berubah. Hal yang menarik dalam perkembangan masyarakat nelayan adalah bahwa meskipun masyarakat nelayan juga mengalami perkembangan evolusi mengikuti tahapan tersebut, namun kenyataannya mereka masih selalu terikat kepada habitatnya, sehingga perubahan habitat akan menyebabkan daya adaptasinya menjadi sangat terganggu.

Habitat sangat terkait pula dengan daya dukung lingkungan yang semakin berkurang (Brown, 1982) sebagai akibat dari cara eksploitasi sumberdaya yang berlebihan. Daya dukung lahan, laut, padang savana, hutan secara bertahap telah menurun tajam, sehingga digambarkan oleh Brown bahwa dunia telah sampai pada hari ke- 29, yaitu suatu masa di mana bumi akan penuh di hari ke-30. Ismawan (1999) juga menelaah adanya resiko ekologis yang hebat di balik sebuah pertumbuhan ekonomi. Hal ini terjadi sebab ada penggeseran makna dari pertumbuhan produksi ke pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan produksi tidak sama dengan pertumbuhan ekonomi, berarti mungkin telah terjadi pertumbuhan produksi, namun karena harus dibayar dengan kerusakan ekologis yang besar, maka ekonomi tidak mengalami pertumbuhan.

Sebagaimana dinyatakan oleh Nuitja (1992) bahwa sebuah tantangan besar bagi negara bahari adalah keberadaan nelayan dalam konteks ekologi kelautan. Terbaikannya dimensi ekologis dalam proses pembaruan sebagaimana disampaikan oleh Salim (1992) sebenarnya dapat diperkecil dengan menempatkan analisis ekonomi untuk menghitung kerusakan ekologis, misalnya dengan apa yang dilakukan oleh Simarmata (1992) yang mengembangkan analisis ekonomi untuk pengelolaan pencemaran udara. Namun perilaku manusia terhadap lingkungan tidak menjadi semakin arif, sehingga proses degradasi sumberdaya menjadi semakin berkembang. Bahwa sumberdaya alam harus mampu menjadi jaminan sosial bagi kehidupan masyarakat (Benda-Beckmann et al, 2001) merupakan sebuah komitmen terhadap adanya sebuah mekanisme yang perlu dibuat untuk meningkatkan daya adaptasi manusia terhadap lingkungan yang berubah cepat.

Oleh karena itu pemikiran ini dibingkai berbagai buah konsep pemikiran. Pertama adalah keterkaitan antara kemampuan adaptasi dan evolusi sosiobudaya yang dapat disebut sebagai kerangka berfikir ekologis-humanistik (Gambar 2). Konsep ini diawali dari dari pemikiran bahwa manusia adalah bagian integral ekosistem, serta adanya arus Energi, Materi dan Informasi (EnMaIn) yang masuk dan keluar dari dan ke dalam hubungan ekosistem dan sistem sosial. Proses interaksi kedua sistem tersebut menjadi segitiga fungsional dengan sudut pertama adalah sumberdaya, sudut kedua adalah pengguna sumberdaya dan sudut ketiga adalah manajemen. Manusia mengalami sebuah evolusi secara sosiobudaya, yang kalau dilihat dari sistem pencaharian, maka akan secara bertahap berubah dari kebiasaan mengambil apa yang ada di alam. Tahap berikut dengan melakukan pemburuan (di darat dan di laut) dan melakukan peternakan di padang gembala. Pertanian ladang berpindah dan peternakan di padang gembala berkembang melalui domestikasi yang menjadi peternakan dan pertanian menetap. Tahap selanjutnya adalah berkembangnya industri. Perkembangan ini secara bertahap dan secara menyeluruh mempengaruhi perubahan ekosistem secara besar dan intensif, yang menyebabkan daya adaptasi manusia mulai tidak bisa mengimbangi dengan laju perubahan lingkungan. Pertumbuhan industri dan perkembangan kota sebagai tahapan yang lebih akhir dari evolusi telah secara perlahan meninggalkan manusia dari keterikatan dengan habitatnya, sehingga pola kebijakan yang dirumuskan di kota cenderung terjadi pengabaian pada kenyataan, bahwa tahapan

evolusi awal juga masih ada di dalam suatu masyarakat. Kesadaran ini telah menyebabkan beberapa ahli melakukan peninjauan kembali terhadap strategi kebijakan ke arah pembangunan yang berkelanjutan.

2.2.2. Proses Adaptasi Manusia

Konsep pemikiran kedua adalah tentang proses adaptasi manusia. Menurut Sihab (1995) Allah menganugerahkan manusia empat daya. Pertama, daya tubuh yang mengantarkan manusia berkuatan fisik. Organ tubuh dan pancaindera berasal dari daya ini. Kedua, daya hidup yang menjadikannya memiliki kemampuan mengembangkan dan menyesuaikan diri dengan lingkungan serta mempertahankan hidupnya dalam menghadapi tantangan. Ketiga, daya akal yang memungkinkannya memiliki ilmu pengetahuan dan teknologi. Keempat, daya kalbu yang memungkinkannya bermoral, merasakan keindahan, kelezatan iman, dan kehadiran Allah. Dari daya ini lahir intuisi dan indera keenam.

Adaptasi manusia telah lama dikaji oleh Hawley (1950), Moran (1982), dan Soemarwoto (1987). Sementara itu Geertz (1985) menelaah involusi sebagai bentuk sebuah adaptasi manusia, yang diperlakukan dengan berbagi kemiskinan (*share proverty*). Konsep adaptasi juga dipahami sebagai pengembangan kajian ekologi dengan menempatkan manusia sebagai bagian integral sebuah ekosistem. Berkaitan dengan adaptasi ini paling tidak telah dikembangkan beberapa teori yang menjelaskan kaitan antara manusia dan lingkungan. Pada awalnya dimunculkan adanya teori Dominasi Lingkungan (*anthropo-geographic*) yang merumuskan keyakinan bahwa seluruh aspek budaya dan perilaku manusia dipengaruhi oleh lingkungan. Dalam pandangan ini perkembangan kehidupan manusia sangat dipengaruhi oleh kondisi alamnya. Sebagai pembanding, kemudian dikembangkan teori Possibilisme (Teori Kemungkinan), yang berkeyakinan bahwa aspek budaya dan teknologi tidak disebabkan oleh lingkungan, namun lingkungan bersifat membatasi terwujudnya budaya suatu masyarakat. Dalam pandangan ini lingkungan adalah sebagai pembatas terhadap perkembangan kehidupan manusia. Tahap lebih lanjut diperkenalkan oleh Steward tentang ekologi budaya, dimana antara budaya dan lingkungan bukan saling mempengaruhi, tetapi interaksi keduanya telah mampu saling menjadikan (dialektis) sebuah kehidupan manusia. Teori Dinamika Adaptif yang dikemukakan oleh Sukadana (1983) menyatakan bahwa manusia memiliki kesadaran, karena itu ia berkembang secara sadar sehingga adaptasinya disebut sebagai adaptasi yang dinamis dan berkesadaran. Hal ini berberda dengan pola adaptasi makhluk lain (selain manusia) yang bersifat pasif (Cf. Geertz, 1985, Sukadana, 1983).

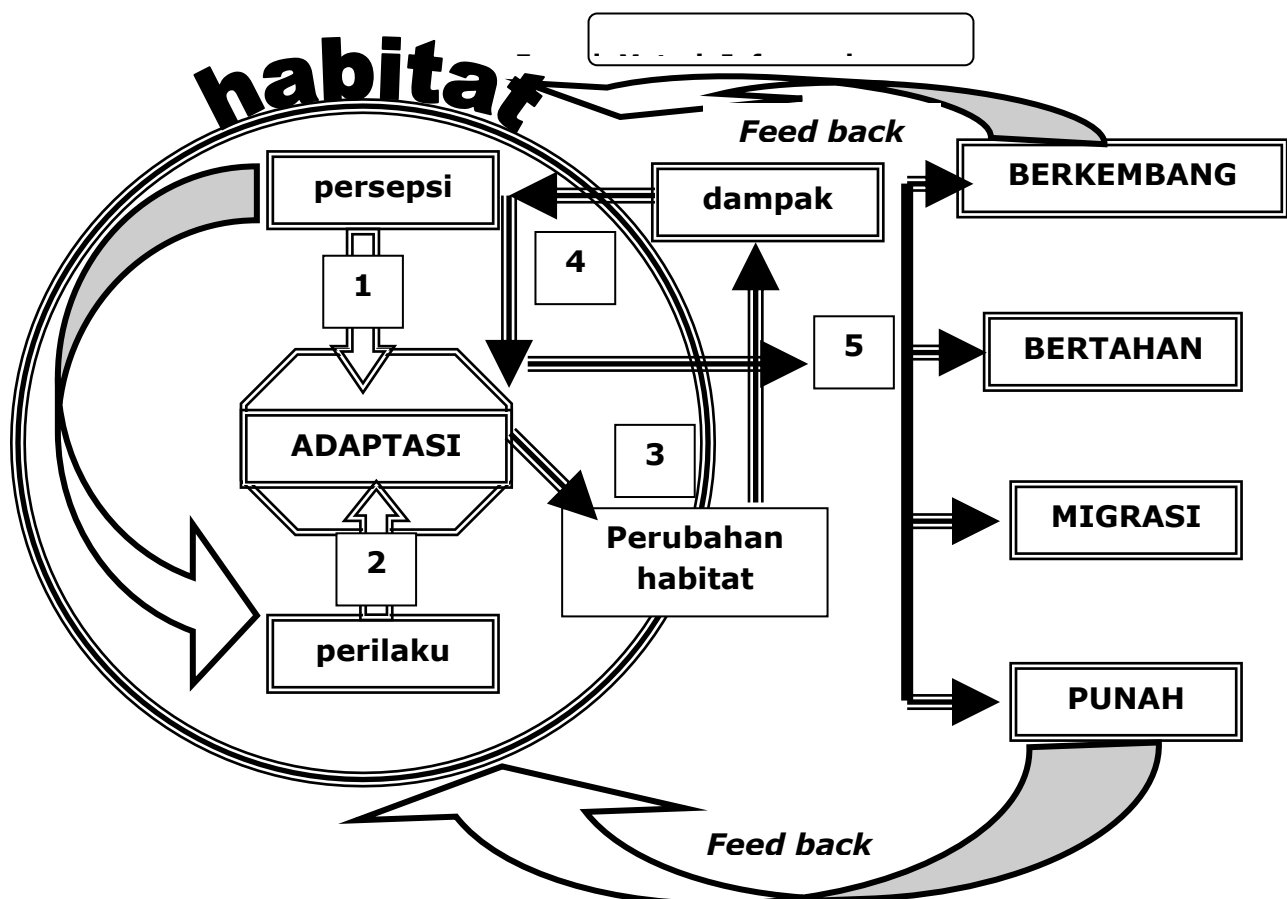
Terakhir dikembangkan dialektis ekologi Islam yang mencoba menjelaskan internalisasi, obyektifikasi dan eksternalisasi (Abdillah, 2001). Internalisasi dilakukan tafsir teoretik terhadap ayat-ayat ekologis yang terdapat dalam Al-Quran. Pengumpulan ayat-ayat lingkungan yang terkait dengan isue lingkungan dikembangkan dengan penalaran ekologis. Kemudian obyektivikasi dilakukan dengan tafsir ekologis yang didasarkan pada disiplin ekologi. Pada taraf eksternalisasi dilakukan generalisasi atau teorisasi konsep agama yang berwawasan Islam. Masuknya agama ke dalam telaah keilmuan ini menandai adanya perubahan orientasi keilmuan atau perubahan paradigmatis dari sekuler ke profetik (Cf. Susilo, 2002). Hal ini sejalan dengan apa yang disebut oleh Imam Ghozali sebagai filsafat pendidikan (Rusn, 2001).

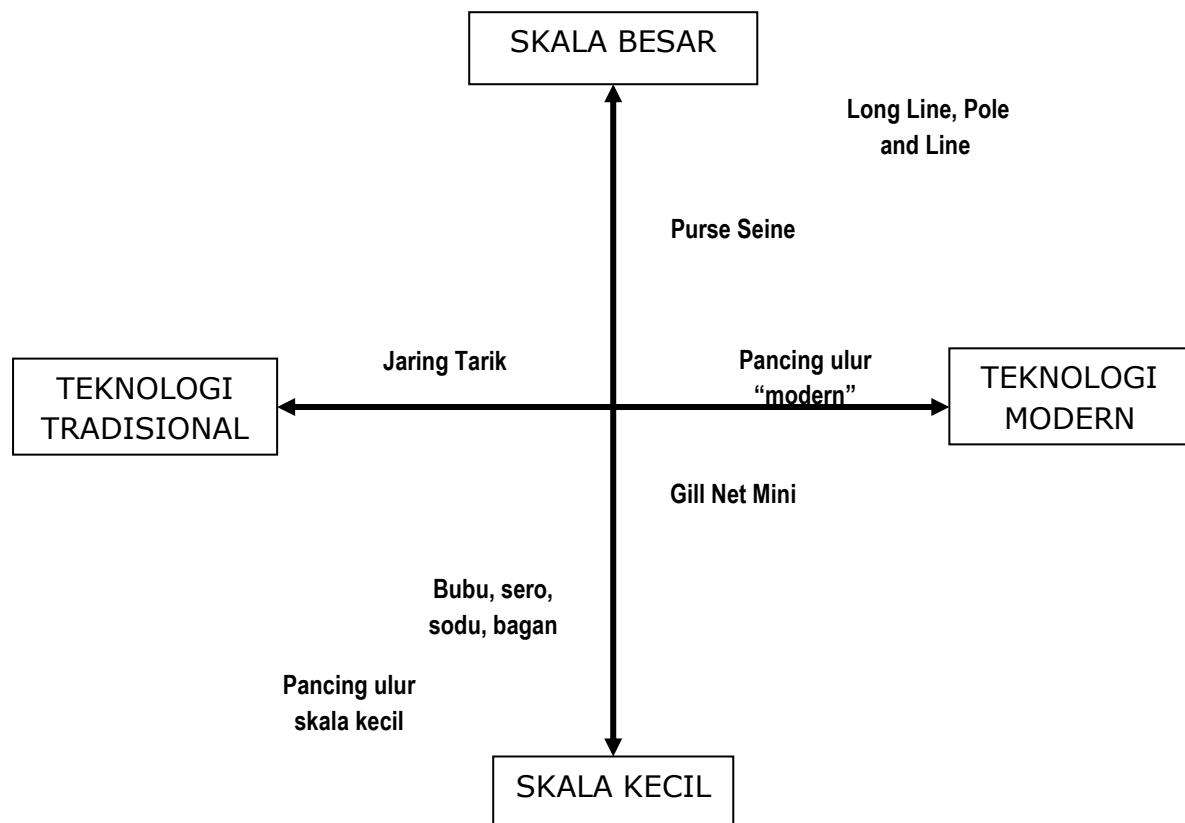
Kajian lebih lanjut tentang adaptasi ini dikembangkan sebagai upaya sadar manusia di dalam mengelola lingkungan. Perilaku dalam pengelolaan sumberdaya berdampak pada perubahan lingkungan. Kemampuan beradaptasi manusia berbeda sesuai dengan daya yang dimiliki, sehingga dampak perubahan tersebut dapat menyebabkan kelompok manusia terbagi menjadi empat kategori, yaitu (a) manusia yang mampu berkembang, (b) manusia yang tetap bertahan, (c) manusia yang memilih berpindah, dan (d) manusia yang punah atau hidup dalam kesulitan. Konsep pemikiran ini disajikan pada Gambar 3.

2.3.Tahapan Evolusi Masyarakat Nelayan di Indonesia

Salah satu kerangka analisis³ untuk melihat tahapan evolusi masyarakat nelayan adalah dengan mengamati pada perubahan penggunaan teknologi alat tangkap maupun pada sistem produksi budidaya perikanan. Kerangka ini disusun untuk membuat peta teknologi alat tangkap. Pemetaan menggunakan dua dimensi usaha penangkapan ikan, yaitu adanya dikotomi penggunaan teknologi yang tradisional dengan modern, dan kedua dikotomi skala usaha, yaitu yang kecil dan besar. Berbagai alat tangkap dapat diletakkan pada posisi tertentu tergantung pada paduan antara teknologi yang digunakan dengan skala usahanya. Alat tangkap pancing ulur sederhana, dengan perahu ukuran panjang 4 meter, menggunakan tenaga penggerak dayung, yang dioperasikan di kawasan Teluk Prigi berada pada kuadran IV. Sementara untuk jaring tarik menempati pada perpaduan antara kuadran IV dan kuadran I, sebab walau menggunakan teknologi sederhana namun skala usaha relatif sedang. Alat tangkap purse seine, yang menggunakan teknologi modern dengan skala yang relatif besar, berada dalam kuadran II. Gambaran dari kerangka analisis tersebut disajikan pada Gambar 4.

Berdasarkan kerangka analisis adaptasi ini, maka akan memberikan suatu pemahaman bahwa tahapan evolusi dalam perikanan tangkap di Indonesia memberikan informasi bahwa semua tahapan evolusi masih ada dalam kehidupan nyata. Hal demikian ini akan memberikan konsekuensi kepada jenis kebijakan pembangunan perikanan sebagai sebuah perubahansosial yang direncanakan, harus didasarkan pada kondisi pluralitas masyarakat. Jika tidak demikian, dan masyarakat nelayan di anggap homogen, maka akan memberikan arah kebijakan yang mungkin kurang tepat. Di sinilah sebenarnya kajian evolusi dan tingkatan adaptasi masyarakat perlu diperhatikan.





Gambar 4. Kerangka Analisis Tahapan Evolusi Perikanan Tangkap

REFERENSI

- Abdillah, Mujiono. 2001. Agama Ramah Lingkungan: Perspektif Al-Quran. Paramadina, Jakarta
- Appelbaum, Richard P. 1970. Theories of Social Change. Markam Publishing Company, Chicago
- Beckmann, F.V. Benda dan Keebat V. 2001. Sumberdaya Alam dan Jaminan Sosial. Pustaka Pelajar. Yogyakarta
- Brown, Lester R, 1992, Hari Keduapuluh Sembilan. Erlangga. Jakarta. Prakata, Bab I, II dan III
- Geertz, Clifford. 1983. Involusi Pertanian: Proses Perubahan Ekologi di Indonesia. Bina aksara. Jakarta
- Hawley, Amos H. 1950. Human Ecology; A Theory of Community Structure. The Ronald Press. Company. Newyork
- Ismawan, Indra. 1999. Risiko Ekologis di Balik Pertumbuhan Ekonomi. Media Pressindo. Yogyakarta
- Koentjaraningrat, 1985. Beberapa Pokok Antropologi Sosial. Dian Rakyat. Jakarta. Bab I dan II
- Moran, Emilio F., 1982. Human Adaptability: An Introduction to Ecological Anthoropology. Westview Press. Inc
- Nuitja, I Nyoman S., 1992. "Ekologi Kelautan: Suatu tantangan Besar Negara Bahari" dalam Analisis CSIS. Tahun XXI. No. 6. Nov-Des. Halaman: 514-523
- Rambo, A. Terry. 1985. Applied Human Ecology Research on Asian Agricultural System. East West and Policy Institute. Honolulu. Hawaii

- Salim, Emil, 1992, "Kesinambungan dengan Pembaharuan" dalam ANALISIS CSIS, Tahun XXI. No. 6. Nov-Des. Halaman:489-497
- Simarmata Dj., A., 1992, "instrumen Ekonomi dalam Penegelolaan Pencemaran Lingkungan" dalam ANALISIS CSIS, Tahun XXI. No. 6. Nov-Des. Halaman:535-547
- Soemarwoto, Otto. 1991. Ekologi, Lingkungan Hidup dan Pembangunan. Penerbit Djambatan. Jakarta
- Sukadana. A. Adi. 1983. Antropo-Ekologi. Airlangga University Press. Surabaya
- Susilo, Edi dan Rachmad Safaat. 2002. "Konflik Hukum di Sektor Kelautan dan Perikanan: Suatu Kajian Substansi Hukum", Makalah disampaikan pada Diskusi dengan Nelayan Pantai Utara dan Selatan Jawa Timur dalam menyikapi Kebijakan Pembangunan Perikanan di Griya Sakinah, Jawa Timur 30 April-2 Mei 2002, Yang diselenggarakan oleh Lembaga bantuan Hukum Surabaya
- Susilo, Edi. 1986. "Nelayan di Antara Tengkulak dan Tempat Pelelangan Ikan: Suatu Kajian Teoritik", Makalah disampaikan dalam Seminar Nasional Ilmu Sosia, 15-19 Desember 1986 di Ujung Pandang.
- Susilo, Edi. Et al. 2005. Peningkatan Daya Adaptasi Manusia Pada Lingkungan yang Sedang Berubah Cepat dan Multidimensional (Kasus pada Masyarakat Nelayan Tradisional. Draft Laporan Tiga Tahun RUKK (IV, 1,2,3) Tahun Anggaran 2003-2005. Pusat Penelitian Ilmu Sosial Lembaga Penelitian Universitas Brawijaya Malang.
- Sztompka, Piotr. 2005 Sosiologi Perubahan Sosial. Prenada Media. Jakarta.

PROPAGASI

E. Latihan dan Diskusi (Propagasi vertical dan Horizontal)

4. Buatlah kerangka berfikir tentang evolusi sesuai dengan pemahaman yang Anda miliki setelah mengikuti membaca modul tentang evolusi sosio budaya

F. Pertanyaan (Evaluasi mandiri)

4. What is classic evolution?
5. What is neo-evolution?
6. What is neo-evolution in cultural anthropology?
7. What is classic evolution?
8. How to make analog between evolution of biology and sociology?

G. QUIZ -mutiple choice (Evaluasi)

H. PROYEK (Eksplorasi entrepreneurship, penerapan topic bahasan pada dunia nyata)



SOSIOLOGI PERIKANAN:

Etika Subsistensi

Dr. Ir. Edi Susilo, MS., Riski A. L., S.Pi.

Agribisnis Perikanan, SEPK, FPIK, Universitas Brawijaya

Email : olisuside@yahoo.com



3. ETIKA SUBSISTENSI

3.1 Etika Subsistensi dan Kehidupan Nelayan

3.2 Subsistensi dan Eksploitasi dalam Masyarakat Nelayan

3.3 *Patron-Client*, Jaminan Subsistensi dan Pembangunan Perikanan

3.3.1 Kebijakan Pembangunan Perikanan dari Masa Ke Masa

3.3.2 Eksistensi *Patron Client* Dalam

3.3.3 Refleksi Sosiologis *Patron-client Relationship*

MODUL

3

SELF-PROPAGATING ENTREPRENEURIAL EDUCATION DEVELOPMENT

3. ETIKA SUBSISTENSI

3.1. Etika Subsistensi dan Kehidupan Nelayan

Kita sering menyebut kata etika yang pada umumnya disamakan dengan moral. Secara lebih rinci etika adalah disiplin ilmu yang berbicara mengenai norma dan kaidah moral yang mengatur perilaku manusia dalam berhubungan dengan alam serta nilai dan prinsip moral yang menjiwai perilaku manusia dalam berhubungan dengan alam tersebut (Keraf, 2002). Etika, yang berasal dari bahasa Yunani yaitu "ethos" yang berarti "adat-istiadat" atau "kebiasaan" yang serba baik dalam kehidupan, disosialisasikan antar generasi, ada perintah dan larangan, dalam bentuk kaidah norma. Etika dipahami memiliki pengertian yang lebih luas daripada moralitas. Etika merupakan refleksi kritis bagaimana manusia harus hidup dan bertindak dalam situasi kongkrit, situasi khusus tertentu. Etika adalah filsafat moral, atau ilmu yang membahas dan mengkaji secara kritis persoalan benar dan salah secara moral, tentang bagaimana harus bertindak dalam situasi kongkret. Kemudian Keraf menyampaikan adanya tiga etika, yaitu: (1) Etika Deontologi: (Deon = kewajiban). Bagaimana harus bertindak? Pada prinsip deontologi maka didasarkan pada melakukan apa yang menjadi kewajiban manusia sebagaimana terungkap dalam norma dan nilai-nilai moral. (2) Etika Teleologi: (Telos = tujuan). Berdasarkan kaidah ini maka manusia diharuskan untuk memilih tindakan yang membawa akibat baik. Paham ini juga disebut sebagai utilitarian, yang mengarah bagi kebaikan atau keuntungan sebagian besar orang. Tindakan diatur dalam azas manfaat, yaitu sebagai manfaat terbesar, dan manfaat terbesar itu ditujukan bagi sebagian besar orang. (3) Etika Keutamaan, yaitu yang mengutamakan pengembangan karakter moral pada setiap diri orang. Manusia diharuskan selalu meneladani moral baik, seperti: kesetiaan, saling percaya, kejujuran, kesediaan berkorban, kasih sayang, kemurahan hati, ---- kesabaran, keikhlasan (tambahan), dalam semua situasi.

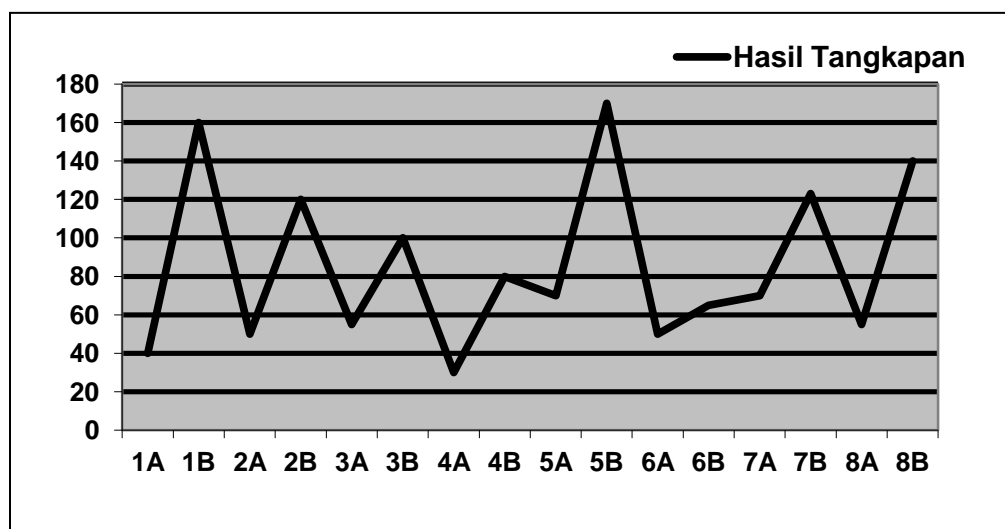


Masih berbicara tentang etika, maka menurut Asya'rie (2002) etika adalah cabang filsafat yang mencari hakekat nilai-nilai baik dan jahat yang berkaitan dengan perbuatan dan tindakan seseorang, yang dilakukan dengan penuh kesadaran berdasarkan pertimbangan pemikirannya. Persoalan etika adalah persoalan yang berhubungan dengan eksistensi manusia, dalam segala aspeknya (individu maupun masyarakat, hubungannya dengan Tuhan, dengan sesama manusia dan dirinya, maupun dengan alam sekitarnya), baik dalam kaitannya dengan eksistensi manusia di bidang sosial, ekonomi, politik, budaya dan agama.

Oleh karena itu etika adalah sebuah pedoman yang seharusnya digunakan acuan untuk berpikir, berkata dan bertindak oleh manusia, baik dalam rangka berhubungan dengan dirinya sendiri, dengan sesama manusia, dengan Tuhan dan dengan alam sekitarnya. Etika dilakukan dengan penuh kesadaran, dan selalu mengajak untuk memilih hal-hal yang baik dari serangkaian pilihan yang ada.

Apakah yang dimaksud dengan etika subsistensi? Scott (1983) menyatakan bahwa perilaku ekonomis yang khas dari keluarga petani yang berorientasi subsistensi merupakan akibat dari kenyataan bahwa, berbeda dengan suatu perusahaan kapitalis, ia sekaligus merupakan satu unit konsumsi dan unit produksi. Mereka yang hidup di dekat batas subsistensi, maka pilihan tindakannya adalah sebuah rasa aman jangka pendek daripada mencari keuntungan yang lebih besar berjangka panjang. Menuju tindakan rasa aman, dengan melakukan "*self exploitation*"⁴ atau melakukan eksploitasi diri dengan memperoleh imbalan yang sangat rendah; atau melakukan "*hunger rent*" yaitu dengan seringkali berani membayar harga yang sangat tinggi untuk tanah. Tindakan tersebut dianggap tidak masuk akal, namun harus dilakukan petani untuk mempertahankan batas subsistensinya.

Scott menyatakan prinsip "*the savety first*" atau dahulukan selamat yang dikenalkan oleh James Roumasset sebagai ekonomi subsistensi. Penjelasan ini menggunakan sebuah kurva fluktuasi penghasilan petani dengan membandingkan dengan kebutuhan subsistensi. Jika kebutuhan minimal keluarga petani adalah sejumlah 80 keranjang padi atau setara dengan 50 keranjang ikan, maka gambaran batas subsistensi tersebut adalah sebagai berikut (Gambar 5).



Gambar 5. Batas subsistensi (disederhanakan dari Scott, 1983:24)

Kebutuhan subsistensi ini dalam masyarakat pada umumnya adalah merupakan sebuah kebutuhan fisik minimum (KFM) atau kebutuhan pokok keluarga (KPK) atau bisa juga disamakan dengan upah minimum regional (UMR) yang kisaran besarnya mengacu kepada kebutuhan pokok untuk mampu bertahan hidup. Nilai subsistensi untuk keluarga yang tidak langsung menghasilkan pangan (beras), berubah sesuai dengan harga yang berlaku, karena itu bersifat dinamis. Angka 80⁵ adalah sebuah batas, di mana kalau kebutuhan tersebut tidak terpenuhi, maka keluarga nelayan akan mengalami gangguan secara fisiologis dan mengalami kondisi gizi buruk. Oleh karena itu menjadi sangat rasional kalau petani melakukan tindakan "dahulukan selamat", yang oleh banyak pihak disebut perilaku irasional. Karena itu menjadi wajar kalau ada pepatah Orang Jawa yang mengatakan "alon-alon waton kelakon", yang mengajak untuk bersikap hati-hati. Dengan demikian menjadi semakin jelas bahwa menurut Scott, subsistensi merupakan sebuah tuntutan moral.

3.2. Subsistensi dan Eksploitasi dalam Masyarakat Nelayan

Jika subsistensi merupakan sebuah tuntutan moral yang harus diberikan oleh lapisan atas masyarakat kepada lapisan bawah, apakah tindakan pemilik modal untuk mengatur sistem bagi hasil ataupun menetapkan harga beli ikan saat nelayan menjual kepada mereka dapat mengarah kepada tindakan eksploitatif? Berkaitan dengan kajian ini Susilo (1986) telah mencoba melakukan analisis hubungan sosial ini untuk melakukan analisis hubungan antara tengkulak dengan nelayan. Dari analisis analogis pada tulisan Scott (1983) tentang hubungan antara penyewa dan tuan tanah, dan menggunakan analisis analogi lainnya tentang hubungan piramida makanan dalam kaitannya dengan perilaku binatang perairan yang ditulis oleh Davis (1955) maka batas subsistensi kemudian diarahkan untuk menuju pada sebuah peluang terjadinya hubungan sosial yang tidak "self exploitation", tetapi merupakan hubungan sosial yang benar-benar eksploitatif.

Dalam arti luas perikanan adalah bagian dari pertanian, tetapi bila dilihat dari sistem matapencahariaannya antara nelayan (*fishing*) dan petani (*agriculture*) menunjukkan perbedaan. Scott menganalisis eksploitasi dalam hubungan antara tuan tanah dengan penyewa. Pada telaah ini analisis tersebut dipergunakan untuk membahas hubungan antara pedagang ikan dengan nelayan.

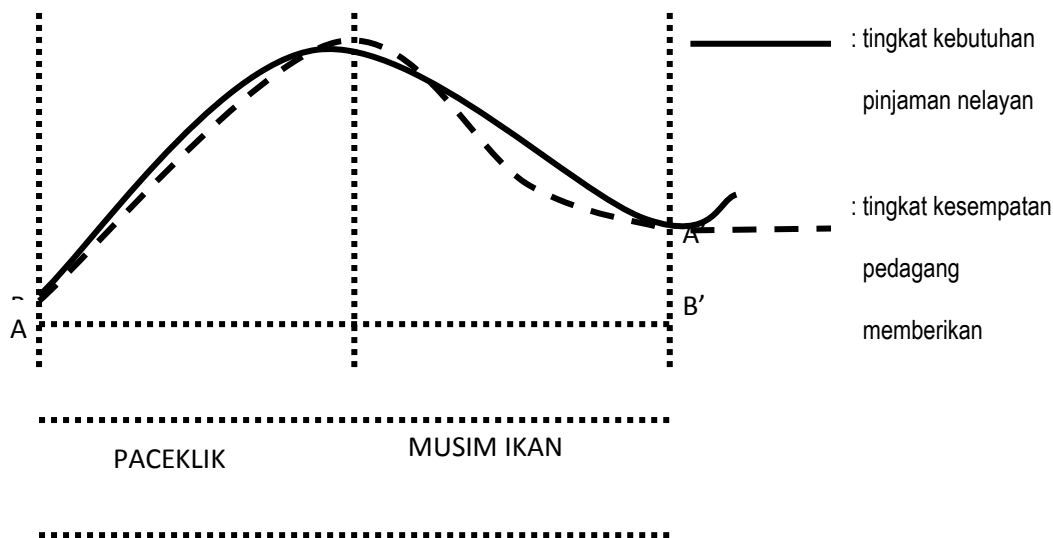
Sesuatu yang identik antara hubungan (nelayan ↔ pedagang ikan) dengan (penyewa ↔ tuan tanah), adalah pada perbedaan pemilikan faktor-faktor produksi. Tuan tanah memiliki tanah dan modal yang lebih besar daripada penyewa, sedangkan pedagang ikan memiliki modal dan alat tangkap yang lebih besar daripada nelayan. Menurut Scott (1983) selama hubungan sosial terjadi antara orang-orang yang tidak sama kuat, maka ada kemungkinan hubungan itu berat sebelah.

Hubungan antara nelayan dengan pedagang ikan dimulai dari transaksi jual-beli yang dilakukan pedagang ikan (Susilowati, 1983). Harga beli yang terjadi hampir selalu lebih rendah daripada harga pasar, di samping itu pedagang yang meminjamkan uang kepada nelayan juga menarik bunga pinjaman. Pedagang ikan mendapatkan dua keuntungan: pertama, diperoleh dari laba atas harga beli yang lebih rendah daripada harga pasar; dan, kedua, penarikan bunga yang tinggi atas pinjaman yang diberikan (Partadiredja, 1982). Keuntungan pedagang ikan diperoleh dari 'kerugian' yang diderita nelayan. Menurut Scott (1983), dalam suatu tata hubungan perorangan atau kelompok, bila salah satu pihak menarik keuntungan atas kerugian orang lain, maka memungkinkan hubungan tersebut bersifat eksploitatif.

Berdasarkan pemikiran tersebut di atas maka Susilo (1986) melakukan analisis terhadap adanya fase-fase hubungan sosial eksploitatif, yang secara rinci adalah sebagai berikut.

Fase I : Kondisi kehidupan nelayan yang penuh 'ketidakpastian' perolehan hasil tangkap mengidentikkan mereka pada suatu posisi siap untuk 'dimangsa' oleh pedagang. Semakin lama terdapat peningkatan ketergantungan nelayan kepada pedagang.

Peningkatan ketergantungan dapat dilihat pada Gambar 6:



Gambar 6. Tingkat ketergantungan nelayan pada pedagang ikan

Pada fase ini dimungkinkan terjadi suatu hubungan antara orang-orang yang ingin mempertahankan hidupnya (sebagai hak atas subsistensi) dari pemberian bantuan dengan orang yang menarik keuntungan atas bantuan yang diberikan. Hubungan tersebut bersifat mutualisme. Kebutuhan pinjaman nelayan semakin meningkat di musim paceklik dan diikuti oleh kenaikan kesempatan pedagang ikan memberikan pinjaman kepada nelayan. Sebaliknya kebutuhan pinjaman nelayan menurun di musim ikan, begitu pula diikuti oleh menurunnya tingkat kesempatan pedagang ikan.

Berdasarkan pada Gambar 6, dalam periode waktu berikut, tingkat kebutuhan pinjaman nelayan tidak bisa kembali pada titik B', tetapi berada pada titik A', demikian pula yang terjadi pada tingkat kesempatan pedagang ikan. Garis AB adalah suatu keadaan atau peningkatan ketergantungan nelayan pada pedagang ikan (bandingkan pula dengan Gambar 7 di halaman berikut).

Fase II : Suatu ketergantungan tingkat awal, pedagang ikan mendapat peluang untuk melakukan perjanjian-perjanjian jual beli yang kurang adil. Agar nelayan merasakan hal itu sebagai sesuatu perjanjian yang adil, maka perjanjiannya masih memerlukan persetujuan dari nelayan. Pada fase ini nelayan masih merasakan bahwa kehadiran pedagang ikan memang diperlukan dalam kehidupan mereka.

Jika nelayan tidak menyetujui perjanjian yang ditawarkan oleh pedagang ikan, maka ia akan mencari sumber pinjaman dari pihak lain. Oleh karena itu perjanjian mengenai harga beli dan bunga pinjaman belum bersifat eksploitatif. Harga ikan dapat sama atau sedikit lebih rendah dari harga pasar dan bunga pinjaman masih relatif rendah.

Persetujuan nelayan pada fase ini masih dapat disebut sebagai persetujuan dalam arti yang sesungguhnya, bukan sebagai keterpaksaan, karena masih memenuhi criteria tentang keadilan (lihat Scott, 1983: 244-249). Perjanjian itu belum mengancam taraf hidupnya, sehingga nelayan belum atau tidak 'berpaling' kepada sumber pinjaman lain. Nelayan masih merasakan kesepadanan pertukaran itu sebagai harga yang adil, sehingga ia menerima tata hubungan tersebut (lihat Gambar 7).

Fase III : Karena nelayan tidak merasa dieksploitasi, maka pedagang ikan semakin leluasa untuk melakukan perjanjian jula-beli semakin lebih tidak adil, atau ia berusaha supaya tidak terjadi pelunasan pinjaman. Keadaan ini menyebabkan nelayan berada pada tingkat ketergantungan yang lebih tinggi. Pada fase ini justru nelayan enggan untuk memutuskan hubungan, suatu keadaan yang tercipta bagi pedagang ikan untuk memperkokoh posisinya. Kedudukan pedagang ikan yang diperkokoh itu memungkinkan eksploitasi lebih mendalam. Walaupun nelayan sebenarnya merasakan ketidakadilan tersebut, tetapi ia sudah tidak kuasa untuk menghindari.

Pada fase ini sebenarnya sulit untuk dikatakan lebih tidak adil daripada fase sebelumnya, namun yang jelas ada peningkatan perjanjian lebih tinggi dari fase II. Masalah yang muncul, mengapa nelayan juga mengharap memperkokoh hubungan itu? Dalam fase ini nelayan terpaksa menerima perjanjian tersebut, walaupun pertukaran semakin tidak seimbang; nelayan tunduk pada kekuasaan pedagang ikan. Sebagaimana disebut oleh Scott (1983), bahwa bila reipsiprositas membaik maka status elit diterima dengan ikhlas dan sikap hormat, kebalikan dari hal itu ia bukan memberikan penghormatan, melainkan tunduk atau patuh kepada elit.

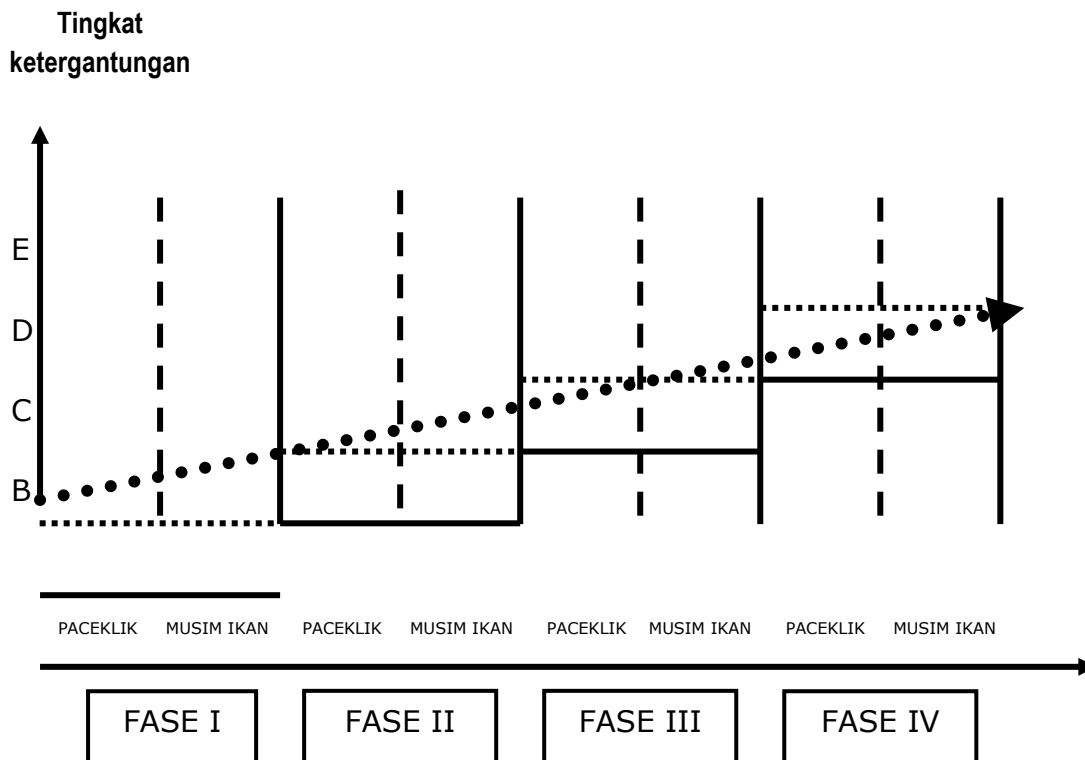
Hak atas subsistensi adalah penentu kewajiban timbal balik yang utama, sebagai kewajiban minimal kaum elit (Scott, 1983). Bagaimana kalau pertukaran semakin merugikan nelayan dan telah mengancam pada batas subsistensinya? Nelayan mungkin tidak dapat menuntut kewajiban kepada pedagang ikan, karena kewajiban atas hal itu menurut nelayan bukan sebagai tanggung jawab pedagang ikan, tetapi sebagai kewajiban alam (laut) untuk menyediakan ikan lebih banyak.

Apa yang dapat dituntut (baca: diharap) nelayan adalah penambahan pinjaman atau penundaan pembayaran, walaupun mungkin dengan bunga pinjaman yang lebih tinggi. Keadaan itu mungkin lebih baik bagi nelayan, sehingga ia mengambil keputusan: lebih baik berada dalam ketergantungan namun terjamin daripada bebas tanpa jaminan (Scott, 1983). Dalam hal ini tidak berarti tidak ada alternatif pinjaman dari pihak lain, seperti Bank atau KUD, namun tidak begitu mudah bagi nelayan untuk segera memperolehnya. Prosedur peminjaman dan pembayaran sistem pedagang ikan lebih 'luwes' jika dibandingkan dengan badan kredit formal. Demikian pula ada faktor penghambat bagi nelayan adalah perbedaan sosial antara petugas badan kredit formal dengan peminjam (Partadiredja, 1982; Bailey, 1983; Kern. 1986) (lihat Gambar 7).

Fase IV : Pedagang ikan dapat dengan mudah melakukan perjanjian-perjanjian tanpa harus melalui persetujuan dari nelayan. Nelayan harus tunduk pada kekuasaan itu, dan ia akan memenuhi hampir segala permintaan pedagang ikan, termasuk permintaan hanya menjual ikan atau meminjam uang hanya pada pedagang ikan bersangkutan.

Memang tidak mudah untuk mengatakan bahwa telah terjadi eksploitasi terhadap nelayan oleh pedagang ikan, tetapi jika fase IV ini benar-benar terjadi, maka sulit juga untuk tidak mengatakan bahwa telah terjadi eksploitasi. Agar ada criteria pelengkap analisis ini, maka disarankan menggunakan ukuran yang 'obyektif', misal perbandingan antar aturan jual beli

nelayan dengan pedagang ikan dengan jual beli antara nelayan dengan bukan pedagang ikan. Sebagai contoh, jika harga beli pedagang ikan lebih rendah dari harga pasar dan nelayan merasa keberatan, tetapi ia masih menerima juga aturan itu, maka berarti ada gejala eksploitasi (lihat pada Gambar 7).



Gambar 7. Peningkatan Ketergantungan Nelayan Kepada Pedagang Ikan Secara Hipotetik

3.3 Patron-Client, Jaminan Subsistensi dan Pembangunan Perikanan

Banyak penulis yang selalu mengidentikkan antara nelayan dengan kemiskinan (misal Mubyarto, *et al*, 1984, Soedjatmoko, 1985, Suaibi, 2005), meskipun dalam kenyataan tidak selalu demikian. Memang, paling tidak dalam masyarakat nelayan ada dua lapisan masyarakat, yaitu lapisan atas yang serba berkecukupan dan lapisan bawah yang selalu hidup dalam kekurangan. Bisa jadi bentuk struktur pelapisan ini menyerupai piramida terbalik, dengan bagian atas ditempati oleh lapisan atas masyarakat. Namun berapa persentasenya saya belum memperoleh data yang pasti. Rupanya ada keragaman dalam wilayah yang berbeda, dengan penyebab keberagaman yang bermacam-macam pula.

Satria (2002) menyatakan bahwa hubungan *patron-client* merupakan ciri struktur sosial dalam masyarakat pesisir. Pola hubungan ini terjadi sebagai konsekuensi logis dari adanya ketidakpastian dan resiko tinggi dalam melakukan penangkapan ikan. Mereka memerlukan jaminan sosial dalam kehidupannya. Pranadji (1995) menyatakan bahwa *patron-client* merupakan sebuah kelembagaan yang mampu memberikan jaminan ketimpangan sosial-budaya yang disebabkan oleh adanya modernisasi dalam perikanan tangkap. *Patron-client* kemudian disebutnya sebagai sebuah bentuk kemitraan tradisional.

Beberapa pertanyaan dalam kaitannya dengan hubungan *patron-client* ini minimal ada dua, yaitu: pertama apakah masih dapat berkembang dan memiliki fungsi sosial bagi kehidupan masyarakat nelayan? Kedua, ketika hubungan sosial ini diberi stigma sebagai

hubungan sosial yang merugikan lapisan bawah, apakah arah kebijakan pembangunan perikanan yang ingin memutus rantai hubungan sosial *patron-client* tersebut dapat terwujud?

3.3.1 Kebijakan Pembangunan Perikanan dari Masa Ke Masa

Telaah ini akan menggambarkan sebuah perubahan kelembagaan yang dimulai pada masa penjajahan Belanda sampai dibentuknya sebuah departemen yang khusus menangani masalah perikanan. Kemudian akan diuraikan tentang kronologi substansial pembangunan perikanan.

(a) Kelembagaan yang Menangani Pembangunan Perikanan

Jika kita merujuk kepada sebuah perjalanan sejarah, maka paling tidak perkembangan pembangunan kelautan dan kelembagaan di Indonesia dapat dibedakan menjadi dua periode besar (Kusumastanto, 2003). **Pertama**, adalah masa antara tahun 1850 s/d 1966, yaitu pada masa penjajahan Belanda hingga akhir Orde Lama. Pada masa penjajahan, kelembagaan yang menangani bidang perikanan berada dalam lingkup Departemen van Landbow, Nijverheid en Handel, yang kemudian berubah menjadi Departemen van Economische Zaken. Pada saat itu kegiatan perikanan dimasukkan ke dalam kegiatan pertanian.

Pada masa penjajahan Jepang. Meskipun departemen berganti nama, namun tidak mengubah perannya dalam pembangunan perikanan. Setelah proklamasi tahun 1945, dalam Departemen Kemakmuran Rakyat dibentuk sebuah Jawatan Perikanan, yang mengurus pembangunan perikanan darat dan laut. Tahun 1948 direstrukturisasi dengan sebuah Pegawai Tinggi Urusan (ada lima buah di bawah Menteri), di mana Jawatan Perikanan menjadi bagian dari Urusan Pertanian dan Kehewanan.

Selama masa tahun 1949, tahun 1951 dan sampai dengan tahun 1957 banyak mengalami perubahan, dan terakhir (1957) dibentuk sebuah Direktorat Perikanan. Pada tahun ini pula kemudian nama direktorat diubah menjadi Jawatan, dan tahun 1962 kembali menjadi nama direktorat. Tahun 1964 dengan kabinet dwikora, maka Departemen Perikanan Darat/Laut tidak lagi di bawah Kompartemen Pertanian dan Agraria, namun di bawah Kompartemen Maritim, sampai dengan tahun 1966.

Kedua, adalah masa antara 1966 s/d 1999, masa orde baru dan masa reformasi. Pada masa 1967-1969 dikenal dengan masa peletakan rencana pembangunan jangka panjang, di mana pada April 1969 mulai dicanangkan sebuah pendekatan trilogi pembangunan, yaitu pertumbuhan ekonomi yang tinggi, stabilitas keamanan nasional dan pemerataan hasil-hasil pembangunan. Pada masa itu sampai dengan tahun 1999 pembangunan perikanan dikoordinasikan oleh Direktorat Jenderal Perikanan di bawah Departemen Pertanian. Pada akhirnya dibentuklah sebuah Departemen Eksplorasi Laut dan Perikanan, yang akhirnya berubah menjadi Departemen Kelautan dan Perikanan.

(b) Kronologi Substansial Pembangunan Perikanan.

Sejak masa tahun 1975 sampai sekarang, paling tidak dapat dilakukan identifikasi kronologis perubahan pendekatan pembangunan perikanan (Susilo, 2005b). **Pertama** adalah pada masa berorientasi produksi (*product oriented*), dimana pemerintah melakukan upaya-upaya meningkatkan produksi perikanan dengan memodernisasi sektor penangkapan ikan. **Kedua**, adalah dengan berusaha menyampaikan produk segar ke konsumen, atau penggunaan pendekatan *cool chain system*. **Ketiga**, melakukan pengembangan kelembagaan atau *institution building*, yang ingin membangun kelembagaan ekonomi dengan melalui pengembangan KUD Mina dan Tempat Pelelengan Ikan (TPI). **Keempat** mengalihkan sektor penangkapan ikan ke sektor budidaya dengan intensifikasi tambak, yang semula gemilang dan kemudian hancur karena tidak mengindahkan aspek lingkungan. **Kelima**, melakukan pendekatan yang menyeluruh dengan menggunakan agribisnis. **Keenam**, karena didorong oleh krisis ekonomi, maka digunakan pendekatan Protekan (Peningkatan ekspor hasil

perikanan) 2003. **Ketujuh**, dengan pendekatan holistik empat dimensi (ekonomi, ekologi, sosial-politik dan kelembagaan).

Selama masa 1975 sampai dengan 2004 tentunya setiap kebijakan yang diimplementasikan akan diberikan respon oleh masyarakat. Salah satu respon yang akan dibahas dalam tulisan ini adalah bagaimana refleksi sosiologis kelembagaan patron-client di dalam menyikapi implementasi kebijakan pemba-ngunan perikanan, terutama ketika pemerintah memberikan fokus kepada pendekatan kelembagaan.

3.3.2. Eksistensi *Patron Client* Dalam Kehidupan Masyarakat Nelayan

Istilah *patron-client* yang dikenalkan oleh Foster (1967) selain digunakan secara luas sebagai ciri dalam masyarakat pedesaan (pertanian sampai ke perikanan), juga digunakan dalam kehidupan politik. Dalam sejarah perkembangan masyarakat pesisir tahun 1850 – 1940 (Masyhuri, 1995) lapisan sosial atas masyarakat yang menentukan arah pergerakan struktur masyarakat pesisir adalah **pachter**, yaitu kelompok pengusaha yang memperoleh lisensi dari Pemerintah Hindia Belanda untuk menarik pajak penangkapan ikan dan memberikan layanan kebutuhan permodalan bagi usaha penangkapan ikan.

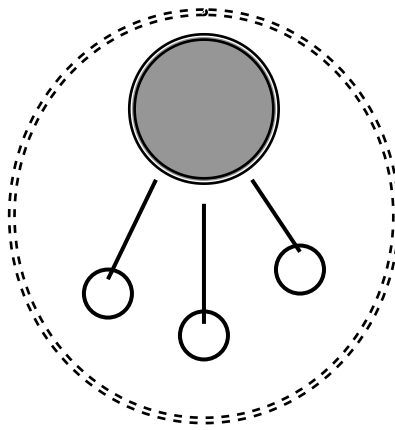
Dalam perkembangan selanjutnya ketika terjadi kemerdekaan Republik Indonesia, maka peranan *pachter* menjadi semakin surut. Lapisan sosial atas masyarakat pesisir kemudian diambil alih oleh para pedagang yang mampu menjamin pasar dan menyediakan alat-alat produksi dan berkembang sampai sekarang. Kajian Susilo *et al* (1997) paling tidak mencatat berbagai istilah *patron-client* di beberapa wilayah memiliki nama yang berbeda, tetapi dengan peran yang sama, yaitu adanya istilah: (a) “bakul-cekelan” di Pacitan, kawasan pantai Selatan Jawa Timur, (b) “pinggawa-sawi”, di Sulawesi, (c) “pengamba’-amba’an”, di Selat Madura Jawa Timur sampai ke Banyuwangi, (d) “Pemapag-papagan”, di Lamongan, pantai Utara Jawa Timur. Istilah *patron* yang paling populer adalah “juragan” atau “tengkulak” atau “taoke”, dan istilah *client*, populer dengan “pendega” atau “buruh”. Jika kita lebih jauh istilah ini mirip dengan apa yang disebut Marx sebagai kaum “borjuis” dan “proletar”.

Berdasarkan adanya pemikiran bahwa hubungan sosial antara pedagang ikan dengan nelayan merupakan sebuah hubungan sosial yang eksploitatif, maka pada tahun 1993 dua penelitian yang didasarkan pada pemikiran ini dilaksanakan untuk membuktikannya di lapang, apakah terjadi hubungan yang eksploitatif atau tidak antara tengkulak dengan nelayan (Setiawan, *et al*, 1993 dan Qoid *et al*, 1993). Ternyata gejala eksploitatif terjadi di dua lokasi riset, yaitu di Lekok (Pasuruan) dan di Muncar (Banyuwangi), sementara untuk kasus di Pacitan, pola hubungan yang ada belum bersifat eksploitatif, justru bersifat sebagai hubungan asuransi sosial dan jaminan pasar bagi nelayan.

3.3.3. Refleksi Sosiologis *Patron-client Relationship*

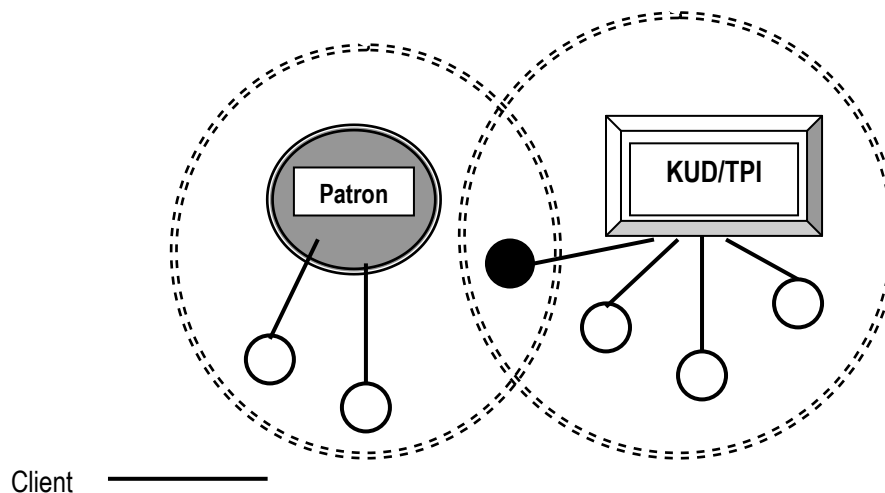
Ketika pemerintah ingin membangun kelembagaan baru dalam masyarakat pesisir, maka patron berusaha untuk melakukan ikatan yang kuat kepada client agar client tidak mengikuti kelembagaan baru, yaitu KUD-Mina dan TPI. Secara berurutan dapat kita lihat reaksi *patron-client* terhadap implementasi pembangunan perikanan.

Pertama, dapat digambarkan adanya hubungan yang harmonis antara *patron* dengan *client*. Kebutuhan permodalan dan jaminan pemasaran hasil tangkapan ikan disediakan oleh *patron*, yang kalau dibuat ilustrasi dapat disampaikan sebagaimana Gambar 8 berikut.



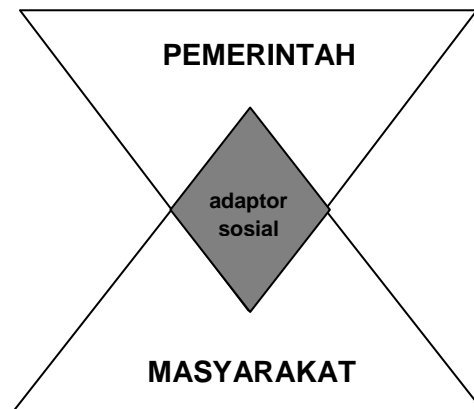
Gambar 8. Hubungan harmonis dalam bentuk *patron-client*.

Kedua, ketika pemerintah melakukan intervensi kelembagaan KUD-Mina yang akan menyediakan sektor permodalan dan TPI untuk menjamin pemasaran, maka akan terjadi pengambilalihan fungsi *patron* dalam masyarakat nelayan. Karena itulah mengapa patron melakukan tindakan ke arah pasar monopsoni yang cenderung bersifat eksploitatif. Penggambaran kondisi tersebut adalah sebagai berikut (Gambar 9). Kondisi pertarungan ini berjalan terus, mungkin sampai sekarang di beberapa wilayah pesisir.



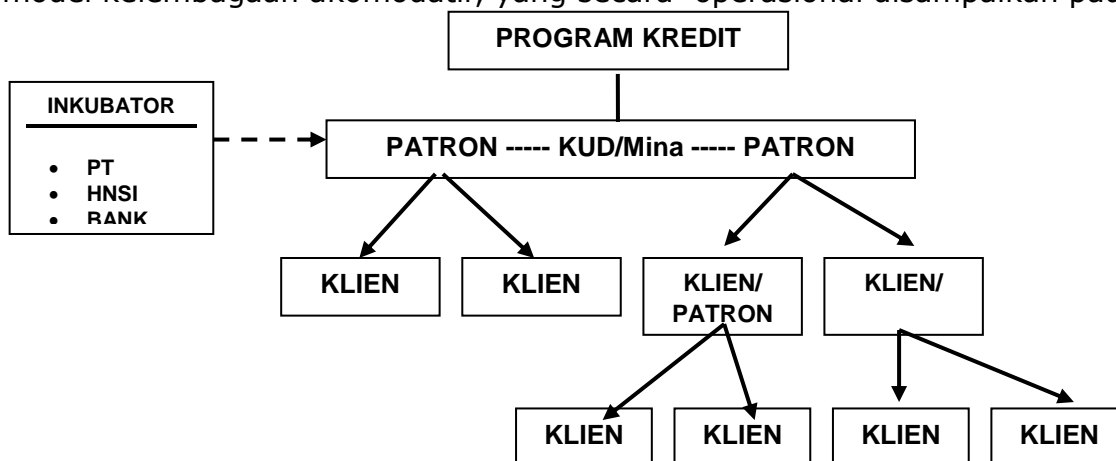
Gambar 9. *Client* akan berpindah dari *patron* ke KUD/TPI

Dengan pertimbangan terjadi suatu kontra struktural dalam masyarakat pantai dan adanya anggaran pemerintah yang telah begitu besar di dalam membangun kelembagaan di kawasan pesisir, maka pada tahun 1996 sampai dengan 1998, (Susilo *et al*, 1996, 1997. 1998) telah melakukan kajian lebih lanjut, yaitu ingin menyambungkan pola hubungan sosial *patron-client* tersebut dengan pengembangan koperasi yang sejak tahun 1980-an dikenalkan oleh pemerintah. Pengkajian ini berusaha menyambungkan dua kutub budaya yang berbeda, yaitu sistem budaya masyarakat dengan sistem intervensi pemerintah. Studi tersebut membentuk sebuah kelembagaan akomodatif⁶ (Gambar 10 dan 11).



Gambar 10. Model Kelembagaan Akomodatif dimodifikasi dari konsep *sodality* yang dikenalkan oleh Tjondonegoro (1985), yang disederhanakan oleh Ndraha (1987) dan disebut sebagai simpul sosiobudaya oleh Rachman (1988). Saya mempopulerkan istilah ini menjadi adaptor sosial (Susilo, 2004).

Operasionalisasi dari kelembagaan ini adalah berusaha menyatukan mekanisme simpan pinjam dalam Unit Simpan Pinjam dari KUD Mina dengan sistem peminjaman model *patron-client*. Unsur positif model *patron-client* (sistem pengendalian piutang) dan unsur positif KUD-Mina (akses perbankan dan kejelasan administrasi keuangan) disatukan dalam model kelembagaan akomodatif, yang secara operasional disampaikan pada Gambar 11.



Gambar 11. Model Operasional Kelembagaan Akomodatif.

Pengembangan kelembagaan ekonomi masyarakat didasarkan kepada bagaimana struktur sosial dibangun dengan melakukan integrasi komponen struktur dari luar dengan komponen struktur yang telah ada di dalam masyarakat. Ibarat seorang petani yang akan menanam sebuah tanaman baru yang diyakini menghasilkan buah yang bagus, maka tanaman tersebut tidak langsung ditanam pada tanah yang terdapat dalam kebun mereka, tetapi dicangkokkan kepada tanaman yang telah secara nyata terbukti mampu tumbuh subur di kebun mereka. Pola pengembangan seperti itulah yang dibangun dalam pembentukan struktur sosial. Oleh karena itu struktur sosial yang dihasilkan merupakan sebuah struktur yang progresif-integratif. Progresif mengandung arti bahwa struktur mampu memberikan ruang yang cukup bagi komponen pembentuk struktur untuk berkembang, dan bersifat integratif, artinya komponen baru mampu berintegrasi dengan struktur yang sudah ada. Upaya ini dapat dikategorikan sebagai langkah meningkatkan kapasitas ruang struktur sosial.

Hubungan patron-client dalam masyarakat pesisir secara sosilogis telah memberikan refleksi terhadap kebijakan pembangunan perikanan. Implementasi pembangunan perikanan dalam masyarakat pesisir telah direspon oleh patron-client dengan memberikan tekanan yang

lebih kuat kepada client agar tidak terlepas dari patron. Terlepasnya hubungan ini akan merugikan secara ekonomi bagi kelangsungan usaha patron, dan juga dari segi status sosial sebagai lapisan atas dalam masyarakat pesisir.

Rupanya dimensi sosiologis ini kurang diperhatikan oleh pengambil keputusan, sehingga berapapun anggaran pemerintah dikeluarkan untuk membangun KUD/TPI selalu belum mencapai keberhasilan yang gemilang. Sampai saat ini aspek permodalan kemungkinan besar dapat didekati dengan model kelembagaan akomodatif yang pernah kami tawarkan sebagaimana pada Gambar 10 di atas. Ujicoba skala kecil di Pacitan dan Lamongan pada tahun 1998 menunjukkan perkembangan yang baik. Berbagai kelembagaan keuangan di pesisir dikembangkan pula oleh Departemen Kelautan dan Perikanan dengan Proyek Pengembangan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP). Demikian pula melalui Proyek *Coastal Community Development and Fisheries Resources Management* (Cofish) telah pula dibentuk lembaga keuangan dalam bentuk Lembaga Keuangan Masyarakat Pesisir (LKMP) (lihat PSWP3K, 2004; Susilo dan Supriyadi, 2005). Khusus untuk pengembangan kegiatan wanita nelayan pemerintah telah mendorong pula dibentuknya Peningkatan Peran Wanita Tani dan Nelayan (P2WTN). Kasus di Prigi, Trenggalek juga didirikan sebuah koperasi yang terdiri dari para pedagang dan nelayan dengan nama Koperasi Bakul Nelayan (KBN). Para nelayan purse seine juga membangun sebuah asosiasi yang kemudian diformalkan menjadi sebuah koperasi yang bernama Koperasi Mina Pantai Prigi (SINATI). Selain itu, sejak tahun 2003 masyarakat nelayan di Prigi juga mampu mendirikan sebuah koperasi yang bernama Pantai Prigi Credit Union (PPCU).

Khusus untuk TPI rupanya pemerintah belum menemukan cara yang lebih baik, atau sedang mengalami jalan buntu. Berbagai pemerintah daerah menggunakan cara paksa melakukan lelang dengan mengeluarkan peraturan daerah. Studi yang dilakukan Beba (2006) akan mempelajari mengapa ada TPI di Jawa Tengah bisa berjalan dengan baik, sementara di Jawa Timur tidak bisa demikian.

Dengan demikian sebenarnya bagi masyarakat nelayan apa pun bentuk pembangunan yang akan dirancang oleh pemerintah, selama tidak mengancam batas subsistensinya, maka mereka akan dapat menerimanya. Oleh karena itu kejelian perencana pembangunan di dalam memahami dan mengetahui batas subsistensi ini akan menjadi sebuah informasi dasar yang penting bagi pembangunan masyarakat pesisir. Memang ukuran-ukuran batas subsistensi yang dinamis memerlukan kesamaan atau kesepahaman besarnya, baik yang dihitung berdasarkan perhitungan makro maupun sesuai dengan ukuran-ukuran mikro yang riil dalam kehidupan keseharian masyarakat pesisir.

REFERENSI

- Asya'rie, Musa. 2002. Filsafat Islam: Sunnah Nabi dalam Berfikir. LESFI. Yogyakarta.
- Davis, Charles C. 1956. Marine an Fresh water Plankton. Michigan University Press.
- Foster, George M. 1967. Tzintzuntzan: Mexican Peasant
- Keraf, A. Sonny. 2002. Etika Lingkungan. Penerbit Buku Kompas, Jakarta
- Kusumastanto, Tridoyo. 2003. Oceao Policy dalam Membangun Negara Bahari di era Otonomi Daerah. Gramedia. Jakarta.
- Masyhuri. 1996. Menyisir Pantai Utara: Usaha dan Perekonomian Nelayan di Jawa dan Madura 1850-1940. Yayasan Pustaka Nusantara-Perwakilan KILTV. Jakarta
- Mubyarto, Lukman Sutrisno dan Michel Dove. 1984. Nelayan dan Kemiskinan: Studi Ekonomi Antropologi di Dua Desa Pantai. Rajawali. Jakarta.
- Ndraha, Taliziduhu. 1987. Pembangunan Masyarakat: Mempersiapkan Masyarakat Tinggal Landas. Bina Aksara. Jakarta.
- Pranadji, Tri. 1995. "Gejala Modernisasi dan 'Kritis Budaya' pada Kegiatan Nelayan Tangkap dalam Analisis CSIS. Tahun XXIV. No. 1. Jan-Feb. Hal: 33-43.

- Rachman, Ali N.A. 1989. Dana dan Simpul Sosio Budaya: Kasus Petani dan Nelayan Sukabumi. Mimbar Sosek. Departemen Ilmu Sosial Ekonomi Pertanian. Fakultas Pertanian. Institut Pertanian Bogor.
- Satria, Arif. 2002. Pengantar Sosiologi Masyarakat Pesisir. Cidesindo. Jakarta.
- Setiawan, Edi Susilo dan Abdul Qoid, 1993. Peranan Pedagang dan KUD/TPI dalam Usaha Penangkapan Ikan, Studi Kasus dengan Pendekatan "Ketergantungan" dan Inovasi di Pacitan. Buletin Ilmiah Perikanan. Edisi/2. Hal 61-79. Fakultas Perikanan Universitas Brawijaya.
- Soedjatmoko. 1985. Dimensi Manusia dalam Pembangunan. LP3ES. Jakarta
- Susilo, Edi. 1986. "Nelayan di Antara Tengkulak dan Tempat Pelelangan Ikan: Suatu Kajian Teoritik", Makalah disampaikan dalam Seminar Nasional Ilmu Sosial, 15-19 Desember 1986 di Ujung Pandang.
- Susilo, Edi. Et al. 2005. Peningkatan Daya Adaptasi Manusia Pada Lingkungan yang Sedang Berubah Cepat dan Multidimensional (Kasus pada Masyarakat Nelayan Tradisional. Draft Laporan Tiga Tahun RUKK (IV, 1,2,3) Tahun Anggaran 2003-2005. Pusat Penelitian Ilmu Sosial Lembaga Penelitian Universitas Brawijaya Malang.
- Susilo, Edi. 1997. "Pengembangan Kelembagaan Akomodatif: Sintesis Pengembangan Perikanan untuk Meningkatkan Aksesibilitas Perikanan Rakyat". Makalah Disampaikan Pada Simposium Perikanan Indonesia 2, di Ujung pandang, november 1997.
- Susilo, Edi. 2004. "Aspek Sosekbud Nelayan Pancing dan Nelayan Jaring Tarik di Pantai Prigi, Trenggalek, Jawa Timur" Makalah disampaikan dalam Workshop Rencana Pengelolaan Perikanan Layur 1 di Kediri, 20 – 22 Juli 2004. Bagian Project Cofish Trenggalek
- Tjondronegoro, S.M.P. 1985. "Gejala Organisasi dan Pembangunan Berencana dalam Masyarakat pedesaan Di Jawa", Dalam Koentjaraningrat (ED.), Masalah Masalah Pembangunan: Bunga rampai Antropologi Terapan. LP3ES. Jakarta. Halaman 214-244.

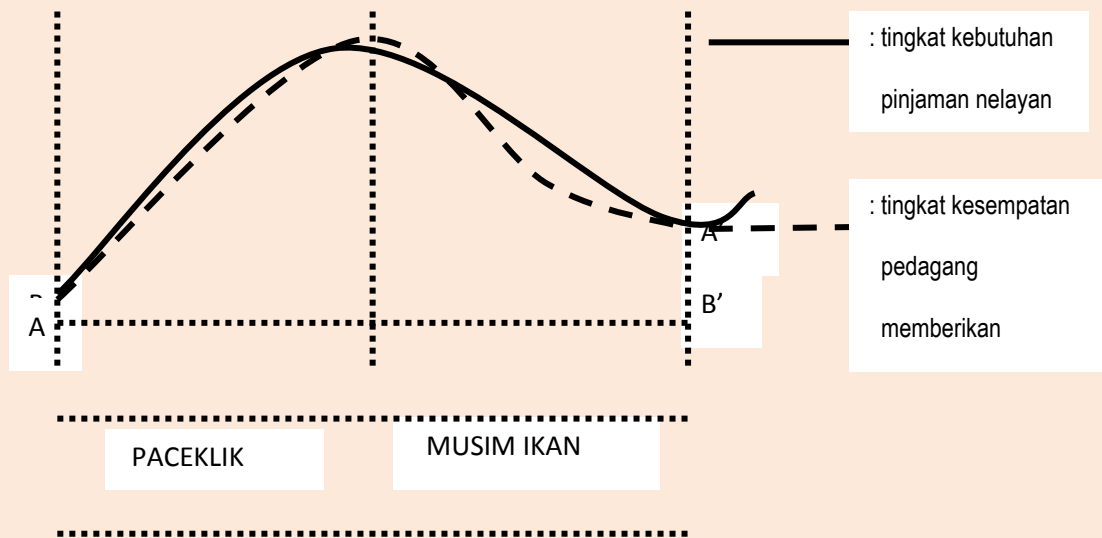
PROPAGASI

I. Latihan dan Diskusi (Propagasi vertical dan Horizontal)

1. Secara berkelompok buatlah sebuah pola pengembangan kelembagaan ekonomi masyarakat didasarkan kepada bagaimana struktur sosial dibangun dengan melakukan integrasi komponen struktur dari luar dengan komponen struktur yang telah ada di dalam masyarakat.
Secara berkelompok presentasikan hasil pembahasan tersebut.

J. Pertanyaan (Evaluasi mandiri)

Buatlah penjelasan sesuai dengan pemahamann Anda dari gambar berikut ini:



K. QUIZ -mutiple choice (Evaluasi)

L. PROYEK (Eksplorasi entrepreneurship, penerapan topic bahasan pada dunia nyata)



SOSIOLOGI PERIKANAN:

Resiprositas, Redistribusi, Exchange Dan Struktur Masyarakat

Dr. Ir. Edi Susilo, MS., Wahyu Handayani, S.Pi.

Agribisnis Perikanan, SEPK, FPIK, Universitas Brawijaya

Email : edisuside@yahoo.com



<p>4. Resiprositas, Redistribusi, Exchange Dan Struktur Masyarakat</p> <p>4.1 Resiprositas, Redistribusi dan Exchange (RRE)</p> <p>4.2 Resiprositas dalam Masyarakat Nelayan Pancing</p> <p>4.3 Struktur Masyarakat yang Selalu Berubah</p> <p>4.4 Kompleksitas Struktur Masyarakat di Pedesaan Pesisir</p> <p>4.5 Teori Strukturasi Gidden</p> <p>4.6 Perubahan Sosial dan Adaptasi Masyarakat Nelayan Tradisional</p> <p>4.6.1 Sekilas tentang Pantai Prigi</p> <p>4.6.2 <i>The Five Contemporary Prime Mover</i></p> <p>4.7 Perubahan Masyarakat Secara Umum</p> <p>4.8 Nelayan Tradisi dalam Perubahan Struktur Masyarakat Nelayan.</p>	<p>4.8.1 Periodisasi Kehidupan Nelayan Jaring Tarik</p> <p>4.8.2. Periodisasi Kehidupan Nelayan Pancing Ulur</p> <p>4.9. Adaptasi dan Perubahan Sosial</p> <p>4.9.1 Adaptasi Nelayan Jaring Tarik.</p> <p>4.9.2. Marginalisasi Kehidupan Nelayan Jaring Tarik.</p> <p>4.9.3. Eksistensi Nelayan Jaring Tarik.</p> <p>4.9.4 Adaptasi Nelayan Pancing</p> <p>4.9.5 Eksistensi Nelayan Pancing</p> <p>4.10 Refleksi Teoretis Perubahan Sosial</p> <p>4.10.1 Skema Alternatif Appelbaum</p> <p>4.10.2 Teori-Teori Perubahan Sosial</p> <p>4.10.3 Refleksi Fakta Lapang Nelayan Tradisi dalam Skema Alternatif Teori Perubahan Sosial</p>
---	--

MODUL

4

SELF-PROPAGATING ENTREPRENEURIAL EDUCATION DEVELOPMENT

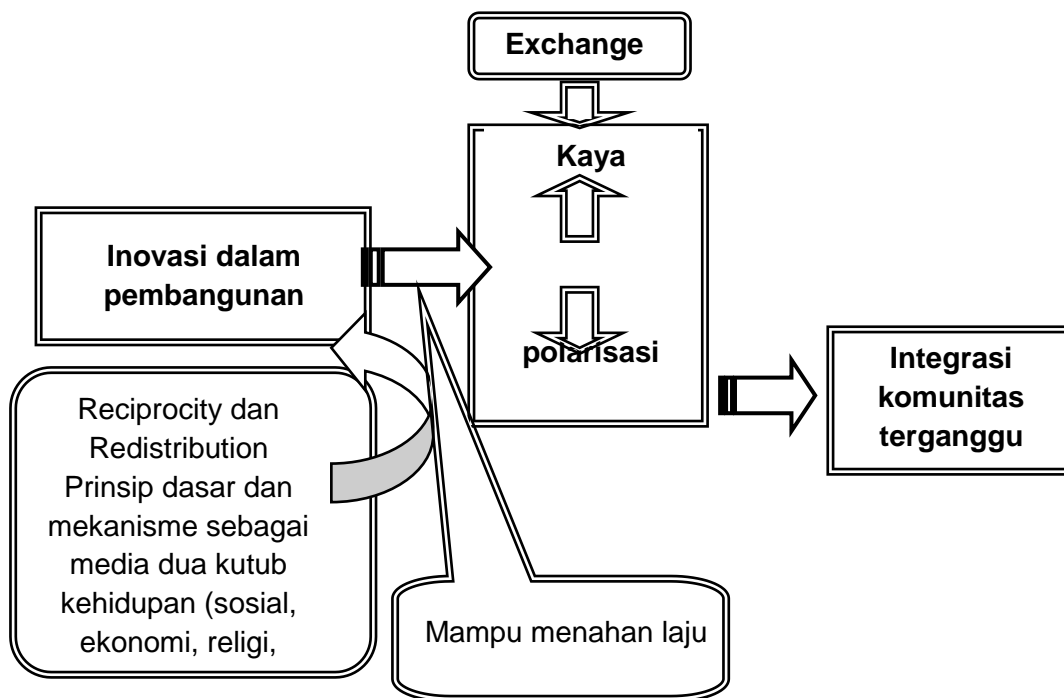
4. RESIPROSITAS, REDISTRIBUSI, EXCHANGE DAN STRUKTUR MASYARAKAT

4.1. Resiprositas, Redistribusi dan Exchange (RRE)

Pengkajian masalah pertukaran ini pada awalnya didasarkan pada analisis yang dilakukan Malinowski (1967) terhadap masyarakat Trobriand yang menyatakan sebagai berikut, "*that the whole life is permeated by a constant give and take*". [bahwa seluruh kehidupan dicirikan oleh pemberian dan penerimaan (pertukaran) secara terus menerus].

Polanyi *et al*, (1988), membedakan secara tegas antara *redistribution*, *reciprocity* dan *exchange*. *Redistribution* menyangkut gerakan-gerakan ke arah suatu pusat dan kemudian kembali keluar dari pusat itu dan tergantung pada kehadiran unsur pusat dalam kelompok tersebut. Pertukaran (*exchange*) sering mengalami perbedaan didalam penggunaan maupun pengertiannya. Pertukaran dilakukan oleh orang-orang yang mana aturan hubungan tersebut dibentuk oleh kekuatan pasar yang menciptakan adanya harga. Resiprositas (*reciprocity*) diartikan sebagai hubungan timbal-balik antar orang-orang yang berkedudukan sejajar. Proses ini diilustrasikan pada Gambar 12.





Gambar 12. *Reciprocity dan redistribution mampu menahan laju polarisasi*

Di pihak lain Sahlins (1978) menyatakan resiprositas adalah bentuk umum dari semua pertukaran. Lebih lanjut Sahlins (1968, 1978) dan Service (1966) membedakan resiprositas menjadi tiga tipe, yaitu resiprositas sama rata, resiprositas seimbang dan resiprositas negatif. Resiprositas sama rata ditandai oleh adanya pertukaran yang lebih bersifat searah dari orang yang mempunyai kelebihan barang atau jasa kepada orang yang tidak memilikinya. Resiprositas seimbang merupakan pertukaran yang terjadi dengan dua arah dan cenderung "seimbang", seperti pada sistem jual beli. Resiprositas negatif merupakan pertukaran searah, tetapi pertukaran terjadi karena adanya paksaan dari pihak satu terhadap pihak yang lain.

Resiprositas dan redistribusi dalam banyak hal mampu menjadi penghambat terjadinya polarisasi sosial dalam masyarakat yang sedang berubah, sementara exchange yang didasarkan pada nilai uang akan mempercepat proses kapitalisasi, yang cenderung mempercepat polarisasi dalam masyarakat. Polarisasi atau pengkutuban adalah sebuah kesenjangan ekonomi yang terjadi dalam suatu masyarakat. Terjadinya polarisasi akan memberikan ancaman bagi integrasi suatu masyarakat, oleh karena itu di masa depan harus lebih banyak dibangun sebuah kelembagaan yang mampu mengembangkan ekonomi masyarakat, namun tidak sampai menyebabkan runtuhnya integritas atau keutuhan masyarakat.

Beberapa ahli yang lain, membahas pertukaran dengan menitikberatkan pada ciri biaya ("cost") dan imbalan ("reward") yang diperhitungkan dalam suatu hubungan sosial (Johnson, 1986). Sosiolog yang mewakili aliran modern yang membahas pertukaran antara lain adalah George C. Homans dan Peter Blau. Homans dalam (Johnson, 1986; Poloma 1984)⁷ membahas teori pertukaran dengan menggunakan pendekatan perilaku psikologi dan ekonomi dasar. Psikologi dasar memberikan penjelasan bahwa orang akan mengulangi perbuatannya bila mendapatkan dukungan. Ekonomi dasar menunjukkan gambaran perilaku manusia yang selalu memperhitungkan biaya yang dikeluarkan dengan imbalan yang akan diperoleh.

Sementara Blau dalam Ritzer dan Goodman, 2005) mengembangkan pertukaran dari skala mikro ke struktur makro.

Pada awalnya untuk menghindari adanya jebakan pada ambiguitas pengertian, maka digunakan istilah pertukaran untuk mencakup dari ketiga bentuk umum pertukaran. Pendekatan ini memberikan konsekuensi teoretik, bahwa kedua konsep tersebut dapat dianggap sama. Namun mengingat bahwa hal demikian akan memberikan konsekuensi yang luas, maka diperlukan sebuah pemikiran untuk mempermudah penggunaan istilah yang lebih mewakili untuk pembahasan tentang pertukaran. Oleh karena itu akan ada dua istilah saja, yaitu pertukaran yang sama dengan resiprositas dan redistribusi. Pertukaran terdiri dari tiga tipe, sebagaimana di atas, yaitu: (1) pertukaran sama rata, pertukaran seimbang dan pertukaran negatif. Dalam hal demikian maka konsep *exchange* sepadan dengan bentuk pertukaran seimbang.

Dalam proses pertukaran antar manusia, yang berarti ada orang yang terlibat dalam suatu hubungan sosial dan cenderung bersifat konstan dan dalam menjalin hubungan tersebut ada sesuatu yang dipertukarkan. Apabila dua orang atau lebih melakukan tukar--menukar (berinteraksi) dan interaksi ini relatif berlangsung konstan, maka akan terbentuk suatu hubungan sosial yang berpola. Keseluruhan jalinan hubungan sosial dalam suatu masyarakat membentuk sebuah struktur.

4.2. Resiprositas dalam Masyarakat Nelayan Pancing

Dalam studi yang saya lakukan (Susilo, 1991) tentang resiprositas dalam masyarakat nelayan pancing, secara ringkas dapat disampaikan sebagai berikut. Studi ini membahas resiprositas dan struktur masyarakat nelayan pancing yang tinggal di Karanggongso, Teluk Segara Wedhi (Prigi), Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur. Mereka hidup dalam kekeluargaan, tinggal berdekatan satu sama lain dan frekuensi interaksi tatap muka yang tinggi. Masyarakat ini hidup dari sumberdaya habitat sekitarnya, berstruktur sederhana seperti masyarakat kecil yang asli. Mereka telah banyak berinteraksi dengan Lingkungan Sosial Luar (LSL), namun ciri khas Lingkungan Lokal (LL) masih kuat mewarnai kehidupannya.

Penelitian ini bertujuan : (1) menganalisis bentuk dan resiprositas nelayan dalam situasi "keterbukaan" habitanya kini, kecenderungan perubahannya dari masa lalu dan menelaah riwayat perubahan itu terjadi, sehingga dapat pula dipahami mekanisme perubahan resiprositas dan struktur masyarakat ini; (2) mencari jawaban di dalam struktur yang bagaimana resiprositas dapat berkembang atau terhambat dan fenomena sosiobudaya apa sebagai parameter yang mempengaruhi perubahan struktur masyarakat tersebut.

Sosialisasi dalam LL cukup berarti dari habitat, sehingga nelayan ini memiliki pengetahuan yang tinggi terhadap pemahaman habitatnya. Gejala ini tampak dari bagaimana masyarakat itu menggunakan sumberdaya asal habitat serta bagaimana mereka mengatur kehidupannya dalam habitat itu. Apabila suatu kebijakan hendak diterapkan, perlu diingat hendaknya kebijakan itu mendukung atau memperkuat resiprositas yang telah ada, agar pengetahuan lingkungan yang sifatnya "indigeneus" itu tidak terabaikan.

Resiprositas ditelaah melalui sejumlah peristiwa yang berkaitan dengan sejarah perkembangan masyarakat dari tahun 1950 – 1990. Delapan peristiwa yang dianalisis adalah: (1) pewarisan perahu, (2) pemberian, (3) peminjaman, (4) sumbangan tenaga kerja, (5) "arisan", (6) pembayaran jasa, (7) penjualan dan (8) pembelian. Bentuk-bentuk peristiwa dan perubahan yang terjadi disampaikan pada Tabel 1. berikut ini.

Tabel 1. Bentuk-bentuk peristiwa dan perubahannya dari tahun 1950 – 1990

No	Bentuk Peristiwa	Masa antara tahun 1950 - 1975	Masa antara tahun 1975-1990
1	Pewarisan perahu	Diwariskan dari orang tua kepada anak pria	Perahu tetap diwariskan dari orang tua kepada anak prianya. Ada anak pria yang mengumpulkan

			modal dari bekerja sebagai ABK pukot cincin (purse seine)
2	Pemberian (hadiah)	Sebagian hasil pertanian, ikan dan makanan diberikan kepada tetangga maupun kerabat	Orang masih menerima pemberian dari tetangga maupun kerabat. Bentuk hiburan untuk tetangga atau kerabat ada yang berupa pertunjukan melalui video. Pengusaha wisata menjadi sponsor perlombaan dayung, tarik tambang dan hiburan Cuma-Cuma
3	Peminjaman	Pinjam peralatan dan pemakaian fasilitas MCK kepada tetangga. Peralatan dapur, baju dibeli secara kredit dari pedagang keliling. Kebutuhan mendesak, uang atau beras bisa dipinjam dari tetangga/kerabat. Tanah di pantai digunakan untuk menambatkan perahu (<i>glandhangan</i>).	Peminjaman kepada tetangga, pedagang keliling masih dilakukan, ada peminjaman uang tunai dari kreditur uang. Tanah yang sudah dijual oleh pemiliknya kepada pengusaha wisata/orang kota tidak bisa digunakan sebagai <i>glandhangan</i> .
4	Sumbangan Tenaga Kerja	Anak pria dan wanita, serta isteri terlibat proses persiapan penangkapan ikan sampai pada penjualan hasil tangkap. Antar tetangga/kerabat dalam pembuatan rumah maupun hajatan	Anggota keluarga masih menyumbangkan tenaganya, demikian pula antar tetangga/kerabat
5	Arisan	Arisan bersamaan dengan Yassinan antar pria, dan arisan barang (beras, gula dan rokok) bersamaan dengan hajatan antar wanita. <i>Becekan</i> antar tetangga, kerabat atau kenalan.	Arisan dan <i>becekan</i> masih dilakukan.
6	Pembayaran Jasa	Membayar tukang kayu, tukang <i>blandhong</i> . Membayar sewa tanah hutan dan membayar	Sewa tanah hutan dan jasa petugas Perhutani masih dibayarkan, demikian juga pembayaran tukang kayu dan tukang <i>blandhong</i> .

		jasa kepada petugas Perhutani.	Upah tukang batu dibayar. Pembayaran sewa video dan sewa lampu dari diesel. Ada penerimaan sewa rumah untuk wisatawan dan nelayan musiman. Ada penerimaan upah/bagi hasil dari pukat cincin maupun payang
7	Penjualan	Hasil tangkap dijual kepada pedagang ikan yang ada di Karanggongso.	Bila saat mendaratkan ikan belum ada pedagang yang datang atau harga belum disepakati, maka ikan dijual ke Prigi (lk. 1,5 km dari Karanggongso). Tanah yang berada di pantai ada yang dijual untuk pariwisata.
8	Pembelian	Umpan berupa ikan dibeli dari nelayan pukat pantai atau ditangkap sendiri, umpan buatan dibuat sendiri. Pancing, tali pancing dan lampu dibuat sendiri. Perahu dibeli dari tukang perahu setempat. Kebutuhan sehari-hari dibeli di toko/warung setempat	Umpan selain dibeli dari nelayan pukat pantai dan ditangkap sendiri, juga dibeli dari nelayan bagan, umpan buatan masih dibuat sendiri. Pancing, tali pancing dan lampu dibeli. Perahu masih disediakan oleh tukang perahu setempat. Kebutuhan sehari-hari dibeli di toko/ warung setempat.

Analisis terhadap kedelapan peristiwa di atas menghasilkan kesimpulan sebagai berikut. Resiprositas di dalam LL berarti sebagai rasa "tanggung jawab moral", yang dijadikan sebagai "asuransi sosial". Resiprositas ini bersifat fleksibel yang menyatukan anggota masyarakat menjadi kesatuan utuh membentuk struktur, terutama bila LL dikehendaki berinteraksi dengan LSL. Kebersamaan sebagai ciri struktur masyarakat kecil ini dapat diamati dari reaksi terhadap dampak LSL pada habitat spesifiknya.

4.3. Struktur Masyarakat yang Selalu Berubah

Banyak ragam ditemukan definisi tentang struktur sosial. Peneliti memilih lebih ke arah pemahaman para antropolog, dengan pertimbangan pada kondisi evolusi sosiobudaya awal pada masyarakat pesisir. Berdasarkan pada Radcliffe-Brown (1968), Service (1971) dan Herskovits (1987), dan dengan sedikit pengembangan, maka struktur sosial diartikan sebagai berikut: **"Penyusunan orang-orang secara berkelanjutan dari berbagai status dan peranan dalam suatu kelompok-kelompok (social grouping), yang hubungan-hubungannya dikendalikan oleh norma-norma (pola-pola tingkah laku) yang diyakini dan atau dibangun oleh masyarakat itu sendiri. Dasar pembentukan kelompok antara lain melalui ikatan perkawinan maupun kerjasama untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam hubungan sosial antara status terdapat gejala kekuasaan"**

Perubahan masyarakat dari sistem agraris menuju masyarakat industri diperlukan beberapa prasyarat. Sistem nilai primer yang mengatur sikap dan perilaku dalam masyarakat agraris sukar sekali berubah, sedangkan sistem nilai sekunder yang mengatur

nilai tata kerja dapat diubah melalui latihan dan pendidikan. Prasyarat menuju masyarakat industri adalah: (a) diperlukan suatu ketelitian yang tinggi, (b) disiplin dalam bersikap dan bertingkah laku dan (c) kerjasama dalam spesialisasi yang terorganisasi (*team-work*) (Soedjito S., 1986). Masyarakat kita telah mengalami perubahan struktur yang sesuai dengan masyarakat industri, tetapi sistem nilai primernya masih belum berubah banyak. Hal ini berarti bahwa orientasi status masih lebih dihargai daripada fungsi.

Hasil-hasil studi peneliti-peneliti di Pusat Penelitian Ilmu Sosial (PPIS) Unibraw ditujukan kepada proses transformasi sosial di pedesaan Jawa Timur. Hasil penelitian ini memberikan gambaran proses transformasi yang dititikberatkan pada perubahan-perubahan dalam hubungan sosial dalam proses produksi (Hartveld, 1993; Hoizner, 1992; Ginting, 1992; Spaan, 1990; Maryunani, 1992; Kanto, 1992; Elizen, 1992; Sumartono, 1992., Zauhar *et al*, 1993; dan Hilmy, 1993). Studi tentang transformasi sosial ekonomi menunjukkan bahwa transformasi terjadi bila ada perubahan-perubahan struktur hubungan sosial produksi yang pada tahap tertentu dicirikan dengan terjadinya perubahan struktur pemilikan faktor produksi dan struktur hubungan kerja dalam proses produksi yang pada akhirnya berdampak pada perubahan struktur hubungan antara individu.

Scott (1983) dalam kajiannya di Asia Tenggara, menyatakan bahwa pertumbuhan negara (kolonial) dan komersialisasi pertanian telah memperumit dilema keterjaminan subsistensi kaum tani dengan minimal lima cara. (1) Sektor yang semakin luas dari kaum tani tidak terlindung lagi dari ketidakpastianketidakpastian baru yang disebabkan oleh ekonomi pasar dan yang memperbesar variabilitas penghasilan mereka di atas dan melampaui resiko fluktuasi hasil panen yang tradisional. (2) Bagi sebagian besar kaum tani, nilai pedesaan dan kelompok kerabat sebagai pemberi perlindungan dan pemikul resiko secara bersama-sama mengalami erosi. (3) Pelbagai katup pengaman subsistensi tradisional menjadi berkurang atau hilang sama sekali. (4) Pemilik tanah yang semula memikul sebagian resiko produksi pertanian, sekarang selain memungut lebih banyak biaya sewa, juga memungut bagian yang tetap dari penghasilan petani, sehingga kaum tani menjadi rawan terhadap resiko pertanian dan pasar. (5) Negara melakukan pemungutan pajak atas kerugian kelas petani.

Pada umumnya kasus di Jawa tentang analisis yang mendalam belum sampai pada pendapat telah terjadi polarisasi antara ektor tradisional dengan sektor modern. Polarisasi dalam masyarakat petani menunjukkan bahwa proses tersebut dapat dihambat oleh kelembagaan tradisional yang tumbuh dalam masyarakat petani (Amaludin, 1988). Lebih lanjut Mubyarto (1985) menyebutkan bahwa ada faktor moral yang berperan kuat di dalam proses penyesuaian kelembagaan. Dasar moral yang dimaksud adalah norma balas-membalas dan hak untuk hidup (*"the right to subsisten"*).

Studi yang dilakukan oleh Susilo (1991) di kawasan pantai, menunjukkan bahwa (1) Pertukaran dalam masyarakat berfungsi sebagai daya mengikat masyarakat nelayan dalam suatu hubungan sosial yang berpola atau membentuk struktur masyarakat. Setiap pihak yang melakukan pertukaran mempertimbangkan biaya dan imbalan untuk menjaga struktur. Meskipun kadang-kadang "kewajiban" melakukan pertukaran balasan ini juga dirasakan berat oleh pihak terlibat. Pertukaran ini juga merupakan faktor penggerak yang mendinamiskan pihak terlibat dalam pertukaran. (2) Pertukaran di lingkungan lokal mencerminkan suatu pertukaran yang berubah dari ikatan satu benang" menjadi ikatan "banyak benang". Pertukaran ini membentuk struktur yang semakin kuat, terutama dalam hubungan ketetanggaan, kekerabatan, dan kenalan/teman. (3) Pertukaran di lingkungan sosial luar cenderung menempatkan subordinasi nelayan pancing dengan pihak di atas desa, kecuali dalam hubungannya dengan KUD/ TPI (Tempat Pelelangan Ikan).

Komponen struktur sangat penting yang sering terabaikan adalah para pedagang. Studi yang dilakukan oleh Emmerson (1982), (de Jonge, 1989), Setiawan *et al* (1993), Qoid *et al* (1993) menunjukkan bahwa peranan pedagang ikan sebagai patron dalam struktur di pedesaan pantai cukup dominan. Walaupun demikian aliran pendukung bagi 'ekonomi moral'

(mengacu kepada Scott, 1985) ini mendapat suatu kritikan dari penganut aliran, petani rasional (misal Popkin), yang mana menjelaskan bahwa struktur itu dibentuk pula atas dasar sikap rasional untuk kepentingan pribadi. Di dalam rangka menuju struktur yang progresif, maka kedudukan pedagang harus tetap dipertimbangkan sebagai salah satu pelaku ekonomi yang penting di pedesaan pantai. Di sinilah maka kajian struktur sosial masyarakat pesisir tidak bisa dilepaskan dari kajian terhadap *patron-client relationship*.

4.4. Kompleksitas Struktur Masyarakat di Pedesaan Pesisir

Hasil penelitian pada struktur masyarakat nelayan di pedesaan pesisir, baik di wilayah utara maupun selatan Jawa Timur (Susilo *et al*, 1997), memberikan gambaran struktur masyarakat tersebut adalah sebagai berikut. **Pertama**, struktur masyarakat perikanan tidak dibatasi oleh wilayah administrasi, tetapi ditentukan oleh aliran komoditi perikanan (*fish-flow*). Penggambaran struktur tidak dapat mengikuti konsepsi ideal masyarakat agribisnis, melainkan terjadi peran ganda oleh pelaku agribisnis, terutama tergabungnya status dan peran mereka sebagai penyedia saprodi (terutama modal), agroindustri dan distribusi & pemasaran. Subsistem usahatani ternyata berada di lapisan bawah dari struktur yang terbentuk. Oleh karena itu sebenarnya bentuk struktur agribisnis ini hanya terdiri dari dua lapisan saja, yaitu lapisan bawah dan lapisan atas. Lapisan atas terdiri dari penggabungan ketiga subsistem yang ada (selain subsistem usahatani = penangkapan ikan). Lapisan atas dapat secara langsung berhubungan dengan penyedia saprodi lainnya (pembuat perahu, pedagang mesin dan pedagang alat tangkap). Walaupun demikian untuk usahatani bermodal kecil, para nelayan ini dapat berhubungan langsung dengan penyedia saprodi, namun masih tergantung pada pinjaman modal pelepas uang. Para pelepas uang ini tidak berfungsi ganda, sebagaimana struktur yang telah ada.

Kedua, peran ganda pedagang dalam struktur agribisnis ini sangat menentukan bentuk dari struktur yang ada. Pada umumnya para pedagang ini memiliki pandangan yang beragam terhadap keberadaan KUD, dari yang menilainya sebagai penyaing kegiatan pedagang sampai yang mengatakan masih dapat bekerjasama, asalkan KUD bertindak jujur di dalam melaksanakan kegiatannya. Dengan demikian masih dimungkinkan adanya kerjasama yang akan dibentuk antara pedagang sebagai "patron" dan KUD dalam kelembagaan akomodatif. Dari keempat lokasi penelitian dapat dilihat derajat kesulitan dalam pembentukan kelembagaan ini, yaitu di Pacitan dan Prigi, Lekok dan yang kemungkinan paling sulit adalah di Weru Komplek.

Ketiga, model umum dari kelembagaan akomodatif, untuk mewujudkan struktur masyarakat agribisnis yang "progresif-integratif", tetap menggunakan hipotesis semula, yaitu dengan membentuk kelembagaan ini dari penggabungan patron dan KUD yang secara bersama membentuk struktur dengan para nelayan, sebagai *client*. Dalam hal ini dibentuk pula inkubator yang terdiri dari Perguruan Tinggi, BRI setempat, HNSI dan dari Dinas Perikanan. Para *patron* yang dipilih adalah yang memiliki jiwa wirausaha dan berwawasan kebangsaan (lihat Gambar 11. di atas).

Kawasan pesisir yang merupakan sebuah perpaduan secara fisik antara ekosistem daratan dan lautan, selain memiliki ciri yang kompleks dalam kondisi alamiah, juga merupakan pertemuan berbagai kepentingan dari berbagai pihak, misalnya sektor perikanan, sektor pariwisata, sektor kehutanan dan pihak lain. Jadi kompleksitas kawasan pesisir bukan saja didasarkan karena struktur alamiahnya, tetapi juga oleh struktur sosial yang terbentuk. Intervensi kebijakan pemerintah ke dalam kawasan ini menyumbangkan kompleksitas yang ada, baik terhadap perubahan tataguna lahan di kawasan pesisir, tetapi juga sistem-sistem baru yang menyumbang terhadap keruwetan struktur sosial dalam masyarakat. Oleh karena itu masih perlu dicari jawaban, apakah struktur memberikan ruang bagi individu untuk

membangun sistem pertukaran yang saling menguntungkan, ataukah struktur telah mencapai pada suatu titik tertentu sehingga menjadi pembatas sosial-budaya bagi individu untuk beradaptasi pada lingkungan hidupnya?.

4.5. Teori Strukturasi Gidden

Dalam tulisan ini lebih bersumber dari Ritzer dan Goodman (2005) daripada Gidden (2003). Menurut Ritzer dan Goodman (2005) Salah satu upaya terkenal yang mengintegrasikan agen-struktur adalah teori strukturasi Giddens, dan ia mengatakan bahwa "Setiap riset sosial atau sejarah selalu menyangkut penghubungan tindakan (sering kali disinonimkan dengan agen) dengan struktur, namun dalam hal ini tidak berarti bahwa struktur 'menentukan' tindakan atau sebaliknya".

Giddens meneliti sejumlah besar teori mulai dari teori yang berorientasi individual atau agen (contoh, interaksionisme simbolik) maupun yang berorientasi masyarakat atau struktur (contohnya, fungsionalisme struktural) dan menolak kedua kutub alternatif pendekatan teoretis tersebut. Kita harus mulai dari "praktik (interaksi) sosial yang berulang. Bidang mendasar studi ilmu sosial bukanlah pengalaman aktor individual atau bentuk-bentuk kesatuan sosial tertentu, melainkan praktek sosial yang diatur melintasi ruang dan waktu.

Teori strukturasi Giddens adalah sebuah teori yang menghubungkan antara agen dan struktur. Tujuan fundamental dari teori strukturasi adalah untuk menjelaskan hubungan dialektika dan saling pengaruh antara agen dan struktur. Dengan demikian agen dan struktur tidak bisa dipahami dalam keadaan salign terpisah satu sama lain, agen dan struktur ibarat dua sisi dari satu mata uang logam. Agen dan struktur adalah sebuah dwi-rangkap. Seluruh tindakan sosial memerlukan struktur dan seluruh struktur memerlukan tindakan sosial. Agen dan struktur saling jalin-menjalin tanpa terpisahkan dalam praktik dan aktivitas manusia.

Dalam kaitannya dengan tindakan suatu agen, yang berupa aktivitas, bukanlah dihasilkan sekali jadi oleh aktor sosial, tetapi secara terus-menerus mereka ciptakan-ulang melalui suatu cara, dan dengan cara itu juga mereka menyatakan diri mereka sendiri sebagai aktor. Di dalam dan melalui aktivitas mereka, agen menciptakan kondisi yang memungkinkan aktivitas itu berlangsung. Dengan demikian aktivitas tidak dihasilkan melalui kesadaran, melalui konstruksional tentang realitas, atau tidak diciptakan oleh struktur sosial. Malahan dalam menyatakan diri mereka sendiri sebagai aktor, orang terlibat dalam praktik sosial dan melalui praktik sosial itulah baik kesadaran maupun struktur diciptakan. Secara umum Giddens memusatkan perhatian pada proses dialektika di mana praktik sosial, struktur dan kesadaran diciptakan, sehingga Giddens menjelaskan masalah agen-struktur secara historis, prosedural dan dinamis.

Elemen-elemen Teori Strukturasi. Pertama, agen terus-menerus memonitor pemikiran dan aktivitas mereka sendiri serta konteks sosial dan fisik mereka. Dalam upaya mereka mencari perasaan aman, aktor merasionalkan kehidupan mereka. Rasionalisasi Giddens adalah mengembangkan kebiasaan sehari-hari yang tak hanya memberikan perasaan aman kepada aktor, tetapi juga memungkinkan mereka menghadapi kehidupan sosialnya secara efisien.

Kedua, masalah motivasi, di mana aktor mempunyai motivasi untuk bertindak dan motivasi ini meliputi keinginan dan hasrat yang mendorong tindakan. Motivasi sebagai potensi untuk melakukan tindakan, namun menurut Giddens, sebagian besar tindakan kita tidak dimotivasi secara langsung. Meski tindakan tertentu tidak dimotivasi dan motivasi kita umumnya tidak disadari, namun motivasi memainkan peran penting dalam tindakan manusia.

Ketiga adalah kesadaran, yang terdiri dari kesadaran diskursif yang memerlukan kemampuan untuk melukiskan tindakan kita dalam kata-kata. Kesadaran praktis melibatkan tindakan yang dianggap aktor benar, tanpa mampu mengungkapkan dengan kata-kata tentang apa-apa yang mereka lakukan. Tipe kesadaran praktis inilah yang sangat penting

bagi teori strukturasi; berarti teori ini lebih memusatkan perhatian pada apa yang dilakukan aktor ketimbang apa yang dikatakannya.

Dengan demikian dalam kaitannya dengan agen dalam teori strukturasi Giddens, memberikan kekuasaan kepada aktor dan tindakan, dan teorinya ini bertentangan dengan teori-teori yang tak menerima orientasi seperti itu, dan malahan mengakui besarnya peran dari tujuan aktor (teori fenomenologi) atau teori yang mengakui besarnya peran struktur eksternal dalam menentukan tindakan aktor (teori fungsional struktural).

Keempat adalah struktur, di mana menurut Giddens, struktur dedefinisikan sebagai "properti-properti yang berstruktur (aturan dan sumberdaya) properti yang memungkinkan praktik sosial serupa yang dapat dijelaskan untuk eksis di sepanjang ruang dan waktu dan yang membuatnya menjadi bentuk sistemik. Struktur hanya ada di dalam dan melalui aktivitas agen manusia. Struktur adalah apa yang membentuk dan menentukan terhadap kehidupan sosial, tetapi bukan struktur itu sendiri membentuk dan menentukan kehidupan sosial. Struktur tidak dapat memaksa atau mengendalikan tindakan, namun struktur selalu membatasi maupun memungkinkan tindakan. Struktur sering memberikan kemungkinan bagi agen untuk melakukan sesuatu yang sebaliknya tak akan mampu mereka kerjakan.

Kelima adalah sistem sosial, yang menurut Giddens, sebagai praktik sosial yang dikembangkan (*reproduced*) atau hubungan yang direproduksi antara aktor dan kolektivitas yang diorganisir sebagai praktik sosial tetap. Sistem sosial tidak mempunyai struktur, tetapi dapat memperlihatkan ciri-ciri strukturalnya. Struktur tidak dapat memunculkan dirinya sendiri dalam ruang dan waktu, tetapi dapat menjelma dalam sistem sosial, dalam bentuk praktik sosial yang direproduksi.

Pada akhirnya strukturasi dipahami sebagai mendasarkan diri pada pemikiran bahwa konstitusi agen dan struktur bukan merupakan dua kumpulan fenomena biasa yang berdiri sendiri (dualisme), tetapi mencerminkan dualitas ciri-ciri struktural sistem sosial adalah sekaligus medium dan hasil praktik sosial yang diorganisir berulang-ulang. Strukturasi merupakan hubungan dialektika antara agen dan struktur, struktur dan keagenan adalah dualitas, struktur tak ada tanpa keagenan dan demikian sebaliknya.

Keenam adalah masalah ruang dan waktu, dimana waktu dan ruang tergantung apakah orang lain hadir untuk sementara waktu atau dalam hubungan yang renggang. Kondisi primordial adalah interaksi tatap muka, di mana orang lain hadir pada waktu dan tempat yang sama, tetapi sistem sosial berkembang atau meluas menurut waktu dan ruang sehingga orang lain tidak perlu lagi hadir pada waktu yang sama di ruang yang sama. Dalam hal ini Giddens lebih banyak memperhatikan waktu daripada ruang.

4.6 Perubahan Sosial dan Adaptasi Masyarakat Nelayan Tradisional

Kajian terhadap komunitas nelayan pancing dan jaring tarik yang merupakan bagian dari riset RUKK IV (Susilo *et al*, 2003-2005) memberikan informasi masa-masa perubahan sosial yang secara rinci disampaikan sebagai berikut. Pengembangan tulisan tentang hal ini sudah dilakukan dalam kaitannya dengan perubahan sosial (Susilo, 2005c).

4.6.1 Sekilas tentang Pantai Prigi

Pantai Prigi, merupakan sebuah nama kawasan pantai, yang terdiri dari tiga wilayah desa (Tasikmadu, Prigi dan Karanggandu), yang terletak di Kabupaten Trenggalek. Dalam kawasan pantai, juga dibagi menjadi tiga subteluk, yaitu Karanggongso di sebelah Timur, Ketawang di bagian tengah dan Pantai Damas di bagian Barat. Di kawasan ini kegiatan penangkapan ikan sudah dilakukan sejak tahun 1930-an, yaitu dengan alat tangkap jaring tarik dan pancing "ulur".

Saat ini (2005) di kawasan pantai ini telah dikembangkan menjadi daerah perikanan menuju pada tingkatan teknologi yang lebih maju, misalnya digunakannya alat tangkap purse seine yang berjumlah sekitar 100 unit alat tangkap, alat tangkap "pancing tonda" (pancing

ulur dengan perahu sekoci) yang mampu menjangkau daerah penangkapan di luar teluk, sampai ke daerah 10⁰C LS. Di kawasan ini dilengkapi dengan pelabuhan perikanan kelas Pelabuhan Perikanan Nusantara Pantai Prigi. Balai Benih Udang Galah juga telah dibangun sekitar tahun 1985. Selain merupakan daerah perikanan, juga menjadi daerah kunjungan wisata yang telah dilengkapi dengan berbagai tempat penginapan seperti Hotel Prigi di Kawasan Pantai Ketawang, dan beberapa cottage di Karanggongso. Daerah ini juga merupakan kawasan yang telah mulai dibangun dalam satuan Jalan Lintas Selatan Jawa Timur.

Khusus dalam bidang perikanan kawasan pantai ini sejak tahun 1988 sampai 2005 telah menjadi salah satu wilayah Proyek Cofish⁸. Proyek bergerak dalam empat komponen, yaitu pertama tentang Pengelolaan Keanekaragaman Hayati, kedua tentang Pengembangan Usaha Ekonomi, ketiga tentang Perbaikan Lingkungan Pelabuhan Perikanan Skala Kecil dan keempat tentang Penguatan Kelembagaan. Hampir seluruh komponen masyarakat pesisir Pantai Prigi terlibat dalam sistem proyek tersebut, termasuk nelayan tradisional, yaitu nelayan jaring arik dan pancing yang menjadi fokus perhatian tulisan ini.

4.6.2 The Five Contemporary Prime Mover (Salim, 2001)

Negara Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang menerapkan perubahan sosial yang direncanakan, yaitu dalam bentuk pembangunan nasional. Dalam analisis Salim (2001) terdapat lima faktor utama yang mampu menjadi penggerak perubahan sosial adalah; (a) komunikasi, (b) birokrasi, (c) modal, (d) ideologi, dan (e) ideologi-agama. Pada awalnya seakan-akan *the agent of change* perubahan sosial adalah pemerintah. Namun ketika disadari bahwa kekuatan pemerintah terlalu dominan, dan cita-cita negara adil makmur belum juga terwujud, maka mulai ada reorientasi pendekatan pembangunan.

Reorientasi pendekatan itu, misalnya dalam bidang pembangunan perikanan dapat dicermati dari tiga aspek penting. Pertama adalah adanya upaya untuk meninggalkan pendekatan sentralistik menuju desentralisasi, yaitu adanya undang-undang otonomi daerah.⁹ Kedua dari pendekatan pengelolaan sumberdaya perikanan juga ada perubahan orientasi rezim, dari *state poverty* ke *co-management (cooperatif management)*, dari sistem yang semua ditentukan oleh negara, kemudian berubah kepada sistem pengelolaan bersama antara masyarakat dengan pemerintah (lihat Nikijuluw, 2002, Berkes, 1991). Ketiga adanya kesadaran berfikir di sebgaiian kalangan agar di dalam melakukan pengelolaan sumberdaya harus ada perubahan dari egosektoral ke lintas sektoral. Ketiga hal ini walaupun mempunyai tujuan yang mulia, namun tidak secara otomatis pola-pola pendekatan lama dalam pembangunan telah hilang begitu saja.

4.7. Perubahan Masyarakat Secara Umum

Salah satu dimensi struktural masyarakat adalah status sosial individu dalam sebuah kelompok atau sebuah kelompok dengan kelompok yang lain. Pengelompokan (*social grouping*) yang terjadi dalam masyarakat nelayan secara umum didasarkan oleh kesamaan dalam alat tangkap dan/atau oleh kedudukannya dengan pedagang dan pemerintah. Di Pantai Prigi nelayan membentuk kelompok-kelompok berdasarkan alat tangkap, misalnya kelompok nelayan purse seine, kelompok nelayan pancing maupun kelompok nelayan jaring tarik.

Sebelum tahun 1975 masyarakat berkembang secara perlahan. Kehidupan petani dan pegawai negeri (yang berkait dengan bidang pendidikan, guru) merupakan gaya hidup yang dominan. Akses masyarakat keluar lingkungan komunitas sangat terbatas. Kehidupan politik didominasi oleh Golongan Karya, yang berasal dari simpatisan kaum Marhaen yang dihipit oleh kekuatan Golkar. Sebagai masyarakat berkebudayaan petani (*peasant society*) mereka sangat tunduk kepada pimpinan formal.

Berbagai perubahan kehidupan mulai nampak bergerak agak cepat, ketika jalan telah diaspal dan kendaraan Jeep Willis mulai digantikan dengan *Colt station*. Di bidang pertanian pengenalan tanaman cengkeh oleh Bupati Trenggalek pada masa itu juga memberikan dampak kepada pola kehidupan masyarakat. Rentang waktu peristiwa ini berkisar sekitar tahun 1975 sampai dengan tahun 1980-an.

Kredit KMKP (Kredit Modal Kerja Permanen) mulai diberikan oleh BRI kepada masyarakat dengan jaminan tanah pekarangan. Pola kehidupan mulai berubah. Para pemilik tanah banyak harus melepaskan tanahnya karena mereka tidak mampu membayar kredit, sebab penggunaan kredit hampir 90 % dipakai untuk keperluan konsumsi (pembelian kendaraan dan pembangunan rumah). Kehidupan sebagai petani dan guru tidak lagi menjadi sebuah daya tarik, sehingga masyarakat mulai beralih kepada perdagangan dan menyekolahkan anak-anaknya ke universitas (Malang, Surabaya dan Jember). Bersamaan waktunya dalam kurun ini adalah masuknya listrik dan televisi mulai merambah dalam kehidupan masyarakat.

Dalam kurun waktu antara 1980-1990, kehidupan masyarakat semakin sulit. Hasil pertanian tidak mencukupi, daya tampung pekerjaan sebagai pegawai negeri semakin rendah. Berangsur masyarakat mulai melirik kepada kehidupan di luar negeri, yaitu banyak Tenaga Kerja Indonesia yang bekerja di Arab Saudi, Malaysia, Taiwan, Korea, dan Brunei Darussalam. Dalam masa ini daerah pantai mulai digunakan sebagai kawasan wisata. Pantai Prigi juga dikembangkan sebagai sentra produksi perikanan tangkap, pengolahan ikan dan juga budidaya (khususnya untuk pembenihan udang galah).

Dominasi politik Golkar mulai berkurang, dan sampai puncaknya pada masa reformasi, di mana dalam Kecamatan Watulimo, untuk tahun 1998-2003, tidak terdapat wakil rakyat dari Partai Golkar. Sejak Golkar ada sampai dengan tahun 1998, di kecamatan ini hanya ada satu anggota DPRD dari Golkar, setelah masa reformasi tidak satu pun wakil rakyat dari Golkar. Di kecamatan ini sekarang ada 3 anggota DPRD, yaitu dari PAN, PKB dan PDIP. Menjelang pemilu tahun 2004, rupanya akan ada "*come back*" politik ke Golkar. Kehidupan ekonomi masyarakat secara ekonomi membaik dengan adanya remitan dari bekerja di luar negeri. Meskipun demikian dalam kasus tertentu, banyak keutuhan keluarga yang menjadi korban dari pergi lamanya salah satu anggota keluarga (suami/isteri) untuk waktu yang relatif lama.

4.8. Nelayan Tradisi dalam Perubahan Struktur Masyarakat Nelayan.

Berbagai faktor penggerak utama yang dapat dideteksi dalam analisis perubahan sosial dalam masyarakat nelayan, antara lain adalah: informasi, teknologi, modal, birokrasi dan ideologi. Namun dalam kaitan dengan masyarakat nelayan, perubahan ini terutama digerakkan oleh perkembangan teknologi nelayan dalam penangkapan ikan dan investasi untuk usaha perikanan. Selain itu aspek birokrasi juga memberikan dampak yang penting.

Dalam pengamatan Susilo (1991), Situmorang (2003), Ulum (2003) dan informasi lapang diperoleh gambaran perubahan sebagai berikut. Kronologis penetrasi investasi, teknologi dan birokrasi adalah sebagai berikut.¹⁰ Sebelum tahun 1960-an alat tangkap dominan adalah jaring tarik dan pancing. Pada tahun 1960-an alat tangkap purse seine mulai dikenalkan oleh seorang nelayan dari luar komunitas Prigi (Sulawesi Selatan). Tiga tahun kemudian (1963) seorang nelayan lokal membawa alat tangkap payang dari Brondong (Lamongan), namun keberadaan alat tangkap ini tidak berlangsung lama. Pada tahun 1966 seorang nelayan dari Lekok, Pasuruan melakukan andhon dengan bekerjasama dengan nelayan lokal untuk mengaktifkan alat tangkap payang.

Tahun 1970-an, kembali nelayan asal Sulawesi membawa alat tangkap purse seine dan bekerjasama dengan nelayan dari Muncar (Banyuwangi). Masyarakat setempat belum dapat menerima kehadiran alat tangkap ini. Pada tahun 1973 dengan adanya pengenalan KUD Mina

Tani Sempurna dan investasi yang dilakukan oleh pemodal dari luar daerah (Tulungagung dan Surabaya), serta mulai adanya tawaran kredit KMKP, penambahan jumlah alat tangkap purse seine mulai meningkat. Pada masa ini terdapat konflik kepentingan antara KUD dengan HNSI, dan rupanya akar konflik itu masih berlanjut sampai sekarang (2003). Tahun 1977 PT Mahera mulai berkomunikasi secara ekonomi dengan KUD Mina untuk melakukan investasi, tetapi masih belum dapat direalisasi.

Menjelang tahun 1980-an nelayan andhon (dari Pasuruan dan Madura Kepulauan) mulai berdatangan ke kawasan ini. Tahun 1981 masyarakat dikenalkan dengan budidaya rumput laut, tetapi usaha ini tidak dapat berkembang, sebab banyak hama ikan (ikan beronang) yang memangsa rumput laut yang sedang tumbuh. Budidaya ini sampai sekarang tidak dilakukan oleh masyarakat.

Pada tahun 1990, kembali PT Mahera melakukan investasi dengan sasaran usaha pengolahan ubur-ubur. Tahun 1996 investor untuk pengolahan ubur-ubur semakin meningkat, Sepuluh perusahaan melakukan investasi dan menggunakan areal yang cukup luas di kawasan pantai, mulai dari Karanggongso, Ketawang, Cengkong dan Damas. Areal ini merupakan daerah penangkapan ikan dengan jaring tarik. Tahun 1998, Pemerintah Daerah melalui Proyek Cofish melakukan pembangunan masyarakat pantai dengan empat komponen, yaitu: (a) pengelolaan keanekaragaman hayati, (b) pengembangan usaha ekonomi, (c) perbaikan pelabuhan perikanan dan peningkatan sanitasi dan hygiene di tempat pendaratan ikan, dan (d) penguatan kelembagaan masyarakat dan kelembagaan pemerintah dalam pengelolaan sumberdaya perikanan.

Perubahan-perubahan yang terjadi baik dalam skala masyarakat yang lebih luas, maupun dalam kawasan pesisir mendapatkan respon dari nelayan tradisi. Respon inilah yang kemudian dapat diamati sebagai sebuah proses adaptasi yang dilakukan masyarakat, resistensi mereka terhadap perubahan dan bagaimana mereka berusaha untuk mempertahankan eksistensinya dalam kehidupan bermasyarakat.

4.8.1 Periodisasi Kehidupan Nelayan Jaring Tarik

Periodisasi ini didasarkan pada sebuah tonggak sejarah, di mana awal perubahan kawasan ini secara umum terjadi pada tahun 1975 (Susilo, 1991). Deskripsi perubahan yang terjadi adalah sebagai berikut:

(a) Fase I (periode sebelum 1975), sebagai zaman keemasan.

Fase ini merupakan zaman keemasan bagi nelayan jaring tarik. Jumlah alat tangkap yang relatif sedikit dengan kondisi sumberdaya perikanan yang masih relatif bagus memungkinkan mereka dapat melakukan penangkapan ikan dengan hasil yang memadai. Tahun 1930 adalah periode awal penggunaan jaring tarik. Ketika masa penjajahan Belanda berakhir dan Jepang masuk ke wilayah ini, yaitu sekitar tahun 1942 sampai masa kemerdekaan, jumlah pengusaha jaring tarik mencapai 13 orang. Sampai dengan tahun 1975 jumlah pengusaha meningkat menjadi 18 orang. Pada masa ini penetrasi kapital dan penetrasi birokrasi belum nampak memberikan dampak, demikian juga dengan masalah transportasi.

Teknologi penangkapan yang masuk ke wilayah ini belum menjadi pesaing yang serius di dalam pemanfaatan sumberdaya perikanan. Perubahan ekologi yang mendasar pada masa ini adalah adanya persepsi bahwa hutan bakau adalah merupakan sarang nyamuk yang dapat menyebabkan penyakit malaria, dan pada masa ini banyak areal hutan bakau yang tumbuh di muara sungai yang dibabat habis untuk mencegah terjadinya genangan air di kawasan pantai.

(b) Fase II (1975 – 1990), zaman daerah terbuka.

Periode ini dapat disebut sebagai zaman daerah terbuka, karena adanya perkembangan pada bidang informasi, transportasi, permodalan, teknologi, dan birokrasi. Dari segi kuantitas jumlah pemilik alat tangkap ini mengalami peningkatan, yaitu mencapai

jumlah 23 orang. Interaksi nelayan dengan lingkungan sosial luar menjadi semakin intensif. Masuknya investasi modal pada alat penangkapan lain, seperti *purse seine*, kedatangan nelayan andhon dari pantai utara, penetrasi birokrasi yang berdampak pula kepada pengelolaan kawasan pantai untuk pariwisata dan perikanan direspon secara intensif oleh nelayan jaring tarik. Pada masa ini ditandai pula oleh semakin berkurangnya sumberdaya dan lokasi penangkapan ikan. Hanya saja mereka masih bertahan karena ketersediaan tenaga kerja untuk menarik jaring masih tersedia, yaitu para wanita dan laki-laki yang tinggal di Desa-Desa Slawe, Dukuh, Gemaharjo, Ngembel dan Pakel yang letaknya kurang lebih puluhan kilometer dari kawasan pantai.

Sebagaimana penuturan beberapa nelayan dapat disimpulkan bahwa masa ini memang merupakan sebuah masa yang ditandai oleh kerusakan sumberdaya perikanan yang sedang. Kawasan hutan mangrove di Pancer Bang sekitar 5 ha dan di Ngrumpu'an seluas sekitar 4 ha. Jenis tanaman di hutan mangrove yang dikenal adalah jenis menengan, drujon, jangkar, jaran, bogem dan truntun. Jika hutan mangrove sebelum tahun 1975 kondisinya baik, antara tahun 1975 – 1990 mengalami kerusakan ringan. Kondisi terumbu karang menurut pengamatan WJN tidak berbeda dengan hutan mangrove. Luasan terumbu karang di Ngrumpu'an yang hanya sekitar 1 ha, sebelum 1990 kondisinya dapat dikategorikan masih baik.

(c) Fase III (1990-sekarang), zaman kekalahan atau “zaman ruwet”.

Mungkin periodisasi ini tidak tepat benar, namun jika dilihat dari perkembangan jaring tarik pada tahun 1994 mencapai jumlah 39 pemilik, tahun 1999 berkurang drastis menjadi 24, namun anehnya pada tahun 2002 ada peningkatan pemilik menjadi 45 orang. Periode ini ditandai dengan areal yang semakin terbuka dan intervensi birokrasi yang semakin nyata, terutama dengan adanya Proyek Cofish, yang dimulai pada tahun 1998. Proyek Cofish bagi nelayan jaring tarik memberikan makna tersendiri, ada sebagian yang merasakan dampak negatifnya, terutama dari segi usaha penangkapan ikan dengan jaring tarik. Di sisi lain Proyek Cofish telah mampu memberikan proses penyadaran kepada nelayan jaring tarik untuk melakukan konservasi terhadap hutan bakau. Nelayan jaring tarik di Damas telah melakukan kegiatan konservasi, yaitu ikut dalam melakukan penanaman dan pemeliharaan hutan bakau, di Pancer Bang dan Pancer Ngrumpu'an.

4.8.2. Periodisasi Kehidupan Nelayan Pancing Ulur

Mengacu kepada riset yang dilakukan oleh Susilo (1991), Hardiyanto (1996), Situmorang (2003) dan data lapang 2003, maka periodisasi kehidupan nelayan pancing adalah sebagai berikut. Periodisasi secara umum terdiri dari tiga fase, yaitu masa sebelum 1975 (Fase I), antara 1975- 1990 (Fase II) dan Fase III (1990 s/d sekarang). Fokus kajian riset tentang nelayan Pancing Ulur adalah di Karanggongso, sedangkan informasi dari nelayan lain digunakan sebagai pelengkap.

Susilo (1991) mengidentifikasi beberapa masa tonggak perubahan dalam masyarakat, yang secara rinci dapat dilihat pada Tabel 2 berikut ini:

Tabel 2. Sejarah Kehidupan Masyarakat Karanggongso 1950-1990

Tahun	Catatan Sejarah	Kejadian
1950 s/d 1964	Sejumlah penduduk dari Desa Tanggul Kabupaten Tulungagung (kawasan pertanian lahan kering) pindah ke Karanggongso (hutan dan lautan) karena masalah ekonomi dan politik	Terjadi alih profesi, dari petani menjadi nelayan dan mencari hasil hutan, atau tetap bertani

1970-an	Hutan di sebelah utara pemukiman dibuka untuk diremajakan dengan pohon jati muda oleh Perhutani	Sebagian penduduk bertani tanaman pangan di kawasan hutan, sambil menanam jati serta merawatnya.
1974-1977	Alat tangkap modern, seperti purse seine dan sarana lain, misal Tempat Pelelangan Ikan dikenalkan di Teluk Prigi.	Nelayan pancing banyak yang menjadi ABK purse seine maupun payang saat tidak musim penangkapan dengan pancing
1980	<ul style="list-style-type: none">Sebagian besar hutan yang dibuka, ditutup kembali (tinggal hutan yang berbatasan dengan RT I)Jalan aspal dan jembatan dibangun, kendaraan roda-4 mudah keluar – masuk Karanggongso	<ul style="list-style-type: none">Bekerja di laut menjadi salah satu alternatif penting dalam mencari nafkah.Frekuensi orang-orang (pedagang, kreditur dan lainnya) masuk ke Karanggongso atau kesempatan orang Karanggongso keluar bertambah
1982	Karanggongso digunakan sebagai kawasan obyek wisata oleh masyarakat, pengusaha dan pemerintah	Wisatawan banyak yang datang, tempat penginapan mulai dibangun dan tanah pantai ada yang dijual.

(a) Fase I (sebelum 1975), atau zaman damai

Pada masa ini kehidupan nelayan pancing dapat dikatakan sebagai masa paling damai. Interaksi dengan lingkungan sosial luar belum begitu intensif. Sampai dengan tahun 1974 jumlah alat tangkap pancing di Teluk Prigi ada 213 buah. Jalan menuju ke Karanggongso masih dari tanah, dan orang yang menuju ke kawasan ini hanya bisa berjalan kaki, naik sepeda atau sepeda motor. Di kawasan Pasir Putih, Karanggongso bagian barat belum ada bangunan rumah seperti sekarang, dan hutan jati sangat lebat. Pada masa itu binatang-binatang hutan seperti kera masih ada dan turun ke jalan atau ke pantai.

(b) Fase II (1975 – 1990), atau zaman terbuka dan tertinggal.

Pada masa ini dengan akses keluar masuk wilayah semakin besar, maka banyak perubahan yang terjadi. Teknologi penangkapan belum banyak berubah, dan masih sangat sederhana. Ukuran perahu juga tidak mengalami perubahan, dan alat penggerak dayung masih digunakan. Pada tahun 1989 jumlah pancing di seluruh teluk ada 254 dan yang ada Karanggongso sejumlah 134 perahu pancing. Ukuran perahu relatif kecil (4 x 0,6 x 0,3) dan peralatan yang sangat sederhana. (Lihat Lampiran).

Pada masa ini ada perkembangan alat tangkap lain yang lebih modern, misalnya purse seine, namun nelayan pancing mampu mengadaptasikannya dengan menjadi pendega saat tidak menangkap ikan dengan alat tangkap pancing. Selain itu masyarakat pendatang yang kemudian menetap di Dusun Gares, sekitar 5 km ke arah barat menangkap ikan dengan pancing tonda, dan juga mengembangkan pancing rawai. Kedua alat pancing ini dioperasikan di luar daerah penangkapan pancing ulur, sehingga kurang berdampak secara langsung terhadap kehidupan nelayan pancing. Pada masa ini masyarakat nelayan pancing mengalami semacam stagnasi dalam hal teknologi penangkapan.

Masyarakat melakukan diversifikasi usaha dengan menyewakan perahu untuk wisata. Di bidang pertanian, mereka menanam tanaman pangan di hutan (padi, jagung, kacang tanah), pohon buah-buahan dan tanaman tahunan di hutan (); beternak (kerbau, sapi, kambing, kelinci, entok, angsa, ayam kampung, dan ayam "walik") bertani di tegalan (kelapa, ketela pohon, nangka, sukun, rambutan, cengkeh, durian, pisang); membuka toko (beras, gula, minyak tanah, rokok, kawat monel, mata kail, monofilamen, kuralon); warung

(makanan kecil dan minuman), serta di bidang jasa (tukang kayu, penebang kayu dan tukang batu).

Kesulitan lain nelayan pancing adalah semakin berkurangnya *glandhangan*, (yaitu kawasan pantai yang digunakan untuk menambatkan perahu), karena diperuntukkan bagi keperluan lain, seperti pembangunan sarana wisata (hotel). Pada tahun 1989 jumlah *glandhangan* ada sembilan, ke delapan tanah diakui sebagai milik pribadi, sedangkan satu *glandhangan* diakui sebagai milik pemerintah dan digunakan pula sebagai areal pemakaman umum.

Keterbukaan wilayah selain menyebabkan penetrasi modal, juga masuk sebuah LSM yang bernama LPK (Lembaga Pengembangan Kenelayanan). LPK melakukan pengembangan dalam kehidupan ekonomi masyarakat di Karanggongso dengan membangun galangan kapal sederhana untuk membuat perahu untuk alat tangkap purse seine. Pada taraf tertentu ada indikasi tentang penyebaran sebuah agama tertentu.

(c) Fase III (1990 s/d sekarang), zaman keemasan.

Pada masa ini setelah mereka mengalami stagnasi dan tertinggal dari kehidupan nelayan lainnya, ada beberapa hal yang mampu meningkatkan kesejahteraan mereka. **Pertama** adalah dari bidang pariwisata, telah memberikan kesempatan untuk membangun warung-warung di lokasi Pasir Putih dan penyewaan jasa perahu. **Kedua**, peluang kerja di luar negeri juga banyak diakses oleh warga masyarakat. **Ketiga**, investor pengolahan ubur-ubur dan pedagang ikan layur telah memberikan kesempatan kerja, baik kepada masyarakat secara umum maupun pada rumahtangga nelayan pancing. Perdagangan ikan layur telah mendorong kepada nelayan pancing untuk meningkatkan kapasitas penangkapan mereka, yaitu dengan memperbesar ukuran perahu, menggunakan tenaga penggerak mesin, dan meningkatkan frekuensi penangkapan. Hal ini dimungkinkan karena ikan layur telah menjadi komoditas ekspor dengan harga sekitar Rp. 6.000,- s/d Rp. 8.000,- per kg. **Keempat**, keterbatasan permodalan juga dapat disuplai dari lembaga permodalan yang diprakarsai oleh LPK, yaitu Kredit Union Pantai Prigi. Sebagaimana dilaporkan oleh Situmorang (2003) bahwa lembaga perkreditan ini didirikan pada tanggal 12 Juni 2002. Keanggotaan heterogen, tetapi terbanyak dari nelayan pancing. **Kelima**, introduksi teknologi budidaya rumput laut telah diujicobakan di kawasan ini. Pada tahap awal dibudidayakan sejumlah 20 rakit dan memperoleh panen sampai 4 ton. Namun karena pemasaran hasil belum memadai dan secara teknis budidaya belum dapat mengendalikan pemangsa, usaha budidaya belum diakses oleh masyarakat Karanggongso.

Hancurnya sistem pengelolaan hutan oleh Perhutani ke sistem pengelolaan secara *gopla* dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh keluarga nelayan untuk mengakses sumberdaya hutan. Secara ekologis hancurnya hutan dan pembuatan jalan lintas selatan Jawa Timur telah meningkatkan sedimentasi di laut memberikan ancaman tanah longsor bagi pemukiman penduduk di Karanggongso dan Pasir Putih.

4.9. Adaptasi dan Perubahan Sosial

Ketika lingkungan alam dan lingkungan sosial berubah, tentu saja manusia tidak diam begitu saja. Mereka melakukan upaya adaptasi agar dapat terus melangsungkan kehidupannya. Demikian juga yang terjadi pada kedua kelompok nelayan tradisi tersebut. Mekanisme adaptasi yang dilakukan oleh nelayan sebagai respon terhadap lingkungan yang sedang berubah dapat disampaikan sebagai berikut.

4.9.1 Adaptasi Nelayan Jaring Tarik.

Pelebaran lokasi pelabuhan perikanan, penggunaan lokasi Pasir Putih untuk *fish sanctuary*, maupun arah kebijakan pada "tidak boleh ditambahnya" alat tangkap jaring

tarik¹¹, serta investasi pengolahan ubur-ubur, telah memberikan akibat berupa berkurangnya wilayah tangkapan jaring tarik. Penggundulan hutan dengan sistem *gopla* maupun usaha pengolahan ubur-ubur telah menyerap dan menarik tenaga kerja upahan yang tersedia, yang pada umumnya mereka sering bekerja lepas sebagai penarik jaring pada operasi penangkapan dengan jaring tarik. Usaha penangkapan ikan selain jaring tarik, selain dalam kapasitasnya sebagai sesama pengguna sumberdaya dapat dianggap sebagai pesaing, mereka ini dalam melakukan operasi penangkapan sering menimbulkan kerugian kepada jaring tarik, misalnya dengan menjaring ikan yang berada dalam areal "kibaran" jaring tarik maupun merusakkan (memutuskan tali) alat tangkap jaring tarik.

Adaptasi masyarakat nelayan jaring tarik, dalam kerangka memberikan respon terhadap kondisi lingkungan yang semakin berubah dapat dijelaskan sebagai berikut. Pertama, **adaptasi magis religius**. Adaptasi ini tidak hanya terjadi karena adanya perubahan lingkungan, tetapi merupakan adaptasi pula terhadap kondisi lingkungan laut dan penguasaan teknologi penangkapan. Mereka masih meyakini bahwa di dalam melakukan penangkapan ikan harus menjalankan upacara ritual tertentu. Ritual yang dilakukan dengan mendatangi seorang dukun (Kyai Jawa) yang berasal dari daerah dataran rendah (*ngare*) misalnya dari Kota Tulungagung. Dukun memberi syarat berupa garam agar ditebar di daerah tangkapan ikan (*rapetan*), sedangkan kemenyan dan candu dibakar di rumah nelayan pada malam hari sebelum keesokan harinya dilakukan penangkapan ikan.

Mereka juga ada yang mendatangi seorang Kyai Islam, yang bermukim di Gunung Kebung, Kota Trenggalek. Seorang Kyai Islam biasanya memberikan sebuah rajah (yaitu kertas diberikan tulisan arab) yang kemudian dibungkus untuk dikaitkan pada jaring tarik pada saat melakukan operasi penangkapan ikan. Selain itu mereka juga melakukan tirakat, misalnya dengan wiridan dan puasa.

Ritual juga dilakukan untuk pembukaan usaha maupun daerah operasi penangkapan (*rapetan*). Upacara ini berupa sebuah acara selamatan (*slametan*) dengan mengundang tetangga maupun sesama nelayan jaring tarik. Sajian atau sesaji yang digunakan dalam selamatan terdiri dari: (1) *Jenang abang* (jenang merah), berasal dari beras ketan putih yang diberi warna merah dengan gula merah. Makna jenang ini adalah berupa suatu sare'at dan penghayatan terhadap *Sangkan paraning dumadi* (asal muasal kejadian makhluk, yaitu Yang Maha Esa). (2) *Sega gurih* (nasi rasa gurih), bermakna penghormatan kepada para nabi. (3) Jajan pasar (kue yang diperjualbelikan di pasar), yang bermakna penghormatan kepada roh dan arwah para leluhur.

Semua prosesi ritual selamatan ini diniatkan sesuai dengan kepercayaan masing-masing nelayan. Ada yang sepenuhnya meyakini Allah sebagai Yang Maha Kuasa, dan ada yang mempercayai terhadap keberadaan Nyi Loro Kidul dan *Dhanyang* (penunggu tempat-tempat tertentu) di kawasan pantai. Lokasi selamatan pada umumnya dilakukan di rumah nelayan, namun ada sebagian nelayan yang melakukan prosesi selamatan ini di tempat-tempat yang dianggap keramat, seperti Watu Dhukun di Karanggongso, atau Babakan Klontong di Damas.

Kedua, **adaptasi ekonomi**. Adaptasi ekonomi atau yang disebut oleh Ulum *et al* (2003) sebagai resistensi ekonomi. Adaptasi ekonomi dilakukan oleh nelayan jaring tarik dengan cara melakukan diversifikasi pekerjaan. Para nelayan pemilik jaring tarik umumnya berasal dari buruh penarik jaring atau mandor. Operasi penangkapan tidak dilakukan sepanjang tahun, sehingga memberi kesempatan kepada nelayan untuk mencari jenis pekerjaan di luar usaha jaring tarik. Bagi pemilik jaring dapat melakukan kegiatan bertani, atau membuka hutan secara *gopla*, atau menjadi pendega alat tangkap purse seine. Buruh nelayan melakukan diversifikasi pekerjaan, antara lain; (a) buruh tahi/ladang, (b) *gopla*, (c) buruh pada usaha pengolahan ikan (pindang, asin dan ubur-ubur), (d) membuat *reyeng* (wadiah untuk mengolah ikan pindang), (e) sebagai tukang kayu, (f) mencari kayu *rencek* di hutan,

(g) pendega kapal purse seine, dan mengumpulkan ikan yang terjatuh atau tercecer di pelabuhan perikanan (*ngalang-alang*) atau juga mengambil sebagian hasil ikan yang didaratkan di pelabuhan (*ngetrol*).

Ketiga, **adaptasi teknologi dan pengaturan penangkapan.** Ketersediaan bahan alat tangkap pada zaman dulu (mulai masa penjajahan Belanda sampai Jepang) berupa bahan alami, yaitu untuk bahan tali digunakan serat waru, atau rotan. Saat ini digunakan tali dari nylon. Panjang tali penarik yang kalau tahun 1989 hanya sekitar 300 meter (5-7 gulungan tali), sekarang mencapai 10 – 12 gulungan tali, atau mencapai sekitar 1.700 meter. Jangkauan penangkapan semakin ke tengah lautan. Upaya lain adalah dengan mengurangi ukuran mata jaring. Hal ini terpaksa dilakukan sebab hasil tangkapan mulai menurun, namun langkah ini sangat berbahaya dari segi ekologi.

Pengaturan penggunaan *rapetan* dengan sistem antrian “tibar” merupakan sebuah upaya untuk melakukan pemerataan bagi nelayan jaring tarik, mengingat dengan jumlah yang relatif banyak (42 unit) dengan areal rapetan yang makin menyempit. Informasi terakhir jumlah *rapetan* yang optimal digunakan tinggal sedikit, yaitu 3 rapetan di Ketawang, 1 rapetan di Cengkong dan 2 rapetan di Damas. Gejala ini mirip dengan gejala involusi, sebagaimana yang dilaporkan oleh Geertz di Mojokuto.

Keempat, **resistensi nelayan jaring tarik.** “Ancaman” yang dihadapi oleh nelayan jaring tarik dapat dikatakan datang dari segala penjuru, baik secara internal di antara sesama nelayan jaring tarik, maupun dengan pihak lain (investor ubur-ubur, nelayan lain dan birokrasi). Ulum *et al* (2003) menyebutkan bahwa nelayan jaring tarik memiliki berbagai resistensi, yaitu yang; (a) melakukan perlawanan sehari-hari (nada-nada gerutuan, menarik diri dari mekanisme lelang di TPI, bersifat apatis terhadap Kelompok PSBK), (b) perlawanan kompromis (legalisasi Jaring tarik melalui SIUP, usulan zonasi area penangkapan), dan (c) melakukan perlawanan frontal (protes kepada Dinas Kelautan dan Perikanan, atau penolakan terhadap ganti rugi pemberhentian usaha penangkapan dengan jaring tarik).

Ada bentuk resistensi yang berbeda dengan temuan di atas, yaitu perilaku kompromis yang dilakukan oleh kelompok kecil nelayan jaring tarik asal Damas. Sebagaimana disampaikan oleh responden (WJN), bahwa meskipun pada masa tahun 1998 sampai tahun 2000 hutan mangrove mengalami kerusakan parah, di mana kayu dari hutan mangrove ditebang untuk keperluan kayu bakar untuk pengolahan ikan pindang dan untuk membakar gamping, Namun pada tahun 2001 melalui PSBK dengan dana dari Proyek Cofish telah dilakukan penanaman kembali bakau (*replanting*), demikian pula pada tahun 2002. Saat ini berkembang sebuah Hak Guna Wilayah Hukum Perikanan (HGWHP) yang mana masyarakat melakukan pengelolaan (pengawasan dan konservasi). Mereka membutuhkan kegiatan ekonomi untuk menjaga kawasan mangrove, misalnya melalui budidaya kepiting bakau dalam karamba di areal hutan mangrove. Selain itu resistensi nelayan jaring tarik dilakukan dengan cara meningkatkan konsolidasi internal, demonstrasi dan membangun jaringan antar nelayan baik yang ada di Prigi (sesama nelayan jaring tarik) maupun dengan nelayan di luar Prigi, melalui partisipasi mereka dalam Forum Nelayan Jawa Timur, yang diprakarsai oleh Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Surabaya.

4.9.2. Marginalisasi Kehidupan Nelayan Jaring Tarik.

Sebagaimana dilaporkan oleh Widayanti (2003) maupun melalui informasi yang dikumpulkan dari lapang diperoleh informasi tentang adanya gejala marginalisasi terhadap kehidupan nelayan jaring tarik. Widayanti (2003) mencatat ada beberapa point dalam studinya tentang jaring tarik, yaitu: (a) Pesatnya pembangunan perikanan di kawasan ini telah menimbulkan marginalisasi ekonomi bagi nelayan jaring tarik. (b) Marginalisasi ini dapat diamati dari; (i) perkembangan teknologi penangkapan yang lebih maju, (ii) semakin kompleksnya pemanfaatan kawasan pantai dan (iii) menurunnya fungsi habitat pantai. (c) Marginalisasi sosial ditandai oleh: (i) keterbatasan akses terhadap sumberdaya, (ii)

pembatasan jumlah, (iii) pelabelan sebagai “perusak” sumberdaya. (d) golongan yang paling terkena marginalisasi adalah para buruh.

Lebih lanjut Widayanti menyatakan bahwa nelayan jaring tarik memiliki tipologi, dan berdasarkan tipologinya ini mereka memiliki strategi yang berbeda untuk bertahan, yang dapat dilihat pada Tabel 3 berikut ini.

Tabel 3. Strategi bertahan berdasarkan tipologi nelayan jaring tarik

Tipologi	Strategi bertahan
Satu (pemilik, kaya)	<ul style="list-style-type: none">• Operasi saat musim saja• Menekuni usaha lain• Mobilisasi anggota rumahtangga
Dua (pemilik, menengah)	<ul style="list-style-type: none">• Diversifikasi usaha relatif (< tipologi satu)• Berpindah-pindah status (migrasi horizontal in and out)• Mobilisasi rumah tangga• Manfaatkan jaringan social
Tiga (pemilik, biasa)	<ul style="list-style-type: none">• Berpindah status, umumnya pekerja
Empat (pekerja)	<ul style="list-style-type: none">• Berpindah status, umumnya pekerja

Proses marginalisasi seperti ini terus berlangsung. Komite Perikanan Lokal (KPL), yang bernama Kelompok PSBK Prigi Lesari yang dibentuk Proyek Cofish masih belum dapat mewadahi nelayan jaring tarik. Dalam rancangan pendampingan oleh LSM untuk Pengelolaan Keanekaragaman Hayati, mestinya Kelompok Nelayan Jaring Tarik ini telah membentuk sebuah Hak Guna Wilayah Hukum Perikanan, terutama bagi nelayan jaring tarik yang berada di Kawasan Ketawang, sebagaimana yang dilakukan oleh nelayan jaring tarik yang ada di Damas. Selain itu kurang adanya perhatian LSM lokal maupun LSM yang dulu melakukan pendampingan telah semakin memberikan suasana termarginalisasi kehidupan nelayan jaring tarik.

4.9.3. Eksistensi Nelayan Jaring Tarik.

Sebuah fenomena yang menarik adalah bahwa meskipun di satu sisi hasil tangkapan semakin mengecil, perhatian dari pemerintah juga semakin memudar, serta marginalisasi yang semakin menguat, namun eksistensi nelayan jaring masih ada. Bahkan jumlah unit alat tangkap ini masih berjumlah 42 unit. Walaupun demikian gejala untuk meninggalkan profesi sebagai nelayan jaring tarik juga telah terjadi.

Dalam sebuah diskusi terbuka, nelayan sebenarnya masih ingin tetap menjadi nelayan. Mereka belum ingin meninggalkan profesinya, hanya saja mereka bersedia pindah ke alat tangkap lain, seperti purse seine maupun pancing tonda. Dari sisi sifat kegiatan, Proyek Cofish memang memiliki ciri antara lain, mengurangi kapasitas penangkapan ikan dan tidak dapat memberikan bantuan dalam bentuk uang tunai. Berdasarkan sifat proyek memang Cofish berpeluang kecil untuk memberikan pendanaan bagi nelayan jaring tarik. Cofish dapat membantu mereka dalam hal alih profesi dari nelayan ke budidaya atau pengolahan ikan, atau dalam bidang penangkapan yang tidak mengancam pada kerusakan sumberdaya perikanan.

Apakah eksistensi nelayan jaring tarik masih perlu dipertahankan? Apakah pengurangan jumlah alat tangkap ini merupakan suatu harapan mereka? Apakah alih profesi dapat menjadi diversifikasi usaha dalam ekonomi rumahtangga mereka? Rentetan pertanyaan ini merupakan permasalahan pokok tentang eksistensi nelayan jaring tarik. Berbagai pandangan, keluhan dan harapan nelayan jaring tarik telah memberikan indikasi

bagi mereka bahwa perubahan yang terjadi secara kolektif direspon sebagai bentuk penyingkiran (marginalisasi) terhadap eksistensi mereka.

Keluhan dan harapan yang muncul dalam diskusi adalah: (1) Pemerintah Daerah dinilai kurang mampu melakukan upaya pencegahan terhadap kerusakan lingkungan yang terjadi selama ini, (2) Mereka sangat kesal dengan Pemerintah yang membangun pelabuhan dan daerah perlindungan laut yang menggusur daerah penangkapan, (3) Bantuan dari proyek lebih sering diterima oleh nelayan selain jaring tarik, misalnya adanya bantuan untuk nelayan purse seine dan jaring udang, (4) KPL Kelompok PSBK Prigi Lestari belum mampu memperjuangkan kepentingan jaring tarik, meskipun di satu sisi diakui telah memberikan harapan baru dalam konservasi hutan bakau (khusus Damas), yang memberikan peluang ekonomi budidaya kepiting. (5) Jika nelayan harus meninggalkan profesi sebagai nelayan jaring tarik, maka harapan yang muncul adalah untuk memperoleh bantuan alat tangkap purse seine (dalam bentuk kelompok) atau menggunakan pancing tonda. Sebagian lain mau beralih profesi atau mendiversifikasi-usahanya di bidang non perikanan, seperti beternak.

4.9.4. Adaptasi Nelayan Pancing

Berbagai bentuk adaptasi dan resistensi nelayan pancing secara lebih rinci adalah sebagai berikut. Pertama, **adaptasi magis religius**. Seagaimana pada umumnya masyarakat Jawa, nelayan pancing juga mempercayai adanya penguasaan sumberdaya laut oleh "Sing Mbaurekso", yang diyakini sebagai Nyi Loro Kidul. Juga mereka meyakini ada roh penunggu gunung (nelayan menyebut gunung terhadap pulau-pulau kecil yang terhampar di luar kawasan teluk). Meskipun secara umum di Teluk Prigi telah diadakan upacara petik laut (*Sembonyo*), namun nelayan pancing menilai bahwa kesakralannya telah bergeser ke arah pariwisata.

Sembonyo sebagai upacara syukur kepada Tuhan dalam bentuk memberikan sesaji ke penguasa Laut Selatan, yang dilaksanakan setahun sekali pada Bulan Jawa Sela, yang sering jatuh pada hari pasaran Pon atau Kliwon. Acara ini biasanya diramaikan dengan kesenian tradisional, yaitu tayuban dan jaranan. Pergeseran nilai sacral ke pariwisata, misalnya dalam hal penetapan hari yang disesuaikan dengan masa libur. Dalam hal ini masyarakat nelayan pancing di Karanggongso untuk tahun 2003 melaksanakan sendiri upacara petik laut (Senin, 27 Januari 2003) sementara pemerintah daerah dan masyarakat Teluk Prigi menyelenggarakan *Sembonyo* pada hari Minggu, 19 Januari 2003.

Upacara di Karanggongso lebih sederhana, berupa pembuatan sepasang miniatur temanten dan sesajian, tetapi tanpa membuat tumpeng. Kesenian wayang dan tayuban tidak dilaksanakan (masalah biaya), dan hanya ada kesenian jaranan. Malam hari menjelang upacara, dilakukan Sholat Hajat. Selesai upacara, masyarakat berdoa dan makan bersama yang diiringi oleh kesenian jaranan.

Kelengkapan upacara *sembonyo* yang dilaksanakan oleh masyarakat nelayan pancing adalah sebagai berikut. (1) Sepasang pohon pisang yang dibuat sebagai miniatur sepasang temanten. (2) Sepasang kembar mayang, (3) Sepasang kelapa muda, (4) Seperangkat sesaji, berupa makanan, minyak wangi, candu dan rokok. Juru masak seluruh makanan yang akan disajikan tersebut harus dilakukan oleh wanita yang sudah tua dan sudah menopause. Di dalam mengantarkan sesajian yang akan dilarung (dibawa ke tengah untuk ditenggelamkan) ke laut, diiringi oleh sepasang Waranggono (penanyi), juru kunci dan kesenian jaranan.

Beberapa bentuk adaptasi magis religius lainnya adalah melakukan pantangan melaut. Seorang nelayan tidak akan melaut pada hari ketika orang tuanya meninggal (*geblake wong tuwa*). Upacara dalam bentuk selamat juga dilakukan saat pertama kali menurunkan perahu. Jika dalam satu minggu tidak memperoleh ikan, mereka pergi ke dukun untuk memperoleh *syarat*. Beberapa nelayan meninggalkan kebiasaan mencopot topi (caping) saat berlayar melewati pulau-pulau kecil yang diyakini dihuni oleh roh-roh tertentu.

Kedua, **adaptasi ekonomi dan teknologi**. Adaptasi ekonomi masyarakat nelayan pancing sebagaimana yang dilaporkan Susilo (1991) tetap berlangsung dan justru saat ini nelayan dapat meningkatkan kapasitas penangkapan ikan dengan pancing maupun mendiversifikasi usaha penangkapan. Rincian adaptasi ekonomi adalah sebagai berikut:

(a) **Pertanian**. Pengelolaan hutan dengan sistem *gopla* digunakan oleh masyarakat untuk melakukan penanaman tanaman semusim (pisang, padi, ketela) maupun tanaman tahunan (durian, petai, jengkol). Dalam pembagian hasil dengan sistem *gopla* Perhutani mendapat bagian hasil satu bagian. Hasil panen selain dibagikan kepada kerabat (misalnya ketela) juga ada yang dijual (cengkeh). Harga cengkeh basah Rp. 4.000,- per kg dan kalau dijual kering berharga Rp. 15.000,- per kg.

(b) **Penangkapan ikan**. Beberapa nelayan pancing yang memiliki modal telah beralih fungsi sebagai nelayan lain, misalnya alat tangkap payang. Setelah ada investor ubur-ubur dan komoditas ikan layur dapat menjangkau pasaran ekspor, maka banyak nelayan yang meningkatkan kapasitas usahanya. Dengan demikian kegiatan penangkapan ikan dan pengolahan ubur-ubur telah mampu diakses dengan baik oleh keluarga nelayan pancing. Peningkatan kapasitas penangkapan dengan alat tangkap pancing (masih tetap pancing ulur, atau menggunakan pancing tonda dan juga pancing rawai) telah meningkatkan frekuensi dan daya jelajah dalam penangkapan ikan. Proses ini tidak dikawatirkan terhadap pengurangan stok ikan, sebab pancing merupakan alat tangkap yang sangat selektif di dalam operasi penangkapan ikan.

Ikan layur yang telah menjadi komoditas ekspor harga jualnya tidak merosot meskipun pada saat musim ikan. Harga jual minimal Rp. 6.000,- per kg. Dengan ukuran perahu yang lebih besar (11 x 3 x 1,5) meter dan penggerak mesin 12 s/d 20 PK mampu melakukan penangkapan ikan sampai ke Popoh, Munjungan dan bahkan Pacitan. Penggunaan wadah yang dilengkapi dengan es sudah dirasakan mampu mempertahankan mutu dan harga ikan, serta berani menangkap ikan lebih jauh ke luar kawasan Prigi.

Ubur-ubur juga menjadi tujuan penangkapan nelayan Prigi, termasuk nelayan pancing yang ada di Karanggongso. Karena ubur-ubur pada umumnya ditangkap di dalam teluk, maka tenaga kerja yang diajak melaut adalah anggota keluarga. Nelayan pancing ada yang lebih mengutamakan menangkap ubur-ubur jika musimnya telah tiba, sebab tidak membutuhkan waktu yang relatif lama (16.00 s/d 22.00), jika dibandingkan kalau melakukan pemancingan yang biasanya pulang pada pagi hari. Harga satu basket ubur-ubur antara Rp. 30.000,- s/d Rp. 40.000,-

Alat tangkap payang digunakan oleh nelayan pancing yang pindah ke alat tangkap ini, atau dilakukan oleh generasi kedua dari keluarga nelayan pancing. Di Karanggongso sekarang terdapat 15 unit payang. Kepindahan ke alat tangkap payang disebabkan oleh alasan ekonomi agar memperoleh hasil yang lebih baik. Meskipun modal investasi untuk perahu, mesin dan alat tangkap relatif besar (Rp. 40.000.000,- s/d Rp. 50.000.000,-), namun hasil tangkapan juga besar. Dalam satu kali trip pernah mendapat penghasilan kotor senilai Rp. 11.000.000,-. **Peningkatan kapasitas** alat tangkap pancing telah meningkatkan hasil tangkapan mereka. Apalagi ketika ikan yang tujuan penangkapan telah terjamin pasarnya.

(c) **Pariwisata**. Lokasi pariwisata di Pasir Putih sebagian dimanfaatkan oleh masyarakat untuk membangun warung, sewa MCK dan penyediaan perahu wisata. Penggunaan kawasan terumbu karang di Pasir Putih sebagai daerah perlindungan laut tidak memberikan pengaruh kepada nelayan pancing, justru dalam jangka panjang dari kawasan *fish sanctuary* tersebut akan memperkaya stok ikan di kawasan teluk.

(d) **Tenaga Kerja Indonesia**. Dilaporkan oleh Situmorang (2003), bahwa banyak kaum muda yang tertarik untuk bekerja di luar negeri (Malaysia, Taiwan dan Hongkong). Remitan yang diterima digunakan untuk membangun rumah dan modal usaha penangkapan. Hal ini dibenarkan oleh IR, istri ANT yang sejak tahun 1997 bekerja di Hongkong dan kembali tahun 2002. Tiga orang anak PRL bekerja sebagai TKI di Hongkong, dan cucu PRL diasuh oleh keluarga PRL.

(e) **Resistensi nelayan pancing.** Berbagai perubahan yang terjadi saat ini lebih banyak yang dapat diakses oleh nelayan pancing untuk beradaptasi. Namun dengan semakin banyaknya alat tangkap yang beroperasi di teluk dan juga adanya nelayan andhon yang dating ke kawasan Prigi, telah seara berangsur menjadi komponen yang menyaingi peluang kerja di sektor penangkapan ikan. Tekanan juga diberikan oleh nelayan yang menggunakan alat tangkap sambil melakukan penyelaman dan penggunaan potas.

Resistensi yang dilakukan oleh nelayan pancing adalah dengan melakukan protes kepada Dinas Kelautan dan Perikanan untuk membatasi jumlah alat tangkap payang. Tahun 2001 pernah terjadi pengrusakan rumah yang ditempati oleh nelayan andhon dan pembakaran alat tangkap payang yang dibawa oleh nelayan andhon. Kesepakatan adalah 40 unit alat tangkap payang dan tidak diperbolehkan adanya nelayan andhon yang membawa alat tangkap payang.

Penentuan harga penjualan hasil tangkapan walaupun dilakukan oleh bakul, tetapi nelayan mampu mendorong kepada bakul untuk membeli dengan harga yang berlaku di pasaran. Memang ada yang terikat dengan bakul tertentu, tetapi masalah harga ikan masih dapat dikompromikan, sedangkan jaminan pinjaman atau ikatan adalah pada kepastian bakul untuk menerima penjualan dari nelayan.

4.9.5. Eksistensi Nelayan Pancing

Nelayan pancing ulur relatif eksis jika dibandingkan dengan nelayan jaring tarik. Dari segi teknologi alat tangkap ini termasuk kategori alat yang ramah lingkungan. Salah satu ikan tujuan penangkapan mereka merupakan komoditi ekspor, sehingga jaminan pasar telah mampu meningkatkan kapasitas penangkapan mereka. Beberapa nelayan mantan pancing juga telah terbukti berhasil pindah ke alat tangkap lain seperti payang. Perahu mancung yang dahulu digunakan untuk memancing ikan sekarang lebih sering digunakan sebagai kapal pengangkut peralatan dari pantai ke lokasi penambatan perahu.

Eksistensi nelayan pancing didukung oleh beberapa faktor. Sifat alat tangkap yang ramah lingkungan jelas tidak akan memperoleh tekanan dari pihak birokrasi. Mutu ikan yang relatif lebih bagus, jika ditangkap dengan pancing jenis ini (masa *rigor mortis* relatif cepat), menjamin harga yang relatif bagus juga. Organisasi nelayan pancing, yang di Karanggongso diketuai oleh PDJ dan di Ketawang diketuai oleh KBL, mendapat porsi yang wajar dalam kedudukannya dalam KPL Kelompok PSBK Prigi Lestari.

4.10. Refleksi Teoretis Perubahan Sosial

Kajian perubahan masyarakat nelayan tradisional tersebut dapat digunakan pula untuk sedikit melakukan refleksi teoretis pada perubahan sosial dalam masyarakat. Refleksi teoretis dimaksud secara rinci adalah sebagai berikut:

4.10.1 Skema Alternatif Appelbaum (1970)

Banyak kajian teori tentang perubahan sosial, dan para ahli juga melakukan beragam klasifikasi yang berbeda. Klasifikasi yang dilakukan oleh Appelbaum (1970) cukup menarik, yaitu berusaha membuat sebuah skema alternatif, yang disusun dari berbagai bahasan ahli.

Dengan mempertimbangkan adanya keruwetan dalam klasifikasi teori perubahan sosial, baik oleh Moore, Smelser dan Etzioni, maka diperlukan sebuah klasifikasi yang mampu mencakup seluruh pemikiran ahli tersebut. Klasifikasi yang diusulkan terdiri dari dua dimensi teoretis perubahan sosial, yang satu berkaitan dengan "sosial" dan lainnya tentang "perubahan". Dimensi "sosial" berkenaan dengan tingkat di mana organisasi sosial memiliki perbedaan sesuai dengan stabilitas internalnya. Dimensi "perubahan" berkaitan dengan ada atau tidaknya seluruh masyarakat untuk seluruh waktu mengalami pergerakan dalam suatu kesatuan "arah" ---- walaupun arah secara umum mungkin telah ada. Klasifikasi yang diusulkan adalah sebagai berikut: (Tabel 4)

Tabel 4. Skema Alternatif Menurut Appelbaum (1970)

	DIMENSI SOSIAL : berdasarkan asumsi-asumsi pada stabilitas internal organisasi masyarakat		
DIMENSI PERUBAHAN: arah perkembangan	Stabilitas internal, perhatian kecil pada perubahan	Stabilitas internal, menunjukkan perubahan yang lambat	Tidak ada stabilitas internal, perhatian kecil pada stabilitas
YA: teori berfokus pada konsistensi arah perkembangan	Teori ekuilibrium	Teori evolusioner	Teori Konflik
TIDAK: teori tidak berfokus pada konsistensi arah perkembangan	Teori kebangkitan dan keruntuhan (Spengler, (Weber)Sorokin)		

4.10.2. Teori-Teori Perubahan Sosial

"Teori" telah didiskripsikan oleh Homans sebagai bentuk dari suatu kesimpulan observasi. Teori adalah konseptualisasi umum, suatu kesatuan dari konsep-konsep umum yang saling berkaitan secara logis, dengan dasar empiris. Parson menyatakan ada dua fungsi teori, yaitu untuk melakukan deskripsi dan sebagai alat untuk melakukan analisis. Dalam membagi teori terdapat dua pertanyaan pokok. Pertama, tentang relevansi, (a) Bagaimana masyarakat dapat dibayangkan sebagai suatu yang menjaga kesatuan? (b) Apa implikasi konseptualisasi ini pada perubahan dalam masyarakat? Kedua, kompetensi teori, yaitu (a) Bagaimana tingkat kesesuaian teori dengan fakta? (b) Bagaimana suatu teori dapat dites --- - misalnya, apakah mungkin menunjukkan kesalahan proposisi kunci dengan menggunakan referensi data?

Sosiologi dimulai dengan **teori evolusi** dan beberapa teori sosiologi kontemporer memperoleh gagasan dari ahli teori evolusi abad 19. Teori evolusi abad 19 didasarkan pada ilmu biologi, walaupun sedikit ahli teori, seperti Comte yang melakukan analogi antara "organisme sosial" dengan kesesuaian secara biologis, ilmu biologi secara jelas memberikan inspirasi model bagi ilmu tentang masyarakat. Masyarakat adalah organisme, dengan perbedaan struktur yang terspesialisasi dalam aspek-aspek yang berbeda untuk kelangsungan hidupnya. Proposisi kunci teori evolusi awal yang diperoleh dari fakta empirik telah menjadi dasar bagi neo-evolusi untuk melakukan tes pada teori yang ada.

Teori **ekuilibrium** yang dikembangkan pada abad ke-20 merupakan warisan dari teori evolusi awal. Sementara teori evolusi dibangun dari kombinasi antara analogi organismik dengan kesamaan secara sosiologis dari teori Darwin tentang evolusi spesies, di sisi lain, ahli teori ekuilibrium sangat sedikit mendasarkan dirinya pada studi tentang organisasi sosial dalam lingkungannya. Teori ekuilibrium saat ini (1970-an) mendominasi paradigma sosiologi di Amerika. Parson mengajukan pemikiran sosiologis melalui teori tindakan dan kemudian disempurnakan dengan teori sistem. Satu hal penting dalam kegagalan teori ekologi manusia adalah pada kesulitan melakukan tes pada proposisi utamanya.

Para ahli teori **konflik** menggambarkan organisasi sosial sebagai terjadinya sebuah respon pada kelangkaan pada sumberdaya. Menurut Marx, sumberdaya yang dimaksud adalah ekonomi, baik subsisten maupun kepemilikan secara umum. Masyarakat industri terorganisasi dalam dua kelas, yaitu kelas kapitalis yang memiliki sumberdaya dan melakukan eksploitasi pada sumberdaya tersebut, dan kelas pekerja, yang menjadi buruh para kapitalis dalam mengeksploitasi sumberdaya.

Teori evolusi dan teori ekuilibrium didasarkan pada asumsi-asumsi metateorikal, seperti "bahwa masyarakat relatif tenang dan stabil, memiliki konsensus nilai di antara para anggotanya", tetapi teori konflik memiliki suatu asumsi metateoretikal yang menyatakan suatu pandangan bahwa bila ada konflik selalu ada perubahan, semua organisasi sosial tidak bisa stabil, dan setiap satuan yang lebih besar menjadi penekan dan penghalang.

Ahli **teori kebangkian dan keruntuhan** memberikan karakter dengan pandangan yang lebih luas. Fokus perhatian mereka pada sistem kultural sebagai suatu sistem sosial, dengan kebudayaan didefinisikan sebagai keseluruhan dari kelas masyarakat (masyarakat Barat merujuk pada Spengler dan Weber, super sistem sosio-kultural pada Sorokin). Meskipun Spengler melakukan analogi antara kebudayaan dengan organisme, namun sangat sedikit membahas tentang spesialisasi, diferensiasi dan integrasi, namun lebih kepada deskripsi secara paralel antara siklus hidup organisme dengan dalam kehidupan masyarakat.

4.10.3. Refleksi Fakta Lapang Nelayan Tradisi dalam Skema Alternatif Teori Perubahan Sosial

Pada skema alternatif menurut Appelbaum di atas, dapat dijelaskan bahwa evolusi adalah sebuah proses yang sedang berjalan dan tidak akan pernah berhenti. Hal ini menunjukkan bahwa perubahan sosial dalam masyarakat di Pantai Prigi adalah sebuah proses evolusi, yang hal itu dialami oleh nelayan pancing maupun nelayan jaring tarik. Perubahan mana merupakan bagian dari perubahan masyarakat yang lebih luas, dan bahkan dipengaruhi oleh perubahan pada tingkat regional (modal dan teknologi) nasional (kebijakan, teknologi) dan bahkan secara internasional (informasi Tenaga Kerja Indonesia, sistem pasar ekspor ikan layur). Proses-proses menyikapi perubahan pada dasarnya adalah sebuah upaya melakukan adaptasi.

Teori konflik akan menjelaskan sebagai sebuah mekanisme interaksi. Hal ini dapat dijelaskan bahwa ketika nelayan jaring tarik berinteraksi dengan nelayan lain maupun dengan penentu kebijakan, maka karena ada perbedaan kepentingan maka dapat menyebabkan konflik. Proses marginalisasi nelayan jaring tarik dan pemberian stigma pada alat tangkap yang merusak lingkungan dan disamakan dengan alat tangkap trawl yang telah dilarang beroperasi. Pengurangan areal penangkapan ikan untuk kawasan pelabuhan dan untuk *fish sanctuary* adalah sebuah proses perebutan sumberdaya. Perlawanan nelayan dalam bentuk resistensi dengan mencemooh, tidak mau terlibat dalam pertemuan bahkan melakukan demonstrasi dapat dijelaskan dari teori konflik. Hal demikian juga dialami oleh nelayan pancing, hanya saja nelayan pancing karena tidak terkena issue alat tangkap yang terbatas, maka tidak memberikan perlawanan kepada kebijakan pemerintah. Para pedagang yang ada juga memberikan harga ikan yang memadai untuk ikan layur, baik saat panen maupun peceklik.

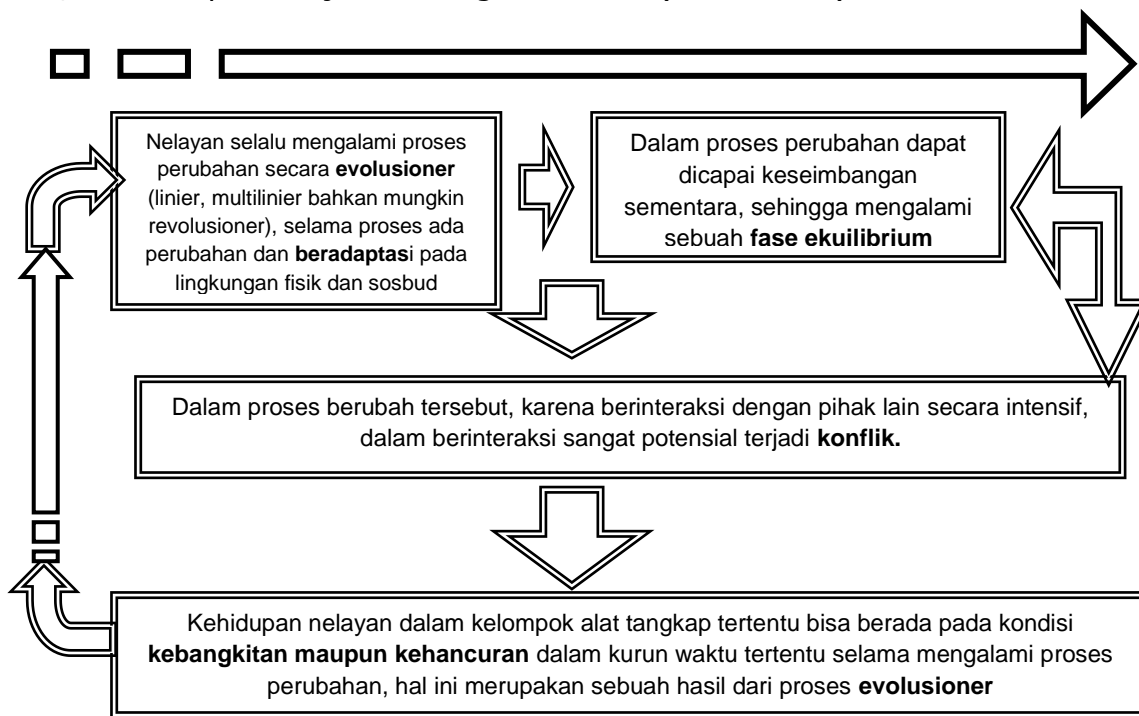
Teori ekuilibrium dapat menjelaskan adanya keseimbangan sesaat yang sewaktu-waktu mungkin akan ada perubahan. Kondisi yang saat ini tampak damai, dapat dianggap dalam stadia ekuilibrium. Karena masih ada alternatif memenuhi kebutuhan hidup baik tetap bekerja di sektor penangkapan ikan (walau menjadi buruh) maupun di sektor pertanian, terutama dalam memanfaatkan sumberdaya hutan, maka kondisi sementara saat ini dalam kondisi tenang. Pada waktu-waktu tertentu, ketika kekuatan yang dimiliki oleh nelayan cukup kuat melakukan sebuah tindakan tertentu, sebagai akibat dari ada yang menggerakkan atau dalam upayanya sendiri, maka konflik baru akan muncul dan hasilnya bisa dalam bentuk ekuilibrium baru, atau dalam bentuk yang mengalami kekacauan dan bahkan kekalahan, artinya harus melakukan aktivitas di luar penangkapan ikan.

Teori "timbul-tenggelam" atau teori "kebangkitan dan kehancuran" dapat menjelaskan adanya sebuah hasil suatu proses daripada sebuah proses itu sendiri, sebagaimana yang disampaikan oleh analisis evolusioner. Kebangkitan dan kehancuran dapat diamati dalam periodisasi waktu perkembangan kehidupan nelayan. Fase I, yaitu sebelum tahun 1975 adalah masa kebangkitan dan kejayaan nelayan jaring tarik, pada fase II, antara 1975-1990 merupakan masa transisi menuju kehancuran, dan fase III, setelah tahun 1990 merupakan masa kehancuran (zaman "ruwet"). Hal ini agak berbeda dengan periodisasi nelayan pancing, di mana pada fase I, sebelum tahun 1975 mengalami masa kedamaian, pada fase II, yaitu antara tahun 1975 – 1990, mengalami zaman terbuka dan secara teknologi dalam kondisi

stagnasi. Tetapi justru pada fase III, 1990- sekarang ketika ikan layur menjadi komoditi ekspor, maka nelayan pancing mengalami zaman keemasan.

Reflesi lapang terhadap pemikiran teoretis menunjukkan bahwa teori evolusi menunjukkan sebuah proses perubahan mulai awal sampai akhir zaman. Teori konflik akan menjelaskan untuk menerangkan sebuah mekanisme dari proses perubahan sosial. Teori equilibrium akan mampu menjelaskan sebuah hasil sementara dari sebuah proses perubahan sosial. Terakhir teori “kebangkitan dan kehancuran” mampu menunjukkan hasil akhir suatu perubahan sosial.

Refleksi lapang terhadap teori perubahan sosial jika diilustrasikan dalam sebuah gambar, maka dapat disajikan sebagai berikut: (Gambar 13)



Gambar 13. Refleksi lapang pada teori perubahan sosial

Dengan demikian, di dalam melakukan sebuah kajian tentang masyarakat maka dapat digunakan sebuah teori utama, yang kemudian dilengkapi dengan teori lain. Pelengkapan ini dapat berbentuk penambahan bingkai atau dilakukan sintesis. Karena hubungan sosial yang selalu dinamis, dan dalam tataran struktur yang selalu berubah, maka teori pertukaran dan konflik akan dibahas kemudian secara lebih khusus di bab berikut.

REFERENSI

- Appelbaum, Richard P. 1970. Theories of Social Change. Markam Publishing Company, Chicago
- Emmerson, Donald K. 1982. Order of Meaning: The Understanding Political Change in Fishing Community in Indonesia". In Benedict Anderson an Audry Kahin Interpreting Indonesian Politics: Thirteen Contribution to the Debate. CMIP. Ithacha. NY. P. 149-164
- Gidden, Anthony. 2003. The Constitution of The Society. Teori Strukturalisasi untuk

- analisa Sosial. Pedati. Yogyakarta
- Mubyarto, Lukman Sutrisno dan Michel Dove. 1984. Nelayan dan Kemiskinan: Studi Ekonomi Antropologi di Dua Desa Pantai. Rajawali. Jakarta.
- Nikijuluw, Victor.P.H. 2002.Rezim Pengelolaan Sumberdaya Perikanan. Pusat Pemberdayaan dan Pembangunan Regional (P3R). PT. Pustaka Cidesindo. Jakarta.
- Ritzer, George dan Douglas J. Goodman. 2005. Teori Sosiologi Modern. Prenada. Jakarta.
- Salim, Agus. 2001. Teori dan Paradigma Penelitian Sosial: dari Denzim Guba dan penerapannya. Tiara Wacana. Jakarta.
- Setiawan,Edi Susilo dan Abdul Qoid, 1993. Peranan Pedagang dan KUD/TPI dalam Usaha Penangkapan Ikan, Studi Kasus dengan Pendekatan "Ketergantungan" dan Inovasi di Pacitan. Bultin Ilmiah Perikanan. Edisi/2. Hal 61-79. Fakultas Perikanan Universitas Brawijaya.
- Susilo, Edi. 1991. Resiprositas dan Struktur Masyarakat: Studi Kasus Nelayan pancing di Karanggongso, Jawa Timur. Thesis S2. Program Pasca Sarjana IPB. Bogor.
- Susilo, Edi. 1997. "Pengembangan Kelembagaan Akomodatif: Sintesis Pengembangan Perikanan untuk Meningkatkan Aksesibilitas Perikanan Rakyat". Makalah Disampaikan Pada Simposium Perikanan Indonesia 2, di Ujung pandang, november 1997.
- Susilo, Edi. 2005." Mengembangkan adaptor Sosial dalam Pembangunan Perikanan" dala Kusnadi "Polemik Kesiskinan Nelayan" . Pondok Edukasi dan Pokja Pembaharuan. Yogyakarta
- Ulum, Bahrul. 2002. Manajemen Pengelolaan Usaha pada Kelompok Nelayan Jaring Tarik (Beach seine) di Pantai Prigi, Kecamatan Watulimo. Kabupaten Trenggalek. Laporan Praktek Kerja Lapang. Fakultas Perikanan. Universitas Brawijaya Malang. Tidak diterbitkan
- Widayanti, Wasiska. 2003. Strategi Nelayang Menghadapi Marjinalisasi (Kasus Usaha Jaring Tarik di teluk Prigi, Trenggalek), Thesis S2. Program Pasca Sarjana IPB. Bogor. Tidak Diterbitkan.

PROPAGASI

M. Latihan dan Diskusi (Propagasi vertical dan Horizontal)

5. Terdapat periodisasi dalam kehidupan nelayan jaring tarik, jelaskan dan diskusikan fase-fase yang terdapat dalam periodisasinya tersebut dan buat makalahnya berdasar pengamatan yang harus dilakukan pada masyarakat nelayan yang ada di daerah terdekat. Serta ilustrasikan dalam bentuk gambar berdasar teori perubahan sosial.

N. Pertanyaan (Evaluasi mandiri)

9. Theory of Evolution in contemporer was release in 19th century, explain it!
- 10.How to use two theories of Parson to describe and analyze a spcial problem?
- 11.What is Alternative of Appelbaum Scheme?
- 12.How to explain the fact of traditional fishermen in the Social Exchange Alternative Scheme?

O. QUIZ -mutiple choice (Evaluasi)

P. PROYEK (Eksplorasi entrepreneurship, penerapan topic bahasan pada dunia nyata)



SOSIOLOGI PERIKANAN: Teori Pertukaran Sosial

Dr. Ir. Edi Susilo, MS.

Agribisnis Perikanan, SEPK, FPIK, Universitas Brawijaya

Email : olisuside@yahoo.com



5 TEORI PERTUKARAN SOSIAL	5.3 Teori Pertukaran Peter Blau
5.1 Kedudukan Teori dalam Ilmu Pengetahuan.	5.4 Analisis Pertukaran dalam Struktur Masyarakat Nelayan
5.2 Teori Pertukaran George C. Homans	

MODUL

5

SELF-PROPAGATING ENTREPRENEURIAL EDUCATION DEVELOPMENT

5. TEORI PERTUKARAN SOSIAL

5.1 Kedudukan Teori dalam Ilmu Pengetahuan.

Banyak sekali teori sosiologi yang dapat digunakan untuk melakukan analisis dalam kehidupan masyarakat nelayan. Mengingat pada kenyataan di lapang bahwa perikanan di Indonesia berada dalam dimensi evolusi multiliner (dari kondisi evolusi sosiobudaya awal sampai tahap akhir) dan diperlukan analisis baik pada tingkat individu maupun struktur sosial, maka dua kajian teori yang digunakan adalah teori evolusioner dan teori pertukaran. Pilihan ini lebih didasarkan kepada kebutuhan praktis saat ini, dalam arti para penulis lain dianjurkan untuk membingkainya dengan teori-teori yang lain. Teori evolusi sudah dibahas pada bab sebelumnya, pada bab ini akan disampaikan teori tentang pertukaran.

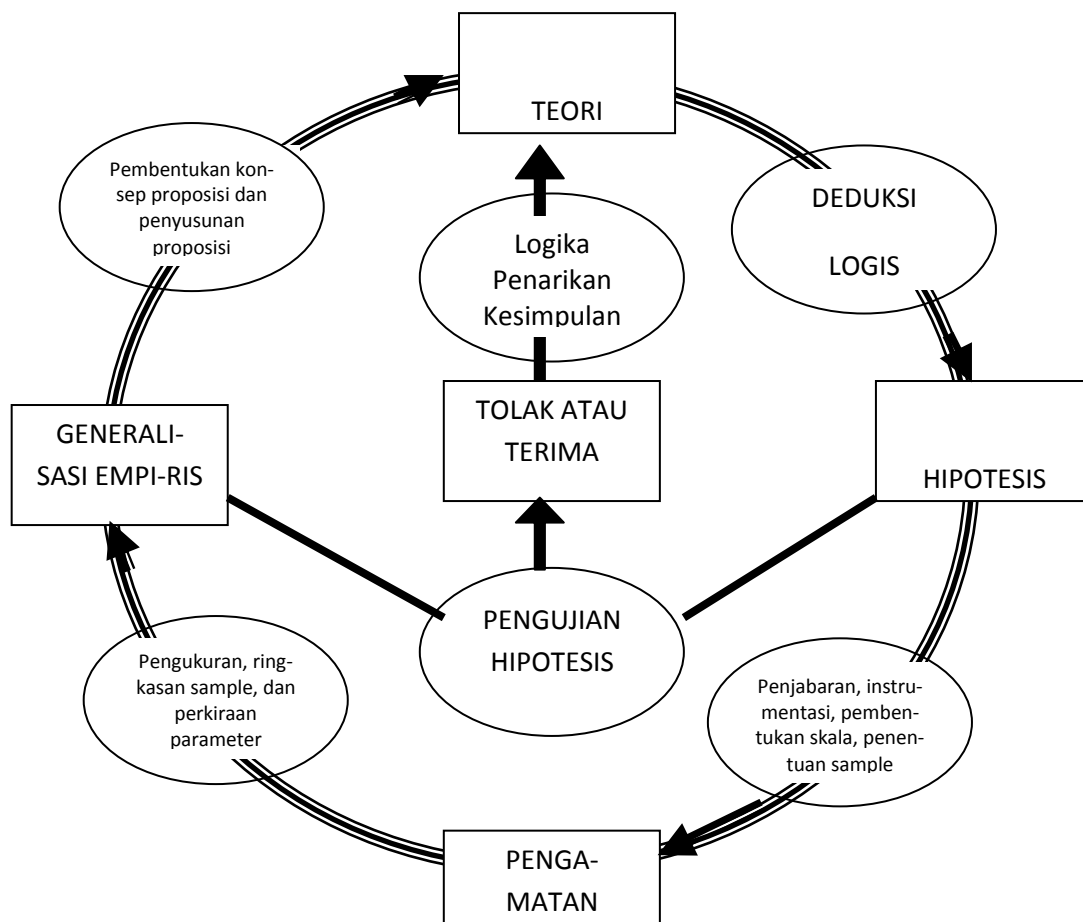
Pengenalan teori pertukaran tidak saja penting dalam hal substansinya, namun saya ingin juga ada aspek pembelajaran dalam proses keilmuan. Selama ini ada dua aliran pendekatan dalam mengembangkan teori dan mengatasi masalah praktis dalam bidang ilmu sosial. Pertama adalah aliran "law-like"¹² yang terdiri dari: (a) pendekatan positivisme atau (kuantitatif) yang mengawali perkembangan awal sosiologi yang berkiblat kepada pendekatan ilmu alam (fisika), (b) pendekatan fenomenologi (kualitatif) yang berusaha melihat fenomena sosial dari kacamata emik, dan (c) adalah adanya upaya menggabungkan kedua pendekatan yang ada atau mix methodology. Kedua, adalah aliran dari Jerman yang mengembangkan teori kritis, yang menolak pendekatan "law-like" dalam melakukan pengkajian dan analisis sosiologis.

Saya sebagai penulis, sejak awal mengikuti pola-pola berfikir positivistik, mengacu kepada sebuah kerangka konseptual pada teori tertentu, namun di dalam melakukan analisis menghindari dari penggunaan statistika. Secara sederhana saya terbiasa berfikir matematis, namun tanpa menggunakan rumus matematika. Model analogis lebih banyak saya gunakan untuk melakukan analisis kehidupan masyarakat nelayan. Dengan demikian saya mengajak kepada para peneliti lain untuk melakukan kajian yang lebih komprehensif. Pilihan saya tentu bersifat subyektif dengan



pertimbangan utama pada keterbatasan saya dalam bidang matematika dan statistika.

Mengacu kepada Wallace (1990) maka proses ilmiah bisa dianggap melibatkan lima komponen informasi pokok di mana transformasi satu bagian ke bagian lain umumnya dikendalikan oleh enam himpunan metode dasar seperti terlihat dalam Gambar 13 berikut.



Gambar 13. Komponen informasi, kontrol metodologis dan transformasi dalam proses ilmiah Wallace (1990).

Berdasarkan pada gambar tersebut, maka jika sebuah proses penelitian dimulai dari teori dan kemudian menyusun hipotesis, melakukan pengamatan di lapang, kemudian melakukan proses pengujian hipotesis dan melakukan generalisasi empiris, dan melakukan penguatan teori maupun penyanggahan teori, maka proses penelitian tersebut merupakan proses penelitian deduktif atau dikenal juga dengan pendekatan kuantitatif, atau *positivisme*. Sebaliknya jika sebuah riset dimulai dari pengamatan, kemudian dilakukan generalisasi empiris, diteruskan dengan pembentukan teori, dan kemudian disusun sebuah hipotesis, maka disebut sebagai proses penelitian induktif, atau pendekatan kualitatif dan dikenal juga dengan *grounded research* (Wallace, 1990, Singarimbun dan Effendi, 1995, Salim. 2001 dan Cresswell, 2003).

Teori terdiri dari satu atau serangkaian proposisi. Proposisi terdiri dari penjelasan dua atau lebih variabel. Variabel adalah sebuah konsep yang memiliki variasi. Teori merupakan sebuah komponen penting dalam ilmu pengetahuan, di mana teori dapat berfungsi sebagai

pedoman suatu penelitian, mampu menjelaskan serangkaian fakta, dan juga dapat digunakan untuk meramalkan kejadian di masa depan (Hasan, 1985, Singaribun dan Effendi, 1995). Uraian berikut akan menyajikan teori pertukaran Homans dan Blau.

5.2 Teori Pertukaran George C. Homans

Homans dalam Ritzer dan Goodman (2005) mengembangkan sejumlah enam proposisi teori pertukaran, yang secara rinci adalah sebagai berikut.

Proposisi-1 (proposisi sukses): Dalam setiap tindakan, semakin sering suatu tindakan tertentu memperoleh ganjaran, maka kian sering orang melakukan tindakan tersebut.

Proposisi-2 (proposisi stimulus): Jika di masa lalu terjadinya stimulus yang khusus, atau seperangkat stimuli, merupakan peristiwa di mana tindakan seseorang memperoleh ganjaran, maka semakin mirip stimuli yang ada sekarang ini dengan stimuli yang lalu tersebut, maka akan semakin mungkin seseorang melakukan tindakan serupa atau yang mirip.

Proposisi-3 (proposisi nilai): Semakin tinggi nilai suatu tindakan, maka kian senang seseorang melakukan tindakan tersebut.

Proposisi-4 (proposisi deprivasi-satiasi): Semakin sering di masa yang baru berlalu, seseorang menerima suatu ganjaran tertentu, maka semakin kurang bernilai bagi orang tersebut peningkatan setiap unit ganjaran tersebut.

Proposisi-5A (proposisi restu/agresi-A): Bila tindakan seseorang tidak memperoleh ganjaran yang diharapkannya, atau menerima hukuman yang tidak diinginkan, maka dia akan marah, dia menjadi sangat cenderung menunjukkan perilaku agresif, dan hasil perilaku demikian menjadi lebih bernilai baginya.

Proposisi-5B (proposisi restu/agresi-B): Bila tindakan seseorang memperoleh ganjaran yang diharapkannya, terutama hadiah yang lebih besar dari yang diharapkan, atau tidak menerima hukuman yang tidak diinginkan, maka dia akan puas, dia makin besar kemungkinan melaksanakan tindakan tersebut, dan hasil perilaku demikian menjadi lebih bernilai baginya.

Proposisi-6 (proposisi rasionalitas): Dalam memilih berbagai tindakan alternatif, seseorang akan memilih satu di antaranya, yang dia anggap saat itu memiliki *value* (V), sebagai hasil, dikalikan dengan probabilitas (P), untuk mendapatkan hasil yang lebih besar.

Teori ini sangat sesuai untuk membahas hubungan sosial antar individu, misalnya dalam mekanisme hubungan *patron-client*, hubungan kekerabatan atau hubungan sosial antar individu dalam sebuah komunitas tertentu. Kritik diberikan pada teori ini karena dianggap terlalu mereduksi fenomena sosial ke dalam hubungan antar pribadi. Sehubungan dengan hal tersebut Peter Blau mengembangkan teori pertukaran ini, yaitu bergerak dari pendekatan mikro kepada terbentuknya sebuah struktur makro.

5.3 Teori Pertukaran Peter Blau

Karena itu menjadi menarik adalah jika teori pertukaran Homans kemudian disambung dengan teori pertukaran Peter Blau (Ritzer dan Goodman, 2005). Peter Blau bertujuan untuk memahami struktur sosial berdasarkan analisis proses sosial yang mempengaruhi hubungan antara individu dengan kelompok. Pertanyaan mendasarnya adalah ..., bagaimana cara kehidupan sosial menjadi tersusun menjadi struktur asosiasi yang semakin kompleks. Blau memusatkan perhatian pada proses yang menurutnya mengatur kebanyakan perilaku manusia dan melandasi hubungan antar individu maupun antar kelompok. Blau membayangkan empat langkah berurutan, mulai dari pertukaran antar pribadi ke struktur sosial hingga ke perubahan sosial. Langkah-1, pertukaran atau transaksi antar individu yang meningkat ke, langkah-2, diferensiasi status dan kekuasaan yang mengarah ke, langkah-3, legitimasi dan pengorganisasian yang menyebarkan bibit dari, langkah -4, yaitu oposisi dan perubahan. Blau bergerak dari mikro ke makro. Dalam hal ini Blau menyatakan bahwa bila satu orang membutuhkan sesuatu dari orang lain, tetapi tidak memberikan apa pun yang sebanding sebagai tukarnya, maka akan tersedia empat kemungkinan: (1) orang itu dapat memaksa orang lain untuk membantunya, (2) orang itu akan mencari sumber lain untuk memenuhi kebutuhannya, (3) orang itu dapat mencoba terus bergaul dengan baik tanpa mendapat apa yang dibutuhkannya dari orang lain, dan (4) paling penting orang akan menundukkan pada orang lain dan dengan demikian memberikan orang lain itu "penghargaan yang sama" dalam antar hubungan mereka.

Meskipun antara Homans dan Blau ada kesamaan, namun Blau bergerak menuju ke struktur sosial. Blau menyatakan bahwa kita tidak bisa menganalisis interaksi sosial terpisah dari struktur sosial yang melingkupinya. Struktur sosial muncul dari interaksi sosial, tetapi segera setelah muncul, struktur sosial terpisah keberadaannya dan mempengaruhi proses interaksi. Dalam analisis yang lebih jauh tentang struktur sosial, Blau menyatakan bahwa; "Struktur sosial kompleks yang menandai kehidupan kolektif luas, secara fundamental berbeda dengan struktur kelompok kecil yang lebih sederhana. Struktur hubungan sosial berkembang dalam kelompok kecil selama berlangsungnya interaksi di kalangan anggotanya. Karena tak ada interaksi sosial langsung di kalangan sebagian besar anggota komunitas besar atau keseluruhan masyarakat, tentu ada mekanisme lain yang menengahi struktur hubungan sosial antara mereka".

Menurut Ritzer dan Goodman (2005) pernyataan Blau di atas memerlukan studi yang mendalam. Di satu pihak Blau mengesampingkan behaviorisme sosial sebagai paradigma yang memadai untuk menjelaskan struktur sosial yang kompleks. Di lain pihak, ia menyingkirkan definisi sosial karena ia menyatakan bahwa interaksi sosial dan definisi sosial yang mengiringinya tak terjadi secara langsung dalam organisasi sosial berskala luas. Jadi beranjak dari paradigma perilaku sosial, Blau mempersekutukan dirinya dengan paradigma fakta sosial dalam menjelaskan struktur sosial yang lebih kompleks.

5.4 Analisis Pertukaran dalam Struktur Masyarakat Nelayan

Analisis pertukaran dalam masyarakat nelayan dapat dimulai dari penggambaran struktur masyarakat secara luas. Struktur masyarakat dapat ditelaah melalui pembentukan kelompok (*social grouping*) yang kemudian dirinci berdasarkan status dan perannya. Status dan peran tadi terdiri dalam diri kelompok maupun dalam kaitannya dengan individu dalam suatu kelompok. Dari status yang ada, maka akan dapat dilakukan telaah terhadap jaringan sosial yang terbentuk, dan dalam berbagai peristiwa pertukaran sosial. Melalui pertukaran tersebut akan dapat ditelaah sistem norma yang berlaku. Perbedaan status dalam peran akan menampilkan tingkat kekuasaan antara status yang satu dengan status yang lain.

Langkah awal deskripsi jaringan dalam hubungan sosial dimulai sebagai berikut. Jaringan sosial antara individu dengan struktur sosial yang terbentuk atau yang dibentuk. Semakin luas jaringan yang dibangun oleh individu dalam sebuah struktur sosial, maka akan tumbuh interaksi yang tidak hanya merupakan sebuah hubungan sosial antar individu, tetapi dapat berupa sebuah interaksi antara individu dalam satuan kelompoknya (*social grouping*),

maupun antar kelompok. Pada Gambar 14, tampak bahwa hubungan sosial dapat dibangun dari hubungan antar individu dalam kelompok (A), hubungan antara individu dengan kelompok (B), hubungan antar kelompok, (C), dan hubungan antar individu berbeda kelompok (D). Jika di dalam sebuah masyarakat terdapat beragam *social grouping*, maka bentuk struktur yang terbangun akan semakin kompleks. Apalagi kalau masuknya individu atau kelompok dipaksakan, dalam arti ada kewenangan melakukannya, dan struktur belum dapat menerima kehadiran kelompok tersebut, maka keruwetan struktur akan bertambah parah. Kajian adaptasi manusia dalam struktur menjadi sangat relevan agar struktur sosial

REFERENSI

- Wallace, Walter. 1990. Metode Logika Ilmu Sosial. Bumi Aksara. Jakarta.
- Singarimbun, Masri dan Sofyan Effendi. 1995. Metode Penelitian Survey. LP3ES. Jakarta.
- Salim, Agus. 2001. Teori dan Paradigma Penelitian Sosial: dari Denzim Guba dan penerapannya. Tiara Wacana. Jakarta.
- Cresswell, John W. 2003. Research Design: Qualitative & Quantitative Approaches. Sage Publications Thousand Oaks.

PROPAGASI

Q. Latihan dan Diskusi (Propagasi vertical dan Horizontal)

6. Secara berkelompok, berdasarkan pengamatan yang ada di wilayah pesisir perikanan buatlah sebuah makalah yang memaparkan realita masyarakat yang mendeskripsikan pola hubungan yang sesuai dengan teori Pertukaran George C. Homans.
(satu kelompok terdiri dari 3 orang yang dipilih berdasar nomor presensi)

R. Pertanyaan (Evaluasi mandiri)

13. Gambarkan proses pembentukan teori!
14. Jelaskan proposisi-proposisi yang ada di teori Pertukaran George C. Homans.
15. Bagaimana teori pertukaran berdasar teorinya Peter Blau?
16. Mengapa pembentukan social grouping dalam pembagian status dan peran dapat menjadi salah satu indikator dalam penggambaran pertukaran sosial?

S. QUIZ -multiple choice (Evaluasi)

T. PROYEK (Eksplorasi entrepreneurship, penerapan topic bahasan pada dunia nyata)



SOSIOLOGI PERIKANAN:

Konflik dan Potensi Konflik

Dr. Ir. Edi Susilo, MS., Wahyu Handayani, S.Pi.

Agribisnis Perikanan, SEPK, FPIK, Universitas Brawijaya

Email : olisuside@yahoo.com



MODUL

6

SELF-PROPAGATING ENTREPRENEURIAL EDUCATION DEVELOPMENT

6 KONFLIK DAN POTENSI KONFLIK

6.1 Teori Konflik

6.1.1 Proposisi Utama Teori Konflik

6.1.2 Karl Marx: Teori Perlawanan Kelas

6.1.3. Wright Mills: Kekuatan Penguasa

6.1.4. Ralf Dahrendorf: Penguasa dan yang dikuasai

6.2. Variasi Teori Konflik

6.2.1. Aliran Frankfurt dan teori kritis.

6.2.2. Sosiologi baru atau sosiologi radikal (Horowitz dan sosiologi radikal)

6.2.3. Sosiologi Dialektik (Collins dan teori konflik analitik)

6.2.4. Fungsionalisme Konflik (Lewis Coser)

6.2.5. Caplow dan Teori Formal Konflik

6.2.6. Dahrendorf dan sosiologi dialektik

6.3. Evaluasi Kritis Pada Teori Konflik.

6.4. Catatan Akhir Teori Konflik

6.5 Potensi Konflik dan Konflik dalam Masyarakat Pesisir.

6.5.1 Mengukur potensi konflik.

6.5.2. Kasus Konflik yang Tak Kunjung Berhenti

6.5.3. Menyelesaikan Konflik.

6. KONFLIK DAN POTENSI KONFLIK

6.1 Teori Konflik

Sebelum membahas teori konflik ada baiknya kalau kita bandingkan dulu dengan teori struktural fungsional secara sederhana, untuk mengingatkan kembali tentang keterkaitan teori tersebut. Menurut Horton dan Hunt (1987), perbedaan tersebut disajikan pada Tabel 5.

Tabel 5. Perbedaan Pokok antara Teori Fungsional dengan Teori Konflik

Items	Fungsional	Konflik
Masyarakat	Sistem stabil, kerjasama	Tidak stabil, bertentangan
Kelas sosial	Wajar, sesuai aturan	Mengeksploitasi orang lain
Perbedaan social	Tidak dapat dihindarkan	Tidak perlu dan tidak adil
Perubahan Sosial	Masyarakat memang terus berubah secara alamiah	Dipaksakan oleh kelompok dominan
Ketertiban social	Tanpa kesadaran untuk mengkoordinasikan	Dilakukan oleh kelompok dominan
Nilai-Nilai	Konsensus untuk mempertahankan kesatuan masyarakat	Ilusi untuk mempertahankan status quo
Lembaga-2	Menanamkan nilai untuk	Agar kelas dominan



Sosial	keutuhan masyarakat	ada kesetiaan dan hak khusus
Hukum dan pemerintahan	Menjalan aturan sesuai konsensus	Jalankan aturan jamin hak-hak istimewa kelompok dominan

Tulisan teori konflik berikut ini disarikan dari Abraham (1982) sebagai berikut. Sementara ini keberadaan fungsionalisme-struktural telah dianggap sebagai pendekatan utama dari suatu analisis sosiologis, sedangkan teori konflik sampai sekarang masih dalam tahap perkembangannya. Dalam kenyataannya, tidaklah ada suatu hal seperti halnya teori konflik dalam sosiologi; terlepas dari itu, terdapat beberapa teori konflik yang mencoba untuk menjelaskan aspek spesifik dari fenomena sosial. Bagaimanapun juga terdapat banyak usaha dalam sosiologi modern untuk membentuk suatu pendekatan konflik yang terintegrasi dari analisis sosiologi guna menyetarakan dengan teori fungsionalisme-struktural.

Dua perbedaan praktek mendasar dari teori konflik di kalangan kaum klasik, yaitu:

1. Praktek hubungan kekuasaan berdasarkan pada filosofis politik. Machiavelli, Bodin, Hobbes, dan Mosca telah menganalisa konflik dalam politik khususnya hubungan kekuasaan dan juga menganggap "negara" sebagai subyek utama analisa.
2. Praktek persaingan kompetitif dalam ekonomi klasik. Adam Smith, Robert Malthus, dan generasi pakar ekonomi yang mengikutinya menempatkan persaingan ekonomi sebagai topik bahasan utamanya.

Teori konflik secara sosiologi sangat luas, dan merupakan perpaduan antara kedua fokus tradisi utama diatas dengan perhatian utama pada ketidaksamaan pembagian imbalan (*reward*) dalam masyarakat. Karl Marx merupakan pionir dari teori tersebut. C. Wright Mills, Ralf Dahrendorf, Irving Louis Horowitz, Lewis Coser, Herbert Marcuse, Randall Collins dan Andre Gunder Frank adalah beberapa diantaranya yang terkenal dengan teori konflik dalam sosiologi modern.

Ditengah-tengah perdebatan mengenai konflik dalam masyarakat tersebut, para sosiolog kemudian membedakan konflik menjadi dua kategori umum:

1. Konflik Internal. Konflik yang menjadi sumber perubahan berasal dari dalam masyarakat dan menandakan wilayah konflik yang paling umum dan dapat dikenali melalui analisa sebagai berikut: (a) Kecenderungan alamiah untuk berubah, (b) Konflik mengenai perbedaan kebutuhan, (c) Konflik tentang nilai-nilai, (d) Konflik tentang otoritas, dan (e) Konflik diantara individu dan masyarakat
2. Konflik Eksternal., atau hal-hal yang tidak berasal dari atau diantara sistem-sistem, biasanya terbagi menjadi tiga kategori: (a) Peperangan, (b) Inovasi kebudayaan, dan (c) Konflik tentang ideologi

Lewis Coser mengenali konflik diantara dua tipe dari konflik, yaitu konflik yang sesuai realita dan yang tidak sesuai realita. Konflik yang sesuai realita memerlukan fungsi alternatif seperti halnya ketika suatu pihak tidak mempunyai pilihan untuk mendapatkan pekerjaan kecuali terlibat adanya konflik. Konflik yang tidak sesuai realita muncul dari rasa kekurangan dan frustrasi yang mana menjadikannya ke dalam beraneka perilaku negatif, 'terjadi manakala kepuasan menjadi hasil tindakan agresif tersebut.

Dahrendorf membedakan dua teori sosial dalam sosiologi modern: suatu integrasi antara teori masyarakat dan teori paksaan dalam masyarakat. Dan tidak seperti fungsionalisme-struktural, teori konflik merupakan karakter yang anti terhadap sistem. Para fungsionalis menganggap masyarakat sebagai suatu sistem sosial, sedangkan teori konflik kadangkala berkonsentrasi pada bagian spesifik dalam suatu masyarakat seperti kelas-kelas, pihak-pihak, kelompok-kelompok, kelompok kepentingan dan lain sebagainya.

Menurut Horowitz, arti pentingnya menganggap konflik sebagai unsur asing terhadap struktur sosial atau sebagai penghancur organisme sosial telah menimbulkan asumsi yang

tidak benar bahwa suatu perubahan hanya akan terjadi melalui metode penyingkapan dan spontanitas.

6.1.1 Proposisi Utama Teori Konflik

Proposisi utama teori konflik adalah sebagai berikut:

1. Masyarakat bukanlah suatu sistem keseimbangan tapi merupakan struktur berinti dengan elemen-elemen yang tersusun secara tidak sempurna, dijalankan bersama-sama oleh paksaan dari beberapa elemen terhadap ketidakberdayaan elemen lainnya.
2. Masyarakat dan elemen-elemennya merupakan suatu proses perubahan yang berlangsung terus menerus dengan adanya variasi tingkatan; perubahan dan konflik selalu berkelanjutan dan merupakan bentuk normal dari kelompok manusia.
3. Masyarakat tersusun dari berbagai tingkatan kehidupan, perjuangan dan orang-orang yang berkompetisi; dunia sosial adalah suatu ruang atau media yang didalamnya terjadi konflik-konflik kehidupan.
4. Konflik sosial sudah mendarahdaging secara alami di dalam struktur sosial, perbedaan antara konflik internal dan eksternal hanya dapat dibuktikan dalam analisis logis.
5. Kecenderungan alamiah untuk melakukan perubahan dalam masyarakat bervariasi dalam lingkup, alam, intensitas dan tingkat kecepatan; kecenderungan tersebut kemungkinan tersembunyi ataupun dalam bentuk nyata baik yang membangun ataupun yang menghancurkan.
6. Konflik internal muncul ke permukaan melalui perpecahan atau perbedaan komunikasi yang bersesuaian dengan struktur, ketidakseragaman kepentingan antar kelompok dan individu, kesenjangan pembagian imbalan, pentingnya orientasi utama dan penunjangnya serta kurangnya kesepakatan tentang nilai-nilai.

6.1.2 Karl Marx: Teori Perlawanan Kelas

Tanpa mengesampingkan banyaknya Marxis, baik yang benar-benar mendukung atau yang dengan pikirannya sendiri, teori konflik Marx adalah murni dan mudah dipahami. Perlawanan kelas merupakan kerangka dasar teori Marx yang berdasarkan pada pernyataan-pernyataan berikut ini:

1. Sejarah dari semua masyarakat yang eksis sampai sekarang adalah sejarah perlawanan kelas.
2. Bukanlah masalah kepekaan dari manusia untuk menentukan keberadaannya, namun sebaliknya keberadaan sosialnya justru yang menentukan kepekaan manusia.
3. Pendapat dari golongan penguasa adalah dalam setiap masa berlaku pendapat penguasa; seperti golongan ber harta yang memaksakan dominasi secara materi dalam masyarakat sama halnya saat terjadi pemaksaan dominasi intelektual.

Analisa Marx mengenai konflik sosial dalam masyarakat kapitalis dapat diringkas sebagai berikut:

1. Arti pentingnya hak milik kebendaan. Bagi Marx, karakter pembeda dari setiap masyarakat adalah bentuk-bentuk dari sifat hak milik kebendaannya., dan menjadi penentu krusial bagi tiap tingkah laku individu dalam hubungannya dengan hak milik kebendaan tersebut.
2. Pengaruh perekonomian. Masyarakat kapitalis didasarkan pada terkonsentrasinya proses produksi dan distribusi di tangan beberapa pihak saja.
3. Perbedaan kedalam kelas-kelas. Secara alamiah masyarakat kapitalis mempunyai tendensi yang radikal mengenai pembagian kedalam kelas-kelas.
4. Teori mengenai nilai lebih. Para kapitalis mengumpulkan keuntungan melalui eksploitasi para pekerja.
5. Kemiskinan. Rakyat jelata yang miskin bertambah seiring meningkatnya eksploitasi terhadap para pekerja.

6. Alienasi. (Keterasingan diri). Eksploitasi secara ekonomis dan kondisi kerja yang tidak berperikemanusiaan memicu peningkatan alienasi manusia .
7. Solidaritas golongan dan kesenjangan. Dengan bertambahnya kesadaran golongan, kristalisasi dari hubungan sosial menjadi dua golongan yang terbagi dengan jelas serta mencoba untuk menjadi sama secara internal, dan perlawanan kelas pun semakin menjadi intensif.
8. Revolusi. Saat pertikaian antar kelas mencapai puncaknya maka sebuah revolusi dengan kekerasan dapat muncul dan akan menghancurkan struktur masyarakat kapitalis.
9. Kediktatoran rakyat jelata. Revolusi berdarah telah menyingkirkan masyarakat kapitalis dan akhirnya menuju pada kediktatoran sosial dari rakyat jelata.
10. Perayaan dari masyarakat komunis. Sosialisasi dari hak milik kebendaan pribadi yang efektif akan menghilangkan kelas dan begitu juga penyebab konflik sosial.

Walaupun ramalan dari pengikut Marx mengenai runtuhnya kapitalisme belum juga menjadi kenyataan, tapi konsep Marx mengenai revolusi dengan konsep historis dan juga konsep dialektika yang mana keduanya masih relevan, meskipun dalam dua konteks yang berbeda: (a) di Negara-negara kapitalis, terdapat batas pemisah antara anggota kelompoknya yang terlihat dari masyarakat perkampungan dan masyarakat berpendidikan rendah, khususnya jika terdapat perwakilan di antara para pelajar, dan (b) di negara-negara agraris besar dalam Negara Dunia Ketiga, terdapat revolusi petani dan gerakan pembebasan nasional.

Marcuse menyatakan secara mendetail adanya faktor obyektif tertentu yang 'mengumumkan diri mereka sendiri ke dalam ketegangan dan tekanan dari komunitas ekonomi'. Hal tersebut adalah:

1. Kebutuhan akan persaingan, dan ancaman dari perkembangan progresif dari mekanisasi, dengan meningkatnya pengangguran, peningkatan permintaan yang dipicu penyerapan tenaga kerja yang tidak produktif, pekerjaan dan pelayanan yang merugikan.
2. Biaya dari peperangan kolonial yang baru, atau kontrol terhadap kediktatoran yang korup, semakin bertambah dan terus bertambah .
3. Sebagai hasil dari meningkatnya pengurangan penggunaan tenaga kerja manusia dalam proses produksi, menjadikan batas dari keuntungan semakin menurun.
4. Masyarakat membutuhkan kreasi akan kebutuhan, kepuasan yang dasarnya hanya membawa menuju konflik baik moral dan disiplin sangat dibutuhkan pada proses kerja di dalam kapitalisme. Atmosfir dari kebutuhan tersebut diperkeruh dengan adanya barang-barang yang kurang penting dan mewah yang keberadaannya beriringan dengan kemiskinan dan kesengsaraan, 'kemewahan' menjadi suatu kebutuhan dalam pergulatan persaingan demi eksistensi.

6.1.3. Wright Mills: Kekuatan Penguasa

Inti dari tesis Mills berupa teori yang menerangkan bahwa kekuatan ekonomi, sosial, dan politik dalam masyarakat Amerika telah termanipulasi oleh tiga tingkatan yang saling mempengaruhi-orang-orang militer, kaum industrial, dan para politikus.

6.1.4. Ralf Dahrendorf: Penguasa dan yang dikuasai

Teori konflik dari Dahrendorf berdasar pada hubungan eksklusif para penguasa pemerintahan. Menurutnya, organisasi sosial merupakan asosiasi penting yang terkoordinir dibandingkan dengan sistem sosial. Struktur pemerintahan, yang merupakan bagian integral dari setiap organisasi sosial, dapat diprediksi akan membawa kedalam kristalisasi kepentingan suatu kelompok dan menjadi kemungkinan wajar dari adanya konflik.

Dahrendorf meringkas teorinya kedalam proposisi berikut ini:

1. Dalam setiap kelompok penting yang terkoordinasi, pembawaan fungsi dominasi positif dan negatif menentukan terbentuknya dua pilihan kelompok semu dengan kepentingan tersembunyi yang bertentangan.
2. Pemegang peran dari pembawaan fungsi dominasi positif dan negatif, yaitu anggota dari kelompok semu yang bertentangan, mengorganisir diri mereka ke dalam kelompok dengan kepentingan yang nyata, kecuali adanya kondisi variasi empiris tertentu yang terjadi.
3. Kelompok berkepentingan yang menciptakan keadaan ini akan selalu berada dalam konflik mengenai pergantian atau perubahan kekuasaan.
4. Konflik diantara kelompok berkepentingan yang sesuai dengan lingkup model ini akan membawa pada perubahan struktur pada hubungna sosialnya, selama perubahan tersebut merupakan hubungan yang dominan.

6.2. Variasi Teori Konflik

Teori konflik dalam perkembangannya menghasilkan berbagai variasi, yang secara ringkas adalah sebagai berikut.

6.2.1. Aliran Frankfurt dan teori kritis.

Disebut aliran Frankfurt karena berkaitan dengan Institut Riset Sosial di Frankfurt, Jerman, yang mapan sejak 1923 oleh sebuah kelompok neo-Marxian yang mengembangkan studi secara bebas dari aliran Marxis. Habermas mengembangkan tradisi 'kemanusiaan baru', yang agak berbeda dengan Marx, yaitu menyebutkan ada tiga tipe masyarakat kapitalis:, yaitu (a) kapitalis liberal, (b) kapitalis yang terorganisasi, dan (c) post-kapitalis (masyarakat negara sosialis dengan elit politik yang menentukan produksi).

Schroyer, yang melakukan rekonstruksi aliran Marxis dengan ciri; "model materialis masyarakat dikonsepsikan kembali sebagai aksi sistem sosial, yaitu: (a) Pembahasan pada substruktur selalu merujuk kepada sistem aksi pilihan rasional, (b) Pembahasan pada superstruktur selalu merujuk kepada interaksionis simbolik, dan (c) Pembahasan tentang bentuk kesadaran sosial akan membahas tentang refleksi pengakuan terhadap otoritas yang legitimate, yang secara internal merupakan sebuah model masyarakat tentang refleksi diri.

6.2.2. Sosiologi baru atau sosiologi radikal (Horowitz dan sosiologi radikal)

Menurut Horowitz, radikalisme adalah ciri utama perilaku individual. Secara umum sosiologi radikal berfokus kepada aspek-aspek negatif dalam masyarakat, yaitu: kemiskinan, rasisme (rasialis), eksploitasi, ketidakberdayaan, dan keamanan industri militer. Radikal sosiologi membahas tentang ketimpangan dalam masyarakat.

6.2.3. Sosiologi Dialektik (Collins dan teori konflik analitik)

Premis dasar dari pendekatan konflik analitik adalah: setiap orang ingin mengasai sebanyak mungkin sumberdaya terhadap pihak yang menjadi pesaingnya, dan struktur sosial yang terbentuk --- baik organisasi formal maupun kelompok kepentingan ---, tidak lebih dari sebuah pertemuan dan komunikasi untuk tujuan tersebut.

6.2.4. Fungsionalisme Konflik (Lewis Coser)

Coser melihat adanya fungsi positif dari adanya konflik, dengan sejumlah proposisi sebagai berikut:

- (a) Konflik sosial internal yang berkait dengan tujuan, nilai dan kepentingan bukan merupakan sebuah kontradiksi terhadap asumsi dasar dalam hubungan sosial, dalam banyak hal merupakan aspek fungsional dari struktur sosial.
- (b) Konflik internal yang terjadi karena kecewa dalam hal tertentu tidak bertahan lama dalam sebuah nilai dasar dan dapat digunakan sebagai cara untuk meningkatkan legitimasi sebuah struktur.

- (c) Konflik yang terjadi dalam sebuah kelompok yang intim merupakan sebuah hal yang mampu memberikan kekuatan dalam kelompok tersebut.
- (d) Kelompok yang terdiri dari berbagai individu yang berpartisipasi secara segmental, konflik yang terjadi tidak sampai menimbulkan perpecahan. Kelompok demikian telah memiliki pengalaman pada konflik yang beragam.
- (e) Dalam struktur sosial yang lentur, konflik silang antar mereka justru mencegah perpecahan di masa depan. Partisipasi segemental dalam konflik menciptakan keseimbangan struktur sosial.
- (f) Dalam kelompok yang berstruktur longgar, konflik bermakna mendamaikan ketegangan bagi mereka yang bertentangan, yang akan membuat stabil dan fungsi integratif bagi hubungan sosial.
- (g) Sistem sosial memiliki toleransi terhadap konflik yang melembaga dalam tingkatan tertentu, yang dapat menjadi sebuah katup pengaman bagi tindakan agresif yang lebih besar.
- (h)kebutuhan pada pelembagaan katup pengaman meningkatkan ketegaran struktur sosial.

6.2.5. Caplow dan Teori Formal Konflik

Beberapa sosiolog menggunakan teorei koalisi dan teori permainan dalam perspektif konflik. Caplow melanjutkan tradisi Simmel dalam bentuk koalisi triadik. Caplow membedakan antara koalisi revolusioner, yang dibentuk dari kekuatan untuk menyerang dan koalisi konservatif, yang dibentuk dalam rangka mempertahankan status quo. Teori permainan dianggap sebagai 'ilmu konflik', merupakan sebuah teori yang diformalkan untuk memperjuangkan pencapaian maksimal sebuah nilai tertentu bagi seseorang atau kelompok.

6.2.6. Dahrendorf dan sosiologi dialektik

Sosiologi dialektik merupakan studi sistematis dari konflik sosial, termasuk konseptualisasi kekuatan oposisi dengan kelompok kepentingan. Model dialektik ini dimulai dengan dikotomi adanya perbedaan seperti antara individu dengan struktur, tuan dan hamba, kaya dan miskin, elit dan massa, mayoritas dan minoritas atau konservatif dan liberal. Dahrendorf melihat bahwa di setiap struktur sosial dapat dilihat adanya dikotomi pada pihak yang membuat aturan dan pihak yang dikenai oleh aturan tersebut.

6.3. Evaluasi Kritis Pada Teori Konflik.

Evaluasi kritis yang dilakukan oleh Abraham, jika diringkas adalah sebagai berikut:

- (1) Sebagian besar ahli sosiologi konflik selalu melihat adanya pandangan dualisme dalam struktur sosial dalam kaitannya dengan prinsip tunggal, misal kepemilikan (Marx), kekuasaan (Mills) dan otoritas (Dahrendorf), yang pada akhirnya selalu dikonstruksi adanya pengkutuban yang saling bertentangan dalam sistem sosial, seperti; borjuis dengan proletar, elit dengan massa, dan penguasa dengan yang dikuasai.. Padahal dalam realitasnya tidak selalu demikian.
- (2) Jika kaum fungsionalis melihat bahwa stabilitas dan ekuilibrium adalah aturan dominant dalam struktur sosial, maka ahli teori konflik melihat bahwa masyarakat manusia selalu mengalami perkembangan dan dalam proses perubahan tiada henti. Kenyataan bahwa perkembangan dalam masyarakat primitif (tribal) sangat kecil dan berlangsung cukup lama. Perubahan adalah ciri semua benda di dunia, tidak ada perkembangan manusia yang statis.
- (3) Ada kecenderungan bahwa konflik selalu dikaitkan dengan perubahan. Perubahan selalu diikuti oleh bentuk konflik antar kelas, kepentingan, nilai, atau apapun, dan jika tidak sedang ada konflik berarti ada yang nampak dan ada yang tersembunyi. Hal itu semua adalah sebuah realitas dalam kehidupan. Sedangkan yang mengalami perubahan itu

adalah keseluruhan sistem sosial-ekonomi dalam masyarakat. Bahwa konflik akan menimbulkan perubahan tidak selalu benar.

- (4) Kenyataannya, konflik dan konsensus, harmoni dan disharmoni, adalah sebuah realitas dalam kehidupan masyarakat. Fenomena sosial adalah sebuah kontinum antara ekulibrium dan disequilibrium, antara ketegangan dan stabilitas dan antara integrasi dan disintegrasi. Baik kaum fungsionalisme maupun ahli teori konflik tidak dapat mengaku sebagai paling komprehensif dan paling valid, semua ada kelebihan dan kelemahan.

6.4. Catatan Akhir Teori Konflik

Setelah mendiskusikan teori konflik, maka paling tidak ada beberapa hal yang bisa direnungkan, yaitu; **pertama**, masyarakat memang selalu berubah baik secara lambat maupun secara cepat tergantung dari faktor-faktor yang menyebabkan perubahan dan respon diri masyarakat bersangkutan dalam menyikapi perubahan. Aliran fungsionalisme mengandung suatu harapan bahwa pada dasarnya keteraturan hidup akan memberikan makna kehidupan yang sesungguhnya, yaitu penuh dengan kedamaian. Namun dalam kenyataan hidup memang selalu terjadi pertentangan yang dilihat oleh para teoretisi konflik sebagai sebuah realita kehidupan, sehingga tidak salah kalau mereka memberikan stigma kepada kaum fungsionalis sebagai utopia. Oleh karena itu, jika banyak realita kehidupan yang penuh dengan konflik, maka akan dapat ditelusuri penyebab dari realita itu (dalam hal ini ahli teori konflik memberikan sumbangan analisis), sehingga dengan melakukan pengurangan intensitas konflik akan dapat diciptakan sebuah kondisi masyarakat yang tenteram (sumbangan kaum fungsionalis). Masalahnya bagaimana cara terbaik untuk mencapai perubahan dari realita sosial konflik menjadi realita sosial kedamaian?

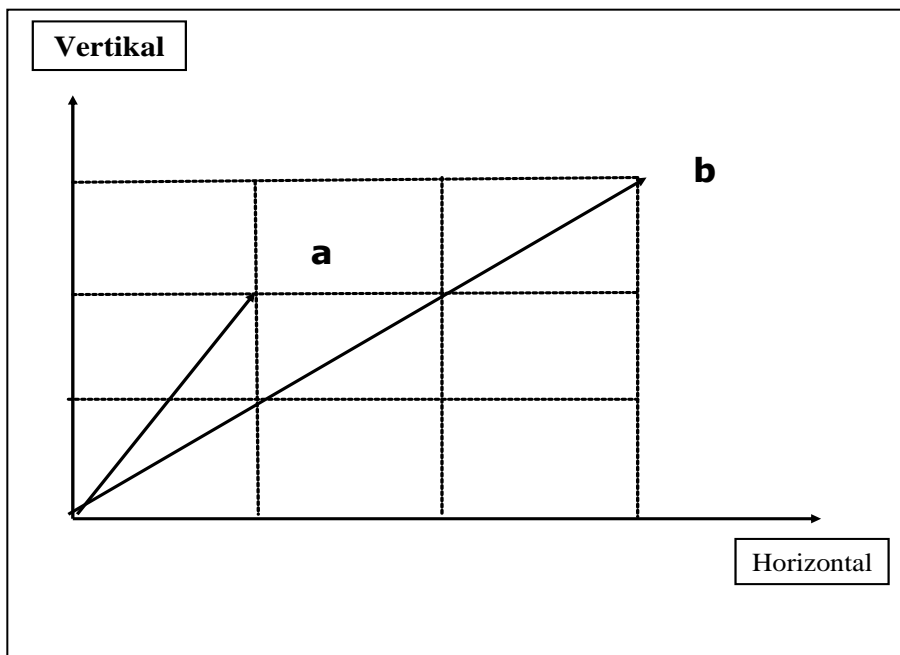
Kedua, masih mengacu kepada pendekatan evolusioner, maka konflik adalah sebuah proses yang sedang berlangsung, yang akan menghasilkan kedamaian sementara dalam bentuk equilibrium, atau menghasilkan proses berkepanjangan, sehingga tidak akan pernah tercipta sebuah kedamaian. Jika hal terakhir ini yang terjadi, maka stigma utopia bagi penganut teori struktural fungsional bisa dipahami.

6.5 Potensi Konflik dan Konflik dalam Masyarakat Pesisir.

Kawasan pantai yang merupakan perpaduan antara kegiatan di darat dengan di laut, di mana laut semakin memberikan kontribusi dalam penyediaan sumberdaya menyebabkan intensitas aktivitas ekonomi di wilayah ini sangat besar. Sehubungan dengan hal ini maka wilayah ini juga memiliki potensi konflik yang tinggi pula. Berdasarkan pada kajian yang dilakukan oleh Pelly (1993) bahwa sumber-sumber konflik (ketidakserasian sosial) ada tiga, yaitu (1) perebutan sumberdaya, alat-alat produksi dan kesempatan ekonomi., (2) perluasan batas-batas kelompok sosial-budaya dan (3) benturan kepentingan politik, ideologi dan agama. Intensitas konflik antara dua kelompok dapat ditelusuri dengan memadukan antara faktor vertikal (*achievement factors*) dan faktor horizontal (*ascribe factors*).

6.5.1 Mengukur potensi konflik.

Potensi konflik menurut Pelly (1993) dapat diukur dari adanya faktor-faktor vertikal dan horizontal, yang secara visual disampaikan pada Gambar 15 berikut ini.



Gambar 15. Mengukur Potensi Konflik (disederhanakan dari Pelly, 1993)

Potensi konflik dapat diidentifikasi dengan memperhatikan faktor-faktor horizontal dan vertikal dari dua kelompok masyarakat yang sedang melakukan interaksi. Faktor-faktor horizontal tersebut merupakan sebuah status bawaan (*ascribe status*), misalnya etnis, agama, bahasa dan lainnya, sementara faktor vertikal (*achieve status*) seperti pendapatan, teknologi yang digunakan, kedudukan dalam bidang politik dan sebagainya. Jika perbedaan faktor-faktor semakin banyak maka potensi konflik semakin tinggi. Titik a bernilai rendah, karena hanya terdiri dari perkalian 1 faktor horizontal dengan 2 faktor vertikal, yang kalau dikuantifikasi menjadi bernilai 2. Sementara pada titik b, merupakan hasil perkalian antara 3 faktor horizontal dengan 3 faktor vertikal, sehingga bernilai 9. Semakin tinggi nilai yang diperoleh, maka potensi konflik semakin besar. Potensi konflik perlu dipertimbangkan sebagai upaya memperkecil dampak negatif dari sebuah perubahan sosial.

Analisis sederhana tentang konflik dalam masyarakat dapat dilakukan dengan melakukan langkah-langkah sebagai berikut. Pertama adalah mengetahui sumber konflik, apa saja yang menimbulkan konflik. Di masyarakat pesisir pada umumnya konflik terjadi sebagai akibat dari perebutan sumberdaya, dan derivasi dari hal tersebut. Kedua, mengukur potensi konflik dengan secara teliti melakukan identifikasi faktor-faktor vertikal dan horizontal dari dua pihak yang terlibat konflik. Ketiga, melakukan identifikasi pihak-pihak yang terlibat dalam konflik. Langkah ini dilakukan untuk mengetahui intensitas dan cakupan luasnya konflik. Keempat melakukan identifikasi terhadap mekanisme penyelesaian konflik yang telah dilakukan dan hasil yang telah dicapai. Terakhir berusaha memberikan alternatif penyelesaian konflik yang menuju kepada keadilan dan kebenaran.

6.5.2. Kasus Konflik yang Tak Kunjung Berhenti

Kasus-kasus konflik dalam masyarakat nelayan yang akan disampaikan di sini diambil dari penulisan skripsi oleh mahasiswa yang dibimbing oleh penulis buku ini. Beberapa kasus konflik dalam pengelolaan sumberdaya perikanan antara lain adalah sebagai berikut.

- (1) Tahun 1974, di Muncar Banyuwangi terjadi sebuah konflik antara nelayan yang menyetujui penggunaan alat tangkap purse seine dengan nelayan yang ingin tetap bertahan menggunakan payang. Konflik muncul kembali sejak tahun 2000-an, yang sesama nelayan purse seine, antara yang menyetujui adanya nelayan andhon dengan yang menentang kedatangan nelayan andhon.

- (2) Tahun 1981, di Prigi Trenggalek terjadi konflik antara nelayan yang menentang penggunaan alat bantu kompresor untuk menangkap udang dan ikan karang dengan mereka yang menggunakannya. Kasus konflik muncul kembali tahun 2001 dengan adanya peristiwa pembakaran perahu dan alat tangkap payang, dengan titik konflik adalah nelayan andhon dengan nelayan setempat. Konflik juga terjadi antara nelayan jaring tarik dengan nelayan payang maupun purse seine dan pihak lain karena perebutan daerah penangkapan.
- (3) Konflik yang disebabkan oleh penggunaan alat tangkap trawl dapat direda dengan kemunculan Keputusan Presiden Nomor 39/1980 tentang pelarangan penggunaan alat tangkap trawl. Saat ini konflik muncul karena nelayan masih mengoperasikan alat tangkap yang menyerupai trawl, atau yang disebut dengan istilah "wesewe" atau "bondhet".
- (4) Konflik dalam masyarakat tidak hanya terjadi antar nelayan, tetapi juga antara nelayan dengan pemilik industri, terutama yang menyebabkan berkurangnya daerah penangkapan (tambang dan wisata) dan pencemaran (industri).
- (5) Konflik juga terjadi antara nelayan dengan pemerintah, terutama instansi teknis yang melaksanakan pengelolaan sumberdaya perikanan.

6.5.3. Menyelesaikan Konflik.

Di bagian depan sudah dikemukakan bahwa penyelesaian atau resolusi konflik telah ditulis secara baik oleh Satria (2001). Demikian pula kepada pembaca untuk mencermati tulisan Hendricks (2000), tentang bagaimana mengelola konflik. Khusus konflik tentang perebutan sumberdaya alam telah disajikan dengan baik oleh Ichsan *et al.* (2003) dengan menyeimbangkan kekuatan: pilihan strategi menyelesaikan konflik atas sumberdaya alam. Dari informasi yang ada, penyebab konflik adalah karena adanya kelangkaan dan ketimpangan distribusi. Khusus dalam kawasan pesisir, konflik agaknya dapat diurai penyebabnya, yaitu pertama dari rusaknya ekologi kawasan pesisir. Kerusakan ekologi tidak mampu mendukung bagi kegiatan ekonomi dalam pemanfaatan sumberdaya perikanan. Kondisi ekonomi yang tidak memadai akan memberikan peluang bagi terjadinya konflik. Oleh karena itu langkah awal dari menyelesaikan konflik di kawasan pesisir adalah dengan melaksanakan pemulihan habitat dan sumberdaya perikanan.

Pemulihan hutan mangrove seluas 100 Ha di Muncar telah memberikan dampak bagi kegiatan penangkapan ikan dengan alat tangkap sero dan sodu, berupa peningkatan hasil tangkapan. Selain itu kegiatan budidaya di belakang *green belt*, maupun dalam areal hutan bakau juga dapat dilaksanakan. Keterbatasan sumberdaya ikan di kawasan pesisir juga dapat diatasi dengan melakukan penangkapan ikan ke wilayah laut lepas, misalnya yang dilakukan nelayan di Sendangbiru Malang, dengan menggunakan perahu sekoci dan alat tangkap pancing dan dengan alat bantu pengumpul ikan, yaitu rumpon laut dalam.

REFERENSI

- Abraham, M. Francis. 1982. *Modern Sociological Theory: An Itroduction*. Delhi Oxford University Press, Bombay.
- Satria, Arif. 2002. *Pengantar Sosiologi Masyarakat Pesisir*. Cidesindo. Jakarta.
- Hendricks, William. 2000. *Bagaimana Mengelola Konflik: Petunjuk Praktis untuk Manajemen Konflik yang Efektif*. Bumi Aksara. Jakarta.

PROPAGASI

U. Latihan dan Diskusi (Propagasi vertical dan Horizontal)

Bermain peran

- 7.** Di daerah Lamalera (NTT) terdapat tradisi perburuan ikan paus (sumberdaya ikan unggulan daerah tersebut) dengan aturan-aturan adat yang saat ini dipegang teguh oleh masyarakat, dengan dimotori oleh tetua adat. Suatu ketika ada kelompok pengusaha yang kaya raya melihat bahwa komoditas ikan paus adalah peluang bisnis yang potensial. Para pengusaha tersebut berniat mendirikan pabrik pengolahan ikan paus (pengalengan daging paus, produksi minyak ikan paus, kulit ikan paus, dan lain lain). Niat pengusaha-pengusaha tersebut mendapat tentangan dari kelompok tetua adat dengan banyak alasan. Untuk meluluskan niatnya pengusaha-pengusaha mendekati para pemuda pengangguran di daerah tersebut, yang sedang kebingungan menentukan sikap.

Aturan permainan:

Bagi kelas menjadi tiga kelompok besar sesuai dengan pembagian dalam peran diatas, masing-masing kelompok harus membuat sikap, sesuai dengan peran yang dimainkan oleh kelompoknya dan harus mempertahankan argument kelompok masing-masing dalam presentasi.

catatan:

- 1.kelompok pertama b'peran sbg pengusaha yang ingin mengembangkan usaha tanpa memperdulikan peraturan adat
- 2.kelompok kedua b'peran sbg kelompok tetua adat (kelompok pemuka adat yang ingin memegang teguh aturan adat)
- 3.kelompok ketiga b'peran sbg kelompok pemuda pengangguran yang sedang mencari jati diri.

V. Pertanyaan (Evaluasi mandiri)

- 17.Bagaimana mengukur potensi konflik?
- 18.Apa yang dimaksud terdapat banyak usaha dalam sosiologi modern untuk membentuk suatu pendekatan konflik yang terintegrasi dari analisis sosiologi guna menyelaraskan dengan teori fungsionalisme-struktural?
- 19.Bagaimana analisis sederhana tentang konflik dalam masyarakat?
- 20.Tuliskan beberapa kasus konflik dalam pengelolaan sumberdaya perikanan!

W. QUIZ -multiple choice (Evaluasi)

X. PROYEK (Eksplorasi entrepreneurship, penerapan topik bahasan pada dunia nyata)



SOSIOLOGI PERIKANAN:

Kapasitas Ruang dan Titik Kritis Struktur Sosial

Dr. Ir. Edi Susilo, MS.

Agribisnis Perikanan, SEPK, FPIK, Universitas Brawijaya

Email : dl@ub.ac.id



7 KAPASITAS RUANG DAN TITIK KRITIS STRUKTUR SOSIAL

- 7.1 Latar Belakang
- 7.2. Perumusan Masalah
- 7.3 Tujuan Penelitian
- 7.4. Manfaat Penelitian
- 7.5 Fokus Penelitian
- 7.6. Kerangka Pemikiran Teoretik.
- 7.7. Kajian Pustaka
 - 7.7.1. Penelitian Terdahulu.
 - 7.7.2. Struktur Sosial
 - 7.7.3. Evolusi dalam Struktur Sosial.
 - 7.7.4. Kapasitas Ruang dan Titik Kritis Struktur Sosial dalam Masyarakat yang Berevolusi.

7.8. Kapasitas Ruang dan Titik Kritis Struktur Sosial

- 7.8.1. Struktur Sosial pada Masa Isolasi (1950 – 1975)
- 7.8.2. Struktur Sosial pada Masa Terbuka-1 (1976 – 1990)
- 7.8.3. Struktur Sosial pada Masa Terbuka-2 (1991 – 2008)
- 7.8.4. Dinamika Kapasitas Ruang dan Titik Kritis Struktur Sosial
- 7.9. Evolusi Struktur Sosial: Tataran Realitas Sosial
- 7.10. Evolusi Struktur Sosial: Tataran Teoretis

MODUL

7

SELF-PROPAGATING ENTREPRENEURIAL EDUCATION DEVELOPMENT

7. KAPASITAS RUANG DAN TITIK KRITIS STRUKTUR SOSIAL:

KASUS KARANGGONGSO, PANTAI PRIGI

7.1. Latar Belakang

Perspektif evolusioner menjelaskan perubahan masyarakat dari sederhana menjadi kompleks. Evolusionisme mengalami perkembangan dan *kemandegan*, bersifat linier maupun multilinier, atau dari klasik ke neo-evolusionisme (Sztompka, 2005, Johnson, 1986). Teori sosiologi modern tidak lagi mengandalkan perspektif ini di dalam pembahasannya (Ritzer dan Goodman, 2005, Ritzer and Smart, 2001), tetapi digunakan oleh antropolog sosial masa lalu, seperti Malinowski, Redcliff-Brown, Sahlin, Service, dan Spencer, maupun antropolog sosial masa kini. Masyarakat nelayan di Indonesia secara umum berada pada perkembangan awal, yaitu pada tahapan *hunting and fishing* (Schutkowski, 2006; Sukadana, 1983, Koentjaraningrat, 1985). Dengan demikian, perspektif evolusioner masih relevan digunakan sebagai dasar memahami dinamika masyarakat nelayan, apalagi dalam kehidupan masyarakat nelayan yang terikat habitat.



Masyarakat Karanggongso pada awalnya merupakan sebuah komunitas kecil, sebagaimana yang digambarkan oleh Redfield (1963). Perkembangan struktur masyarakat dapat ditelaah berdasarkan perkembangan organisasi sosial primitif sebagaimana yang dilakukan oleh Servis (1971) maupun pada unsur-unsur organisasi sosial sebagaimana yang dilakukan oleh Firth (1971), maupun studi Firth (1966) terhadap perubahan sosial masyarakat nelayan di Malaysia. Kajian terhadap struktur sosial memberikan makna bahwa struktur memiliki daya tampung yang dinamis, dapat berkembang sesuai dengan perjalanan sejarah sosial masyarakat bersangkutan.

Perkembangan masyarakat di abad informasi akan berinteraksi dengan lingkungan sosial luar secara intensif. Konsekuensi teoretiknya, pendekatan sosiologi modern menjadi relevan menelaah dinamika masyarakat nelayan. Sintesis teoretik antara pendekatan evolusioner dengan dimensi struktural merupakan upaya untuk memahami perkembangan masyarakat ini, bahkan mungkin peramalan perubahan sosial mendatang. Masyarakat nelayan sangat terikat habitatnya, maka memadukan pendekatan ekosistem diharapkan lebih kontekstual. Studi sebelumnya (Susilo *et al.*, 1991, Susilo *et al.* 2003-2005) memberikan dasar periodisasi perubahan, yaitu zaman damai, zaman stagnasi dan zaman keemasan.

Interaksi antara masyarakat lokal dengan masyarakat dari lingkungan sosial luar akan direpson sesuai dengan daya tampung atau kapasitas ruang struktur sosial. Jika elemen baru yang masuk ke dalam kehidupan masyarakat dapat berintegrasi dengan struktur, atau struktur berada dalam kapasitas yang longgar untuk menerima elemen baru, maka elemen baru dapat diterima dan menjadi bagian struktur. Sebaliknya, elemen baru yang tidak mampu berintegrasi dengan struktur akan menguras kapasitas ruang struktur, yang akan menyebabkan daya tampung struktur sosial semakin sempit. Konsep *Adaptation* (adaptasi) – *Goal Attainment* (pencapaian tujuan) – *Integration* (integrasi) – *Latent Pattern Maintenance* (pemeliharaan pola), yang sangat terkenal dan disingkat AGIL dari fungsionalisme struktural Parsons (1957) merupakan salah satu rujukan penjelasan ini, meskipun peran pendekatan ini mengalami pemudaran.

Introduksi kelembagaan ekonomi di pedesaan pantai yang belum berfungsi secara efektif (Susilo, 1986; Qoid *et al.*, 1993; Setiawan, *et.al.*, 1993) sampai dibentuknya kelembagaan akomodatif (Susilo *et al.*, 1996-1998) dapat menjelaskan peningkatan kapasitas ruang struktur sosial. Introduksi kelembagaan ekonomi (KUD/TPI) belum berhasil berintegrasi dengan struktur masyarakat pedesaan pantai. Kelembagaan akomodatif¹³ mencari titik temu antara bagian tertentu kelembagaan yang memiliki akar sosial dalam masyarakat lokal dengan unsur baru yang dapat diintegrasikan dari lingkungan sosial luar untuk meningkatkan kapasitas ruang struktur sosial. Dimensi lain struktur sosial adalah titik kritis (BSN, 1988; Susilo, *et al.*, 2006), yaitu batas kapasitas maksimum ruang struktur sosial.

Studi tentang masyarakat nelayan sudah banyak dilakukan. Beberapa fokus kajian antara lain adalah: (1) **kemiskinan** (Mubyarto *et al.*, 1984; Kusnadi, 2004, Kusnadi, 2005, Muhammad *et al.*, 2006), (2) **konflik** perebutan sumberdaya perikanan (Alaudin and Tisdell, 1998; Faperikan, 2002; Wahyono, 2003; Kusnadi, 2003; Bramantyo *et al.*, 2006; Utsman, 2007; Setyanto, *et al.*, 2005, Wahyono *et.al.*, 2006, Kinseng, 2006, Sudiyono, 2006), (3) **partisipasi dan pembangunan** masyarakat pesisir (Bort, 1987; Mayasari, *et al.*, 2003; Lestariadi, *et al.*, 2003; Kusmayadi, *et al.*, 2005; Handayani dan Yani, 2005), (4) **kelembagaan** sosial-ekonomi (Susilo, *et al.*, 1996-1998; Kusnadi, 2000; Harahab *et al.*, 2005; PP-WP3K, 2005; Bhokaleba, *et al.*, 2006; Khasanudin *et.al.*, 2006), (5) **kebudayaan dan adat** (Abady, 1988; Kusnadi, 2000; Alimuddin, 2005; Zamroni, 2006; Susilo *et al.*, 2006; Kusnadi, 2007,), (6) **anak nelayan** (Rama, 1988; Hardiyanto *et al.*, 1996; Muflikhati dan Wulandari, 2006), (7) **jender atau wanita nelayan** (Aminah, 2000; Laksono, 2001; Kusnadi, 2003; Zein, 2006; Kusnadi, 2006; Riniwati, 2007), (8) **pengelolaan** sumberdaya

perikanan (Chong, 1996; Basuki dan Nikijuluw, 1996; Sunderlin and Gorospe, 1997; Amarasinghe *et al.*, 1997; King, 1997; Faperikan, 1998; Honneland, 1999; Muzdalifah *et al.*, 2003; Novaczek and Mitchell, 2004), (9) **wisata bahari** (Basuki, 1994; FAO, 1997, Faulkenberry *et al.*, 2000). Studi ini berfokus pada dinamika kapasitas ruang dan titik kritis struktur sosial.

Pendekatan evolusioner Spencerian, menyatakan masyarakat berevolusi melalui diferensiasi struktural dan fungsional: (1) dari sederhana menuju kompleks, (2) dari tanpa bentuk ke keterkaitan antarbagian, (3) dari keseragaman (homogenitas) ke spesialisasi (heterogenitas), dan (4) dari ketidakstabilan ke stabil. Kritik terhadap evolusi klasik menghasilkan neo-evolusi, dan bahkan ada gejala akan kembali ke evolusionisme biologis (Sztompka, 2005), di satu sisi, di sisi lain kritik Yahya (2004) terhadap evolusi biologis ---- terutama pada Darwinisme, mendorong perlunya memisahkan antara evolusi biologi dengan evolusi sosial. Pendekatan organismik adalah alat analisis perubahan struktur masyarakat. Aliran neo-evolusioner Parson maupun Lenski, menyatakan bahwa evolusi sosial berlangsung di sepanjang proses utama differensiasi dan integrasi, dan differensiasi-differensiasi struktural muncul disertai potensi untuk meningkatkan kemampuan adaptif sistem sosial (Parson, 1966; Lenski, 1984; Cubbon, 2003).

Pendekatan teoretik dilengkapi dengan konsep stuktur sosial, yang menyatakan bahwa struktur merupakan suatu keberlanjutan susunan orang-orang dalam hubungan-hubungan yang dibatasi atau dikendalikan oleh institusi-institusi, yaitu norma-norma atau pola-pola tingkah laku yang dibangun masyarakat (Radcliff-Brown, 1968). Melalui berbagai studi lapang (Susilo, *et al.*, 1991; Susilo *et al.*, 1996-1998) dan pustaka (Abercrombie *et al.* 1988; Susilo, 2006, Keel, 2007), konsep struktur tersebut ditambah dengan beberapa konsep seperti: stratifikasi, status, peran, *social group* (kelompok), perilaku terduga, dan kekuasaan. Kajian struktur yang sebenarnya memberikan ilham untuk berfokus pada kapasitas ruang dan titik kritis diakui berasal dari Gidden (1993) tentang teori strukturasi. Namun berdasarkan kritik terhadap Gidden (Ross, 2003) yang menyatakan bahwa:

Di Australia, Giddens lebih berpengaruh sebagai penganjur mazhab pemikiran yang relatif tidak dikenal daripada seorang pemikir baru yang mandiri. Barangkali karya Gidden selayaknya dipandang sebagai catatan akhir (*postscript*) bagi pelbagai kecenderungan utama pemikiran sosial di abad ke - 20.

maka teori strukturasi dalam studi ini digunakan sebagai pelengkap dari kajian-kajian struktur sosial yang sudah ada.

7.2. Perumusan Masalah

Pembangunan masyarakat pesisir yang dimulai dari tahun 1970-an, secara kronologis dapat diuraikan sebagai berikut. *Pertama*, pendekatan *product oriented*, untuk meningkatkan produksi secara nasional. Dampak negatif modernisasi armada penangkapan ikan dalam bentuk konflik masyarakat nelayan, diredam dengan Keputusan Presiden Nomor 39 Tahun 1980 tentang Pelarangan Alat Tangkap Trawl. Pada masa itu juga dilakukan pendekatan pemasaran rantai dingin. *Kedua*, setelah tahun 1980 pemerintah mulai menyebarluaskan alat tangkap *purse seine*, yang diikuti dengan pengembangan kelembagaan ekonomi masyarakat, yaitu Koperasi Unit Desa (KUD) Mina dan Tempat Pelelangan Ikan (TPI). *Ketiga*, kondisi permintaan udang dunia yang terus meningkat telah mendorong pemerintah dan masyarakat untuk mengembangkan budidaya udang secara intensif. Selama masa 7-10 tahun berjalan industri tambak udang berkembang pesat, namun karena tidak diselaraskan dengan kondisi daya dukung lingkungan, maka peningkatan produksi melalui tambak mengalami kemunduran. *Keempat*, awal tahun 1990-an pemerintah menggunakan pendekatan agribisnis, dimana pembangunan perikanan dilakukan secara holistik, yaitu mulai dari subsistem penyediaan sarana produksi, usahatani, agroindustri, dan distribusi & pemasaran. Pendekatan ini berusaha menggantikan pendekatan sebelumnya yang dinilai parsial. *Kelima*, ketika krisis ekonomi tahun 1998 terjadi, pemerintah memberikan respon dengan

menggunakan pendekatan peningkatan ekspor, yaitu dengan program Protekan 2003¹⁴, dengan meningkatkan usaha budidaya perikanan. Program ini belum berjalan secara efektif, kemudian digantikan lagi dengan pendekatan yang baru, yaitu pendekatan holistik empat dimensi (ekologi, ekonomi, sosial-politik, dan kelembagaan & hukum), sebagai langkah *keenam*. Terakhir, tahun 2005, pemerintah menggulirkan program revitalisasi perikanan dengan prioritas tiga komoditi utama (udang, tuna, dan rumput laut) yang merupakan bagian integral dari Revitalisasi Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (RPPK).

Berbagai pendekatan pembangunan perikanan direspon oleh masyarakat secara beragam. Komponen pembangunan masyarakat tidak selamanya berintegrasi dengan struktur sosial masyarakat pesisir. Berbagai konflik yang terjadi dalam masyarakat pesisir atau introduksi kelembagaan ekonomi yang tidak diimplemen-tasikan oleh masyarakat pesisir memberikan informasi bahwa struktur sosial tidak secara otomatis dapat menerima masukan dari luar sistem. Belakangan disadari bahwa masyarakat pesisir telah terstruktur secara ekonomi dan sosial budaya dengan perkembangan internal habitatnya, sehingga masukan dari luar sebagian dapat diterima dan sebagian lagi selain kurang diberikan respon, juga dilakukan kontra struktural, misalnya terhadap introduksi kelembagaan KUD/TPI.

Karena itu, perumusan permasalahan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- (1) Bagaimana perkembangan struktur sosial masyarakat dari tahun 1950-an sampai pada saat penelitian dilaksanakan?
- (2) Bagaimanakah dinamika kapasitas ruang struktur sosial memberikan daya tampung terhadap elemen-elemen baru yang berasal dari lingkungan sosial lokal maupun luar ?
- (3) Apakah dalam perubahan struktur masyarakat nelayan yang didekati dengan teori evolusi sosial dapat ditemukan titik-titik kritis struktur sosial yang menjadi sebuah tanda perubahan dari kapasitas ruang yang sempit menjadi kapasitas ruang yang luas dan sebaliknya?

7.3 Tujuan Penelitian

- (1) Menganalisis perubahan struktur sosial secara umum (penyebab – proses – dampak), sejak awal kehidupan masyarakat (1950-an) sampai dengan kondisi saat penelitian dilaksanakan (2008).
- (2) Menganalisis dinamika kapasitas ruang struktur sosial masyarakat nelayan di dalam memberikan daya tampung atau toleransi terhadap masuknya elemen-elemen baru ke dalam struktur sosial, yang dapat berubah-ubah sesuai dengan kemampuan mengintegrasikan elemen baru ke dalam struktur.
- (3) Menemukan titik-titik kritis struktur sosial, yaitu suatu titik yang menjadi sebuah pembatas perubahan dari kapasitas ruang struktur sosial yang luas menjadi sempit dan sebaliknya, dalam proses perubahan masyarakat nelayan yang berlangsung dalam kurun waktu sesuai dengan tujuan nomor 1.

7.4. Manfaat Penelitian

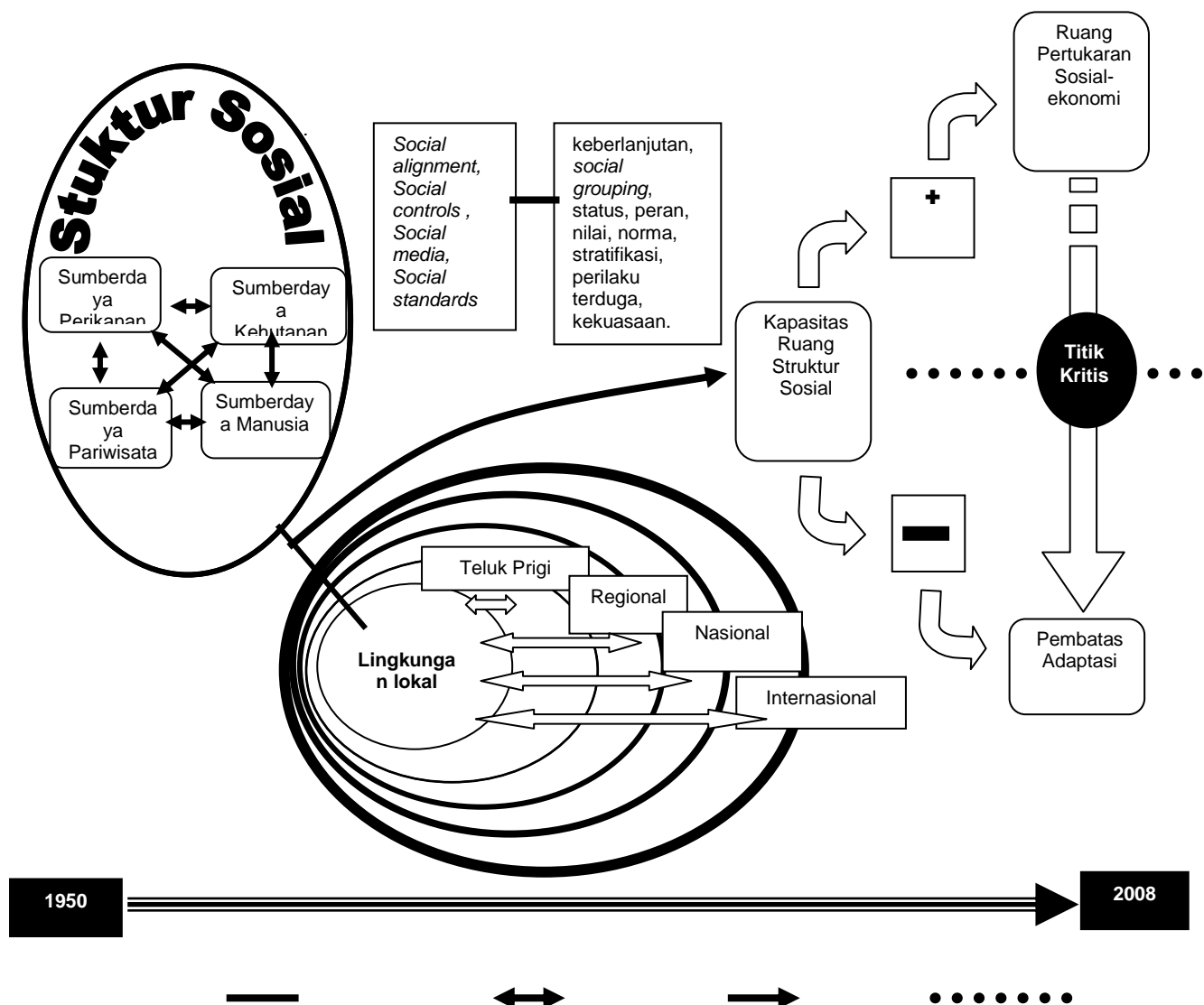
Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut. *Pertama* dari segi keilmuan akan berusaha untuk menemukan berbagai indikator kunci tentang kapasitas ruang struktur sosial. *Kedua*, dari segi praktis temuan ini akan memberikan informasi kepada para perencana pemberdayaan masyarakat dan atau agen pembangunan untuk secara lebih cermat memperoleh informasi tentang kapasitas ruang dan titik kritis struktur sosial dalam kehidupan masyarakat.

7.5 Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini adalah pada dinamika struktur sosial masyarakat pesisir Dusun Karanggongso, yaitu pada kapasitas ruang dan titik kritis struktur sosial selama tahun 1950-an sampai tahun 2008.

7.6. Kerangka Pemikiran Teoretik.

Visualisasi kerangka pemikiran ditampilkan melalui beberapa gugus pemikiran sebagai berikut. *Pertama* adalah penggambaran kapasitas ruang dan titik kritis struktur sosial, bagaimana struktur yang semula berfungsi sebagai sebuah ruang pertukaran sosial berubah menjadi sebuah pembatas sosial budaya dalam proses adaptasi manusia. *Kedua*, fokus pengamatan dilakukan terhadap pengelolaan sumberdaya pesisir, yaitu yang berkaitan dengan perikanan, pertanian di kawasan hutan, dan kegiatan kepariwisataan. *Ketiga*, dinamika masyarakat yang ditandai oleh semakin intensifnya interaksi dengan lingkungan sosial luar, ditelusuri dari periodisasi waktu dalam peristiwa-peristiwa tertentu, yaitu terutama yang berkaitan dengan pengelolaan sumberdaya pesisir. Selain itu peristiwa-peristiwa yang berlingkup regional, nasional dan internasional yang diduga berpengaruh terhadap perubahan struktur. Resultan ketiga gugus pemikiran tersebut disampaikan pada Gambar 16.



Gambar 16. Kerangka Pemikiran

7.7. Kajian Pustaka

Bingkai teoretis dalam studi ini adalah: evolusi sosial dan struktur sosial. Teori evolusi yang digunakan sebagai dasar telaah disertasi ini adalah evolusi klasik dan neo-evolusi. Dasar teoretis evolusi klasik didasarkan pada teori evolusi Spencer (2008/1862). Teori neo-evolusi yang digunakan dalam disertasi ini adalah analisis Parsons (1966) dan Lenski (1985). Kajian teori tentang struktur sosial berusaha menyusun sebuah definisi tentang struktur sosial. Sebelum membahas pendekatan teoritik, disampaikan lebih dulu tentang kronologi penelitian terdahulu.

7.7.2. Penelitian Terdahulu.

Konstruksi pemikiran ini sebagian didasarkan pada serangkaian penelitian yang dilakukan oleh peneliti dan atau tim peneliti. *Pertama*, analisis teoretis pola hubungan sosial ekonomi antara pedagang ikan dengan nelayan, yang menggunakan model analogi biologi model dinamika pertumbuhan plankton di perairan (Davis, 1955; Scott, 1983; Rogers dan Shoemaker, 1981; Susilo, *et al*, 1984). *Kedua*, analisis lapang hubungan eksploitatif antara pedagang dengan nelayan, memberikan informasi bahwa di kawasan pantai Muncar dan Lekok ada gejala hubungan eksploitatif (Qoid, *et al*. 1993), sementara di Pacitan menunjukkan bahwa pola hubungan sosial lebih bersifat sebagai bentuk dari asuransi sosial (Setiawan, *et al*. 1993). *Ketiga*, studi tentang resiprositas dan struktur masyarakat menunjukkan bahwa bahwa resiprositas di dalam lingkungan lokal berarti sebagai rasa "tanggung jawab moral" yang dijadikan sebagai asuransi sosial. Resiprositas bersifat fleksibel yang menyatukan anggota masyarakat menjadi kesatuan utuh membentuk struktur (Susilo *et al*, 1991). *Keempat*, mengembangkan model kelembagaan akomodatif sebagai upaya untuk menyambungkan unsur-unsur pembentuk struktur masyarakat lokal dengan unsur dari introduksi sub struktur dari lingkungan sosial luar (Susilo *et al*., 1996-1998). Riset didasarkan pada konsep *sodality* yang dikembangkan oleh Tjondronegoro (1985), disederhanakan oleh Ndraha (1987) dan disebut sebagai simpul sosiobudaya oleh Rachman (1988). Saya mempopulerkan istilah ini menjadi adaptor sosial (Susilo, 2004). *Kelima*, penelitian tentang adaptasi manusia memperoleh informasi bahwa lapisan atas dan lapisan bawah masyarakat agraris mampu beradaptasi dalam kehidupan industri, sementara lapisan tengah justru tidak memiliki kemampuan beradaptasi (Susilo *et al*, 1995). *Keenam*, kajian teorisasi adaptasi manusia, selain menghasilkan tiga proposisi utama¹⁵, juga melahirkan sebuah pemikiran tentang titik kritis dalam sebuah struktur sosial (Susilo *et al*, 2003-2005; Susilo *et al*., 2007).

7.7.2. Struktur Sosial

Struktur sosial merupakan sebuah istilah yang sering digunakan dalam teori sosial, namun jarang dedefinisikan secara jelas (<http://en.wikipedia.org>., 2006). Firth (1956) menyatakan adanya empat unsur esensi komunitas, yaitu: (1) tata masyarakat (*social alignment*), (2) kontrol sosial (*social control*), (3) media sosial (*social media*), dan (4) standard sosial (*social standard*). Redfield (1963) menyatakan bahwa struktur sosial adalah sebuah istilah yang berdimensi luas, berliku-liku, dan bercabang-cabang seperti sebuah pohon dalam studi tentang sebuah komunitas. Karena itu untuk keperluan studi ini diperlukan sebuah definisi tentang struktur sosial, yaitu: "penyusunan orang-orang secara berkesinambungan atas status dan peran dalam satu atau lebih *social group*, dalam sistem stratifikasi tertentu, dimana perilakunya dapat diduga dan atau dapat dikendalikan oleh nilai dan norma, dan di dalam proses berinteraksi antar status ada unsur kekuasaan" (Radcliffe-

Brown, 1968; Abercrombie *et al.*, 1988; Berger dan Luckmann, 1967; Susilo *et al.*, 1991; Susilo *et al.*, 1997; Susilo, 2006; www.wikipedia, 2007; dan Keel, 2007).

Giddens mencatat, bahwa salah satu dimensi struktural itu menunjukkan bahwa struktur sosial dapat menjadi "pembangun", dan juga dapat berfungsi sebagai pembatas (*enabling and constraint*) (Giddens, 2003; Ritzer dan Goodman, 2005). Ide tentang kapasitas ruang dan titik kritis struktur sosial diperoleh dari analisis Giddens. Johnson (1986) menyatakan bahwa saat ini kesadaran adanya kesalingtergantungan yang terjadi pada sistem yang lebih kecil, seperti keluarga, maupun pada sistem di tingkatan komunitas yang lebih besar. Buckley dalam Johnson (1986) menyatakan bahwa model proses lebih sesuai jika digunakan untuk menganalisis sistem sosiobudaya, daripada menggunakan model mekanik maupun model organik. Proses pengembangan struktural ada dua konsep, yaitu morfogenesis (mengembangkan dan mengubah bentuk) dan morfostatis (menjaga dan mempertahankan bentuk). Luhmann dalam Ritzer dan Goodman (2005) terkenal karena pemikirannya tentang sistem *autopoietic*. Konsep ini merujuk pada diversitas pada sistem-sistem sel biologis sampai ke seluruh masyarakat dunia, yang terdiri dari empat unsur pokok pemikiran, yaitu: (1) menghasilkan elemen-elemen dasar penyusun sistem, (2) mampu mengorganisasikan diri dalam batas-batas struktur internalnya, (3) bersifat *self-referential*, dan (4) sebagai sistem tertutup. Sementara itu Fararo (2000/2008) menyatakan bahwa ada dua istilah penting dalam struktur sosial, yaitu model struktur sosial, model proses sosial, dan kombinasi keduanya. Model analisis struktur sosial minimal ada empat, yaitu: struktur sebagai jaringan, struktur sebagai distribusi, struktur sebagai *grammar*, dan struktur sebagai permainan. Sebagai sebuah proses, maka ada dua hal yang penting diperhatikan, yaitu: apakah struktur sosial memang sudah terbentuk (*as a given*), atau struktur social sebagai sebuah dampak.

7.7.3. Evolusi dalam Struktur Sosial.

Evolusi sosial dibahas oleh para ahli dalam berbagai variasi. Laurer (1993) membahas tiga tokoh (Comte, Spencer dan Durkheim), LaPiere (1965) membahas evolusi dan neo-evolusi, Appelbaum (1970) menyajikan teori evolusioner klasik dan modern, dan Sztompka (2005) yang secara mudah dan lengkap membagi evolusi ke dalam evolusionisme klasik dan neo-evolusionisme. Sementara itu Abercrombie (1988), teori evolusioner memiliki variasi prinsip-prinsip yang berbeda, yaitu : (a) yang menggunakan postulat unilinier, mengikuti pemikiran perubahan sosial; dan (b) menggunakan dasar analogi dengan evolusi pada populasi tanaman dan binatang, mengikuti teori Darwin. Sztompka (2005), mencatat ada berbagai tokoh yang mengembangkan teori evolusi klasik adalah Comte (evolusi idealis), Spenser (evolusi naturalis), Morgan (evolusi materialis), Durkheim (evolusi sosiologis), Tonnies (evolusi tanpa kemajuan), dan Ward (evolusi dari evolusi).

Pemikiran klasik tersebut dianggap memiliki berbagai kelemahan, kurang dapat dibuktikan secara empiris dan berlawanan dengan bukti historis. Kritik sempat membuat teori ini mengalami mati suri pada abad 20, dan baru bangkit sekitar tahun 1950-an. Neo-evolusionisme mencoba mencari landasan baru bagi pernyataan teoretisnya. Ia mencoba memanfaatkan temuan disiplin empiris mengenai perubahan sosial, terutama temuan palaentologi, arkeologi, antropologi-kultural, etnologi dan historiografi. Mereka, antara lain White (langkah ke determinisme teknologi), Steward (evolusi multilinier), Sahlin dan Service (perbedaan antara evolusi umum dan evolusi khusus), Gerhard dan Lenski (evolusi-ekologi), Parsons (diferensiasi). Perkembangan baru menunjukkan adanya kembali ke evolusionisme biologis, serta menyatakan bahwa teori modernisasi dan konvergensi dapat dianggap sebagai wujud terakhir pemikiran evolusionisme (Sztompka, 2005). Yahya (2004) mengemukakan tentang keruntuhan teori evolusi, terutama pada evolusi biologis dalam penciptaan makhluk hidup. Darwinisme tidak sekedar tentang studi biologi, namun sangat berpengaruh terhadap kehidupan sehari-hari, bahkan mampu menjadi landasan filsafat "materialisme", yang mengandung sejumlah pemikiran penuh kepalsuan tentang mengapa dan bagaimana manusia muncul di muka bumi.

Dua tokoh teori evolusi yang dijadikan dasar analisis dalam studi ini adalah Spencer dan Parsons. Spencer dalam Sztompka (2005) menyatakan bahwa mekanisme evolusi sosial didasarkan pada tiga aturan. Pertama, mengandung ketidak-stabilan keseragaman, ketidakstabilan populasi yang homogen. Ada variasi dasar dalam bakat bawaan, pengalaman individual, lingkungan, peluang kebetulan dan kerugian yang dihadapi. Kelangsungan hidup manusia sangat tergantung pada diferensiasi peran, fungsi, kekuasaan, gengsi, dan kekayaan. Kedua, semakin kuat ketimpangan (*inequality*), spesialisasi peran, dispersitas kekuasaan, dan perbedaan kekayaan berkecenderungan semakin mendalam. Ketiga, status yang sama (peran, fungsi, gengsi, kekayaan) cenderung berkumpul bersama, maka akan menyebabkan masyarakat terbagi menjadi faksi-faksi, kelas dan kelompok, bangsa, dan pekerjaan yang berbeda. Setelah itu tidak ada lagi peluang untuk kembali ke keseragaman.

Parsons (1966) menyatakan bahwa paradigma perubahan evolusioner sebagai peningkatan kapasitas adaptif, yang dimulai melalui proses diferensiasi. Suatu unit atau subsistem berkembang menjadi lebih luas cakupannya. Jika diferensiasi menghasilkan suatu keseimbangan, akan mengembangkan substruktur yang baru, akan meningkatkan kapasitas adaptasi. Proses ini oleh Parson disebut peningkatan adaptif (*adaptive upgrading*) sebagai aspek siklus perubahan evolusioner. Proses diferensiasi juga berpotensi menyebabkan permasalahan integrasi suatu sistem. Karena itu sistem memerlukan peningkatan kemampuan integrasi yang disebut oleh parson sebagai inklusi. Komponen terakhir dari proses perubahan ini adalah yang berkaitan dengan sistem nilai dalam masyarakat.

Selain itu Luhmann (dalam Ritzer dan Goodman, 2005) membahas tentang evolusi yang melibatkan tiga mekanisme, yaitu variasi, seleksi dan stabilisasi. Masyarakat modern berhadapan dengan meningkatnya kompleksitas lingkungannya melalui proses diferensiasi. Diferensiasi menghasilkan peningkatan kompleksitas sistem dan membuatnya lebih mampu merespon lingkungan dan lebih cepat evolusinya. Terdapat empat bentuk diferensiasi, yaitu: segmentasi, stratifikasi, pusat – pinggiran, dan fungsional. Bentuk yang terakhir itulah yang paling kompleks dan mendominasi masyarakat modern. Ia menghasilkan fleksibilitas yang lebih besar, tetapi jika satu sistem yang dideferensiasi secara fungsional gagal melakukan fungsinya, sistem secara keseluruhan akan ambruk. Lebih jauh, adalah mungkin bahwa masyarakat tidak akan memiliki subsistem yang terdeferensiasi secara fungsional yang mampu menangani problem-problem penting.

Pada dasarnya sulit untuk dibantah bahwa masyarakat di mana struktur sosial merupakan salah satu fenomena pokok yang membentuknya selalu mengalami perubahan, baik secara lambat maupun cepat. Evolusionisme dengan berbagai kekurangannya merupakan sebuah alat analisis yang dapat digunakan untuk menjelaskan suatu perubahan dalam masyarakat, terutama jika dikaitkan dengan adanya periodisasi waktu. Perjalanan kehidupan masyarakat dapat dicermati melalui perubahan struktur sosial, di mana penambahan komponen struktur akan terus berlangsung, baik sebagai perluasan dari bagian internal struktur maupun ketika masyarakat berinteraksi intensif dengan lingkungan sosial luarnya.

7.7.4. Kapasitas Ruang dan Titik Kritis Struktur Sosial dalam Masyarakat yang Berevolusi.

Kapasitas ruang merujuk kepada pengertian *carrying capacity* (Soemarwoto 2003). Kemampuan lingkungan memasok sumberdaya dan mengasimilasi zat pencemar serta ketegangan sosial adalah terbatas. Batas kemampuan itu disebut dayadukung. Kecenderungan yang sekarang terjadi ialah kenaikan kualitas hidup disertai oleh kenaikan konsumsi sumberdaya dan pencemaran serta naiknya ketegangan sosial. Jika kecenderungan itu terus berlangsung, pada suatu ketika daya dukung lingkungan terlampaui. Konsekuensi ini ialah terjadinya keambrukan kehidupan manusia. Untuk menghindari keambrukan ini, haruslah diusahakan agar kenaikan kualitas hidup terjadi bersamaan dengan penurunan konsumsi sumberdaya dan pencemaran. Hal ini hanya dapat terjadi, apabila kualitas hidup

kita tidak hanya bertumpu pada materi saja, melainkan juga pada nonmateri (seni, budaya, filsafat dan ilmu), yang juga akan berfungsi untuk mengubah ketegangan sosial menjadi informasi sosial untuk perkembangan masyarakat dan bangsa. Dengan demikian kapasitas ruang struktur sosial adalah kemampuan struktur sosial di dalam menampung unsur-unsur pembentuk struktur, sehingga sampai pada batas kemampuannya menjadi ruang bagi manusia untuk melakukan interaksinya secara berkeadilan.

Dengan demikian, maka struktur merupakan sebuah ruang, sebuah arena yang digunakan oleh individu untuk menjalin interaksi dengan individu lainnya. Sebagai suatu ruang maka secara analogi ia akan mempunyai kapasitas tertentu dengan daya dukung atau daya tampung yang dinamis. Semua status yang ada dalam struktur yang berinteraksi memerlukan sistem nilai dan sistem norma agar struktur mampu menampung secara optimal. Bentuk-bentuk stratifikasi maupun sistem kekuasaan yang bekerja dalam struktur mempunyai dua peran yang bisa menyebabkan semakin luasnya kapasitas ruang di satu sisi, dan di sisi lain dapat juga mempersempit kapasitas ruang. Kapasitas ruang yang semakin terbatas dan membuat sesak bagi interaksi komponen struktur akan mengantarkan pada sebuah keadaan titik kritis. Perjalanan evolusi masyarakat akan mengalami dinamika kapasitas ruang.

Penentuan titik kritis struktur sosial adalah sebuah upaya penggunaan model analogi dari HACCP (*Hazard Analysis and Critical Control Point*) atau Sistem Analisis Bahaya dan Pengendalian Titik Kritis (BSN, 1998). Sistem ini terdiri dari tujuh prinsip, yaitu: (1) melaksanakan analisis bahaya, (2) menentukan Titik Kendali Kritis (TTK), (3) menetapkan batas kritis, (4) menetapkan sistem untuk memantau pengendalian TTK, (5) menetapkan tindakan perbaikan untuk dilakukan jika hasil pemantauan menunjukkan bahwa suatu titik kritis tertentu tidak dalam kendali, (6) menetapkan prosedur verifikasi untuk memastikan bahwa sistem HACCP bekerja secara efektif, dan (7) menetapkan semua dokumentasi mengenai semua prosedur dan catatan yang sesuai dengan prinsip-prinsip sistem HACCP dan penerapannya. Karena struktur memiliki kapasitas yang dinamis, maka di dalam prosesnya akan terdapat sebuah titik kritis yang perlu dihindari agar kapasitas ruang struktur sosial tetap mampu menjadi media bagi kehidupan individu dan kelompok dalam suatu masyarakat. Dalam masyarakat yang berevolusi maka dapat mengalami titik kritis lebih dari satu kali, bahkan mungkin bisa berkali-kali. Kerangka analisis data digunakan sebuah model analisis kapasitas ruang dan titik kritis struktur sosial, yang terdiri dari lima fase

7.8. Kapasitas Ruang dan Titik Kritis Struktur Sosial

7.8.1. Struktur Sosial pada Masa Isolasi (1950 – 1975)

Berbagai status dalam masa terisolasi adalah petani (di tegal dan hutan), pedagang (hasil pertanian, ikan), buruh pertanian (usaha tani, ternak), nelayan, Ucen (Kepala Dusun), Ketua RT, perhutani, partai politik (PNI, PKI), nelayan juragan jaring tarik. Kapasitas ruang struktur sosial secara obyektif bergantung kepada keberadaan sumber-sumber ekonomi rumah tangga yang dapat diakses oleh individu. Intervensi partai politik pada masa tahun 1965 telah membawa kepada kehidupan di mana struktur sosial telah mendekati pada titik kritisnya. Kemunculan pemerintahan orde baru, di satu sisi telah memberikan keluasaan pada kapasitas ruang struktur sosial, karena telah membebaskan mereka dari kehidupan yang mendekati titik kritis. Di sisi lain diakui bahwa pada masa itu tingkat kepatuhan masyarakat kepada pemerintah cukup tinggi. Dibukanya akses jalan di kawasan barat wilayah Karanggongso telah memberikan tambahan kapasitas ruang struktur sosial. Kehidupan masyarakat Karanggongso bergerak menjauhi titik kritisnya.

Sumber-sumber ekonomi yang diakses oleh masyarakat adalah memanfaatkan sumberdaya perikanan di kawasan teluk, dan sumberdaya hutan. Pemanfaatan sumberdaya perikanan yang semula hanya diakses oleh nelayan pancing, kemudian di akhir masa isolasi

dapat mengakses dengan alat tangkap jaring tarik. Perhutani pada masa tersebut memiliki kemampuan tinggi di dalam mengendalikan pemanfaatan sumberdaya hutan secara ilegal.

7.8.2. Struktur Sosial pada Masa Terbuka-1 (1976 – 1990)

Pada masa ini terjadi suatu perubahan struktur yang semakin kompleks, yang dipengaruhi pula oleh perubahan-perubahan yang terjadi di kawasan pantai Prigi. Sumber-sumber ekonomi dari pemanfaatan sumberdaya perikanan ditandai oleh semakin bertambahnya alat tangkap berskala lebih besar, seperti payang, purse seine, dan gill net. Sumber-sumber ekonomi dari sumberdaya kehutanan tidak banyak mengalami perubahan. Namun sumberdaya pariwisata telah berkembang demikian cepat, baik pada tumbuhnya hotel maupun kunjungan wisata. Demikian pula investor yang memanfaatkan sumberdaya perikanan juga semakin berkembang, bahkan ada investor yang membeli tanah, membangun penginapan, mendirikan Lembaga Swadaya Masyarakat dan bermukim di Karanggongso. Dengan demikian struktur sosial telah menjadi semakin kompleks.

Berbagai status yang memasuki struktur sosial di Karanggongso menjadi semakin banyak, yaitu: (1) investor (perikanan dan wisata), (2) pengunjung wisata, (3) pengusaha warung makan, (4) nelayan andhon, (5) LPK, (6) Pengelola SD dan TK. Struktur pada masa isolasi mengalami perubahan dengan masuknya unsur-unsur baru dalam struktur. Kelompok sosial yang ada disederhanakan. Pada masa Terbuka-1 faktor penggerak utama perubahan adalah kebijakan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah, yaitu dengan mengenalkan teknologi penangkapan ikan dan budidaya tanaman cengkih. Di tingkat lokal ada beberapa penggerak perubahan, adalah para investor di bidang pariwisata dan perikanan, termasuk di dalamnya adalah kedatangan pendeta Lugano, yang mengembangkan Lembaga Pengembangan Kenelayanan (LPK) dan melakukan investasi untuk penginapan. Investor juga ada yang mengembangkan usaha peternakan burung walet. Di bidang perikanan, saat musim ubur-ubur, beberapa perusahaan pengolahan ikan juga melakukan investasi. Berkembangnya sektor perikanan juga telah menjadi faktor penarik bagi nelayan dari Pasuruan untuk melakukan *andhon* ke Karanggongso.

7.8.3. Struktur Sosial pada Masa Terbuka-2 (1991 – 2008)

Masuknya sistem pengelolaan *fish sanctuary* di Pasir Putih, berdampak terhadap sistem pemanfaatan sumberdaya pesisir. Di bagian barat pasir putih sebelum *fish sanctuary* dioperasikan, digunakan oleh nelayan jaring tarik untuk melakukan penangkapan ikan. Namun setelah *fish sanctuary* dioperasikan makan seluruh kegiatan penangkapan ikan di kawasan ini dilarang. Pengelolaan *fish sanctuary* di sisi lain telah meluaskan akses dalam pemanfaatan sumberdaya wisata, baik oleh pemerintah daerah maupun masyarakat sekitar. Penyediaan perahu wisata oleh proyek telah mendorong berkembangnya layanan perahu wisata, yang sering disebut sebagai "perahu ojek wisata".

Karanggongso yang telah terbuka dengan adanya akses jalan di bagian barat dan dengan adanya perkembangan alat telekomunikasi, juga menyebabkan banyak tenaga kerja Karanggongso yang bekerja di luar negeri. Pada masa ini komoditi ikan layur juga melimpah dan menjadi komoditi ekspor. Nelayan pancing meningkatkan daya tangkapnya dengan meningkatkan ukuran perahu dan menggantikan daya dari dayung ke motor tempel. Perubahan penting pada masa ini adalah adanya akses masyarakat secara meluas untuk memanfaatkan hutan yang dikuasai oleh perhutani, dengan sistem gopla. Penggopla tidak hanya berasal dari Karanggongso, namun dari desa-desa di Kecamatan Watulimo yang jaraknya mencapai sekitar 15 km. Pembangunan jalur lintas selatan (JLS) telah membuka isolasi Karanggongso dari arah timur, dan ini semakin meningkatkan akses masyarakat dari kawasan barat menuju ke hutan di timur wilayah Karanggongso.

Perubahan struktur sosial tidak saja ditandai oleh masuknya status pembentuk struktur, tetapi juga oleh adanya perubahan sistem pemanfaatan sumberdaya, atau oleh sistem ekonomi masyarakat. Perilaku petani sekitar hutan yang menerapkan sistem "gopla"

dalam memanfaatkan sumberdaya hutan, tidak lagi bisa disikapi dengan diam oleh perhutani. Apalagi dengan adanya dorongan kuat bagi perhutani untuk melaksanakan PHBM dengan mekanisme LMDH, akan mereorganisasikan sistem pengelolaan pemanfaatan sumberdaya hutan yang selama ini dilakukan oleh masyarakat. Kedatangan investor untuk melakukan usaha budidaya rumput laut di akhir tahun 2008 melengkapi struktur masyarakat Karanggongso yang semakin kompleks.

7.8.4. Dinamika Kapasitas Ruang dan Titik Kritis Struktur Sosial

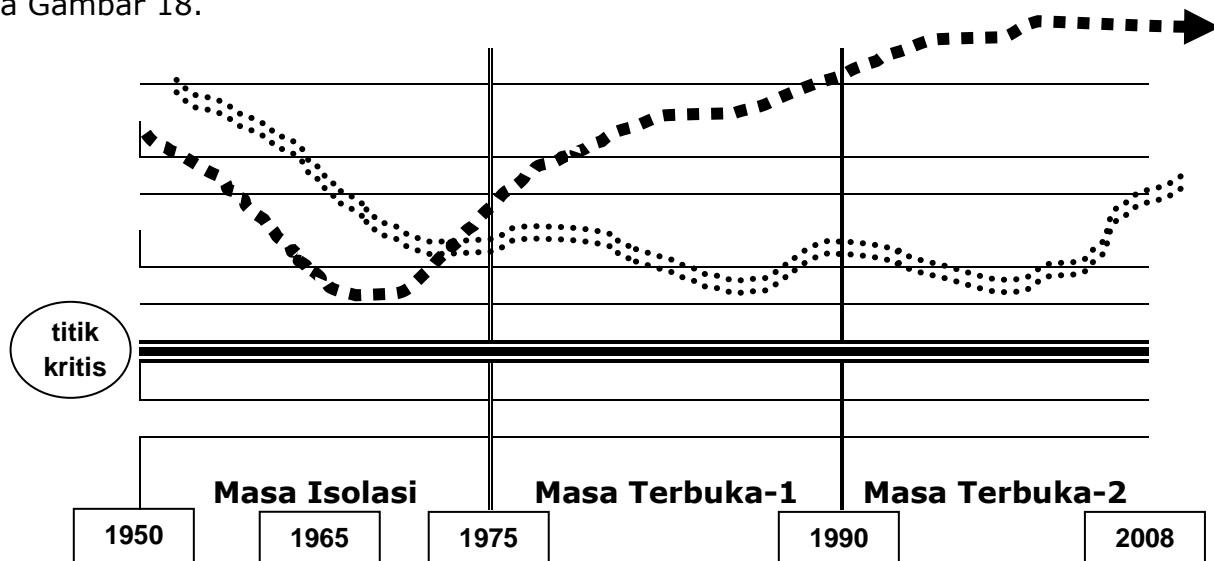
Kapasitas ruang dapat dilihat dalam tataran obyektif dan subyektif. Dalam tataran obyektif bisa ditelusuri dari sistem ekonomi yang berkembang di masyarakat. Ketersediaan sumber-sumber ekonomi dalam pemanfaatan sumberdaya pesisir (perikanan, kehutanan, pariwisata) dan tingkat kemampuan akses¹⁶ anggota masyarakat merupakan indikator obyektif untuk melakukan pengukuran kapasitas ruang struktur sosial.¹⁷ Ukuran subyektif diperoleh dari apa yang dirasakan dan dipersepsikan oleh aktor atau individu terhadap peluang bekerja dan berusaha yang berkembang dalam lingkungan lokal maupun akses mereka ke dalam lingkungan sosial luar. Dengan demikian kapasitas ruang secara obyektif dapat diukur dan bersifat lebih umum, sementara dalam tataran subyektif sangat tergantung pada individu, dalam arti memiliki tingkat keberagaman yang tinggi, kecuali pada suatu fenomena atau peristiwa yang secara umum dialami bersama dalam komunitas.

Kapasitas ruang struktur sosial masyarakat pesisir Karanggongso secara periodik dalam tiga masa kehidupan mereka mengalami kelenturan. Keterisolasian masyarakat Karanggongso dari perkembangan kehidupan di kawasan Teluk Prigi, belum dirasakan sebagai sebuah penurunan atau penyempitan kapasitas ruang struktur sosial. Sumber-sumber ekonomi dalam bidang pertanian dan perikanan, telah menjadi faktor penarik bagi penduduk di Tanggul Turus (Kabupaten Tulungagung) maupun penduduk sekitar dalam wilayah Kecamatan Watulimo (Kabupaten Trenggalek). Namun dalam masa isolasi ditandai adanya kapasitas ruang yang mengarah kepada titik kritis struktur sosial yang berlaku umum, yaitu pada peristiwa G.30 S. PKI. Peristiwa ini mampu memberikan tekanan pada struktur sosial, yaitu adanya suatu rasa tidak aman dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian bisa saja salah satu indikator kapasitas ruang adalah rasa aman, semakin tinggi rasa aman, maka kapasitas ruang struktur sosial secara subyektif semakin meluas dan sebaliknya.

Pada masa terbuka-1 kapasitas ruang struktur sosial mengalami perluasan, terutama ketika akses jalan dan masuknya investasi pada pemanfaatan sumberdaya perikanan dan pariwisata. Investasi di bidang pariwisata di satu sisi memberikan lapangan pekerjaan baru, namun di sisi lain terutama bagi nelayan pancing ulur mengalami kesulitan mendaratkan perahunya. Kapasitas ruang struktur sosial pada fase ini meluas, terutama didukung oleh peran aktif aktor Lugano dan LPK yang dikembangkannya. Masa ini juga ditandai oleh menyempitnya kapasitas ruang, terutama bagi rumahtangga pesisir yang hanya mampu mengakses sumberdaya ekonomi pertanian.

Kapasitas struktur sosial pada masa terbuka-2 juga memberikan arti yang berbeda bagi penduduk di Karanggongso. Ditutupnya akses penangkapan ikan di lokasi *fish sanctuary* tentu mempersempit kapasitas ruang struktur sosial bagi nelayan jaring tarik dan nelayan lain yang biasa menangkap ikan di lokasi tersebut, namun pengembangan *fish sanctuary* dan paket wisata telah memperluas kapasitas ruang struktur sosial bagi penduduk yang bekerja di sektor jasa pariwisata. Penghancuran hutan di lokasi penelitian, sebagai akses dari reformasi yang "keluar jalur", di sisi lain telah meningkatkan akses penduduk pesisir dalam memanfaatkan hutan dengan sistem "gopla". Pada masa ini, seakan-akan sistem "gopla" telah memiliki "keabsahan" yang lebih tinggi.

Visualisasi struktur sosial selama tiga periode disampaikan pada Gambar 17 di halaman berikut, dan visualisasi kapasitas ruang dan titik kritis struktur sosial disampaikan pada Gambar 18.

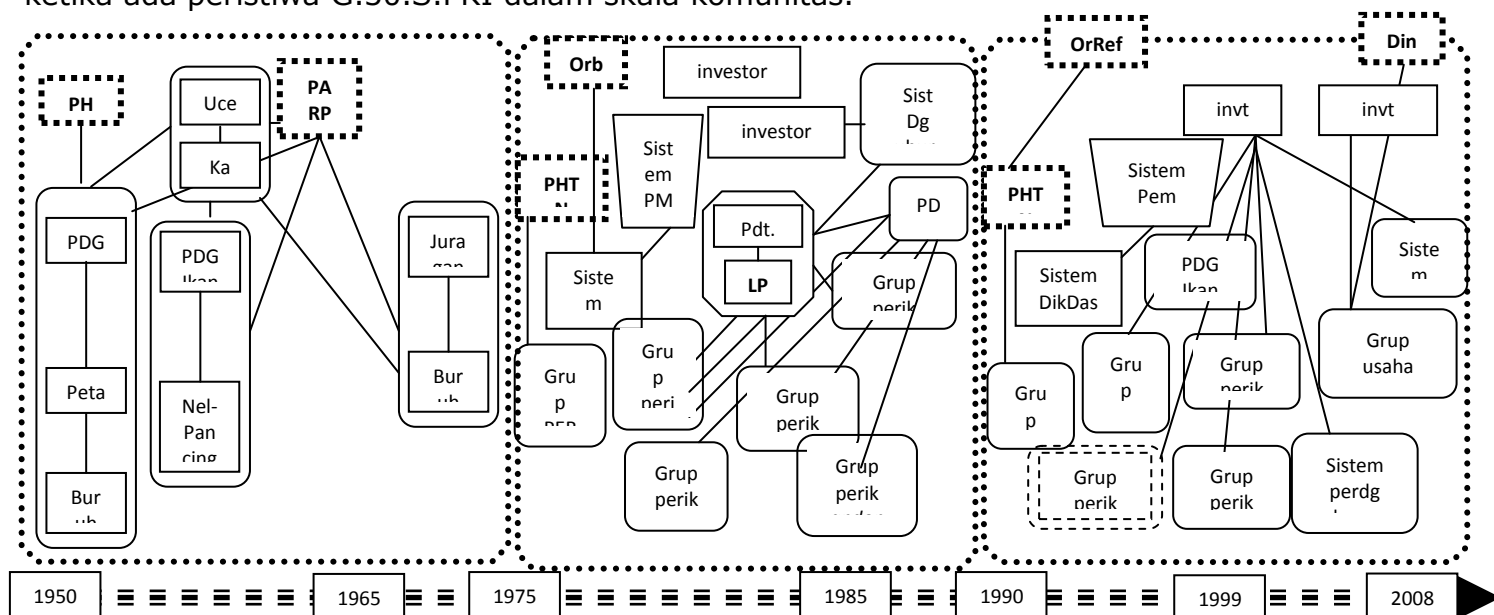


Keterangan gambar:

- ■ ■ ■: Kapasitas ruang struktur sosial level komunitas
-: Kapasitas ruang struktur sosial level individual atau *group*

Gambar 18. Kapasitas Ruang dan Titik Kritis Struktur Sosial Masyarakat Pesisir Karanggongso.

Kapasitas ruang struktur sosial di masa isolasi secara obyektif cukup luas, karena kondisi sumberdaya alam masih dalam kondisi tidak mengalami degradasi. Meskipun ada pengawasan yang cukup ketat dari pihak perhutani, namun akses ke hutan masih bisa dilakukan. Namun karena akses jalan ke arah pusat ekonomi terdekat sulit, maka kapasitas ruang tidak optimal. Teknologi penangkapan ikan kurang berkembang karena permintaan ikan hasil memancing tidak begitu tinggi. Pada masa ini titik kritis kehidupan hampir tercapai ketika ada peristiwa G.30.S.PKI dalam skala komunitas.



Keterangan gambar: PHTN: Perhutani/Jawatan Kehutanan; PDG = Pedagang; LPK = Lembaga Pengembangan Kenelayanan; Pdt. LGN = Pendeta Lugano; PCUL: Pancing *Ulur*; SDI = Sumberdaya Perikanan; JT = Jaring Tarik.

Gambar 17. Visualisasi Struktur Sosial Masyarakat Karanggongso pada tiga episode perubahan, yaitu masa isolasi (< 1975), masa terbuka-1 (1976 – 1990), dan masa terbuka-2 (1991-2008).

Semakin baik kondisi suatu ekosistem pesisir, maka akan semakin luas tingkat kapasitas ruang struktur sosial. Namun di sisi lain peningkatan kapasitas ruang struktur sosial tidak secara otomatis akan meningkatkan kehidupan masyarakat, jika tidak dibarengi dengan peningkatan kemampuan akses terhadap pemanfaatan sumberdaya di ekosistem. Dengan demikian kapasitas ruang struktur sosial itu dapat dimaknai secara obyektif maupun secara subyektif.

Titik kritis dapat pula memberikan informasi tentang mutu kehidupan sebuah komunitas. Tingkat kecepatan pencapaian titik kritis dalam struktur sosial, berarti struktur sosial semakin rapuh, demikian pula jika masa titik kritis tidak segera berlalu atau terjadi dalam waktu yang relatif lama. Penyebab tercapainya titik kritis lebih banyak berasal dari lingkungan sosial luar, sementara itu kemampuan lingkungan lokal untuk bertahan tidak mencapai titik kritis sangat tergantung pada fleksibilitas struktur, dalam arti kemampuan struktur meningkatkan kapasitas ruangnya.

Riset-riset sebelumnya tidak secara eksplisit membahas kapasitas ruang dan titik kritis struktur sosial. Jaringan sosial yang dibangun nelayan *pendega* di Situbondo (Kusnadi, 2000) dan jaringan sosial keluarga nelayan sekoci di Sendang Biru (Ardiyanto, 2006) merupakan upaya melakukan strategi adaptasi. Di dalam sebuah jaringan sosial dapat memberikan kekuatan akses bagi individu maupun keluarga untuk mampu berada aktif dalam sebuah kapasitas ruang struktur sosial.

Riset sistem *pengamba'* yang berciri *patron-client* (Qoid *et al*, 1993; Setiawan *et al*, 1993; Kusnadi, 2001) merupakan sebuah struktur dasar berbasis pengelolaan sumberdaya perikanan. Temuan lapang menunjukkan bahwa hubungan sosial lebih bersifat saling menguntungkan dari perspektif nelayan. Secara subyektif pola hubungan sosial semacam ini telah memberikan rasa aman di dalam menerima jaminan pasar hasil tangkapan. Dalam hal demikian, maka sistem perdagangan di kawasan pesisir masih dalam tahap tidak mempersempit kapasitas ruang struktur sosial.

Riset tentang aksesibilitas nelayan skala kecil (Muhammad *et al.*, 2008) tentang saptagon akses. memberikan informasi bahwa rumahtangga nelayan skala kecil pada umumnya kurang memiliki akses terhadap sistem pengelolaan sumberdaya. Dapat diduga bahwa semakin tinggi kemampuan akses, maka di satu sisi akan meningkatkan kapasitas ruang struktur sosial, dan di sisi lain menimbulkan kekuatan individu dan komunitas di dalam menjauh dari titik kritis struktur sosial.

Konflik sosial dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya pesisir merupakan variabel penting dalam kaitannya dengan kapaistas ruang dan titik kritis struktur sosial. Konflik sosial bisa menjadi indikator tentang kapasitas ruang struktur sosial, di mana jika frekuensi dan eskalasi konflik semakin tinggi, maka akan menurunkan kapasitas struktur sosial. Konflik di Karanggongso masih termasuk dalam kategori konflik antar kelas nelayan, yang ditumpangi oleh sentimen etnis dan otonomi daerah. Hal ini agak berbeda dengan berbagai konflik yang pernah terjadi di tanah air, misalnya konflik penggunaan trawl tahun 1970 – 1980. Dilaporkan oleh Kinseng (2006) bahwa di sekitar perairan Klandasan, Balikpapan, Kalimantan Timur sudah mengarah kepada konflik kelas, yang mengarah kepada dominasi kelas yang satu kepada kelas lainnya, bukan eksploitasi kelas. Menarik juga mencermati konflik antar nelayan di perairan Lombok Barat (Sudiyono, 2006), di mana konflik tidak hanya merupakan sebuah perebutan sumberdaya alam, melainkan ada faktor penguat konflik, yaitu adanya persaingan tokoh lokal dari dua partai yang berbeda.

Isu konflik, selalu bertumpu dengan kondisi sumberdaya pesisir. Dalam kaitannya dengan sistem pengelolaan, di Karanggongso sebenarnya juga dapat diamati adanya perebutan sumberdaya antar sektor. Misalnya di masa terbuka-1 nelayan pancing dengan investor pariwisata, atau pada masa terbuka-2 konflik antara nelayan jaring tarik dan nelayan

gill net dengan Pengelola Kawasan *Fish Sanctuary*. Konflik ini tentu akan berpengaruh terhadap kapasitas ruang dan titik kritis struktur sosial. Dalam kaitannya dengan pengelolaan sumberdaya pesisir, ada peristiwa yang menarik, dimana ketika terjadi pembalakan liar dan massal terhadap hutan, telah memberikan "legitimasi" sistem *gopla*, dan bahkan sekarang di dalam pengelolaan LMDH didasarkan pada sistem *gopla*. Kerusakan sumberdaya hutan, ternyata meningkatkan akses masyarakat pada pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya, yang diduga kuat akan meningkatkan kapasitas ruang struktur sosial.

7.9. Evolusi Struktur Sosial: Tataran Realitas Sosial

Konstruksi pemikiran disertasi ini dibangun dengan beberapa pertimbangan. *Pertama*, riset-riset peneliti terdahulu sebagai dasar pemikiran utama. Kapasitas ruang struktur sosial dan titik kritis ini diilhami dari Gidden (2003) tentang *enabling and constraint* dan (Soemarwoto, 2003) tentang *carrying capacity* yang harus memper-hatikan aspek sosio-kultural. *Kedua*, menawarkan sebuah definisi tentang struktur sosial, yaitu: "penyusunan orang-orang secara berkesinambungan atas status dan peran dalam satu atau lebih *social group*, dalam sistem stratifikasi tertentu, dimana perilakunya dapat diduga dan atau dapat dikendalikan oleh nilai dan norma, dan di dalam proses berinteraksi antar status ada unsur kekuasaan". *Ketiga*, struktur sosial yang dikaji ini berada dalam sebuah ekosistem pesisir, yang mengalami perkembangan dalam tiga fase, yang ingin dianalisis secara evolusioner menggunakan perspektif Spencer (dalam Stompka, 2005), Parsons (1966) dan (1984).

Struktur sosial mengalami perkembangan secara evolusioner ditandai dengan semakin meningkat jumlah unsur dalam struktur. Unsur-unsur tersebut dapat berupa sebuah sistem baru, atau individu yang mampu menggerakkan sistem dalam struktur, atau sebuah sistem pengelolaan sumberdaya yang mampu mendorong perubahan struktur secara lebih luas. Sebagaimana disampaikan oleh Spencer, bahwa bentuk struktur yang telah berevolusi tidak akan mungkin kembali ke bentuk semula. Hal ini bisa terjadi, sebab perubahan-perubahan struktur sosial, juga secara linier menyebabkan atau disebabkan oleh adanya perubahan habitat. Aspek terpenting dalam evolusi ini adalah bukan kemampuan kembalinya sebuah struktur sosial ke suatu bentuk pada periode tertentu, karena dalam struktur itu kapasitas ruangnya masih luas, tetapi adalah kemampuan adaptasi individu dan sistem sosial ke dalam bentuk struktur yang baru.

Penggerak utama perubahan struktur sosial dalam masa isolasi adalah peristiwa politik nasional yang merambah ke seluruh aspek kehidupan. Terganggunya rasa aman bagi warga karena peristiwa G.30.S PKI dirasakan oleh keseluruhan komunitas yang ada. Bergantinya rezim pemerintahan ke masa orde baru memberikan dampak pada babak baru kehidupan di Karanggongso, di mana selama masa itu banyak orang-orang dari lain dusun (Nggares), lain desa (Dukuh, Selawe), lain kecamatan (Durenan) bahkan lain kabupaten (Tulungagung), yang melakukan migrasi ke kawasan ini. Sumberdaya dominan yang memberikan keluasan ruang struktur sosial adalah perikanan, peternakan, dan sedikit pertanian di kawasan hutan.

Perubahan struktur sosial Periode terbuka-1 terutama digerakkan oleh berkembangnya teknologi penangkapan ikan dan kepariwisataan. Peranan LSM (LPK) yang didirikan oleh Pendeta Lugano memberikan penguatan kepada komunitas lokal dalam interaksinya dengan pihak-pihak dari kawasan subteluk lainnya, utamanya dalam penguatan bargaining pada sistem bagi hasil alat tangkap *purse seine*. Investasi di bidang perikanan dan pariwisata merupakan penggerak perubahan yang utama. Pada masa ini ditandai juga oleh beralihnya penguasaan lahan oleh para investor, yang datang dari luar kota kabupaten (Trenggalek), maupun luar kabupaten, misalnya Tulungagung dan Blitar, Pasuruan untuk tinggal menetap atau dalam musim penangkapan ikan. Pada masa ini pemanfaatan sumberdaya dominan adalah perikanan dan pariwisata.

Pada periode terbuka-2 struktur terutama digerakkan oleh tiga hal, yaitu internasionalisasi, perubahan sistem politik nasional yang mengarah pada desentralisasi

(reformasi), terutama pada melemahnya kontrol Perhutani terhadap pengelolaan sumberdaya kehutanan, dan berkembangnya kawasan wisata Pasir Putih. Dalam periode ini juga dapat diamati adanya pergantian orinetasi kerja bagi generasi muda nelayan. Teknologi dan peralatan pancing *ulur* tidak lagi menjadi sebuah warisan yang penting dalam keluarga, usaha penangkapan dengan pancing *ulur* telah berubah dari sebuah pekerjaan utama di masa lalu, menjadi pekerjaan sampingan di masa sekarang. Selain itu generasi tua banyak yang meninggalkan laut dan mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya hutan, yang di masa terbuka-2 ini, ditunjang leh berkembangnya sistem pengelolaan *gopla*. Pengelolaan *fish sanctuary* di Pasir Putih memberikan peluang pada berkembangnya sektor pariwisata di kawasan ini, karena dalam sistem pengelolaa *fish sanctuary* disatukan dengan kegiatan wisata.

7.10. Evolusi Struktur Sosial: Tataran Teoretis

Dua item penting dalam tataran teoretis adalah sebagai berikut:

Pertama, perubahan struktur sosial masyarakat Karanggongso tidak sepenuhnya mengikuti teori evolusi yang ada, di mana seakan-akan bentuk struktur tesebut mengalami perubahan pada tahapan-tahapan evolusioner. Perubahan memang terjadi, tetapi mereka tetap berada dalam satuan komunitas dan budaya semula. Struktur tidak secara otomatis merupakan sebuah peralihan dari masyarakat meramu dan berburu, ke fase hortikultura, ke fase agraris, dan ke fase industri, sebagaimana yang digambarkan oleh Lenksi, juga tidak mengikuti pola seperti pada perubahan *antroposere* sebagaimana yang digambarkan dalam Sukadana maupun Schutkowski.

Perkembangan struktur sosial ditandai oleh merumitnya evolusi, dimana ciri-ciri tahapan evolusi itu ditemukan dalam satu komunitas. Pemanfaatan sumberdaya perikanan, pada generasi berikutnya terjadi perluasan skala usaha penangkapan ikan, misalnya dari alat pancing ulur ke alat tangkap *purse seine*; pancing ulur ke payang; pancing ulur ke pancing "tonda". Di bidang pemanfaatan sumberdaya pertanian dari tegal ke *gopla*, ke perdagangan hortikultura. Namun jika dirunut dapat dilihat adanya perubahan dari penangkapan ikan dibidang perikanan, ke budidaya pertanian dan perikanan, dan ke perdagangan hortikultura dan pengolahan ikan. Hal ini berarti bahwa walaupun secara kronologis berdasarkan waktu bisa disusun adanya perubahan yang linier mengikuti waktu, namun bentuk struktur tidak selalu berubah secara bertahap. Khusus struktur sosial, ternyata diferensiasi tidak selalu menjadikan struktur berevolusi, tetapi mampu mengubahnya menjadi semakin kompleks. Dari sinilah sebenarnya analisis kapasitas dan titik kritis struktur sosial menjadi penting untuk menelusuri dinamika sebuah struktur sosial.

Kedua, struktur dapat dikaji sebagai sebuah sistem, di mana di dalam sebuah sistem dari sudut pandang teori sistem umum (Buckley), memiliki dua sifat, yaitu: pertama, morfogenesis (mengembangkan atau mengubah bentuk) dan, kedua morfostatis (menjaga atau mempertahankan) bentuk tertentu suatu sistem. Sistem mampu mengalami proses pengembangan (*structural elaboration*) dan kompleksitas yang semakin tinggi, namun sistem sosial dapat berubah ke arah penyederhanaan struktural (*structural simplification*). Berdasarkan visuali struktural dapat dikatakan bahwa struktur sosial masyarakat nelayan Karanggongso mengalami kedua sifat, baik morfogenesis maupun morfostatis. Morfogenesis ditandai dengan semakinnya kompleksnya pembentuk struktur, namun ketika ada konflik di dalam pemanfaatan sumberdaya, maka unsur struktur yang dianggap menyebabkan ketegangan (nelayan andhon) diupayakan untuk keluar dari struktur. Dalam arti ini nelayan andhon dipaksa untuk kembali ke asalnya, atau armada penangkapan ikannya dirusak.

Demikian pula struktur masyarakat nelayan Karanggongso dapat pula dijelaskan dengan teori sistem yang disampaikan oleh Luhman, menjelaskan tentang adanya sistem *autopoietic*, suatu diversitas pada sistem-sistem biologis sampai ke seluruh masyarakat dunia. Empat karakteristik autopuietik adalah: (a) menghasilkan elemen dasar, (b) mampu mengorgani-sasikan diri dalam batas-batasnya dan struktur internalnya, (c) *self referential*,

dan (d) sebagai sistem tertutup. Struktur dapat dipahami sebuah sistem yang “hidup”. Masyarakat Karanggongso walaupun sudah berinteraksi dengan dunia luar masih berada dalam satu kesatuan, hal ini nampak jelas misalnya dalam kaitannya dengan dukungan mereka kepada calon pimpinan daerah, baik untuk pemimpin lokal, regional maupun nasional. Mereka juga tetap dapat menjalankan kehidupan harmonis ketika Pendeta Lugano masuk ke dalam komunitas mereka.

Ketiga, kajian struktur sosial di Karanggongso yang sedang mengalami perubahan, dan dengan menggunakan pendekatan evolusioner yang dalam hal ini saya berasumsi bahwa teori-teori perubahan sosial yang dipetakan oleh Appelbaum (1970) dapat dijelaskan tidak dari sisi sebuah skematik, namun diupayakan untuk mengkonstruksinya menjadi sebuah proses. Evolusi, dengan keterbatasan yang ada, mungkin bisa digunakan sebagai *the grand of theory of social change*, dengan menekankan bahwa selama proses itu masyarakat melakukan adaptasi. Selama proses perkembangan selalu berpeluang terjadi konflik, karena itu teori konflik digunakan untuk menjelaskan sebuah proses jangka pendek yang secara langsung dapat diamati. Proses selanjutnya, jika struktur mengalami keseimbangan, maka digunakan teori ekuilibrium, sebuah keseimbangan sementara. Akhirnya struktur akan mencapai hasil akhir, yaitu bangkit atau runtuh. Kebangkitan atau keruntuhan suatu struktur dalam kajian ini identik dengan analisis kapasitas ruang dan titik kritis struktur sosial. Struktur yang mengalami kebangkitan artinya memiliki kapasitas ruang yang luas, sementara struktur yang runtuh berarti telah mencapai titik kritisnya. Secara faktual masyarakat nelayan Karanggongso sekali akan mendekati titik kritis secara umum, yang dalam hal ini juga dialami secara nasional, yaitu pada masa isolasi dengan peristiwa G.30.S PKI. Titik kritis secara parsial, artinya yang dialami oleh individu adalah justru pada masa terbuka-1, ketika para petani kesulitan untuk mengakses perekonomian hutan, dan tidak memiliki akses (ketrampilan dan modal) dalam pemanfaatan sumberdaya perikanan.

Keempat, berkaitan dengan analisis evolusi, maka tiga fase teori evolusi Spencer (ada ketidakstabilan dalam keseragaman, karena itu perlu ada diferensiasi untuk bertahan hidup, semakin kuat ketimpangan maka diferensiasi semakin mendalam, masyarakat semakin terbagi menjadi faksi-faksi, semakin tidak ada lagi peluang untuk menjadi keseragaman), artinya struktur yang berubah tidak akan kembali ke bentuk semula. Visualisasi struktural secara sederhana telah memberikan jawaban, bahwa bentuk semula dari suatu proses diferensiasi tidak akan kembali. Sedangkan pandangan evolusi yang disampaikan Parsons (1966) menyatakan bahwa perubahan evolusioner sebagai sebuah peningkatan kapasitas adaptif (diferensiasi, keseimbangan, mengembangkan substruktur baru) adalah sebuah *adaptive upgrading* yang mengarah pada bagaimana struktur mampu meningkatkan kemampuan integrasinya. Visualisasi struktural pada masa terbuka-2 telah memberikan jawaban, bahwa pada dasarnya masyarakat Karanggongso sampai saat ini masih mampu meningkatkan kemampuan *adaptive upgrading*-nya, dimana harmoni sosial masih bisa ditemui dalam berbagai aspek kehidupan, terutama untuk lingkungan komunitas lokal.

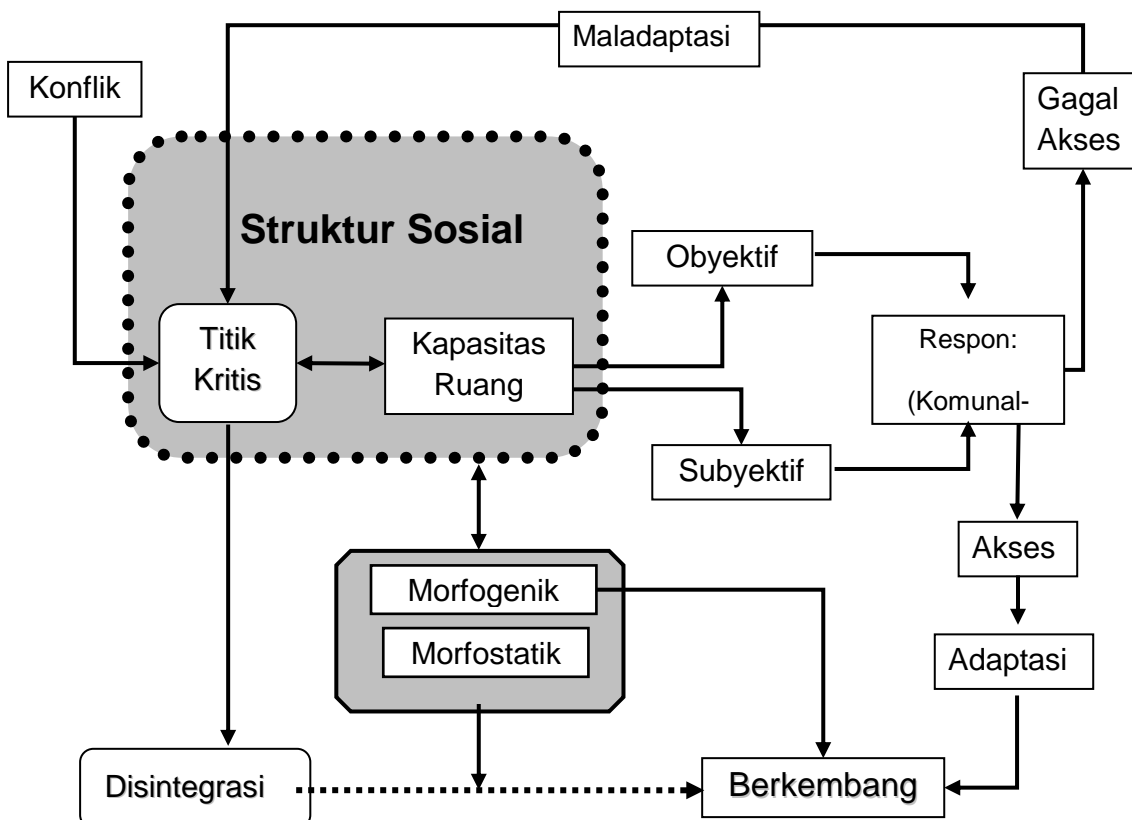
Dua implikasi teoretis disampaikan, yaitu dalam tataran sintesis teori dan refleksi lapang terhadap teori. *Pertama*, sintesis teori menyatakan bahwa teori evolusi dapat digunakan sebagai teori utama untuk menjelaskan sebuah perubahan struktur sosial, sementara teori konflik menjelaskan sebuah proses berjangka relatif pendek perubahan struktur, dan teori ekuilibrium memberikan informasi tentang kestabilan sesaat sebuah struktur, yang akhirnya struktur akan berubah pada kondisi berkembang atau mengalami kehancuran. Sintesa teori sebagai sebuah proses ini akan lebih operasional jika dibandingkan penyusunan teori perubahan sosial model skematik Appelbaum (1970). Penempatan teori evolusi sebagai induk telaah ini memberi makna bahwa teori evolusi masih dapat digunakan untuk memberikan penjelasan tentang perubahan sosial, namun harus dilengkapi dengan berbagai teori lain, disesuaikan dengan konteks permasalahan yang ada. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa teori itu tidak pernah mati suri, hanya saja diperlukan pengkajian

terus-menerus disesuaikan dengan perkembangan masyarakat dan perkembangan teori itu sendiri.

Kedua, tujuh proposisi yang dihasilkan dari riset ini adalah:

- 1. Struktur sosial berkembang sejalan dengan perubahan kapasitas ruangnya.**
- 2. Jika struktur mencapai titik kritis, maka ia akan mengalami disintegrasi.**
- 3. Dimensi morfogenik dapat meningkatkan kapasitas ruang struktur sosial, sementara itu dimensi morfostatik dapat menjaga stabilitas struktur untuk tidak mencapai titik kritis.**
- 4. Jika dimensi obyektif kapasitas ruang struktur sosial dalam sebuah ekosistem meningkat, maka tidak secara otomatis meningkatkan kapasitas ruang dari dimensi subyektif.**
- 5. Perubahan dimensi obyektif-subyektif kapasitas ruang struktur sosial memiliki respon yang relatif terhadap dimensi komunal-individual.**
- 6. Tingginya intensitas dan eskalasi konflik dapat mempersempit kapasitas ruang struktur sosial, yang cenderung mengarah pada titik kritis.**
- 7. Kemampuan akses yang tinggi dapat meningkatkan daya adaptasi, dan akan memperluas kapasitas ruang struktur sosial.**

Konstruksi konsep atau variabel dari proposisi di atas jika dikembangkan untuk membangun teori kapasitas ruang dan titik kritis struktur sosial dapat divisualisasikan pada Gambar 19 berikut.



Gambar 19. Konstruksi antar konsep dari proposisi .

Implikasi praktis yang dapat disampaikan dari kajian di atas adalah sebagai berikut. Sampai dengan saat ini telah banyak model pembangunan dan pemberdayaan masyarakat pesisir yang telah dilaksanakan. Dalam banyak hal identifikasi awal terhadap kondisi

masyarakat belum secara optimal menampilkan struktur masyarakat. Struktur masyarakat bergerak secara dinamis. Salah satu informasi penting dari struktur sosial adalah tentang kapasitas ruang dan titik kritis struktur sosial. Sebelum sebuah kegiatan diimplementasikan, maka di dalam membuat perencanaan kegiatan seharusnya didahului dengan informasi akurat tentang kompleksitas struktur sosial, kapasitas ruang struktur sosial dan titik kritis struktur sosial.

Informasi tentang struktur sosial tersebut dapat digunakan untuk menyelaraskan program atau kegiatan yang akan diintroduksi dari luar, kegiatan yang dirancang oleh masyarakat lokal, maupun kegiatan yang mengintegrasikan kebutuhan lokal dengan kepentingan dari luar. Pengenalan teknologi penangkapan dengan “pancing tonda” secara teknis akan segera bisa dilakukan oleh nelayan pancing “ulur”, namun secara finansial diperlukan modal yang tinggi, karena itu bentuk introduksi teknologi yang berpeluang bisa diterima adalah dalam bentuk *social group* antara pemilik modal dengan nelayan, bukan dalam bentuk Kelompok Usaha Bersama (KUB). Demikian pula sistem reforestasi di kawasan hutan milik perhutani yang dilakukan akan lebih berhasil dengan baik, jika pola pengelolaannya didasarkan pada “sistem *gopla*” yang sudah dikembangkan oleh masyarakat. Dengan memahami struktur sosial, maka akan dapat dilakukan prediksi tentang tingkat integrasi komponen pembaruan dengan struktur yang ada, kemudahan di dalam melakukan implementasi kegiatan, dan tentu saja akan lebih memudahkan di dalam merancang evaluasi suatu kegiatan.

Oleh karena itu tahapan yang perlu memperoleh perhatian dalam kajian tentang kapasitas ruang dan titik kritis struktur sosial adalah berbagai langkah penting di dalam menggerakkan potensi masyarakat untuk berkembang ke arah yang lebih dapat menjamin kemakmuran mereka. Beberapa pemikiran pokok tersebut adalah: *Pertama*, pendeskripsian atau visualisasi struktural masyarakat yang akan menjadi sasaran kegiatan. *Kedua*, pendugaan secara cepat dan cermat tentang tingkat kapasitas ruang dan titik kritis struktur sosial, baik yang bersifat obyektif – subyektif, maupun yang berlaku umum (komunal) maupun yang berlaku khusus (individual dan *social group*), atau dimensi komunal – individual. *Ketiga*, penyusunan rencana kegiatan perlu untuk tetap mengacu kepada pendekatan *community base and resources management*, yang sudah dikembangkan oleh para ahli pemberdayaan masyarakat. *Keempat*, kemunculan generasi muda warga Dusun Karanggongso yang melakukan spesialisasi dalam sistem perdagangan produk perikanan dan pertanian, paling tidak akan menjadikan berkurangnya struktur sosial dari ketergantungan pada investor dari lingkungan sosial luar. *Kelima*, tingginya peranan perempuan pesisir dalam ekonomi pada tingkat komunitas maupun rumah tangga sering terabaikan dalam sistem perencanaan pembangunan. *Keenam*, diperlukan berbagai langkah-langkah protektif dan antisipatif dari pihak pemerintah desa dengan meningkatkan akses warga kepada dinamika kehidupan sosial yang semakin berkembang.

REFERENSI

- Appelbaum, Richard P. 1970. Theories of Social Change. Markam Publishing Company, Chicago
- Davis, Charles C. 1956. Marine and Fresh water Plankton. Michigan University Press.
- Fakultas Perikanan (Fakultas Perikanan) 1999. Penyusunan Pengelolaan Sumberdaya Perikanan Berbasis Kepada Masyarakat. Kerjasama Penelitian antara Cofish Project Bagpro Trenggalek dan Banyuwangi dengan Fakultas Perikanan Universitas Brawijaya
- Giddens, Anthony. 2003. The Constitution of The Society. Teori Strukturisasi untuk analisa Sosial. Pedati. Yogyakarta
- Kusnadi. 2004. Polemik Kemiskinan Nelayan. Pondok Edukasi dan Pokja Pembaruan. Bantul
- Laurer, Robert H., 1993. Perspektif Tentang Perubahan Sosial. Rineka Cipta. Jakarta

- Mubyarto, Lukman Sutrisno dan Michel Dove. 1984. Nelayan dan Kemiskinan: Studi Ekonomi Antropologi di Dua Desa Pantai. Rajawali. Jakarta.
- Ndraha, Taliziduhu. 1987. Pembangunan Masyarakat: Mempersiapkan Masyarakat Tinggal Landas. Bina Aksara. Jakarta.
- Qoid, Abdul. 1993. Analisa Sosial Ekonomi Pembiayaan dan Perkreditan Pola Pengambe' di Muncar dan Lekok. Jawa Timur. Jurnal Universitas Brawijaya. Vol 6. Hal. 82-102. Universitas Brawijaya. Malang.
- Ritzer, George dan Douglas J. Goodman. 2005. Teori Sosiologi Modern. Prenada. Jakarta.
- Setiawan,Edi Susilo dan Abdul Qoid, 1993. Peranan Pedagang dan KUD/TPI dalam Usaha Penangkapan Ikan, Studi Kasus dengan Pendekatan "Ketergantungan" dan Inovasi di Pacitan. Bultin Ilmiah Perikanan. Edisi/2. Hal 61-79. Fakultas Perikanan Universitas Brawijaya.
- Soemarwoto, Otto. 1991. Ekologi, Lingkungan Hidup dan Pembangunan. Penerbit Djambatan. Jakarta
- Sukadana. A. Adi. 1983. Antropo-Ekologi. Airlangga University Press. Surabaya
- Susilo, Edi. 1991. Resiprositas dan Struktur Masyarakat: Studi Kasus Nelayan pancing di Karanggongso, Jawa Timur. Thesis S2. Program Pasca Sarjana IPB. Bogor.
- Susilo, Edi dan Rachmad Safaat. 2002. "Konflik Hukum di Sektor Kelautan dan Perikanan: Suatu Kajian Substansi Hukum", Makalah disampaikan pada Diskusi dengan Nelayan Pantai Utara dan Selatan Jawa Timur dalam menyikapi Kebijakan Pembangunan Perikanan di Griya Sakinah, Jawa Timur 30 April-2 Mei 2002, Yang diselenggarakan oleh Lembaga bantuan Hukum Surabaya
- Susilo, Edi. 1997. "Pengembangan Kelembagaan Akomodatif: Sintesis Pengembangan Perikanan untuk Meningkatkan Aksesibititas Perikanan Rakyat". Makalah Disampaikan Pada Simposium Perikanan Indonesia 2, di Ujung pandang, november 1997.
- Susilo, Edi. Et al. 2005. Peningkatan Daya Adaptasi Manusia Pada Lingkungan yang Sedang Berubah Cepat dan Multidimensional (Kasus pada Masyarakat Nelayan Tradisional. Draft Laporan Tiga Tahun RUKK (IV, 1,2,3) Tahun Anggaran 2003-2005. Pusat Penelitian Ilmu Sosial Lembaga Penelitian Universitas Brawijaya Malang.
- Susilo, Edi. 1986. "Nelayan di Antara Tengkulak dan Tempat Pelelangan Ikan: Suatu Kajian Teoritik", Makalah disampaikan dalam Seminar Nasional Ilmu Sosia, 15-19 Desember 1986 di Ujung Pandang.
- Susilo, Edi. 2004."Aspek Sosekbud Nelayan Pancing dan Nelayan Jaring Tarik di Pantai Prigi, Trenggalek, Jawatimur" Makalah disampaikan dalam Workshop Rencana Pengelolaan Perikanan Layur 1 di Kediri, 20 – 22 Juli 2004. Bagian Project Cofish Trenggalek
- Sztompka, Piotr. 2005 Sosiologi Perubahan Sosial. Prenada Media. Jakarta.
- Tjondronegoro, S.M.P. 1985." Gejala Organisasi dan Pembangunan Berencana dalam Masyarakat pedesaan Di Jawa", Dalam Koentjaraningrat (ED.), Maslah Masalah Pembangunan: Bunga rampai Antropologi Terapan. LP3ES. Jakarta. Halaman 214-244.

PROPAGASI

Y. Latihan dan Diskusi (Propagasi vertical dan Horizontal)

8. Secara berkelompok, diskusikan pokok bahasan kapasitas ruang dan titik kritis struktur sosial: kasus Karanggongso, Pantai Prigi. Kemudian hasil diskusi tersebut dipresentasikan sesuai dengan pembagian temanya yang akan ditentukan oleh pengampu mata kuliah.

Z. Pertanyaan (Evaluasi mandiri)

- 21.What is the meaning of mal-adaptation?
- 22.What is the meaning of morfogenik?
- 23.What is the meaning of morfostatic?
- 24.What is the meaning of disintegration?

AA. QUIZ -multiple choice (Evaluasi)

BB. PROYEK (Eksplorasi entrepreneurship, penerapan topic bahasan pada dunia nyata)



SOSIOLOGI PERIKANAN:

Pemberdayaan Masyarakat Pesisir

Dr. Ir. Edi Susilo, MS., Riski A.L. S.Pi.

Agribisnis Perikanan, SEPK, FPIK, Universitas Brawijaya

Email : olisuside@yahoo.com



8 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PESIR 8.1 Beberapa Pemberdayaan yang Sudah Dilakukan 8.2 <i>Cofish Project</i> Banyuwangi (Susilo dan Hartono, 2005) 8.2.1. Profil Umum Proyek 8.2.2. Perencanaan dan Persiapan Proyek 8.2.3. Permasalahan Pokok dari kajian REA dan SEA 8.2.4. Rencana Pengelolaan Sumberdaya Perikanan 8.2.5. Evaluasi Kelembagaan 8.2.6. Pelaksanaan Kegiatan 8.2.6.1. Pelatihan Awal. 8.2.6.2. Kelompok PSBK (Pengelola Sumberdaya Berbasis Masyarakat) 8.2.6.3. KKPPK	8.2.7. Pelaksanaan Proyek 8.2.7.1 Pengelolaan Sumberdaya Perikanan Pantai (PSP2) atau Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (PKH) 8.2.7.2. <i>Pembangunan Masyarakat dan Pengurangan Kemiskinan (PMPK) atau Pengembangan Usaha Ekonomi (PUE)</i> 8.2.7.3. <i>Perbaikan Lingkungan Pusat Pendaratan Ikan Skala Kecil (PLP2ISK) atau Pengelolaan Kawasan Pelestarian Alam (PKPA)</i> 8.2.7.4. <i>Penguatan Kelembagaan</i> 8.2.7.5 Belajar dari Proyek Cofish 8.3. Peningkatan Daya Adaptasi Melalui Proses Advokasi 8.3.1. Diskusi dengan Pemegang Otoritas Pengelolaan Sumberdaya Pesisir. 8.3.2. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Nelayan Tradisional
--	---

MODUL

8

SELF-PROPAGATING ENTREPRENEURIAL EDUCATION DEVELOPMENT

8. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PESIR

Saya yakin cukup banyak model pemberdayaan yang telah dirancang dan dioperasionalkan untuk mengembangkan masyarakat pesisir. Pada umumnya pemberdayaan ditujukan secara khusus untuk masyarakat pesisir, atau masyarakat pesisir merupakan bagian dari program pemberdayaan masyarakat secara umum. Segi pemberdayaan pada umumnya didasarkan pada pendekatan ekonomi, padahal permasalahan masyarakat pesisir merupakan jalinan antara masalah ekologi, ekonomi dan sosial. Berikut disampaikan beberapa kasus dan ide-ide pemberdayaan.

8.1 Beberapa Pemberdayaan yang Sudah Dilakukan

Berdasarkan pada Wahyono *et al.* (2001) pemberdayaan masyarakat dilakukan dalam bentuk intervensi pemerintah. Kasus program intervensi di Cirebon berkaitan dengan pelarangan alat tangkap trawl dan pengelolaan retribusi. Trawl yang dilarang telah digantikan dengan pengembangan usaha perikanan lainnya, misalnya dengan pengembangan usaha penangkapan selain trawl, usaha budidaya kerang hijau, pengadaan alat tangkap dan spare part di kawasan pelabuhan perikanan, bangsal pengolahan ikan, tempat



penggilingan kulit kerang, pelatihan pengeringan ikan, pinjaman modal, program Jaring Pengaman Sosial (KPS),

pengadaan dua perahu, pembangunan TPI, perbaikan dermaga dan pengerukan sungai. Program ini dilaksanakan oleh berbagai instansi secara sektoral.

Sementara itu program intervensi di Kabupaten Cilacap, menurut Wahyono, belum banyak didukung dari LSM, dan masih mengandalkan dari pemerintah melalui Dinas Perikanan dan KUD. Sejumlah 40 unit usaha penangkapan ikan dengan perahu motor 9 PK telah disalurkan kepada masyarakat nelayan. Sistem bantuan dalam bentuk kredit ini mengalami kemacetan sampai 80 %. Kredit tersebut merupakan bentuk peningkatan usaha penangkapan pasca pelarangan alat tangkap trawl. Sebelum itu di kawasan ini, sekitar tahun 1978 juga menerima bantuan paket motor dengan daya 6 PK. Selain bantuan dalam bentuk paket usaha perikanan, melalui Dinas Perikanan telah dilakukan penyuluhan secara rutin, sekali dalam tiga bulan. Bantuan dalam bentuk permodalan pernah dilakukan.

Saya kira kita bisa membuat daftar panjang tentang pemberdayaan yang telah dilakukan oleh pemerintah di banyak kawasan pesisir. Saya berharap para mahasiswa akan mencoba mengumpulkan sendiri informasi tersebut dan mencoba melakukan pencarian jawaban, apakah pemberdayaan tersebut telah memenuhi target sasaran program atau kalau misalnya belum optimal, maka hal-hal apa yang bisa dilakukan untuk memperbaiki sistem pemberdayaan yang telah dilaksanakan tersebut. Beberapa program pemberdayaan yang dilakukan oleh pemerintah, antara lain: (1) Program Peningkatan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP), (2) *Coral Reef Rehabilitation Management Program* (COREMAP), dan (3) *Coastal Community Development and Fisheries Resources Management Project* (Cofish Project). Untuk pemberdayaan melalui PEMP bisa dilihat pada Risky (2005), sedangkan untuk COREMAP dapat dilihat pada COREMAP (2000.), yang sementara saat buku ini ditulis masih sedang berjalan di Sumatra. Rincian singkat Proyek Cofish akan disampaikan berikut ini.

8.2 Cofish Project Banyuwangi (Susilo dan Hartono, 2005)

8.2.1. Profil Umum Proyek

Proyek PMP2SP (Pembangunan Masyarakat Pantai dan Pengelolaan Sumberdaya Perikanan) atau Cofish (*Coastal Community Development and Fisheries Resource Management*), berlokasi di lima wilayah, yaitu di Prigi (Trenggalek), Muncar (Banyuwangi), Meskon dan Pambang (Bengkalis), Tanjung Luar (Lombok Timur), dan Tegalsari (Tegal). Proyek PMP2SP (Cofish) berkedudukan di Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, Departemen Kelautan dan Perikanan di Jakarta. Sedangkan Bagian Proyek Cofish Banyuwangi adalah bagian Proyek Cofish yang berlokasi di Kabupaten Banyuwangi dengan pusat kegiatan di Kecamatan Muncar.

Terdapat dua isu penting dalam pengelolaan sumberdaya perikanan, yaitu; (1) Kondisi sosial-ekonomi masyarakat pantai yang kurang menguntungkan, di mana masih sangat diperlukan adanya sumber-sumber pendapatan tambahan maupun alternatif pekerjaan untuk memperbaiki kondisi kehidupan mereka. (2) Menurunnya sumberdaya pantai, yang sangat membutuhkan upaya dari instansi terkait dan partisipasi masyarakat guna melakukan pengelolaan sumberdaya dan konservasi pantai, untuk kelangsungan sumberdaya dalam jangka panjang maupun bagi kelangsungan kehidupan pengguna sumberdaya.

Pendanaan proyek didasarkan pada Nota Pinjaman Luar Negeri (NPLN) antara Pemerintah Republik Indonesia dengan *Asian Development Bank* (ADB) tanggal 2 Februari 1998 Nomor Loan Nos 1570 dan 1571 (SF)-INO beserta perubahannya. Sumberdana proyek ini berasal dari *Loan* ADB dan APBN untuk seluruh lokasi proyek sebesar \$71 juta dengan

rincian \$29 juta (41%) dari *Loan* ADB dan dana APBN \$42 juta (59 %). Proyek dilaksanakan mulai tahun 1998/1999 s/d 2003 dan diperpanjang sampai tahun 2005.

Proyek Cofish didesain dengan empat tujuan, yaitu: (a) Melestarikan stok sumberdaya perikanan dan merehabilitasi sumberdaya habitat pantai, (b) Meningkatkan pendapatan masyarakat pantai dan mengurangi tingkat kemiskinan., (c) Mempertahankan kualitas ikan hasil tangkapan dan meningkatkan kondisi lingkungan pendaratan ikan, dan (d) Memperkuat kapasitas kelembagaan masyarakat dan kelembagaan pemerintah dalam pengelolaan sumberdaya perikanan.

8.2.2. Perencanaan dan Persiapan Proyek

Perencanaan Bagian Proyek Cofish Banyuwangi secara umum didasarkan pada beberapa dokumen. Pertama *logframe*¹⁸ proyek berdasarkan *Project Agreement Memorandum* (PAM) dan Mid Term Review (MTR) yang dilaksanakan setiap tahun. Kedua berasal dari studi REA dan SEA, termasuk identifikasi keperluan usaha ekonomi. Ketiga melalui determinasi kebutuhan perbaikan prasarana sosial. Sedangkan untuk rehabilitasi pelabuhan didasarkan pada perencanaan pengembangan pelabuhan oleh Dinas Perikanan dan Kelautan Propinsi Jawa Timur yang sudah ada yang dikuatkan dengan analisis kondisi lapang oleh PIU dan spesialis dari PMC Jakarta. Perlu disampaikan bahwa Kabupaten Banyuwangi juga menerima kegiatan yang dirancang oleh PCO di Jakarta.

Tahapan dalam Proyek Cofish secara garis besar terdiri dari tiga, yaitu Tahap Persiapan, Tahap Pelaksanaan dan Tahap Akhir. Tahap Persiapan terdiri dari dua dua tahap, yaitu Tahap I dan Tahap II. Pada Tahap I dilakukan dua aktivitas pokok, yaitu sosialisasi proyek dan studi untuk memberikan gambaran kondisi sumberdaya alam dan sumberdaya manusia (REA/SEA) pada Tahun 1998/1999, maupun evaluasi terhadap pengembangan kelembagaan nelayan dan pelatihan diversifikasi usaha perikanan. Pada Persiapan Tahap II dilakukan pembentukan organisasi masyarakat yang akan melakukan pengelolaan sumberdaya, determinasi kebutuhan prasarana sosial serta berbagai pelatihan. Di dua kecamatan selain Muncar, juga dilakukan studi RRA (2001) untuk memperluas cakupan wilayah pantai yang menjangkau kecamatan pantai lainnya di Banyuwangi, seperti, Kecamatan Purwoharjo dan Kecamatan Rogojampi.

Pada tahap awal kegiatan proyek dilakukan sosialisasi kepada seluruh jajaran di Propinsi Jawa Timur. Proses ini dilakukan untuk memberitahukan tujuan dan karakteristik proyek, agar memperoleh dukungan, baik dari Pemerintah Daerah dan sektor terkait maupun dukungan dari masyarakat sasaran proyek. Proyek Cofish ini pada awalnya disebut sebagai Proyek PMP2SP. Sosialisasi dilakukan di Jakarta, Surabaya dan lokasi proyek di Muncar. Cofish Project Launching Program dilakukan di Hotel Hilton pada tanggal 7 Desember 1999, dengan peserta dari berbagai kalangan (Masyarakat, Birokrat, Perguruan Tinggi, Pelaku Bisnis), yang berjumlah sekitar 300 orang, yang juga disiarkan melalui media elektronik. Sosialisasi proyek juga dilakukan antar dinas terkait dalam wilayah kabupaten.

Studi REA (Resources Ecological Assessment) tahap I dilaksanakan untuk memperoleh gambaran kondisi awal. Informasi yang dikumpulkan dalam studi tersebut meliputi: (1) Gambaran Umum Lokasi Tahun 1998/1999, (2) Sumberdaya Habitat, terumbu karang, hutan mangrove, muara sungai dan sempadan pantai (3) Kualitas air, (4) Sumberdaya Ikan, (5) Armada Perikanan dan alat tangkap, (6) Daerah Penangkapan, (7) Hasil Tangkapan. Sedangkan Studi SEA (Socio-Economic Assesmen, 1998/1999) Tahap I mengumpulkan informasi tentang: (1) Profil Usaha Ekonomi dan Usaha Penangkapan, (2) Usaha Pengolahan, (3) Usaha Non Perikanan, (4) Posisi dan Peranan Perikanan, (5) Keragaan Kemiskinan, (6) Jenis Usaha alternatif, (7) (g). Pola Pengembangan Usaha Alternatif, (8) Faktor-faktor Pendukung, yang terdiri dari: (a) Perilaku Pembelanjaan, Tabungan, dan Kredit, (b) Skim Kredit, (c) Kemitraan dan Investor, dan (d) Modul paket

pelatihan.

8.2.3. Permasalahan Pokok dari kajian REA dan SEA

Identifikasi permasalahan perikanan sangat menentukan pada upaya perencanaan pengelolaan sumberdaya perikanan. Identifikasi & formulasi isu sentral perikanan didekati dari tiga sisi, yaitu: (1) menurut persepsi masyarakat lokal; (2) kajian hasil studi; dan (3) kebijakan pemerintah daerah. Dari hasil ketiga pendekatan tersebut, Muncar tergantung pada tiga sumberdaya dominan yaitu: (1) industri pengolahan ikan; (2) perikanan laut; dan (3) pertanian padi sawah. Permasalahan atau kerangka isu sentral di Muncar dipisahkan ke dalam 4 (empat) kelompok, yaitu: (i) isu sentral yang berkaitan dengan sumberdaya habitat; (ii) permasalahan sumberdaya lingkungan; (iii) permasalahan sumberdaya ikan; dan (iv) permasalahan manajemen perikanan. Dari permasalahan yang ada, kemudian disusun sebuah Rencana Pengelolaan Sumberdaya Perikanan.

8.2.4. Rencana Pengelolaan Sumberdaya Perikanan

Perencanaan perikanan di daerah Muncar pada dasarnya bisa dilihat dari tiga pendekatan, yaitu: (a) pendekatan keberadaan sumberdaya, (b) pendekatan pengguna sumberdaya; dan (c) pendekatan kebijakan pemanfaatan sumberdaya. Dari ketiga pendekatan tersebut, kerangka atau bentuk manajemen perikanan dipisahkan dalam empat (4) bagian yaitu: (a) preservasi dan konservasi habitat, (b) perbaikan kualitas lingkungan pesisir pantai, (c) manajemen sumberdaya ikan, dan (d) resolusi konflik diantara pengguna sumberdaya.

8.2.5. Evaluasi Kelembagaan

Pada Tahun Anggaran 1998/1999 telah dilakukan evaluasi terhadap Program Pengembangan Kelembagaan, yang dilaksanakan oleh Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Banyuwangi. Tujuan evaluasi adalah untuk mendeskripsikan jenis dan peran kelembagaan masyarakat serta efektifitas aturan dan hukum adat di dalam pengelolaan sumberdaya perikanan. Hasil identifikasi aturan menunjukkan adanya sejumlah 32 jenis aturan yang ada (UU sampai Perda) yang mengatur pengelolaan sumberdaya perikanan. Namun kenyataan di lapang menunjukkan adanya berbagai pelanggaran, yaitu: (a) pelanggaran area penangkapan, (b) pelanggaran ukuran mata jaring purse seine, (c) penggunaan bahan peledak dan racun (potas) untuk menangkap ikan, (d) pengambilan karang laut untuk industri batu kapur, (e) pengakapan binatang yang dilindungi (penyu dan lumba-lumba), (f) penggunaan alat tangkap sejenis trawl (payang bergardan, atau wesewe), (g) alat tangkap bagan tancap dan apung yang makin berkembang, (h) pembuangan limbah rumah tangga dan industri ke perairan, (i) perusakan hutan bakau untuk kayu bakar dan untuk penebangan untuk tambak.

Organisasi atau kelembagaan masyarakat yang ada di Muncar adalah sebagai berikut: (a) LMD/LKMD, (b) HNSI, (c) KUD, (d) Kelompok Nelayan, (e) Kelompok Wanita Nelayan (P2WTN), (f) organisasi kepemudaaan, (g) Assosiasi (APPI, PAPINDA, PESINDO, HPIS, HIPPERINDO), (h) LSM (Bina Swadaya dan Yayasan Ruslan), (i) Lembaga Keagamaan, (j) Kelembagaan adat (aturan tak tertulis dalam penangkapan ikan dan sistem bagi hasil), (k) kelembagaan pemasaran (TPI), (l) kelembagaan perkreditan (pengamba', kemitraan antara nelayan dengan pabrik, dan perbankan).

8.2.6. Pelaksanaan Kegiatan

8.2.6.1. Pelatihan Awal.

Langkah awal penyiapan masyarakat di dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya perikanan dimulai dengan melakukan pelatihan diversifikasi usaha perikanan, yang dilaksanakan di Balai Keterampilan Penangkapan Ikan (BKPI), yang sekarang berubah menjadi Balai Pelatihan dan Pendidikan Perikanan (BP3). Materi pelatihan terdiri dari: (a)

pembangunan perikanan, (b) Kaidah-kaidah pengelolaan sumberdaya perikanan, (c) Paket Teknologi Terapan (pakan buatan, kulit cucut, abon ikan, kecap ikan, petis ikan, packing, budidaya ikan kerapu dan rumput laut), (d) Pengelolaan dan Analisa Usaha, (e) Peluang Usaha, (f) Pemasaran hasil perikanan dan (g) dinamika kelompok. Selain pelatihan dalam kelas, juga dilakukan field trip ke Tegal, Pekalongan, Batang, Kendal, Semarang, Bonang dan Situbondo. Pelatihan terus berlanjut sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan proyek dan perkembangan masyarakat.

8.2.6.3. Kelompok PSBK (Pengelola Sumberdaya Berbasis Masyarakat)

Selama ini pendekatan pembangunan perikanan dalam tataran *institusional building* (lihat Susilo, 1996, 2004) atau pendekatan kelembagaan masih selalu berorientasi kelembagaan ekonomi. Padahal kita tahu bahwa perikanan dalam pendekatan agribisnis tidak dapat terlepas dari masalah ekologi. Tanpa dukungan sumberdaya alam yang memadai dan terlanjutan, usaha perikanan tidak akan dapat berlanjut. Oleh karena itu diperlukan membangun kelembagaan masyarakat yang melakukan pengelolaan sumberdaya perikanan. Proyek Cofish membentuk kelembagaan tersebut dengan nama Kelompok Pengelola Sumberdaya Berbasis Komunitas (PSBK) pada tingkat wilayah kecamatan dan Komite Konsultasi Pengelolaan Perikanan Kabupaten (KKPPK) yang berada ditingkat kabupaten.

Kelompok PSBK Muncar didirikan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kabupaten Banyuwangi Nomor: 138/71/SK/439.014/2000 tentang Pembentukan Kelompok Pengelola Sumberdaya Perikanan Berbasis Komunitas (PSBK) di Kecamatan Muncar Kabupaten Daerah Tingkat II Banyuwangi. Saat ini Kelompok PSBK Muncar telah mengembangkan organisasinya, yaitu diintegrasikannya Lembaga Keuangan Masyarakat Pantai yang dibentuk tahun 2004 (Akte Notaris No.30, tanggal 23 November 2004).

Enam fungsi Kelompok PSBK adalah sebagai berikut: (a) membahas masalah yang dalam masyarakat, (b) menyusun kesepakatan local, (c) Aktif dalam kegiatan KKPPK, (d) memberikan masukan terhadap Penyusunan Rancangan Rencana Pengelolaan Perikanan, (e) Melakukan pencatatan data dasar kawasan, dan (f) bekerja sama dalam bidang pengawasan (MCS) dan penyampaian informasi kepada masyarakat (KIE).

8.2.6.3. KKPPK

KKPPK dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Perikanan No. 1536/SK/429.104.02/2003, tanggal 01 November 2003. KKPPK memiliki fungsi sebagai mitra kerja Dinas Perikanan dan Kelautan, terutama di dalam menyampaikan aspirasi masyarakat untuk masuk dalam rencana kerja atau program pembangunan perikanan. Secara umum peranan KKPPK adalah sebagai berikut:

- (a) Menyediakan suatu forum untuk berdiskusi dan mencari pemecahan terhadap masalah-masalah yang berkaitan dengan pengembangan, pelaksanaan, tinjauan ulang dan amandemen dari Rencana Perikanan Pantai, Peraturan dan Peraturan Desa serta kesepakatan untuk setiap jenis kegiatan perikanan dan/ atau daerah penangkapan dan alat penangkapan ikan, reservasi laut, perlindungan ikan, terumbu karang buatan, dan konservasi habitat.
- (b) Memberi advis dan saran kepada Dinas Perikanan dan Kelautan dalam hal: (i) pengembangan, pelaksanaan, tinjauan ulang dan amandemen dari rencana-rencana perikanan pantai, Peraturan dan Peraturan Desa serta Kesepakatan untuk setiap jenis kegiatan perikanan dan/atau alat penangkapan ikan, reservasi laut, perlindungan ikan, terumbu karang buatan, dan konservasi habitat, (ii) Pengelolaan mekanisme pemantauan untuk memberikan kemudahan stakeholders untuk memperoleh sumber informasi yang sebaik-baiknya dalam pemanfaatan, pengelolaan, pengembangan dan perlindungan sumberdaya perikanan, (iii) Menetapkan urutan prioritas pengawasan dan penegakan hukum dan peraturan, dan (iv) Menetapkan urutan prioritas riset sesuai dengan tujuan pengelolaan sumberdaya perikanan pantai.

- (c) Membantu pelaksanaan Rencana-rencana Perikanan Pantai dalam pengumpulan dan pencatatan data dasar tentang sumberdaya perikanan berserta pemanfaatannya dalam lingkup daerah pengelolaan dan menggunakan informasi tersebut untuk menciptakan peraturan-peraturan desa yang baru dan untuk pengembangan rencana-rencana perikanan pantai, dan
- (d) Melakukan kegiatan-kegiatan penerangan, pendidikan, komunikasi dan kegiatan pelatihan untuk menjamin terwujudnya pemasyarakatan rencana-rencana perikanan pantai di daerah pengelolaan.

8.2.7. Pelaksanaan Proyek

Penyebutan komponen proyek tidak sesuai benar dengan yang ada di *Project Administration Memorandum* (PAM) dari ADB, sehingga dalam hal tertentu digunakan dua istilah sekaligus. Keempat komponen proyek adalah sebagai berikut: (1) Pengelolaan Sumberdaya Perikanan Pantai (PSP2, CFRM = *Coastal Fisheries Resource Management*), yang oleh Proyek disebut juga dengan Pengelolaan Kenakeragaman Hayati (PKH). (2) Pembangunan Masyarakat dan Pengurangan Kemiskinan (PMPK, CDPR = *Community Development and Poverty Reduction*), atau disebut dengan Pengembangan Usaha Ekonomi (PUE); (3) Perbaikan Lingkungan Pusat Pendaratan Ikan Skala Kecil (PLP2ISK, EISFLC = *Environment Improvement of Small-scale Fish Landing Centre*), atau disebut dengan Pengelolaan Kawasan Pelestarian Alam (PKPA)¹⁹ dan (4) Penguatan Kelembagaan (PK, IS = *Institutional Strengthening*).

8.2.7.1 Pengelolaan Sumberdaya Perikanan Pantai (PSP2) atau Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (PKH)

(a) Mengadakan pengkajian sumberdaya perikanan dan ekologis dan sosial ekonomi dan membentuk data base terkait.

Kegiatan dimulai dari pelaksanaan studi Penyusunan Pengelolaan Sumberdaya Perikanan Pantai di Muncar, yang kemudian dikenal dengan Studi REA I (*Resources Ecological Assessment*) dan Studi Identifikasi Keperluan Usaha Ekonomi dalam Rangka Mengurangi Kemiskinan atau dikenal dengan Studi SEA I (*Socio-Economic Assessment*). Kedua dokumen ini sangat penting sebagai penggambaran kondisi awal sebelum proyek dilaksanakan. Di akhir proyek dilakukan studi SEA II (2003) dan REA II (2004) untuk melakukan evaluasi secara ekologis dan secara sosial tentang perubahan-perubahan yang terjadi selama masa proyek berlangsung. Selain studi SEA dan REA, dilakukan pula kajian tentang Monitoring Pengelolaan Sumberdaya Perikanan. Monitoring ini bermaksud menyajikan data time series tentang perkembangan habitat, antara lain pertumbuhan bakau dan terumbu karang yang dirangsang pertumbuhannya dengan Terumbu Karang Buatan di lokasi Fish Sanctuary. Pada tahun 2004 dilaksanakan pula Studi Penentuan JTB (jumlah ikan yang diperbolehkan ditangkap), terutama untuk jenis ikan lemuru, ikan layang dan ikan tongkol. Nilai MSY dan JTB adalah sebagai berikut: Ikan Lemuru (MSY = 31.161 ton/tahun; JTB = 24.928 ton/tahun), Ikan Layang (MSY = 2.758 ton/tahun; JTB = 2.207), dan Ikan Tongkol (MSY = 22.525 ton/tahun; JTB = 18.020 ton/tahun). Perlu disampaikan bahwa angka tingkat eksploitasi ikan lemuru sudah mencapai 0,91, yang berarti tekanan kepada sumberdaya ikan ini dalam klasifikasi sangat berat.

b. Mengembangkan CFRM Plan

Berdasarkan dari kedua studi tersebut disusun sebuah CFRM Plan, yang bersifat umum dan CFRM Plan khusus tentang pengurangan penggunaan bahan peledak dalam penangkapan ikan. CFRM Plan terutama berkait dengan pengembalian fungsi habitat dan manajemen

perikanan, serta pengelolaan konflik dalam pemanfaatan sumberdaya perikanan. Termasuk dalam kegiatan ini adalah upaya membangun sebuah organisasi masyarakat yang berfungsi sebagai penggerak dan koordinator di dalam pengelolaan sumberdaya perikanan. Organisasi tersebut adalah sebuah Komite Perikanan Lokal (PSBK), dan Komite Konsultasi Pengelolaan Perikanan Kabupaten (KKPPK). Kedua lembaga tersebut melakukan sebuah perencanaan pengelolaan dalam bentuk Rencana Kerja Masyarakat (RKM).

CFRM Plan yang dihasilkan pada pendampingan LSM PKH pada tahun 2005 ada dua. Pertama adalah Rancangan Rencana Pengelolaan Teluk Pangpang, sebagai kelanjutan dari hasil pertemuan publik pada tahun 2003. Kedua, adalah Rancangan Rencana Pengelolaan Perikanan Selat Bali, yang direncanakan akan diintegrasikan ke dalam Rencana Pengelolaan Perikanan Wilayah IX yang saat ini sedang dalam proses penyusunan oleh Departemen Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia dalam sebuah Surat Keputusan Menteri.

(c) Mengawali dan melaksanakan kegiatan konservasi sumberdaya perikanan dan habitat terkait.

Kerusakan paling parah di lokasi proyek adalah kondisi hutan bakau dan terumbu karang. Dari sejumlah potensi tanam seluas 600 ha, proyek Cofish sampai dengan tahun 2004 menanam seluas 100 ha, dengan kerusakan 30 ha saat tanam tahun 2004 terkena gelombang pasang. Secara berurutan, penanaman mangrove adalah seluas 30 ha (2001), 10 ha (2002), 30 ha (2003) dan 30 ha pada tahun 2004. Selain itu tahun 2000 penanaman seluas 5 ha dilakukan oleh LSM LPIP Surabaya, dan tahun dari Proyek P3BL seluas 15 ha.

Lokasi penanaman bakau di Desa Wringinputih, yang di Dusun Tegalpare dan Kabat Mantren. Desa Wringinputih telah mengeluarkan sebuah Peraturan Desa No. 03 Tahun 2003, tentang Penetapan Pengelolaan Kawasan Lindung Ekosistem Jalur Hijau Hutan Mangrove Berbasis pada Masyarakat Setempat, tanggal 15 April 2003. Di masa depan Perdes ini akan diintegrasikan dalam Rancangan Rencana Pengelolaan Teluk Pangpang.

Pada tahun 2001 mulai dibangun sebuah *fish sanctuary* yang berada di Teluk Kayuaking dengan luas 289, 23 Ha. Pembangunan ini mengalami perbaikan dan penataan selama tiga tahun, sampai dengan disahkannya Peraturan Daerah No. 35 Tahun 2003 tentang Penetapan, Pelestarian dan Pengelolaan Kawasan Laut Lindung Perairan Kayu Aking di Muncar Kabupaten Banyuwangi. Petunjuk Pelaksanaan Perda tersebut sudah disiapkan dalam bentuk draft pada tahun 2004, namun sampai laporan ini ditulis belum disahkan menjadi sebuah Surat Keputusan Bupati Banyuwangi. Di masa depan Perda No.35 Tahun 2003 akan diintegrasikan dalam Rencana Pengelolaan Perikanan Selat Bali.

Pemulihan habitat terumbu karang dilaksanakan dengan Terumbu Karang Buatan (TKB). TKB yang ditenggelamkan di lokasi *fish sanctuary*, beturut-turut adalah sejumlah 310 (2000), 210 (2002), 250 (2003) dan 275 (2004), atau total berjumlah 1.045 buah. Selain itu proyek juga menenggelamkan TKB di Pulau Tabuhan, tahun 2000, tetapi jumlah TKB tidak tercatat. Melalui kegiatan M/E habitat dapat diketahui telah ada pertumbuhan terumbu karang di TKB dan beberapa jenis ikan sudah mulai berasosiasi dengan habitat yang berkembang tersebut.

Proses pemulihan sumberdaya juga dilaksanakan dengan *restocking*, yang ditebarkan di lokasi *fish sanctuary*. Pada tahun 2002 telah ditebarkan bibit sejumlah 1.250 ekor induk udang barong. Tahun 2003 ditebarkan induk lobster (size 5-10) 100 kg dan sejumlah 10.000 ekor ikan kerapu ukuran 5 cm, sedangkan tahun 2004 dilakukan penebaran benih ikan kerapu sejumlah 10.000 ekor dan udang windu dengan jumlah 800.000 ekor.

(d) Merehabilitasi sumberdaya perikanan pantai dan habitat terkait dan mengurangi *fishing effort*.

Rehabilitasi sumberdaya habitat hutan dan sumberdaya perikanan tidak selalu dapat menurunkan upaya penangkapan. Untuk rebailitasi treumbu karang dalam lokasi fish sanctuary memang tidak menaikkan upaya penangkapan, tetapi membaiknya kualitas

sumberdaya hutan mangrove di areal Teluk Pangpang justru meningkatkan aktivitas penangkapan ikan di Teluk Pangpang, terutama alat-alat penangkapan menetap, yaitu bagan dan sero. Walaupun demikian masyarakat juga akan mengembangkan usaha budidaya di lokasi hutan mangrove, atau di lokasi di belakang hutan mangrove.

Melalui kegiatan Implementasi *CBFRM Group Planning*, nelayan yang mengoperasikan alat tangkap menggunakan bahan peledak dan potas telah dilarang. Mereka dialihkan ke penggunaan alat tangkap yang ramah lingkungan, misalnya menggunakan gill net. Nelayan masih ingin melakukan penangkapan ikan, daripada bekerja di sektor lain. Jumlah nelayan pengguna bahan peledak ada 19 orang juragan dan 1 orang pedagang. Sejumlah 14 nelayan dan 1 pedagang beralih alat tangkap. Alat tangkap yang diminati adalah rawai, bagan apung, bagan tancap, jaring dan purse seine. Bagan dan purse seine tidak diperbolehkan karena ada pembatasan. Selain itu juga telah dihasilkan sebuah kesepakatan lokal yang mencakup pelarangan penggunaan bahan peledak, potasium dan larangan penggunaan alat tangkap **wcw**.²⁰

(e) Melaksanakan sistem Monitoring, Control dan Surveillance (MCS)

Selama ini fokus kegiatan MCS masih pada kegiatan usaha penangkapan ikan. Pengembangan perangkat lunak untuk kegiatan Monitoring dilakukan mulai tahun 2002, dan kemudian dikembangkan pada tahun 2004. Perangkat lunak sejumlah 10 komputer disediakan untuk keperluan pendataan dan pemrosesan perijinan usaha penangkapan ikan.

Kegiatan kontrol dilakukan dengan menggunakan kapal patroli. Selain menggunakan kapal ini di Kabupaten Banyuwangi, juga terdapat kapal pengawasan dari Dinas Perikanan dan Kelautan Jawa Timur. Dari proyek P3BL juga disediakan kapal pengawas tipe jukung. Pelaksanaan patroli selama ini adalah 2 kali dalam satu bulan. Untuk menunjang pengawasan juga telah dibangun Hanggar Kapal patroli dengan luas bangunan 248,16 m², sleepway 43,45 m', dan kelengkapan lainnya.

Untuk meningkatkan komunikasi dengan HT, maka telah dipasang lima buah menara untuk repeater, yaitu di Kantor BP3 (Bangsring), di Kantor Dinas Perikanan dan Kelautan Banyuwangi, di Kantor UPTD Perikanan Muncar, di lokasi TPI Grajagan dan di Rumah Ketua I KKPPK di Pancer. Pada tingkat masyarakat juga telah dibentuk sebuah kelompok SISMASWAS.

Pengawasan secara personal juga dilakukan oleh masyarakat yang dengan komitmen tertentu terhadap fish sanctuary dan hutan bakau. Di masa depan diperlukan semacam pembakuan sistem ini dalam bentuk gugus pengawas, untuk melakukan pengawasan sumberdaya tertentu, sebagai bentuk implementasi dari pengawasan dengan SISMASWAS.

Angkatan Laut dan Satpolairud mendukung upaya pengawasan dalam pemanfaatan sumberdaya perikanan. Selain itu mereka juga melakukan penegakan hukum. Hanya saja karena belum adanya aturan yang mudah disepakati oleh aparat penegak hukum, maka upaya penegakan hukum masih belum sempurna. Karena itu Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Banyuwangi sedang menyusun sebuah Presedur Tetap (Protap) Penegakan Hukum dalam bidang perikanan.

(e) Pengadaan barang dan kegiatan KIE, dan program pelatihan tentang manajemen sumberdaya.

Kegiatan ini dilaksanakan setiap tahun, baik pada pengadaan barang maupun Selama masa proyek telah dilakukan pengadaan barang untuk keperluan KIE, antara lain kalender, buku kerja, stiker, kaos. topi, buku bacaan siswa, layar perahu jukung, sistem audio visual dengan tema umum "Lautku, Masa Depan". Kegiatan KIE meliputi lomba menggambar,

lomba memasak ikan, kampanye makan ikan. Pada tahun 2004 kegiatan KIE dilengkapi dengan 5 jenis, yaitu: radio spot, pembuatan materi KIE, VCD potensi perikanan dan kelautan Kabupaten Banyuwangi, Workshop Integrasi Bahan Ajar Muatan Lokal Bidang Perikanan dan kegiatan kampanye memasyarakatkan makan ikan.

Pelatihan manajemen sumberdaya perikanan yang dilaksanakan bagi aparat dan LSM difokuskan pada kegiatan CFRM yang dilakukan pada tahun 2003 dan 2004. Peserta adalah Guru SLTP dan SLTA, serta LSM. Berdsarakan hasil dan proses pelatihan kemudian dilanjutkan dengan kegiatan KIE, berupa workshop integrasi bahan ajar sebagaimana di atas, dengan hasil sebuah buku pedoman mengintegrasikan substansi perikanan ke dalam mata pelajaran di SLTP atau di SLTA, misal dalam mata pelajaran biologi.

8.2.7.3. Pembangunan Masyarakat dan Pengurangan Kemiskinan (PMPK) atau Pengembangan Usaha Ekonomi (PUE)

(a) Mengorganisasikan masyarakat nelayan dan mengembangkan/memperkuat kerjasama masyarakat (KUB).

Pendekatan yang digunakan dalam kegiatan ini adalah pembentukan dan penguatan usaha perikanan dalam bentuk Kelompok Usaha Bersama (KUB). Bidang gerak komoditi dalam KUB ini terdiri dari usaha pengolahan, usaha perdagangan ikan basah, usaha budidaya, dan usaha penangkapan pengalihan dari nelayan bekas pengguna bom/potas dan pengguna alat tangkap wcw ("mini trawl"). Jumlah dan jenis KUB yang dicakup dalam Bagian Proyek Cofish Banyuwangi adalah 65 KUB. Dalam rangka ini dilakukan renovasi Balai Pertemuan Nelayan di Kalimoro, Renovasi Pasar Ikan di Desa Kedungrejo dan Pembuatan Pondok Nelayan dan MCK (2 kamar mandi/WC, dan 1 tempat cuci) di Desa Sumbersewu.

(b) Memberikan bantuan teknis, kredit (dana bergulir) pemasaran dan layanan sosial untuk KUB.

Bantuan teknis diberikan dalam bentuk pelatihan, yang meliputi pelatihan penangkapan ikan ramah lingkungan (bubu), pelatihan pengolahan ikan, misalnya 15 paket demonstrasi ikan asap/pindang sejumlah 15 unit. Pada pelatihan budidaya laut (rumput laut dan Karamba Jaring Apung), tahun 2001 dan 2002 terdapat 7 buah KJA Selain itu mereka juga disertakan dalam pelatihan sanitasi dan higiene, baik dalam kelas maupun melakukan studi banding. Kredit tidak diberikan dalam bentuk uang, tetapi berupa paket misalnya cool box, tobos dan alat pengasapan ikan. Tahun 2002 diberikan sejumlah 20 unit cool box dan tahun 2003 ditingkatkan menjadi 140 unit, sementara pada tahun 2004 diberikan sejumlah 250 unit cool box ukuran 200 liter dan sejumlah 40 unit "tobos".

(c) Memperkuat usaha kecil/proyek peningkatan pendapatan

Penguatan usaha kecil dilakukan dengan berbagai pelatihan, mulai dari manajemen usaha dan pemasaran produk. Permodalan usaha yang selama ini menjadi salah satu isu dalam pengembangan usaha perikanan skala kecil didekati dengan membangun kelembagaan keuangan, yaitu Lembaga Keuangan Masyarakat Pantai (LKMP) pada tahun 2004 dengan surat pendirian dari notaris. Kelembagaan ini tahun 2005 dikuatkan dengan dilakukan temu bisnis, baik dalam rangka meningkatkan jaringan permodalan maupun pada jaringan pemasaran. Salah satu yang hadir dalam acara tersebut adalah direktur Roxy Supermarket yang menawarkan peluang pasar kepada produk perikanan. Penguatan dilakukan oleh LSM, antara lain Bina Masyarakat Madani dari Surabaya, Lembaga Bahtera Indonesia dari Malang, dan LSM dari Banyuwangi, PPMA "Bocah Angon".

(d) Memperbaiki fasilitas prasarana sosial

Berbagai fasilitas prasarana sosial telah dibangun di 6 desa dalam wilayah proyek, dan ada prasarana yang dibangun di dalam Kabupaten Banyuwangi, tetapi di luar Kecamatan

Muncar, dan ada yang di luar Banyuwangi yaitu Gedung BBAP Situbondo. BBAP Situbondo meningkatkan kemampuan masyarakat pantai di dalam mengelola budidaya ikan di kawasan pantai. Beberapa prasarana sosial yang dibangun oleh Proyek Cofish adalah sebagai berikut.

Tabel 7. Beberapa prasarana sosial yang dibangun oleh Proyek Cofish

No.	Jenis	Lokasi	Tahun	Kapasitas
1.	Tandon Air	Desa Kedungringin	2001	2.000 ltr
2.	Jalan Rabat	Desa Tembokrejo	2001	710,00 m ¹
3.	Jalan Rabat	Kedungringin	2001	5.456,00 m ¹
4.	Jalan Aspal	Desa Tembokrejo	2001	972,95 m ¹
5.	Jalan Aspal	Desa Kedungrejo	2001	5.456,00 m ¹
6.	Saluran Air terbuka	Desa Tembokrejo	2001	2.700,00 m ¹
7.	Saluran Air terbuka	Desa Kedungrejo	2001	1.400,00 m ¹
8.	Plengsengan	Desa Kedungrejo	2001	500,00 m ¹
9.	Sumur Bor	Desa Tembokrejo	2001	1.000 ltr
10.	Sumur Bor	Desa Kedungringin	2001	1.000 ltr
11.	Renovasi Balai Pertemuan Nelayan	Desa Kedungrejo	2003	Bangunan 156 m ³ Teras 45,36 m ²
12.	Renovasi Pasar	Desa Kedungrejo	2003	Bangunan 16,25 m ³ Lantai 114m ²
13.	Pembangunan Jalan	di Jl. Terusan Sapari Kedungringin	2003	Aspal 475 m'

8.2.7.3. Perbaikan Lingkungan Pusat Pendaratan Ikan Skala Kecil (PLP2ISK) atau Pengelolaan Kawasan Pelestarian Alam (PKPA)

Lingkungan Pusat Pendaratan ikan yang kurang bersih dan sehat sering berdampak kepada kerugian nelayan. Kerugian itu disebabkan karena mutu ikan cepat turun, atau kehilangan produk ikan akibat rusak (fish losses) cukup besar. Oleh karena itu diperlukan upaya-upaya memperbaiki lingkungan PPI dalam kerangka mempertahankan kualitas ikan hasil tangkapan nelayan.

(a) Meningkatkan kondisi lingkungan lokasi pusat pendaratan ikan.

Upaya yang dilakukan oleh Proyek Cofish antara lain: (1) melakukan peningkatan sanitasi TPI Kalimoro, (2) Pembangunan Pos Pengamat Mutu Hasil Perikanan, (3) Penataan TPI di Grajagan, (4) Pembangunan plengsengan di pelabuhan, (5) perbaikan lingkungan PPI Muncar, (6) pembenahan jalan TPI di Pelabuhan.

(b) Instalasi air bersih, drainase, limbah cair dan sistem pembuangan sampah

Perbaikan sistem drainase dilaksanakan di Kalimoro berupa kegiatan pembuatan saluran keliling los 92 m¹, pembuatan saluran type A di Kalimoro 75 m', dan pembuatan tandon air 3,06 m² dan MCK 7,5 m². Sedangkan di PPI Muncar juga telah dilaksanakan perbaikan saluran, yaitu: (a) tipe A panjang P1 (33,4 m¹ (L = 50 cm) tipe B panjang P2 39,4 m' ; (L : 60 cm), dan tipe C panjang P3 76,8 m' ; (L : 30 cm). Di TPI Grajagan juga dibuat saluran keliling TPI sepanjang 63 m'. Limbah cair yang masuk ke lokasi pelabuhan di desa Kedungrejo telah disentralisasi berupa bak pengendapan ukuran (2 x 2 x 2) m berjumlah 3 bak melalui pipa PVC berdiamter 8 inchi. Bangunan ini rusak diterjang banjir tahun 2002

(c) Meningkatkan fasilitas penanganan ikan

Peningkatan fasilitas penanganan ikan diberikan dalam bentuk cool box. Cool box digunakan oleh nelayan dalam penangkapan ikan di laut, terutama untuk nelayan gillnet, atau yang disebut dengan palkanisasi perahu gill net. Cool box juga dibantukan kepada pedagang ikan segar dengan ukuran yang lebih kecil. Cool box dalam bentuk "tobos" sebagai alat pembawa ikan segar bagi pedagang ikan juga dibantukan kepada masyarakat.

(d) Konstruksi struktur penahan gelombang dan rehabilitasi pusat pendaratan ikan

Struktur penahan gelombang (*breakwater*) tidak dibangun di Banyuwangi. Rehabilitasi pusat pendaratan ikan dilaksanakan dalam kegiatan antara lain adalah: (1) di PPI Muncar telah direhabilitasi dengan membangun (a) plat beton halaman TPI barat & timur 2.928 m², (b) perbaikan lantai dengan pasang paving lama 2.242 m². (2) Di TPI Grajagan telah direhabilitasi pada: (a) Lantai TPI 181,125 m², dan (b) Lantai penitipan keranjang & kamar mandi 24 m².

(e) Mempertahankan kualitas produksi dan mengurangi ikan yang rusak (terbuang karena rusak)

Dengan adanya kenaikan sanitasi di kawasan Pusat Pendaratan Ikan diharapkan mampu mempertahankan kualitas produksi. Selain itu juga akan mengurangi jumlah ikan yang mengalami kerusakan (*fish losses*). Data pasti tentang seluruh jumlah ikan yang rusak dapat dikurangi belum dapat disajikan pada laporan ini. Sebagai contoh untuk ikan layur yang disimpan dalam cool box mampu mengurangi kerusakan sampai 20 %. Kalau sebelum coolbox rusak mencapai 50 %, maka penggunaan coolbox telah mampu mengurangi kerusakan ikan sampai 30%.

(f) Meningkatkan nilai tambah produk perikanan.

Kualitas ikan yang baik pada umumnya berdampak terhadap harga ikan yang didaratkan, dan ini sangat tergantung kepada jenis ikan dan cara-cara penanganan yang dilakukan. Dari sisi nilai tambah produk perikanan dapat disampaikan dengan contoh ikan layur. Dengan menggunakan cool box harga ikan akan dibeli secara umum dengan harga Rp.8.000,- per kg. Tetapi kalau ikan layur rusak karena perut telah rusak (pecah) dan tidak memenuhi kualitas ekspor, maka harga bisa turun sampai Rp. 3.000,- per kg.

8.2.7.4. Penguatan Kelembagaan

Penguatan kelembagaan ditujukan bagi pembentukan dan peningkatan suatu kelembagaan dalam kaitannya dengan pengelolaan sumberdaya perikanan. Kelembagaan yang dimaksud adalah kelembagaan masyarakat, kelembagaan Dinas Perikanan dan Kelautan dan Lembaga Swadaya Masyarakat yang di lokasi proyek.

(a) Penguatan dan peningkatan sistem dan jaringan informasi perikanan dalam skala nasional.

Selain penguatan dilakukan pada skala nasional, juga dikembangkan sistem dalam skala lokal. Penguatan dalam skala nasional dilakukan pelatihan tentang GIS (Geographical Information System) dan pengadaan seperangkat komputer GIS untuk masing-masing daerah. Total pegawai Dinas Perikanan dan Kelautan yang dilatih 9 orang dan 3 orang dari staf proyek (PMC dan PIU). Sistem ini belum berjalan secara optimal.

Informasi untuk kapal perikanan < dari 30 GT telah didesain agar bisa digunakan datanya oleh Departemen Kelautan dan Perikanan, dengan adanya situs di DKP Jakarta. Daerah menyediakan data dan dikumpulkan di Dinas Perikanan dan Kelautan, sementara jika DKP Pusat atau DPK Propinsi akan menagakses, maka bisa melalui software tertentu yang

dibuat DKP dan sejumlah 2 orang pegawai Dinas Perikanan dan Kelautan Banyuwangi yang dilatih di Jakarta.

(b) Menerima bimbingan teknis, pelatihan, peralatan untuk implementasi proyek.

Para pegawai di Dinas Perikanan dan Kelautan telah menerima pelatihan dan penggunaan peralatan tertentu. Bimbingan teknis meliputi masalah keuangan dan penataan barang, pelatihan bahasa Inggris dan aplikasi komputer. Penggunaan peralatan selam juga dilatihkan kepada pegawai Dinas Perikanan dan Kelautan dan sejumlah unsur masyarakat.

(c) Membentuk sistem manajemen proyek

Dengan sistem yang baik, maka akan memberikan bagi ruang gerak manajemen pengelolaan proyek. Sistem manajemen proyek telah dibentuk sejak awal, baik pada tingkatan nasional (PCO), tingkatan propinsi (Tim Teknis) dan pada tingkatan lokal (PIU) dengan LPAC. Pada tingkat PCO dan PIU diperbantukan tenaga dari PMC. Sistem ini cukup efektif di dalam menjalankan proyek.

(d) Meningkatkan kapabilitas aparat nasional dan lokal, organisasi komunitas lokal, dan masyarakat dalam pengelolaan sumberdaya perikanan dan pembangunan masyarakat.

Berbagai pelatihan telah dilakukan terhadap aparat pemerintah (Departemen Kelautan dan Perikanan), aparat pemerintah propinsi (Dinas Perikanan dan Kelautan, Guru SMP dan SMA dan masyarakat luas, termasuk yang tergabung dalam Kelompok PSBK dan KKPPK. Para Guru SMP dan SMA telah dibekali dalam dua kali pelatihan CFRM, yang akhirnya mereka mampu menyusun sebuah pedoman mengintegrasikan bahan ajar bidang perikanan ke dalam mata pelajaran yang diasuhnya.

8.2.7.5 Belajar dari Proyek Cofish

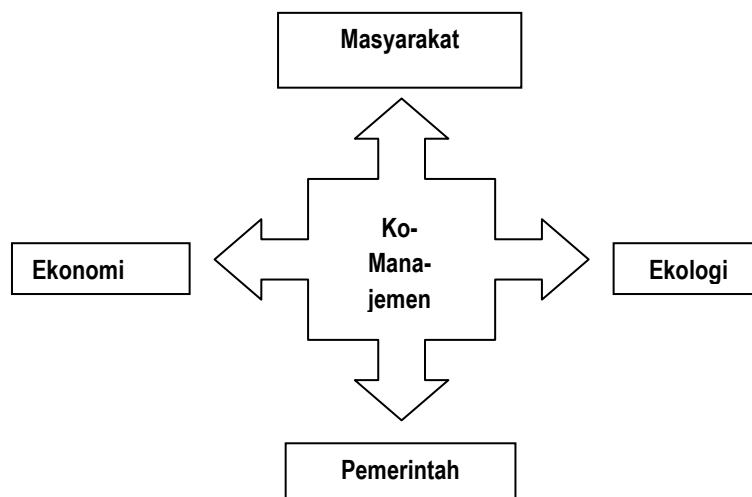
Kegiatan proyek Cofish sudah selesai dan boleh saja demikian, namun sistem pengelolaan sumberdaya perikanan akan terus berjalan, laksana gerak gelombang di laut yang tak pernah mengenal kata berhenti. Proyek Cofish dengan segala kekurangannya telah mampu meletakkan dasar-dasar pengelolaan sumberdaya perikanan secara berkelanjutan. Tentu saja pasca proyek juga memberikan pekerjaan rumah bagi Dinas Perikanan dan Kelautan untuk mengintegrasikan "jiwa" proyek Cofish ke dalam struktur organisasinya. Tanpa itu sebuah pondasi yang telah dibangun tidak akan dapat berkembang menjadi sebuah rumah yang kokoh, yaitu PENGELOLAAN SUMBERDAYA PERIKANAN BERKELANJUTAN DAN BERBASIS PADA MASYARAKAT.

Keberlanjutan proyek Cofish sedang diupayakan dicarikan dana dari Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, melalui kegiatan pasca proyek, untuk Tahun Anggaran 2006. Sampai dengan laporan ini dibuat Dinas Perikanan dan Kelautan telah menyusun Rencana Kegiatan yang dilengkapi dengan draft TOR dan RAB. Selain itu secara perlahan bidang-bidang di Dinas Perikanan dan Kelautan juga sudah melakukan integrasi kegiatan proyek ke dalam struktur organisasi, misalnya pada kegiatan registrasi kapal ke dalam seksi perijinan usaha dan lain sebagainya.

Proyek Cofish tahap ini disebut sebagai Cofish I, dan tentunya harus ada Cofish II. Namun karena Executing Agency Cofish berubah dari Direktorat Jenderal Perikanan Departemen Pertanian ke Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Departemen Kelautan dan Perikanan, maka secara de jure Cofish II tidak bisa dilanjutkan. Namun secara de facto ada peluang melanjutkan Proyek Cofish dengan *Integrated Coastal Fisheries Resources Management* (ICFRM) Project. Pemerintah Kabupaten Banyuwangi juga menyiapkan usulan Proyek ICFRM sebagai tindak lanjut dari Proyek Cofish. Proyek ICFRM akan dimulai pada tahun 2007.

Beberapa pelajaran menarik yang dapat dipetik dari Proyek Cofish antara lain adalah sebagai berikut:

- (a) Proyek Cofish telah meletakkan sebuah pondasi yang kuat bagi pemerintah dan masyarakat di dalam melakukan pengelolaan sumberdaya perikanan secara berkelanjutan. Pondasi yang kokoh ini memberikan sebuah tantangan tersendiri bagi Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Banyuwangi untuk mengintegrasikan hasil kegiatan ke dalam dinamika struktur organisasi kerja dinas, sehingga memberikan dorongan bagi dinas untuk melakukan rerorientasi terhadap sistem pengelolaan sumberdaya yang selama ini dilakukan. Pada sisi yang lebih luas, perhatian Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi yang besar terhadap pembangunan daerah dengan potensi perikanan yang ada, telah didorong untuk menempatkan sektor ini sebagai salah satu leading sector pembangunan masyarakat.
- (b) Pendekatan partisipatif proyek telah tergabung secara baik dalam bingkai penyatuan pendekatan ekonomi dan pendekatan ekologi secara sinergi, sehingga proyek Cofish merupakan implementasi dari pendekatan ko-manajemen (kooperatif manajemen) antara masyarakat dan pemerintah. Bentuk integrasi itu adalah sebagai berikut (Gambar 20)



Gambar 20. Mendekatkan jarak filosofi pengelolaan sumberdaya dan budaya pembangunan.

Konsep ini berusaha menyambungkan jarak sosial-budaya antara pemerintah di satu sisi dengan masyarakat pada sisi yang lain, dan selalu berusaha melakukan kegiatan ekonomi yang tidak merusak ekologi. Secara konseptual berarti mengikuti anjuran untuk menempatkan manusia sebagai pusat pembangunan, menempatkan yang terakhir menjadi yang pertama, dan menjadi sebuah adaptor sosial-budaya.

- (c) Pendekatan pengentasan kemiskinan di kawasan pesisir/pantai dapat dilakukan dengan meningkatkan daya dukung lingkungan dengan jalan melakukan rehabilitasi habitat sumberdaya. Naiknya daya dukung lingkungan bagi kehidupan biota, telah memperluas kesempatan berkerja dan berusaha bagi penduduk di sekitar lokasi pemulihan sumberdaya, dengan sekaligus memberikan tanggungjawab di dalam melakukan pengawasan. Rehabilitasi hutan bakau telah memberikan kenaikan hasil tangkapan nelayan sero dan bagan, menciptakan peluang usaha di dalam atau di sekitar hutan bakau dengan tetap menjaga green belt di satu sisi, di sisi lain telah menumbuhkan kesadaran kepada masyarakat di sekitarnya untuk menjaga sumberdaya. Pemerintah Desa dapat memperkuat hal tersebut dengan mengeluarkan sebuah Peraturan Desa, seperti Perdes No.03 Tahun 2003 dari Desa Wringinputih. Kalau pemerintah di tingkat desa, yang dekat dengan sumberdaya sudah melakukan kepedulian seperti itu, lalu apa yang harus

dilakukan oleh jajaran pemerintah di level atasnya, dan juga instansi teknis yang bertanggung jawab terhadap kelestarian sumberdaya wilayah pesisir?

8.3. Peningkatan Daya Adaptasi Melalui Proses Advokasi

Tim Peneliti Pusat Penelitian Ilmu Sosial (PPIS) pada tahun 2003-2005 telah melaksanakan riset yang terdiri dari studi *base line*, penguatan kelembagaan, advokasi dan melakukan proses teoretisasi tentang adaptasi. Berikut ini akan disampaikan proses advokasi yang telah dilakukan pada tahun 2005.

8.3.1. Diskusi dengan Pemegang Otoritas Pengelolaan Sumberdaya Pesisir.

Hasil pra-diskusi panel adalah sebuah persiapan dialog yang memantapkan rencana kerja masyarakat nelayan. Tekanan rencana kerja nelayan jaring tarik adalah sebuah upaya menemukan alternatif ekonomi yang masih berkaitan dengan penangkapan ikan, yaitu yang mengarah kepada penggunaan pancing ulur²¹ dengan armada yang mampu menjangkau wilayah lautan lepas pada ($9^{\circ} - 10^{\circ}$) LS. Kegiatan lain di luar penangkapan ikan adalah usaha di bidang perternakan dan melanjutkan "gopla" di kawasan hutan. Selain itu nelayan berharap ada pengendalian erosi dari hutan, pencemaran dari pengolahan dan peningkatan pengawasan pada *fish sanctuary* dan hutan bakau. Sementara itu untuk nelayan pancing berharap ada kemitraan dengan eksportir dan memperoleh pendanaan permodalan usaha, terutama untuk peningkatan armada dalam rangka akses pada daerah penangkapan di laut lepas.

Garis besar kebijakan pengelola sumberdaya pesisir adalah sebagai berikut. Pertama, Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Trenggalek dengan arah kebijakan; (a) Nelayan jaring tarik diharapkan beralih ke alat tangkap pancing, (b) Kawasan teluk Prigi akan tertutup bagi semua aktivitas penangkapan ikan, kecuali yang dilakukan oleh nelayan jaring tarik dan nelayan pancing, (c) Jumlah maksimal jaring tarik yang boleh beroperasi adalah 40 unit, tidak boleh ada penambahan armada, dan (d) Usaha ini kurang menguntungkan dan cenderung tidak ramah lingkungan. Kedua, Dinas Perhubungan dan Pariwisata Kabupaten Trenggalek, dengan arah kebijakan: (a) Mengemas aktivitas nelayan jaring tarik sebagai atraksi wisata (wisata budaya), (b) Menjadikan aktivitas nelayan pancing sebagai daya tarik wisata khusus, (c) Menempatkan para nelayan jaring tarik dan pancing sebagai jasa penyewaan pancing dan sebagai jasa penyewaan pancing dan sebagai pemandu kegiatan wisata jaring tarik dan pancing, dan (d) Menempatkan para pemilik kapal/perahu sebagai penyedia jasa penyewaan kapal. Ketiga, Asisten Perhutani/ Kepala Bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan di Bandung, Kabupaten Tulungagung, dengan kebijakan: (a) Membentuk pola pengelolaan PHBM (Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat), (b) Mempertahankan kondisi hutan lindung yang masih utuh, (c) Merehabilitasi hutan lindung yang diusahakan oleh masyarakat dalam sistem "gopla", (d) Menyusun kerjasama pengelolaan sumberdaya hutan dengan sumberdaya perikanan dan pariwisata (pesisir), dan (d) Melakukan pengembangan hutan pantai (mangrove)

Tanggapan peserta saat Diskusi Panel dapat disampaikan sebagaimana berikut ini, banyak dilontarkan oleh nelayan maupun kelembagaan masyarakat lokal. Uraian ringkas dari tanggapan peserta dalam proses Diskusi panel adalah sebagai berikut: (a) Secara umum diskusi ini merupakan sebuah pertemuan awal, yang memerlukan berbagai tindak lanjut untuk masa-masa yang akan datang, (b) Nelayan jangan dieksploitasi untuk kegiatan wisata, tetapi diberikan hak-haknya sebagai bagian integral sebuah paket wisata, (c) Di dalam menyelesaikan permasalahan nelayan jaring tarik, pihak pemerintah jangan melakukannya

dengan setengah hati, (d) Ada indikasi bahwa pihak Perhutani belum serius di dalam melakukan pengelolaan hutan dengan melibatkan para nelayan, dan (e) Dalam tahap tertentu nelayan pancing cenderung mengikuti apa yang dikehendaki oleh pemerintah.

8.3.2. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Nelayan Tradisional

Pemberdayaan ekonomi masyarakat nelayan dilaksanakan dengan cara melakukan audiensi dengan *Business Developing Services* (BDS) Indonesia. BDS adalah jasa non-finansial yang meningkatkan kinerja, akses ke pasar dan kemampuan bersaing suatu perusahaan individual yang tersedia dalam waktu singkat atau sementara. Selain itu juga dilakukan audiensi dengan Inkubator Bisnis Universitas Brawijaya, yang memberikan layanan berupa; (a) Manajemen: pendidikan dan latihan, pembinaan dan konsultasi, kemitraan dengan kelembagaan terkait dan pengusaha besar, penelitian, dan informasi bisnis; (b) layanan teknik, dan (c) layanan akses permodalan.

Setelah audiensi dan masyarakat nelayan memperoleh informasi yang lengkap, maka dilanjutkan dengan menyambungkan kelembagaan tersebut dengan masyarakat nelayan tradisional. Langkah berikutnya adalah merealisasikan akses permodalan dan pasar yang dalam pelaksanaannya masyarakat nelayan dibantu oleh LSM PAMA, koperasi PPCU (Pantai Prigi Credit Union) dan PTL (Petugas Teknis Lapangan) dari Dinas Kelautan dan Perikanan yang berdomisili di Prigi. Ketiga personal kelembagaan tersebut terlibat sejak awal, baik saat berdiskusi dengan pengelola sumberdaya pesisir maupun dalam audiensi di kampus.

Tugas perguruan tinggi adalah “sebagai jembatan” yang menyambungkan dua kutub komponen dalam struktur masyarakat, agar terjadi proses strukturisasi yang terintegrasi dan mampu berkembang menjadi kesatuan yang utuh. Sering kita dapatkan fakta bahwa masuknya komponen baru dalam struktur masyarakat tidak selalu dapat berintegrasi dengan komponen yang sudah ada, sehingga terjadi sebuah struktur yang saling membelenggu. Hal demikian ini akan berdampak kepada kehidupan masyarakat yang tidak kondusif, dengan tingkat potensi konflik yang tinggi. Kemandegan struktur ini semakin meningkatkan kapasitas terpakai dari struktur sosial, sehingga meningkatkan fungsi pembatas bagi proses adaptasi manusia.

REFERENSI

Susilo, Edi. 2004. “Aspek Sosekbud Nelayan Pancing dan Nelayan Jaring Tarik di Pantai Prigi, Trenggalek, Jawa Timur” Makalah disampaikan dalam Workshop Rencana Pengelolaan Perikanan Layur 1 di Kediri, 20 – 22 Juli 2004. Bagian Project Cofish Trenggalek

PROPAGASI

CC. Latihan dan Diskusi (Propagasi vertical dan Horizontal)

Buatlah sebuah proposal tentang pemberdayaan masyarakat dengan memperhatikan dan mengikuti kaidah-kaidah yang dicontohkan dalam proses pemberdayaan masyarakat yang telah dijelaskan dalam modul tersebut di atas.

Dengan harapan proposal tersebut menjadi bahan untuk diajukan dalam lomba PKM bidang pemberdayaan masyarakat.

^^ SEMANGAT!!

DD. Pertanyaan (Evaluasi mandiri)

25. Upaya apa saja yang dapat meningkatkan daya adaptasi nelayan melalui proses

advokasi?

26. Apa saja pelajaran menarik yang dapat dipetik dari Proyek Cofish?

27. Mengapa perbaikan lingkungan dan pengelolaan kawasan kelestarian adalah sesuatu yang sangat penting?

EE. QUIZ -multiple choice (Evaluasi)

FF. PROYEK (Eksplorasi entrepreneurship, penerapan topic bahasan pada dunia nyata)



SOSIOLOGI PERIKANAN:

Sosial Entrepreneur

Dr. Ir. Edi Susilo, MS., Wildan Alfarizi, SE.
Agribisnis Perikanan, SEPK, FPIK, Universitas Brawijaya
Email : olisuside@yahoo.com



9. Social Entrepreneur	9.8 Sifat <i>Social Entrepreneur</i>
9.1 Pengantar	9.9 Bidang <i>Social Entrepreneur</i>
9.2 Pengertian	9.10 Social Entrepreneur & Pekerja Sosial
9.3 Sejarah	9.11 Perkembangan Social Entrepreneur Dalam Dunia Usaha
9.4 Entrepreneurship dalam Bersosial	9.12 Menjadi Social Entrepreneur
9.5 Ciri-ciri dan Sifat kewirausahaan	9.13 Tantangan Yang Dihadapi Oleh <i>Social Entrepreneur</i>
9.6 Karakteristik Kewirausahaan Sosial (<i>Social Entrepreneur</i>)	9.14 Profil Social Entrepreneur
9.7 Prinsip Social Entrepreneur	

MODUL

9

SELF-PROPAGATING ENTREPRENEURIAL EDUCATION DEVELOPMENT

10. Social Entrepreneur

9.1 Pengantar

Titik terkuat suatu masyarakat terletak pada simpul terlemahnya. Bila simpul terlemah suatu bangsa adalah kemiskinan, maka mengubah mereka tak lagi miskin akan jadi kekuatan bangsa. Jangan urusi orang-orang kaya karena mereka pasti telah mampu urus diri sendiri. Mengatasi 1.000 keluarga miskin, berarti telah menumbuhkan 1.000 kekuatan baru. Itulah kekuatan sesungguhnya dari suatu bangsa (Sudewo Erie)

Belajar dari FC Barcelona, contoh Social Entrepreneurship yang menginspirasi Social Entrepreneur menyelesaikan masalah social dalam skala besar. Sama dengan entrepreneur yang membangun bisnis, social entrepreneur menjadi agen perubahan dalam masyarakat. Merebut kesempatan dalam rangka menciptakan nilai sosial dengan memperbaiki sistem dan memajukan solusi berkelanjutan.

Salah satu contoh *social entrepreneur* yang menginspirasi adalah FC Barcelona. Club sepak bola satu ini tidak memiliki logo sponsor di baju seragam mereka. Yang ada adalah logo UNICEF sebagai partner dimana FC Barcelona akan menyalurkan dana untuk logo UNICEF dipasang di seragam mereka. Bukan sebaliknya seperti club-club sepak bola lainnya.

FC Barcelona didirikan oleh warga Barcelona, bukan oleh dewan direksi. Club ini didirikan untuk mendidik anak-anak mencintai olahraga khususnya sepakbola. Tujuan utama didirikan club ini bukanlah untuk mencari keuntungan melainkan untuk mendidik. Para pemain FC Barcelona banyak yang menjadi duta besar UNICEF dan merupakan pengalaman yang berharga bagi para pemain.

Camp Nou yang merupakan markas FC Barcelona juga memiliki ruang kelas untuk anak-anak belajar. Kelas ini diperuntukkan bagi anak-anak yang drop out dari sekolah dan beresiko terlibat tindak kriminal. Sebelum mereka dikeluarkan dari sekolah mereka masing-masing,



mereka diberi pilihan untuk keluar dari sekolah atau mengikuti program 6 minggu di Camp Nou dan meneruskan sekolah di Camp Nou.

Tentu saja belajar di salah satu club sepak bola terkenal di dunia sangatlah memotivasi dan banyak anak-anak ini memilih untuk ke Camp Nou daripada drop out. Setelah 6 bulan mereka diberi pilihan untuk kembali ke sekolah asal mereka. Saat mereka kembali ke sekolah asal mereka biasanya anak-anak ini sudah menjadi pribadi yang berbeda (Rizwansyah Fahmi)

9.2 Pengertian

Kewirausahaan sosial (*social entrepreneurship*) merupakan paradigma baru dalam dunia bisnis tanah air. Social entrepreneur atau wirausaha sosial, di tempat kami, kami lebih mudah mengejanya menjadi *socialpreneur* yang bersumber dari kata *social* dan *entrepreneur*.

Sebagai sebuah jenis bisnis / usaha, *socialpreneur* masih belum banyak dipahami oleh para pihak. Dibandingkan dengan beberapa negara lainya kita masih tertinggal dalam pengembangan *socialpreneur* ini. Di negara lainya *socialpreneur* ini sudah berkembang dengan pesat, tidak heran telah lahir begitu banyak layanan pendukung untuk pengembangan *socialpreneur* ini. Layanan yang berkembang untuk mendukung *socialpreneur* ini antara lain layanan dibidang pembiayaan baik bagi start up maupun untuk pengembangan lanjut, layanan lainya adalah dibidang asistensi maupun konsultasi untuk pengembangan *socialpreneur* ini .

Berbeda dengan business entrepreneur yang berfokus pada motif ekonomi, barisan social entrepreneur adalah mereka yang berjuang merajut hidup demi dan atas nama kemaslahatan sosial. Mereka berikhtiar membentangkan serangkaian tindakan untuk membantu penciptaan masyarakat sosial yang makmur dan bermartabat.

Pengertian sederhana dari *Social Entrepreneur* adalah seseorang yang mengerti permasalahan sosial dan menggunakan kemampuan *entrepreneurship* untuk melakukan perubahan sosial (*social change*), terutama meliputi bidang kesejahteraan (*welfare*), pendidikan dan kesehatan (*healthcare*). Jika *business entrepreneurs* mengukur keberhasilan dari kinerja keuangannya (keuntungan ataupun pendapatan) maka *social entrepreneur* keberhasilannya diukur dari manfaat yang dirasakan oleh masyarakat.

Kewirausahaan sosial diawali dengan keprihatinan terhadap keadaan sosial yang berujung menjadi sebuah model bisnis baru. Kewirausahaan sosial merupakan kombinasi dari semangat besar dalam misi sosial dengan disiplin, inovasi dan keteguhan seperti yang lazim ditemukan di dunia bisnis. Dapat dikatakan kewirausahaan sosial menggunakan sikap mental wirausaha demi tujuan-tujuan sosial.

Kewirusahaan sosial merupakan solusi alternatif yang kreatif karena tidak hanya berorientasi pada keuntungan belaka akan tetapi juga kesejahteraan masyarakat. Melalui kewirausahaan sosial, masalah ekonomi Indonesia dapat sedikit teratasi. Karena dengan ini, masyarakat akan terlibat langsung dalam menjadi pelaku bisnis dan keuntungannya akan dikembalikan lagi ke masyarakat untuk dikembangkan. Tujuan jangka panjangnya, kewirausahaan sosial dapat membantu masyarakat menjadi lebih mandiri dalam hal finansial dan tidak selalu menggantungkan pada kebijakan pemerintah yang cenderung hanya sebagai pemanis buatan, seperti subsidi dan bantuan langsung tunai.

Dari pengertian sederhana tersebut maka *social entrepreneur* sesungguhnya adalah pelaku atau aktor perubahan yang mampu untuk :

- Melaksanakan cita-cita mengubah dan memperbaiki nilai-nilai sosial sehingga membawa kesejahteraan bagi masyarakat sekitar

- Menemu kenali berbagai peluang untuk memberi nilai tambah pada setiap kekayaan sumber daya Indonesia
- Selalu melibatkan diri dalam proses inovasi, adaptasi dan pembelajaran yang terus menerus
- Bertindak tanpa menghiraukan berbagai hambatan atau keterbatasan yang dihadapinya
- Memiliki akuntabilitas dalam mempertanggungjawabkan hasil yang dicapainya kepada masyarakat.

Wirausaha sosial melihat masalah sebagai peluang untuk membentuk sebuah model bisnis baru yang bermanfaat bagi pemberdayaan masyarakat sekitar. Hasil yang ingin dicapai bukan keuntungan materi atau kepuasan pelanggan, melainkan bagaimana gagasan yang diajukan dapat memberikan dampak baik bagi masyarakat. Mereka seperti seseorang yang sedang menabung dalam jangka panjang karena usaha mereka memerlukan waktu dan proses yang lama untuk dapat terlihat hasilnya.

Wirausaha sosial menjadi fenomena sangat menarik saat ini karena perbedaan-perbedaannya dengan wirausaha tradisional yang hanya fokus terhadap keuntungan materi dan kepuasan pelanggan serta signifikansinya terhadap kehidupan masyarakat. Kajian mengenai kewirausahaan sosial melibatkan berbagai ilmu pengetahuan dalam pengembangan serta praktiknya di lapangan. Lintas ilmu pengetahuan yang diadopsi kajian kewirausahaan sosial merupakan hal penting untuk menjelaskan serta membuat pemikiran-pemikiran baru. (www.wikipedia.com)

9.3 Sejarah

Seiring dengan berbagai kejadian yang merupakan indikasi terpuruknya perekonomian Indonesia saat ini, seperti imbas krisis di Amerika Serikat, harga minyak tanah yang melambung tinggi, dan PHK besar-besaran, maka pembahasan pemulihan ekonomi dengan cara yang tidak bergantung sepenuhnya kepada pemerintah menjadi aktual. Dikemukakan berbagai konsep alternatif seperti pemberdayaan ekonomi mikro (misalnya UKM; usaha kecil menengah), pengembangan sumber energi alternatif, penerapan konsep ekonomi kreatif (*creative economy*) sampai *entrepreneurship* atau kewirausahaan. Hal terakhir, yakni kewirausahaan menjadi topik hangat bila diperbincangkan di kampus.

Jika ditinjau secara ilmiah, sudah sejak ratusan abad yang lalu, istilah *entrepreneurship* dibahas. Antara lain Richard Cantillon pada tahun 1755 dan J.B. Say pada tahun 1803 (Santosa, 2007). Cantillon menyatakan *entrepreneur* sebagai seseorang yang mengelola perusahaan atau usaha dengan mendasarkan pada akuntabilitas dalam menghadapi resiko yang terkait (*a person who undertakes and operates a new enterprise or venture and assumes some accountability for inherent risks*). Di dalam konsep sebuah *entrepreneurship*, terdapat unsur pemberdayaan atau *empowerment* di dalamnya. Menurut Webster dan Oxford English Dictionary, *empowerment* bisa diartikan sebagai *to give power to* atau *authority to*, atau memberi kekuasaan, mengalihkan kekuatan atau mendelegasikan otoritas ke pihak lain. Bisa juga diterjemahkan sebagai *to give ability to or enable* atau usaha memberi kemampuan. Salah satu unsur yang termaktub dalam kewirausahaan memang bermakna sebagai sebuah usaha untuk memberikan kemampuan dan mengalihkan kekuatan seseorang atau beberapa orang menuju sebuah kemandirian. Kemandirian secara finansial misalnya

9.4 Entrepreneurship dalam Bersosial

Wujud peran sosial yang diambil berbagai kalangan sangat beragam. Dari pengamatan di lapangan ditemukan dua ciri kegiatan. Pertama, kelompok nonmandiri yaitu kelompok yang memperjuangkan peran sosialnya dengan menggalang dana-dana sumbangan tiada henti.

Kedua, kelompok mandiri yang gerakan-gerakannya murni dibiayai dari kegiatan sendiri. Kelompok nonmandiri cenderung fokus pada pembuatan proposal dan laporan. Mereka mencari-cari dana sumbangan dan mengorganisasi kegiatan.

Sadar atau tidak sadar, bahkan sering kali berpura-pura tidak sadar, kegiatan mereka dibiayai lembaga-lembaga besar asing (donor) yang diberi dana oleh sponsor dari perusahaan-perusahaan tertentu. Maka dapat diduga, sasaran kegiatan mereka adalah penekanan-penekanan pada perusahaan-perusahaan domestik yang diberi label "jahat", "merusak", "tidak peduli", "membalak", dan sebagainya.

Sebenarnya, kegiatan seperti itu lebih banyak merusak daripada membangun karena mereka bukan memperbaiki masyarakat, melainkan menimbulkan masalah-masalah baru. Di balik semua itu adalah sebuah kegiatan konspiratif yang tersembunyi dari persaingan yang tidak sehat.

Terlepas dari koreksi positif yang harus dilakukan untuk menekan perusahaan-perusahaan yang nakal dan benar-benar merusak alam dan masyarakat, peran-peran sosial yang demikian telah banyak dibajak oleh para "preman sosial". Kelompok kedua adalah kelompok mandiri yang mewujudkan paham sosialnya dengan upaya-upaya entrepreneurship.

Mereka tidak ingin bergantung pada dana sumbangan meski tidak menolak bantuan-bantuan yang datang baik dari pemerintah maupun swasta. Mereka mengelola perannya menggunakan prinsip-prinsip kewirausahaan. Mereka sadar betul, di balik peran sosial itu ada peluang-peluang bisnis yang bisa membuat mereka mandiri.

Dengan kata lain, kegiatan-kegiatan sosial itu dibuat berkelanjutan dengan adanya kegiatan ekonomi. Maklumlah manusia, perilakunya selalu di dorong oleh motif-motif ekonomi. Dengan menghasilkan reward ekonomi, manusia akan terpacu dan terus memelihara usahanya.

Peran sosial tercapai, kemiskinan bisa diatasi, dan keberlanjutan (sustainability) kegiatan lebih terjamin. Entrepreneurship itu tampak dalam kegiatan sehari-hari dari pemimpin yang berwatak wirausaha. Mereka adalah pengusaha, bukan politikus, sehingga cenderung menghindari konflik.

Mereka adalah pengambil risiko yang bersedia menggunakan harta pribadi, memberikan pelayanan prima, menjunjung tinggi nilai etika-etika, dan cenderung tidak berorientasi pada aktivitas populis. Sebagai pribadi, mereka cenderung panjang akal (resourcefulness), mudah bergaul, berwawasan dan pergaulan luas, tidak mudah curiga atau tersinggung, dan memenuhi komitmen. Karena itu, mereka sangat kreatif dan penuh terobosan (inovatif).

Maka, hasil yang mereka capai sungguh mengagumkan. Mereka dikenal sebagai sosok yang sosial, namun hidup mereka sejahtera, tidak anti terhadap korporasi ataupun investasi-konsumsi. Kita bisa melihat sosok-sosok yang demikian ada di mana-mana, mulai seorang tentara yang membuat arang dari dedaunan di Garut, Jawa Barat, seorang ibu yang membuat puluhan pembangkit listrik tenaga hidro, warga-warga masyarakat yang mengelola sampah, sampai para pengelola simpan pinjam (kredit mikro), serta masih banyak lagi. (Kasali Rhenald)

9.5 Ciri-ciri dan Sifat kewirausahaan

Untuk dapat mencapai tujuan yang diharapkan, maka setiap orang memerlukan ciri-ciri dan juga memiliki sifat-sifat dalam kewirausahaan. Ciri-ciri seorang wirausaha adalah:

- Percaya diri
- Berorientasikan tugas dan hasil
- Pengambil risiko
- Kepemimpinan
- Keorisinan
- Berorientasi ke masa depan

- Jujur dan tekun

Sifat-sifat seorang wirausaha adalah:

- Memiliki sifat keyakinan, kemandirian, individualitas, optimisme.
- Selalu berusaha untuk berprestasi, berorientasi pada laba, memiliki ketekunan dan ketabahan, memiliki tekad yang kuat, suka bekerja keras, energik dan memiliki inisiatif.
- Memiliki kemampuan mengambil risiko dan suka pada tantangan.
- Bertingkah laku sebagai pemimpin, dapat bergaul dengan orang lain dan suka terhadap saran dan kritik yang membangun.
- Memiliki inovasi dan kreativitas tinggi, fleksibel, serba bisa dan memiliki jaringan bisnis yang luas.
- Memiliki persepsi dan cara pandang yang berorientasi pada masa depan.
- Memiliki keyakinan bahwa hidup itu sama dengan kerja keras.

9.6 Karakteristik Kewirausahaan Sosial (*Social Entrepreneur*)

Terdapat beberapa pembelajaran tentang kewirausahawan sosial beserta beberapa karakteristik yang dimiliki oleh para pengusaha sosial itu sendiri. Hal tersebut dapat terlihat dari penelitian mengenai kewirausahaan sosial terbagi menjadi beberapa grup sosial sesuai dengan karakteristiknya masing-masing.

Hal ini pada dasarnya terdiri dari hal-hal yang tidak umum untuk dilakukan dalam kegiatan usaha yang biasanya berjalan secara rutin. Austin Stevenson dan Wei-Skillern berpendapat bahwa pengusaha sosial dan tradisional berbeda dengan pengusahanya sendiri, metode, situasi, dan peluang. Tujuan utama dari pengusaha sosial adalah melayani kebutuhan dasar masyarakat, sementara pengusaha tradisional adalah untuk meraih pasar yang besar kesenjangan dan memperoleh keuntungan, dalam proses bertaraf minimum untuk kepentingan masyarakatnya. Paul C Light mengamati berbagai definisi yang ada pengusaha sosial dan memberikan definisi yang luas yang menganggap bahwa pengusaha sosial adalah individu, kelompok, jaringan, organisasi atau aliansi. Tapi berupaya secara berkelanjutan melalui ide-ide yang berbeda untuk mengatasi masalah-masalah sosial yang signifikan. Lynn Barendsen dan Howard Gardeber menjelaskan bahwa Pemimpin yang baru sebagai pemimpin yang sadar akan kewajiban mereka. Mereka memiliki kemampuan untuk melihat hal-hal yang sifatnya positif. Gillian et al. berpendapat bahwa hanya keterampilan saja tidak membuat kewirausahaan dapat dikatakan sebagai seorang pengusaha sosial. Sebaliknya seorang pengusaha sosial juga memerlukan persimpangan *virtuousness*, kesempatan sosial, pengakuan, dapat menghakimi, bersifat toleransi, dan inovasi. Robert Ronstadt kewirausahaan didefinisikan sebagai proses yang sifatnya dinamis namun dapat menciptakan kekayaan yang sifatnya penting.

Dalam pandangan pengusaha, kekayaan diciptakan oleh orang-orang yang mengambil risiko besar dalam hal waktu, karier, dan komitmen untuk memberikan nilai dalam beberapa produk atau layanan. Nilai diinfuskan dengan mengamankan dan mengalokasikan keterampilan yang diperlukan dan sumber daya. Sarah H Alvord membuat analisis komparatif dari tujuh kasus kewirausahaan sosial yang secara luas telah diakui sebagai sesuatu yang dianggap sukses. Mereka mengenali perbedaan-perbedaan dalam bentuk tujuh organisasi yang memperkenalkan inovasi. Thomson mendefinisikan pengusaha sosial sebagai orang-orang dengan sikap pengusaha bisnis, tetapi beroperasi di masyarakat. Mereka bertindak lebih sebagai pengasuh dari masyarakat dan bukan sebagai pengusaha yang dengan mudah menghasilkan uang. Gregory Dees mengidentifikasikan pengusaha sosial sebagai pengusaha yang langka. Dia menggambarkan satu set ciri-ciri luar biasa pengusaha sosial dengan menekankan bahwa masyarakat harus mendorong dan memberi balasan kepada orang dengan kemampuan yang sifatnya unik.

Hal ini tentunya sangat bergantung kepada bagaimana isi dari gagasan yang kita tawarkan, pada dasarnya agar gagasan serta ide yang kita tawarkan bisa diterima oleh masyarakat kita harus memiliki misi sosial di dalamnya semata-mata hanya untuk membuat masyarakat dapat terbebas dari permasalahan yang terjadi. Dalam pelaksanaan pengimplementasian gagasan tersebut pastinya kita akan mendapatkan banyak sekali permasalahan, seorang jiwa wirausaha sosial (*social entrepreneur*) harus mempunyai kemampuan pengelolaan risiko (*risk management*) agar dapat menuntaskan apa yang menjadi idenya tersebut. Kemampuan mengelola risiko ini merupakan suatu hal yang penting agar kita dapat memastikan bahwa program yang ditawarkan berjalan secara berkelanjutan. (www.wikipedia.com)

9.7 Prinsip Social Entrepreneur

Untuk membangun suatu kemandirian dalam Kewirausahaan Sosial (*Social Entrepreneurship*) harus dimulai dari Mental seseorang tersebut, serta menjiwai apa yang menjadi tujuan hidup, dalam suatu siklus kehidupan yang sesungguhnya. Kewirausahaan Sosial (*Social Entrepreneurship*) merupakan suatu dasar untuk membangkitkan semangat seseorang untuk pencapaian hidupnya dengan berwirausaha. Tentunya tidak segampang membalikkan telapak tangan membangun suatu usaha yang melibatkan banyak orang. Mengenai *Social Entrepreneurship* yang sudah dikenal ratusan tahun yang lalu diawali antara lain oleh Florence Nightingale (pendiri sekolah perawat pertama) dan Robert Owen (pendiri koperasi). Pengertian *Social Entrepreneurship* sendiri berkembang sejak tahun 1980 –an yang diawali oleh para tokoh-tokoh seperti Rosabeth Moss Kanter, Bill Drayton, Charles Leadbeater dan Profesor Daniel Bell dari Universitas Harvard yang sukses dalam kegiatan *Social Entrepreneurship* karena sejak tahun 1980 berhasil membentuk 60 organisasi yang tersebar diseluruh dunia. Pengertian sederhana dari *Social Entrepreneur* adalah seseorang yang mengerti permasalahan sosial dan menggunakan kemampuan *entrepreneurship* untuk melakukan perubahan sosial (*social change*), terutama meliputi bidang kesejahteraan (*welfare*), pendidikan dan kesehatan (*healthcare*).

Solusi riil untuk membantu meringankan beban orang-orang yang kurang mampu dapat diselesaikan salah satunya dengan mempraktekkan *Social Entrepreneurship*. Dalam hal ini bukan semata-mata mengandalkan lembaga pemerintahan atas nama Kementerian Kesejahteraan sosial dan Kementerian Kesejahteraan Rakyat. Masyarakat secara pribadi bisa bergerak sendiri dan membangun kemandirain. Akan menghasilkan efek ganda, sesuai dengan pemaparan di atas, yakni kesejahteraan orang lain meningkat dan menjadi nilai kewirausahaan untuk mencari profit. Sebenarnya ada yang paling mendasar untuk dimengerti dan dipahami oleh masyarakat pada umumnya. Dan hal ini sesungguhnya bisa dilakukan dengan mengubah paradigma masyarakat Indonesia pada umumnya. Jika selama ini lembaga-lembaga sosial tersebut hanya dipandang sebuah ajang aktualisasi diri untuk saling membantu sesama, maka sebenarnya dengan membangun sendiri sebuah *Social Entrepreneurship* juga akan mendatangkan profit secara finansial. Hal ini bisa diterapkan semenjak dini untuk memupuk rasa kemanusiaan dan pemahaman apa itu *Social Entrepreneurship*.

Konsep kewirausahaan sosial berarti hal yang berbeda bagi orang yang berbeda dan peneliti (Dees, 1998). Satu kelompok peneliti mengacu pada sosial kewirausahaan tidak nirlaba inisiatif dalam pencarian strategi pendanaan alternatif, atau manajemen skema untuk menciptakan nilai sosial (Austin, Stevenson, & Wei-Skiller, 2003; Boschee, 1998). Kelompok kedua peneliti memahami itu sebagai tanggung jawab sosial praktek bisnis komersial terlibat dalam crosssector kemitraan (Sagawa & Segal, 2000; Waddock, 1988). Dan kelompok ketiga memandang kewirausahaan sosial sebagai sarana untuk meringankan masalah sosial dan mengkatalisasi sosial transformasi (Alvord et al., 2004). Penting untuk dicatat perbedaan konseptual antara definisi. Definisi kewirausahaan sosial biasanya mengacu pada suatu proses atau perilaku; definisi pengusaha sosial berfokus pada pendiri inisiatif, dan definisi

usaha sosial merujuk untuk hasil nyata dari kewirausahaan sosial. Meskipun sejumlah besar definisi, sistematis upaya untuk inisiatif peta dan definisi jarang terjadi (lihat Boschee (1995) dan Waddock dan Post (1995), selama dua pengecualian).

Sementara definisi yang saling melengkapi, masing-masing berfokus pada aspek yang berbeda dari fenomena tersebut, yang belum tentu menjadi penghalang dalam mencari teori, kita masih belum memiliki gambaran yang komprehensif tentang fenomena dan kurangnya pemahaman yang jelas tentang bagaimana kewirausahaan sosial harus dipelajari.

Apabila kita tinjau dari kegiatan yang dilakukan dalam kewirausahaan sosial, ada tiga kegiatan yang dilakukan oleh wirausahawan sosial yaitu pertama, kegiatan yang dilakukan tidak bertujuan untuk mencari laba. Kedua, kegiatan yang dilakukan merupakan bisnis dengan tujuan sosial. Ketiga kegiatan wirausahawan sosial merupakan kegiatan perpaduan antara bisnis sosial tetapi tidak mencari laba. Titik tekan dari ketiga kegiatan dari wirausahawan sosial itu dapat berupa bisnis dengan tujuan sosial serta tidak berorientasi kepada pencarian keuntungan. Wirausahawan sosial bukan tidak mencari keuntungan akan tetapi kebermanfaatan kegiatan tersebut bagi masyarakat merupakan tujuan utama. Kegiatan-kegiatan inilah yang sebenarnya dibutuhkan oleh masyarakat miskin agar dapat membantu mengentaskan kemiskinan tersebut dalam upaya melakukan kegiatan yang bermanfaat dan berkelanjutan. (Berbagai sumber terkait, (Sagawa & Segal, 2000; Waddock, 1988), et al, data diolah: Frans Hero K. Purba)

"Prinsip dari social entrepreneur adalah untuk meningkatkan kehidupan masyarakat dan perbaikan negara. Mereka bisa memberi manfaat untuk rakyat, bukan hanya berfikir soal keuntungan saja,"

"Social entrepreneur harus peka terhadap lingkungan. Indonesia merupakan tempat yang pas untuk hal ini. Jika diibaratkan, social entrepreneur menjadi penerangan untuk tempat yang gelap," (Juwaini Ahmad)

"Kaya bukanlah sesuatu yang berkaitan dengan diri sendiri, tetapi mengenai sejauh mana kita bisa memberdayakan orang lain agar turut berkarya dan berprestasi," (Dharmawan Herry)

Kata Kunci :

- Social Entrepreneur nggak mengharamkan kerjasama dg perusahaan utk menciptakan value
- Prinsip itu dipegang teguh, bukan utk dipamer-pamerkan kepada orang lain, dlm melaksanakannya harus bijak
- Social entrepreneur itu yg dicari kebahagiaan, bkn menghabiskan dan menutup jalan rejeki orang lain
- Orang yang transformatif dan inovatif adalah orang yang banyak tersenyum
- orang yang punya masalah adalah peluang bagi orang yang jeli memanfaatkan peluang
- Social entrepreneur nggak cuma memikirkan untung semata tp juga gimana membantu sesama
- Prinsip social entrepreneurship tdk menimbulkan ketergantungan pd yg menerima bantuan
- entrepreneur memberikan orang gak bayar bisa. bahkan memberikan yang terbaik bagi orang tersebut (www.dotsemarang.com)

9.8 Sifat *Social Entrepreneur*

Pertama, menjadi seorang *social entrepreneur* harus mau berkorban dan segera bertindak. Pengorbanan bukan cuma harta benda, melainkan juga naluri untuk bersenang-senang, waktu, tenaga dan pikiran.

Kedua, kesediaan untuk memulai bekerja dengan diam-diam. *Social Entrepreneur* memulai karyanya dari hal-hal kecil di daerah yang tidak dikenal. Butet bekerja di pedalaman Sumatera dengan anak-anak suku Kubu. Atau Yayasan Dian Desa yang berkubang lumpur di desa-desa. Ada juga Muhammad Yunus yang bekerja dengan buruh-buruh kasar dan tukang

becak di Bangladesh. Biasanya mereka baru dikenal setelah karya-karyanya menjadi kenyataan dan ramai dibicarakan orang.

Ketiga, Bekerja dengan energi penuh. Orang yang berenergi penuh 'tak ada matinya'. Ia melakukan banyak hal sekaligus dengan menembus berbagai dinding-dinding penyekat. Ia tak mengenal batas-batas yang dibuat manusia untuk membatasi ruang gerakanya. Tanpa berpikir keuntungan yang akan didapat, wirausahawan sosial meledakkan segala ide kreatif mereka demi peningkatan kualitas hidup masyarakat luas.

Keempat, ia menghancurkan *the established structures*. Ia benar-benar bekerja independent dan tak mau terbelenggu oleh struktur yang seakan-akan mewakili kebenaran. Mereka bisa saja ditemukan di antara pegawai-pegawai pemerintahan atau dosen di universitas, tetapi yang adalah kebebasannya dalam bertindak dan berpikir. Mereka punya kecerdasan yang luar biasa dalam mengambil jarak untuk melihat "beyond the orthodoxy" dalam bidang/pekerjaan mereka. Untuk melakukan hal ini, mereka mengambil resiko yang terlihat aneh, bahkan adakalanya dimusuhi oleh orang umum.

Kelima, kesediaan melakukan koreksi diri. Kewirausahaan sosial memerlukan kejernihan berpikir dan sikap-sikap positif. Artinya, kalau suatu langkah tidak bekerja dengan baik, mereka harus rela mengoreksinya. Pada tahun 1990-an orang-orang sudah meyakini karya besar Muhammad Yunus yang sukses dengan Grameen Bank-nya untuk melayani segmen mikro, tetapi ia melihat tetap ada kelemahan yang merepotkan debitur untuk melunasi hutangnya. Pada tahun 2002, Yunus meluncurkan Grameen Bank II untuk melayani nasabah-nasabah mikro-nya dengan lebih baik lagi.

Keenam adalah kesediaan berbagi keberhasilan. Mereka adalah orang-orang yang rendah hati, yang bekerja dengan prinsip, "sukses ini bukan karena semata-mata karya Saya."

Lebih dari sekedar berkarya dan berbisnis, para *social entrepreneur* membangun sebuah kekuatan, yaitu kekuatan perubahan yang berkelanjutan. Andapun bisa melakukannya.

9.9 Bidang *Social Entrepreneur*

Bidang yang ditekuni para *social entrepreneur* ini sangat beragam, mulai dari gerakan kepemudaan, pemberdayaan petani, ekonomi kreatif, hingga pendidikan toleransi antar umat beragama. Tidak hanya di kota besar seperti Jakarta dan Surabaya, tetapi para *social entrepreneurs* ini tersebar hingga ke Flores, Poso, hingga Papua. Sebagian besar dari mereka berusia di bawah 30 tahun; bahkan peserta termuda berusia 14 tahun dan masih duduk di bangku SMP.

9.10 Social Entrepreneur & Pekerja Sosial

Da Mai, seseorang yang sangat kreatif baik dalam berpikir maupun bertindak. Beliau mengibartkan kita sebagai Social Entrepreneur, atau pengusaha sosial. Pengusaha sosial tidak sama dengan pekerja sosial, sama seperti pengusaha lainnya pengusaha sosial melihat opportunity dari masalah yang terjadi di masyarakat dan menganggapnya sebagai peluang. Peluang dalam artian, kita mampu meniadakan profit begitu juga dengan masyarakat.

Social entrepreneur khususnya kalangan muda, adalah mereka yang berinvestasi terhadap tata nilai yang berkembang di masyarakat, yang mempengaruhi masyarakat banyak. Mereka memperbaiki dan mengadakan inovasi pada sistem tata nilai, agar dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat. kuncinya adalah "jangan pernah berhenti untuk berinovasi".

Seorang sosial entrepreneurship berbeda dengan seorang pekerja sosial, kata pak Rhenald. Karena seorang sosial entrepreneurship dan pekerja sosial meski tujuannya sama, namun caranya berbeda. Jika sosial entrepreneur bisa mendapatkan dana dengan cara nya sendiri tanpa menunggu, maka pekerja sosial selalu menunggu dana cair. Jika tidak ada terkadang bisa nggak jalan programnya.

9.11 Perkembangan Social Entrepreneur Dalam Dunia Usaha

Dengan kreativitas dan inovasi serta diladandasi dengan tekad yang kuat, maka upaya untuk menjadi social entrepreneur akan dengan mudah tercapai. Sosial Entrepreneurship bermakna seseorang yang memiliki visi, kreatifitas dan komitmen yang luar biasa untuk melakukan perubahan-perubahan maupun upaya untuk mengatasi permasalahan yang ada di sekelilingnya. Menurut Kamus Oxford, entrepreneur adalah "*A person who undertakes an enterprise or business, with the chance of profit or loss*" (Seorang yang bertanggung jawab atas sebuah bisnis dengan memikul risiko untung atau rugi). Bagi business entrepreneur, keuntungan yang diperoleh akan dimanfaatkan untuk ekspansi usaha, sedangkan bagi social entrepreneur keuntungan yang didapat (sebagian atau seluruhnya) diinvestasikan kembali untuk pemberdayaan "masyarakat berisiko". Namun dalam tren global, dikotomi semacam itu kian kabur, sebab mereka (business entrepreneur dan social entrepreneur) sesungguhnya berbicara dalam bahasa yang sama, yaitu inovasi, manajemen, efektivitas, mutu, dan kompetensi.

Indonesia untuk produktivitas masih menjadi pekerjaan rumah yang belum terselesaikan dengan indikator paling jelas adalah tingkat pengangguran yang tinggi, di mana pada 2010 diperkirakan masih berada dalam kisaran 10%. Rendahnya tingkat produktivitas tersebut selain disebabkan oleh tingkat pertumbuhan ekonomi yang masih relatif rendah, juga disebabkan oleh akses investasi yang sulit kepada masyarakat biasa yang ingin membuat usaha kecil dan tingkat kemampuan teknis masyarakat yang kurang. Dalam *Social entrepreneur* beda dengan business entrepreneur. Social entrepreneur menggunakannya lebih untuk memberdayakan masyarakat yang membutuhkan sehingga menjadi mandiri. Pengembangan social entrepreneur penting karena mayoritas masyarakat ekonomi masyarakat masih tergolong tradisional dan aksesnya kepada modal terbatas. Untuk jumlah entrepreneur di Indonesia baru mencapai 0,18 persen dari jumlah penduduk, padahal kita butuh 2 persen. Pengembangan social entrepreneur ini dapat dilakukan melalui beberapa cara. Entrepreneur itu tidak mencari keuntungan (*profit*) semata, melainkan sesuatu yang berbeda yang keluar dari pikiran kita. Tentang bagaimana aktivitas sosial ini bisa menciptakan, bukan saja uang, melainkan juga memberi nilai tambah bagi kehidupan masyarakat, serta adanya interaksi sosial. (Purba Hero K.)

9.12 Menjadi Social Entrepreneur

Belakangan ini kita sering mendengar istilah *entrepreneur* telah menjadi bahan pembicaraan dimana-mana, mulai dari tingkat masyarakat, lembaga pendidikan, hingga instansi pemerintahan. Dan sejak tahun 2005 keatas, begitu banyak program-program pembentukan entrepreneur muda diciptakan oleh lembaga-lembaga pendidikan tinggi sebagai salah satu upaya penciptaan tenaga-tenaga terampil dan mandiri sehingga pemikiran yang selama ini dimiliki yaitu BEGITU LULUS MENCARI KERJA langsung dapat diubah menjadi BEGITU LULUS MENCIPTAKAN LAPANGAN PEKERJAAN. Untuk dukungan instansi pemerintahan dan swasta sendiri sepertinya untuk saat ini juga sudah cukup optimal jika dilihat dari jumlah entrepreneur-entrepreneur muda yang lahir dari hasil "penggodokkan" mereka selama ini.

Sekarang bagaimana pula dengan *Social Entrepreneur*, apakah diantara teman-teman sudah sering mendengarnya?. Saya yakin begitu mendengar istilah diatas, teman-teman pasti langsung berpikiran bahwa *social entrepreneur* itu adalah seorang *entrepreneur* yang sudah bisa memberikan sebagian keuntungan usahanya demi menolong orang-orang yang membutuhkan atau bahasa sederhananya *entrepreneur* yang melakukan kegiatan sosial. Benar ngga?. Oke, sekarang mari kita perhatikan definisi *social entrepreneur* itu sendiri seperti apa:

A social entrepreneur recognizes a social problem and uses entrepreneurial principles to organize, create and manage a venture to achieve social change (a social venture). While a business entrepreneur typically measures performance in profit and return, a social entrepreneur focuses on creating social capital. Thus, the main aim of social entrepreneurship is to further social and environmental goals. Social entrepreneurs are most commonly associated with the voluntary and not-for-profit sectors, but this need not preclude making a profit. Social entrepreneurship practiced with a world view or international context is called international social entrepreneurship.

Sepenggal pengertian *social entrepreneur* diatas diambil dari Wikipedia. Secara umum, *social entrepreneur* dapat diasumsikan sebagai seorang pelaku usaha yang dengan prinsip-prinsip kewirausahaannya mampu merencanakan, membuat, mengatur, dan mengelola sebuah usaha demi menciptakan sebuah perubahan sosial. Dengan kata lain, jika *entrepreneur* itu konsepnya lebih ke *profit oriented* sehingga dasar pengukuran keberhasilannya mengacu kepada kinerja perusahaan dan laba yang dihasilkan, sedangkan *social entrepreneur* itu konsepnya lebih ke *profit sharing oriented* sehingga dasar pengukuran keberhasilannya mengacu kepada jumlah masyarakat yang dapat disejahterakan dihitung berdasarkan keuntungan yang mampu dibagikan. Disinilah letak perbedaan pengertian *social entrepreneur* menurut pandangan teman-teman sebelumnya diatas dengan pengertian *social entrepreneur* yang sebenarnya, ada pada kata MEMBERI dan MENYEJAHTERAKAN.

Ada pepatah yang menyatakan: Jika ingin membantu seseorang berilah dia kail beserta umpannya sehingga dia dapat mencari ikan secara terus menerus demi memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Jangan hanya berikan ikannya saja karena ikan itu akan langsung habis begitu dimakan dan kedepannya dia akan kembali meminta belas kasihan dari orang lain demi memenuhi kebutuhan hidupnya. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat beberapa profil orang-orang yang selama ini telah berhasil menyejahterakan masyarakat sekitarnya melalui konsep *entrepreneur* yang diciptakannya. (Wahyudi Dwi) www.blogger borneo.com

Tercatat dalam sejarah bahwa pemuda memegang peranan penting dalam perjalanan Republik ini. Peristiwa penting sejarah seperti Budi Utomo, Sumpah Pemuda, Tritura, dan Reformasi adalah bukti nyata betapa pemuda mampu merubah arah dan kondisi negeri ini.

Dalam konteks kekinian, pergerakan pemuda terasa mengalami penurunan. Tidak ada arah yang jelas mau dibawa kemana gerakan para pemuda saat ini. Pemuda seperti kehilangan jati diri, padahal masyarakat berharap besar kepada pemuda untuk selalu membawa perubahan di tengah-tengah masyarakat.

Paradigma gerakan pemuda saat ini harus berorientasi pada *social entrepreneur*, yaitu seseorang yang mampu melihat secara jeli peluang dan kemampuan yang ada di masyarakat sehingga masyarakat bisa menjadi mandiri dan dapat diberdayakan. Inilah sosok pemuda yang dibutuhkan oleh Indonesia saat ini. Sosok yang mampu melihat cahaya di balik kegelapan.

Seorang *social entrepreneur* berperan sebagai pembuka jalan, penunjuk arah, dan pemberi dorongan bagi masyarakat untuk maju. *Social entrepreneur* tidak perlu memberikan petunjuk secara rigid kepada masyarakat. Masyarakat hanya butuh diberikan stimulus atau perangsang, setelah itu mereka akan mengakselerasi diri mereka sendiri.

Social entrepreneur tidak perlu memiliki ilmu seluas profesor tetapi yang dibutuhkan seorang *social entrepreneur* adalah kepekaan dan keinginan yang besar untuk merubah nasib masyarakat disekitarnya. Berbekal kedua hal ini, *social entrepreneur* akan menjadi *problem solver* yang handal, pribadi yang memberikan jalan keluar dari berbagai permasalahan yang terjadi di masyarakat.

Munculnya sosok-sosok *social entrepreneur* sangat mendesak. Hal ini didasarkan kepada keadaan dan nasib masyarakat yang semakin tidak menentu akibat tekanan berbagai krisis multidimensi. Tingginya angka kemiskinan, rusaknya lingkungan hidup, menurunnya kesetiakawanan sosial, adalah beberapa pekerjaan rumah yang harus segera diselesaikan.

Namun, menjadi seorang *social entrepreneur* tidaklah mudah. Tidak seperti *commercial entrepreneur* yang menawarkan keuntungan (baca: *profit*) dan materi disana-sini. Sebaliknya, *social entrepreneur* justru menuntut seseorang untuk berkorban waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan manfaat (baca: *benefit*) kepada masyarakat. Oleh karena itu, pribadi-pribadi yang rela berkorban, bermental baja, dan ikhlas mutlak harus dimiliki oleh seorang *social entrepreneur*.

Ini adalah paradigma baru pergerakan pemuda di masa kini dan mendatang. Pergerakan yang tidak hanya berorientasi terhadap pembangunan sektor ekonomi belaka, melainkan pembangunan manusia paripurna.

Pembangunan yang meminjam istilah Prof. Sri-Edi Swasono, yaitu Pembangunan Indonesia seutuhnya bukan hanya pembangunan *di* Indonesia, pembangunan yang bukan menggusur orang miskin tetapi menggusur kemiskinan. Itulah hakikat pembangunan Indonesia, yaitu pembangunan yang dilakukan dalam rangka memenuhi tuntutan konstitusi kita yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa dan mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. (Syafrian Dzulfian)

9.13 Tantangan Yang Dihadapi Oleh *Social Entrepreneur*

Tantangan dan permasalahan kewirausahaan merupakan suatu kenyataan yang harus dihadapi oleh seorang wirausahawan. Tantangan dapat bersifat teknologi, sosial, politik dan lingkungan. Pasar merupakan salah satu tantangan yang memerlukan perhatian yang cukup besar.

Upaya penanggulangan terhadap tantangan dapat dilakukan dengan memilih teknologi yang sesuai dengan perkembangan zaman, mencermati perkembangan sosial budaya masyarakat yang menjadi fokus pemasaran, mengikuti perkembangan politik baik di dalam negeri maupun di luar negeri terutama yang berdampak pada bisnis, dan berusaha memenuhi persyaratan lingkungan yang ditetapkan, seperti ISO 9000, ISO 14000 dan *Eco Label*.

Berbagai tantangan yang dihadapi oleh *Social Entrepreneurs* antara lain adalah masalah pendanaan, pendidikan untuk para pemimpin dimasa mendatang yang menyadari tentang pentingnya *social entrepreneurship*, dan kurangnya insentif yang diberikan oleh pemerintah untuk meringankan beban lembaga-lembaga yang bergerak di bidang sosial. Oleh karena itu *Social Entrepreneurs* harus didukung oleh *Social Investor* agar inovasinya dapat diwujudkan.

Tantangannya tentu lebih berat daripada yang lainnya. Seorang *entrepreneur* menurut saya bahkan harus menyumbangkan dirinya untuk benar-benar mengabdikan pada masyarakat. Seorang *entrepreneur* sosial harus memiliki banyak waktu, harus berkonsentrasi penuh dengan apa yang mereka inginkan yaitu perubahan terbaik yang terjadi di masyarakat.

Selain tantangan yang di atas, permasalahan bisnis bisa muncul sebagai akibat dari adanya tantangan yang ada, seperti teknologi, sosial, politik, dan lingkungan.

1. Teknologi

Daya saing perusahaan pada era globalisasi ini secara signifikan sangat ditentukan oleh kemauan dan kemampuan dalam menerapkan teknologi. Teknologi akan sangat menentukan keberhasilan perusahaan dalam menguasai pasar, menghasilkan laba, dan bertahan hidup. Teknologi yang ada sifatnya mudah usang (*out of date*) sebagai akibat dari inovasi yang semakin maju dan semakin cepat sehingga siapa pun pengusaha atau perusahaan yang tidak secara cepat mengimbangi perkembangan teknologi akan ditinggalkan pasar. Sebagai contoh produsen telepon seluler yang agak lambat mengeluarkan modelnya akan ditinggalkan oleh konsumen (Nokia merupakan pemimpin pasar dan yang lainnya, seperti Siemen, Motorola hanya sebagai pengikut pasar).

2. Sosial dan Budaya

Masalah jumlah penduduk, tingkat pendapatan, tingkat pendidikan merupakan variabel-variabel yang secara langsung ataupun tidak langsung akan mempengaruhi keberhasilan usaha. Jumlah penduduk yang besar dilihat dari sisi pemasaran merupakan peluang yang sangat berarti apalagi apabila didukung dengan adanya peningkatan pendapatan. Namun, sebaliknya apabila jumlah penduduk tersebut tidak diimbangi dengan peningkatan pendapatan dapat saja merupakan hambatan dalam kegiatan bisnis, seperti adanya penjarahan, gangguan terhadap produksi dan lain-lain. Adanya jumlah penduduk juga akan berakibat terhadap kemudahan di dalam memperoleh tenaga kerja. Peningkatan pendidikan

dapat saja berpengaruh terhadap selera konsumen dan pada umumnya semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang semakin memperhatikan segi kualitas daripada segi harga. Budaya yang dianut oleh masyarakat akan dapat mempengaruhi keberhasilan usaha. Pada daerah yang memiliki budaya kerja keras pengusaha tidak akan menemui kesulitan di dalam merekrut tenaga-tenaga produktif dan memiliki kemampuan untuk menghasilkan produk yang berkualitas, tetapi tidak demikian dengan masyarakat yang rendah etos kerjanya. Faktor budaya juga akan sangat berpengaruh terhadap daya beli terhadap produk, masyarakat yang berbudaya konsumtif merupakan peluang pasar yang menjanjikan dibandingkan dengan masyarakat yang tidak konsumtif. Dimensi sosial budaya ini hendaknya tidak dibatasi pada lingkup yang lebih sempit, tetapi dapat diarahkan pada lingkup yang lebih luas, terutama untuk aspek pemasaran (selain produsen lokal juga bertindak sebagai produsen global).

3. Politik

Bagi wirausahawan, perkembangan politik pada suatu negara merupakan sesuatu yang tidak dapat diabaikan begitu saja. Kebijakan pemerintah tentang perbankan, perpajakan, perdagangan antardaerah atau antarnegara, arah pembangunan ekonomi, perjanjian antarnegara akan sangat berpengaruh terhadap kelangsungan usaha.

4. Lingkungan

Isu lingkungan merupakan suatu isu yang sudah mendunia karena lingkungan tempat kita hidup akan mengalami kerusakan bila tidak ada upaya-upaya yang arif dan bijaksana. Kita mengenal ada istilah *membangun tanpa merusak*, yang merupakan salah satu solusi agar kelestarian alam ini dapat terus terjaga. Walaupun demikian, tampaknya dengan berbagai upaya yang terus dilakukan kerusakan lingkungan, seperti pencemaran udara, air, kerusakan hutan, musnahnya keragaman hayati terus saja terjadi dan sepertinya tak dapat dielakkan. (Sakwati Monalia)

9.14 Profil Social Entrepreneurer

1. Muhammad Yunus

Muhammad Yunus adalah seorang bankir dari negara Bangladesh yang telah berhasil mengembangkan konsep kredit mikro, yaitu pengembangan pinjaman skala kecil untuk entrepreneur miskin yang tidak mampu meminjam dari bank umum. Salah satu bentuk hasil implementasi gagasannya adalah dengan mendirikan **Grameen Bank**. Dari keberhasilannya ini, Muhammad Yunus berhasil mendapatkan Hadiah Budaya Asia Fukuoka XII pada tahun 2001. Lima tahun kemudian, tepatnya pada tahun 2006, sebuah Penghargaan Nobel Perdamaian juga berhasil diraih Muhammad Yunus beserta konsep **Grameen Bank** miliknya.

2. Sandiaga Salahudin Uno

Sandiaga Salahudin Uno atau sering dipanggil Sandi Uno (lahir di Rumbi, Pekanbaru, 28 Juni 1969; umur 42 tahun[1]) adalah pengusaha asal Indonesia. Sering hadir di acara seminar-seminar, Sandi Uno memberikan pembekalan tentang jiwa kewirausahaan (entrepreneurship), utamanya pada pemuda. Sandi Uno memulai usahanya setelah sempat menjadi seorang pengangguran ketika perusahaan yang mempekerjakannya bangkrut. Bersama rekannya, Sandi Uno mendirikan sebuah perusahaan di bidang keuangan, PT Saratoga Advisor. Usaha tersebut terbukti sukses dan telah mengambil alih beberapa perusahaan lain. Pada tahun 2009, Sandi Uno tercatat sebagai orang terkaya urutan ke-29 di Indonesia menurut majalah Forbes. Pada tahun 2011, Forbes kembali merilis daftar orang terkaya di Indonesia. Sandiaga Uno menduduki peringkat ke-37 dengan total kekayaan US\$ 660 juta.

3. Anies Baswedan

Pada 2005, Anies menjadi direktur riset pada The Indonesian Institute. Kemudian pada 2008, ia mendapat anugerah sebagai 100 Tokoh Intelektual Muda

Dunia versi Majalah Foreign Policy dari Amerika Serikat. Pada tahun yang sama, di usia muda (38 tahun) ia menjadi rektor Universitas Paramadina. Meskipun lahir di Kuningan, Jawa Barat, Anies menghabiskan masa kecil hingga kuliahnya di Yogyakarta. Salah satu gerakan yang berhasil didirikan adalah **Indonesia Mengajar**.

4. Tri Mumpuni

Tri Mumpuni adalah sosok ibu yang bersahaja, rendah hati, dan ramah. Ibu dua anak yang mengabdikan dirinya bagi masyarakat desa bersama suami tercinta, Iskandar Budisaro Kuntoadji. Beliau biasa dipanggil **Bu Puni**. Tidak kurang 60 lokasi terpencil yang sebelumnya gelap gulita menjadi terang benderang dengan pembangkit yang mereka bangun. Melalui Institut Bisnis dan Ekonomi Kerakyatan (Ibeka) yang mereka bentuk memberikan penerangan di beberapa wilayah Indonesia dan satu lokasi di Filipina. Bu Puni ini lebih dikenal sebagai **Penjuang Mikro Hido** karena telah berhasil mengembangkan pembangkit listrik tenaga air.

Sebenarnya masih banyak lagi tokoh-tokoh *social entrepreneur* yang dapat dijadikan motivator sekaligus inspirator saat ini dimana melalui gagasan dan pemikiran kreatif yang dimiliki mampu menciptakan lapangan kerja yang terkait dengan masyarakat langsung sehingga dapat memberikan *multi effect* dari tingkat hulu ke hilir. Semakin banyak masyarakat yang bisa disejahterakan maka akan semakin banyak juga amal jariyah kita yang akan didapatkan. Jadi kesimpulannya disini adalah memang **Menjadi Entrepreneur Itu Baik Namun Menjadi Social Entrepreneur Itu Lebih Baik**.

REFERENSI

Sudewo Erie. www.masyarakatmandiri.org
Rizwansyah Fahmi. www.Frizzy Relaxing Articles Spa.wordpress.com
www.wikipedia.com
Kasali Rhenald. <http://www.seputarindonesia.com/ediscetak/content/view/217356/>
Juwaini Ahmad. <http://ddjogja.org>
Dharmawan Herry. <http://www.itb.ac.id/news/trackback/2806>
www.dotsemarang.com
Purba Hero K. heropurba@wordpress.com
Wahyudi Dwi. www.blogger borneo.com
Syafrian Dzulfian. www.kompasiana.com

PROPAGASI

GG. Latihan dan Diskusi (Propagasi vertical dan Horizontal)

Buatlah sebuah cerita singkat tentang harapan kelompok saudara apabila ada kesempatan untuk menjadi social entrepreneur. Apa saja yang akan dilakukan dan mengapa akan melakukan hal tersebut?

HH. Pertanyaan (Evaluasi mandiri)

28. What is entrepreneur?
29. What is the meaning of social entrepreneur?
30. Mention the name of persons who did social entrepreneur.
31. What kind of obstacles being social entrepreneur?

II. QUIZ -multiple choice (Evaluasi)

JJ. PROYEK (Eksplorasi entrepreneurship, penerapan topic bahasan pada dunia nyata)



SOSIOLOGI PERIKANAN:

Penutup

Dr. Ir. Edi Susilo, MS.

Agribisnis Perikanan, SEPK, FPIK, Universitas Brawijaya

Email : olisuside@yahoo.com



10 PENUTUP

MODUL

10

SELF-PROPAGATING ENTREPRENEURIAL EDUCATION DEVELOPMENT

10. Penutup

Saya rasa masih banyak pekerjaan rumah yang tersisa. Pertama yang menyangkut upaya-upaya membumikan sosiologi, antropologi dan ekologi untuk dapat digunakan sebagai bingkai di dalam melakukan telaah terhadap masyarakat perikanan. Upaya-upaya melakukan analogi perlu terus dikembangkan agar pengayaan bingkai teoretik dapat dibangun. Keinginan saya lebih jauh selain berusaha melakukan sintesis teoretik antara ekologi dengan sosiologi/atropologi, juga akan memasukkan kajian keagamaan, terutama tentang bagaimana seharusnya sebuah masyarakat itu dikonstruksi dan direkonstruksi, agar diperoleh sebuah struktur yang berkeadilan secara ekologi, ekonomi dan sosial.

Kedua, mengingat bahwa sumberdaya ikan merupakan bagian dari sumberdaya global, maka model pengelolaan sumberdaya secara internasional melalui UNCLOS dan CCRF hendaknya diikuti pula oleh pengkajian teori sosiologi yang menjangkau analisis hubungan antar negara. Selain itu dengan mempertimbangkan bahwa buku ini diawali dengan pengkajian skala mikro, maka kemudian dicoba untuk diangkat ke arah analisis lebih makro. Dengan demikian teori ketergantungan digunakan untuk melengkapi analisis pertukaran Homans dan Blau.

Ketiga, pokok bahasan *social entrepreneurship*, sudah dapat diselesaikan dalam edisi ini. Kami berharap bahwa dalam bentuk yang akan dilakukan revisi, maka akan ditambahkan satu bab tentang *social entrepreneurship*, karena kami yakin bahwa salah satu pondasi dasar pemberdayaan masyarakat.

Keempat, buku ini mewajibkan kepada pembaca untuk menelusuri sumber-sumber kepustakaan lain. Langkah ini perlu dilakukan agar memperoleh kritik dan saran, sehingga tujuan dari ditulisnya buku ini tidak hanya memenuhi sebuah tugas akademik, namun dapat berguna bagi para mahasiswa dan pembaca lain untuk memiliki kepedulian dan kemampuan di dalam meningkatkan kapasitas masyarakat perikanan untuk melakukan pengelolaan sumberdaya perikanan yang berkelanjutan.

Kelima, buku ini meskipun sudah dirancang cukup lama, namun tetap hadir di hadapan pembaca dalam kondisi seperti ini. Oleh karena itu jika pembaca tidak keberatan, maka kami sebagai penulis buku ini berharap untuk memperoleh kritik dan saran. Sebagai penutup buku ini kami ingin sampaikan sebuah renungan:



"..... boleh saja ombak yang berkerjaran itu kemudian berhenti, tapi tidak bagiku, untuk melakukan kajian-kajian sosiologi, yang bersintesa dengan ekologi, antropologi dan religi, seberapa pun gelap gulitnya di depan sana, aku yakin akan adanya jalan keempat, yang mampu mengantarkan kemunculan setitik cahaya....."

REFERENSI

PROPAGASI

KK. Latihan dan Diskusi (Propagasi vertical dan Horizontal)
9.

LL. Pertanyaan (Evaluasi mandiri)
32.

MM. QUIZ -multiple choice (Evaluasi)

NN.PROYEK (Eksplorasi entrepreneurship, penerapan topic bahasan pada dunia nyata)